

PROTEKSI ISI LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN MULTI TAHUN

ID Proposal: 342cb60a-8148-4e23-aa36-4337e8baeaf6
Laporan Kemajuan Penelitian: tahun ke-2 dari 3 tahun

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

Pekon Tanggap Covid-19: Membangun Bridging Sosial Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Tatakelola dan pemerintahan	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)

C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Kompetitif Nasional	Penelitian Dasar	SBK Riset Dasar	SBK Riset Dasar	3	3

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
NOVERMAN DUADJI Ketua Pengusul	Universitas Lampung	Ilmu Administrasi Negara		5975286	0
Dr NOVITA TRESIANA S.Sos, M.Si Anggota Pengusul 1	Universitas Lampung	Ilmu Administrasi		5975918	0

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
-------	------------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
2	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	accepted/published	Jurnal International Society atau Social Research

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
2	Desain	produk	Produk desain formulasi/rancangan
2	Buku Hasil Penelitian	editing	Penerbit AURA
2	Keikutsertaan dalam Seminar Nasional	terdaftar	Seminar Nasional Fisip/Asosiasi Ilmu Administrasi Negara

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB 3 Tahun Rp. 557,810,000

Tahun 1 Total Rp. 0

Tahun 2 Total Rp. 278,905,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	4	750,000	3,000,000
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	40	200,000	8,000,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	80	45,000	3,600,000
Bahan	ATK	Paket	1	25,255,000	25,255,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	1	11,150,000	11,150,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	1	4,000,000	4,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	Paket	1	5,000,000	5,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Paket	1	30,000,000	30,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Luaran KI (paten, hak cipta dll)	Paket	1	5,000,000	5,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya penyusunan buku	Paket	1	25,000,000	25,000,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
dan Luaran Tambahan	termasuk book chapter				
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	5	750,000	3,750,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	40	100,000	4,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di luar kantor	OH	100	150,000	15,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	OH	120	45,000	5,400,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	5	750,000	3,750,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	7	4,000,000	28,000,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	20	100,000	2,000,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di luar kantor	OH	20	150,000	3,000,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	200	250,000	50,000,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	200	150,000	30,000,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	200	45,000	9,000,000
Sewa Peralatan	Transport penelitian	OK (kali)	2	2,500,000	5,000,000

Tahun 3 Total Rp. 278,905,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	4	750,000	3,000,000
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	40	200,000	8,000,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	80	45,000	3,600,000
Bahan	ATK	Paket	1	25,255,000	25,255,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	1	11,150,000	11,150,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	1	4,000,000	4,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	Paket	1	5,000,000	5,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Paket	1	30,000,000	30,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Luaran KI (paten, hak cipta dll)	Paket	1	5,000,000	5,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya penyusunan buku termasuk book chapter	Paket	1	25,000,000	25,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib,	HR Sekretariat/Administrasi	OB	5	750,000	3,750,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
dan Luaran Tambahan	Peneliti				
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	40	100,000	4,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di luar kantor	OH	100	150,000	15,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	OH	120	45,000	5,400,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	5	750,000	3,750,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	7	4,000,000	28,000,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	20	100,000	2,000,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di luar kantor	OH	20	150,000	3,000,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	200	250,000	50,000,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	200	150,000	30,000,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	200	45,000	9,000,000
Sewa Peralatan	Transport penelitian	OK (kali)	2	2,500,000	5,000,000

6. KEMAJUAN PENELITIAN

A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Penelitian ini dilatarbelakangi persoalan tata kelola desentralisasi desa yang menyebabkan program tidak pro anak, diantaranya: lemahnya koordinasi dan harmonisasi tingkat pemerintahan yang berbeda, kelemahan kapasitas dan pengetahuan teknis (sumberdaya manusia, data, pemantauan), terbatasnya partisipasi perencanaan pembangunan desa bagi kelompok untuk memperjuangkan perlindungan dan hak anak, termasuk keterlibatan anak itu sendiri. Gagasan deliberatif tentang ruang publik yang terpisah dari pasar dan pemerintah sebagai prasyarat lahir dan berkembangnya kebijakan pro anak dalam musrenbangdes, memerlukan reorientasi dalam konteks partisipasi, perencanaan kebijakan desa. Dibutuhkan gagasan yang mampu mengamankan karakter kepublikan melalui penguatan sosial budaya lokal yang pro anak. Gagasan Sound Governance Body dan Citizenship Education menjadi titik temu dan orientasi baru untuk mensinergikan gagasan deliberatif dengan konteks inovasi kebijakan di Indonesia. Gagasan ini memperkuat ruang publik melalui desain proses pendewasaan dan pematangan sebagai warga negara yang cerdas dan baik, juga dilakukan kepada anak sebagai warga negara. Knowledge yang memadai memungkinkan anak dan warga berpartisipasi aktif dalam Sound Governance Body yang merefleksikan sinergitas state, market dan civil society.

Tujuanyang ingin dicapai dalam masa 3 tahun penelitian ini adalah: 1) ujicoba teori yang menghasilkan formulasi/rancangan prinsip tata kelola dan penguatan kapasitas musrenbangdes sebagai solusi lahirnya inovasi kebijakan produk musrenbangdes yang pro anak dan berkarakter membangun Pekon Ramah Anak; 2) publikasi hasil pada jurnal, buku ajar, dan buku hasil penelitian.

Tahapan metode penelitian secara umum dimulai dari Inventarisasi data baik primer

maupun sekunder; koleksi data melalui Kuesioner, Wawancara mendalam, Observasi, Pemetaan Partisipatif, FGD; analisis dan sintesis data dengan analisis kualitatif, analisis kebijakan, dokumentasi dan sistem dinamis; penyusunan pemetaan dan formulasi/rancangan musrenbangdes dan penyusunan policy brief.

Tahapandan luaran penelitian tahun pertama (2019) : 1) pemetaan situasi anak (ASA), pemetaan potensi sosial budaya masyarakat; 2) Pemetaan Elemen-elemen penting sebagai prinsip Musrenbangdes pro anak. Metode yang digunakan survei, partisipatif dan analisis kualitatif. Luaran berupa draft desain formulasi/rancangan prinsip-prinsip musrenbangdes berbasis data lapang.

Tahapan dan luaran penelitian tahun kedua (2020), merumuskan produk desain formulasi/rancangan prinsip-prinsip musrenbangde pro anak dengan metode sistem, metode Partisipatif, Diskusi kelompok terarah (FGD), Analisis Kebijakan dan analisis dokument. Luaran tahun kedua produk desain, Artikel publikasi ilmiah (submitted/accepted) pada Jurnal Public Policy and Administration, SJR 0,168 (Q4), beberapa draft yaitu Policy Brief, HAKI, Buku Ajar Kebijakan Publik, Artikel Seminar Ilmiah, Buku hasil penelitian.

Tahapan dan luaran penelitian tahun ketiga (2021), maka ketua peneliti melakukan kegiatan pelaporan, publikasi, penerbitan dan pendaftaran luaran penelitian wajib dan tambahan. Ketua Peneliti mempublikasikan Jurnal Internasional (accepted/Published) Jurnal Public Policy and Administration, SJR 0,168 (Q4), melaksanakan seminar hasil penelitian, publikasi Prosiding, HAKI terdaftar, Buku Ajar ber-ISBN, Dokumen Policy Brief dan Buku Hasil Penelitian ber-ISBN.

TKT yang diusulkan adalah TKT 3, diharapkan luaran penelitian dapat mengantisipasi gejala/fenomena.

B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

Sound governance body: Social Capital; Bounding; Bridging

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan sesingkat mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Analogi sebuah bangunan—adanya lahan, ketercukupan material dan dukungan beberapa resources lain masih belum cukup, tetapi perlu gambar teknik untuk menjadi sebuah bangunan dengan tatanan apik. Demikian juga data dan informasi riset sebagai bahan kajian masih perlu dianalisis dan dirumuskan pemodelan yang tepat untuk menjadi sebuah ramuan konsep untuk memberikan dorongan pengembangan keilmuan, khususnya penempatan lensa kapital sosial kedalam reposisi administrasi publik.

Uraian yang disajikan ini merupakan rangkaian hasil penelitian Kompetitif Nasional— Skema Penelitian Dasar yang dibiayai oleh DIKTI Kemenristekdikti dengan tema Pekon Tanggap Covid-19: Membangun Bridging Sosial Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang dilakukan Duadji & Tresiana (2020) sebagai sandaran rintisan awal membangun model *bridging social capital* dalam program desa/pekon ramah anak di Kabupaten Lampung Selatan.

C.1. Deskripsi Umum Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah di ujung selatan pulau Sumatera yang menjadi pintu gerbang masuknya arus orang, barang dan jasa ke provinsi-provinsi lain di pulau Sumatera maupun Provinsi Lampung secara khusus. Kabupaten dengan luas wilayah mencapai 2007,01 km² ini beribukota di Kota Kalianda (BPS Lampung Selatan, 2016A). Secara administratif, wilayah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur; Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda; Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran; Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 251 desa/kelurahan (248 desa dan 3 kelurahan) (BPS Lampung Selatan, 2016A). Dengan garis pantai yang panjang terdapat 39 desa yang lokasinya dekat tepi laut, yaitu desa yang berada di Kecamatan Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Sragi, Ketapang dan Bakauheni. Wilayah di Sumatera masih banyak dikelilingi hutan. Ada sekitar 24 desa di Lampung Selatan yang lokasinya berada di sekitar hutan. Kecamatan Rajabasa merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yang berada di sekitar hutan.

Gambar 1. Peta Kabupaten Lampung Selatan



Gambar 3.2. Luas dan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan

No	Kecamatan	Luas (KM2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Piramida Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia
1	Natar	250,55	190.157	
2	Jati Agung	164,47	160.265	
3	Tanjung Bintang	129,72	78.825	
4	Tanjung Sari	103,32	35.104	
5	Katibung	188,62	102.700	
6	Merbau Mataram	113,94	74.706	
7	Way Sulan	46,54	27,343	
8	Sidomulyo	158,99	89,559	
9	Candipuro	84,90	72,060	
10	Way Panji	38,45	23,445	
11	Kalianda	179,82	114,880	
12	Rajabasa	100,39	32,443	
13	Palas	165,57	74.015	
14	Seragi	93,44	41,539	
15	Penengahan	124,95	48,122	
16	Ketapang	108,50	74,759	
17	Bakauheni	57,13	29,330	
Jumlah		2.109,74	1.269.262	

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan data yang ada, penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu Penduduk Asli Lampung dan Penduduk Pendatang. Penduduk Asli Lampung, khususnya sub suku Lampung Peminggir, umumnya berkediaman di sepanjang pantai pesisir, seperti di Kecamatan Penengahan, Kalianda, Katibung. Penduduk sub suku Lampung yang lain tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk yang bermisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia, seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan lain-lain. Dari semua suku tersebut, yang merupakan penduduk pendatang yang terbesar adalah berasal dari pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Yogyakarta). Besarnya penduduk Lampung Selatan yang berasal dari pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda, dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2013 berjumlah 942.572 jiwa, yang terdiri dari 485.805 jiwa laki-laki dan 456.767 perempuan. Sex ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan 106,36 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 106 laki-laki (BPS Kab. Lamsel, 2016B).

Tabel 1. Indikator Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan

Indikator Kependudukan	2013	2014	2015
1	2	3	4
Jumlah Penduduk (Jiwa)	950 844	961 897	972 579
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)	474	479	485
Sex Ratio (%)	105,72	105,61	105,53
Jumlah Rumahtangga	245 927	253 131	256 255
Rata-rata anggota rumahtangga	3,87	3,80	3,80

Sumber: BPS Kab. Lamsel, 2016A

Berdasarkan data yang ada, penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu Penduduk Asli Lampung dan Penduduk Pendatang. Penduduk Asli Lampung, khususnya sub suku Lampung Peminggir, umumnya berkediaman di sepanjang pantai pesisir, seperti di

Kecamatan Penengahan, Kalianda, Katibung. Penduduk sub suku Lampung yang lain tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia, seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan lain-lain. Dari semua suku tersebut, yang merupakan penduduk pendatang yang terbesar adalah berasal dari pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Yogyakarta). Besarnya penduduk Lampung Selatan yang berasal dari pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda, dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan.

Pada sektor tenaga kerja, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mencapai 687 orang, di-mana lebih dari 60 persennya termasuk ke dalam angkatan kerja sedang sisanya bukan angkatan kerja atau penduduk yang sedang bersekolah atau mengurus rumah tangga. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tahun 2015, TPAK Lampung Selatan mencapai 60,12 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 60 orang tersedia untuk memproduksi barang/jasa.

Tabel 2. Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Selatan

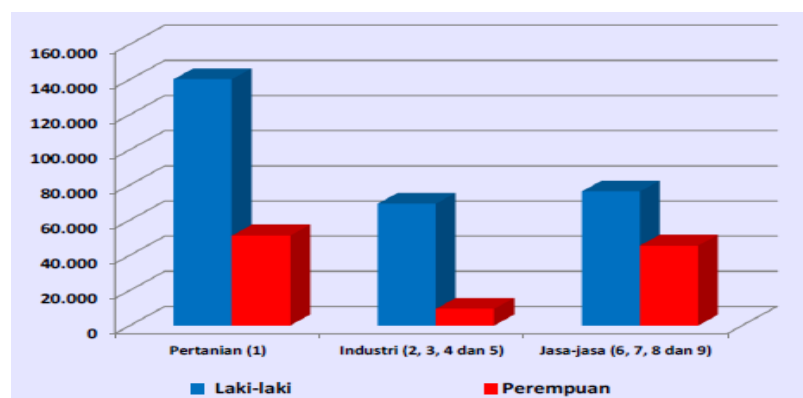
Indikator Ketenagakerjaan (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)
Penduduk 15 tahun + (000)	655	679	687
Angkatan Kerja (000)	411	440	414
• Bekerja (000)	384	413	392
• Pengangguran (000)	26	27	22
Bukan Angkatan Kerja (000)	244	240	275
TPAK (%)	62,71	64,73	60,12
TPT (%)	6,46	6,05	5,38
Bekerja di Sektor (%)			
• Pertanian	40,41	33,24	48,81
• Industri	13,25	18,17	20,11
• Jasa	46,34	48,59	31,08

Sumber: BPS Kab. Lamsel, 2016A.

Untuk melihat penyerapan angkatan kerja pada pasar tenaga kerja salah satunya dengan melihat tingkat pengangguran terbuka (TPT). Selama tiga tahun terakhir, TPT Lampung Selatan semakin rendah dari 6,46 persen di tahun 2013 menjadi 5,38 per-sen (2015). Perkembangan TPT merupakan salah satu indikator keberhasilan program ketenagakerjaan. Dari angkatan kerja yang bekerja di Lampung Selatan, hampir 50 persen bekerja di bidang pertanian dan lebih dari 70 persennya adalah pekerja laki-laki dengan usia 24-54 tahun.

Jika dilihat dari jenis lapangan kerja utama dan jenis kelamin, laki-laki lebih angka partisipasi kerja laki-laki lebih tinggi baik di sektor pertanian, industri maupun jasa-jasa. Sedangkan untuk perempuan, lapangan kerja utama lebih tinggi pada sektor pertanian, diikuti dengan sektor jasa-jasa dan sektor industri. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Tabel 3. Perkembangan Tenaga Kerja Kab. Lamsel menurut Lapangan Kerja Utama dan Jenis Kelamin



Sumber: BPS Kab. Lamsel, 2016A.

Tabel 4. Indikator Ketenagakerjaan Kecamatan Rajabasa

Indikator Ketenagakerjaan	Jumlah
Penduduk 15 tahun +	14 500
Angkatan Kerja	13 248
Bukan Angkatan Kerja	1 348
TPAK (%)	61,07
TPT (%)	38,03

Sumber: BPS. Kab. Lamsel (2015A)

Berdasarkan data dari BPS Kab. Lamsel (2015A), Kecamatan Rajabasa pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun lebih berjumlah 14 596 orang, dan 13.248 orang merupakan angkatan kerja yang bekerja dan sisanya merupakan angkatan kerja pengangguran dan bukan angkatan kerja. Sejalan dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja bertambah, Sebaliknya jumlah pengangguran menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Rajabasa yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya semakin meningkat.

C.2. Profil Anak di Kabupaten Lampung Selatan

Indonesia pada dasarnya telah memiliki komitmen dalam perlindungan atas hak-hak anak dengan dasar Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA). Bahkan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan secara imperatif tentang hak kelangsungan hidup anak dalam pasal 28b dan 28c. Seiring waktu dalam prosesnya, banyak perkembangan secara kelembagaan maupun regulasi yang diupayakan Indonesia agar terus menjaga hak kelangsungan hidup anak. Komitmen tersebut ditindaklanjuti pelbagai daerah dengan menjadikan wilayah mereka “berlomba” sebagai Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota dalam mempercepat implementasi KHA dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Komitmen tersebut dilakukan banyak pemerintah daerah, tidak terkecuali di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan upaya peningkatan kelangsungan hidup anak sebagai salah satu prioritas pembangunan kesehatan. Hal ini menjadi penting dalam konteks usaha membangun sumber daya manusia unggul di Indonesia, karena pembangunan kualitas manusia perlu diawali dengan kesehatan yang baik, termasuk kesehatan di masa kecil, bahkan saat anak masih dalam kandungan.

Hak kelangsungan hidup anak merupakan salah satu fokus dari kajian ilmu kesehatan masyarakat yang direfleksikan dengan penurunan angka kematian anak. Perlu dilakukan desain intervensi kelangsungan hidup anak untuk menurunkan tingkat resiko penyebab kematian anak seperti diare, malaria dan kondisi dan kondisi neonatal. Dalam perspektif *governance*, hak kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintahan, termasuk pihak swasta. Satu sama lain perlu menjalin kolaborasi dalam mewujudkan ruang publik dan kebijakan publik yang ramah anak. Setelah hadirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kini desa memiliki otonomi, oleh karenanya pemerintahan level desa juga memiliki tanggung jawab dalam perlindungan hak keberlangsungan hidup anak. Desa adalah ujung tombak dalam pelaksanaan Desa Ramah Anak. Tujuan dari Pekon/Desa Ramah Anak adalah mensikapi hal-hal yang berkaitan dengan anak seperti infrastruktur anak menuju sekolah, hak asasi manusia, tempat bermain anak, dan sebagainya.

Sesuai dengan rencana, dalam laporan tahun pertama, peneliti akan melakukan pemetaan kondisi eksisting dari hak keberlangsungan hidup anak di Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan beberapa data penting sebagai pemetaan awal yang kemudian akan dianalisa berdasarkan kelembagaan (ruang publik), modal sosial, partisipasi, *partnership* dan aktor yang berkaitan dengan desa/pekon ramah anak.

Jumlah anak di Kabupaten Lampung Selatan 354.204 jiwa dengan rincian anak laki-laki 162.716 jiwa dan perempuan sebanyak 181.488 jiwa.

Tabel 5. Jumlah Anak di Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Tanjung Bintang	12.043	14.105	26.148
Sragi	5.538	6.324	11.862
Ketapang	8.720	10.171	18.891
Bakauheni	3.118	3.736	6.854
Way Sulan	3.405	4.319	7.724
Way Panji	3.596	3.740	7.336
Kalianda	13.451	15.982	29.433
Raja Basa	4.542	20.806	8.267
Palas	11.044	13.728	20.806
Penengahan	7.421	64.696	13.728

Natar	34.953	22.941	64.696
Katibung	12.549	10.871	22.941
Tanjung Sari	5.939	39.631	10.871
Jati Agung	21.629	24.768	39.631
Sidomulyo	13.318	20.704	24.768
Candipuro	11.159	19.544	20.704
Merbau Mataram	10.557	20.806	19.544
Lampung Selatan	162.716	191.488	354.204

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan

Jumlah 354.205 jiwa anak di Kabupaten Lampung Selatan merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan Indonesia termasuk masa depan Lampung Selatan, yang mempunyai ciri dan sifat yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka secara utuh. Salah satu unsur penting dalam menjamin pertumbuhan anak adalah pendidikan anak. Salah satu cara untuk mengukur partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan formal persekolahan dapat digunakan APS (Angka Partisipasi Sekolah), APS atau angka partisipasi sekolah, adalah data yang dikeluarkan oleh BPS untuk mengetahui jumlah penduduk menurut kelompok umur tertentu yang tertampung oleh lembaga pendidikan (sekolah). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah, atau merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui penduduk kelompok umur tertentu yang tertampung dalam dunia pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan. Pada dimensi tumbuh kembang indikator APS merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keterpenuhan hak dari anak.

Tabel 6. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah
7-12	99,41
13-15	92,95
16-18	64,49

Sumber: BPS Lampung Selatan

Data di atas menginformasikan ada penurunan drastis APS untuk kelompok umur 16-18 tahun di Kabupaten Lampung Selatan, hal ini menunjukkan cukup banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah sampai jenjang pendidikan SMA/SMK/Madrasah Aliyah. Hal ini tentu perlu menjadi catatan tersendiri bagi Lampung Selatan untuk menelusuri problem mengapa cukup banyak penurunan partisipasi sekolah di kelompok umur 16-18 tahun. Sedangkan untuk data anak bersekolah di Kabupaten Lampung Selatan lebih detail diinformasikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 7. Data Anak Bersekolah di Kabupaten Lampung Selatan

Nama Kecamatan	Jumlah anak bersekolah				Jumlah anak bersekolah					Jumlah anak bersekolah				GRAND TOTAL		
	SD/SDLB/Paket A		M.Ibtidaiyah		SMP/SMPLB/Paket B		M. Tsanawiyah		TOTAL	SMA/SMK/SMALB/Paket C		M. Aliyah			TOTAL	
	P	L	P	L	P	L	P	L		P	L	P	L			
Natar	4.414	4.784	107	153	9.458	1.999	2.073	121	122	4.315	1.106	1.121	55	48	2.330	16.103
Jati Agung	2.148	2.396	85	90	4.719	855	865	64	71	1.855	470	445	22	20	957	7.531
Tanjung Bintang	2.122	2.274	11	21	4.428	940	955	13	16	1.924	459	481	4	0	944	7.296
Tanjung Sari	1.116	1.233	1	1	2.351	500	560	8	4	1.072	192	251	1	2	446	3.869
Katibung	2.521	2.670	130	138	5.459	1.077	1.120	83	103	2.383	526	536	17	25	1.104	8.946

Merbau Mataram	1.655	1.635	117	124	3.531	678	700	80	78	1.536	329	285	11	3	628	5.695
Way Sulan	636	661	265	316	1.878	243	311	184	160	898	210	233	31	33	507	3.283
Sidomulyo	1.584	1.773	63	68	3.488	656	672	60	77	1.465	321	288	6	4	619	5.572
Candipuro	1.225	1.349	207	197	2.978	433	452	223	182	1.290	236	248	71	50	605	4.873
Way Panji	268	321	11	14	614	147	106	9	14	276	57	51	1	4	113	1.003
Kalianda	2.693	2.915	43	50	5.701	1.101	1.112	95	128	2.436	603	641	53	55	1.352	9.489
Rajabasa	727	847	18	21	1.613	268	307	65	50	690	157	162	17	19	355	2.658
Palas	1.723	1.791	70	110	3.694	569	627	183	171	1.550	352	318	31	20	721	5.965
Sragi	1.146	1.221	53	59	2.479	349	406	169	164	1.088	206	183	18	23	430	3.997
Penengahan	1.197	1.315	47	68	2.627	464	461	101	102	1.128	275	287	22	10	594	4.349
Ketapang	1.439	1.546	79	93	3.157	551	523	117	121	1.312	266	270	19	13	568	5.037
Bakauheni	617	584	22	39	1.262	260	247	26	28	561	148	146	2	0	296	2.119
JUMLAH TOTAL																97.785

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

Selanjutnya bidang kesehatan bagi anak yang termasuk dari dimensi hak perlindungan anak. Dalam hal ini, imunisasi merupakan salah satu upaya perlindungan kesehatan yang paling efektif untuk anak-anak terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) (Tanjung, Rohmawati dan Sofyani, 2017). Imunisasi merupakan *cost* paling efektif dalam konteks upaya peningkatan kesehatan masyarakat (Kemenkes RI, 2018). Dalam Undang-undang No 36 tentang Kesehatan Tahun 2009, disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Di Provinsi Lampung, cakupan imunisasi dasar lengkap masih sekitar 45%. Angka tersebut masih berada di bawah angka nasional sekitar 59%.

Secara empirik, terdapat banyak faktor yang menyebabkan masih rendahnya cakupan imunisasi bagi balita. Seperti termuat beberapa peneliti dalam Puslit Wanita, Anak dan Pembangunan LP2M Unila pada Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung (2009): Studi Hastono menunjukkan bahwa pendidikan ibu dan pendidikan suami berhubungan secara bermakna dengan status imunisasi dasar pada anak. Hasil analisis multilevel menemukan bahwa kontribusi variabel level kabupaten (92,5 %) jauh lebih besar daripada level individu (7,5 %). Studi Prabandari, Musthofa, & Kusumastuti, menunjukkan bahwa pengetahuan tentang: imunisasi, keparahan, manfaat, dan hambatan berhubungan dengan penerimaan terhadap imunisasi measles-rubella. Studi Mariana, Lorian, & Mustaming (2018), menemukan faktor pengetahuan tentang imunisasi sebelumnya dan dukungan tokoh masyarakat setempat yang berhubungan dengan pemberian imunisasi. Studi Libunelo, Paramarta, & Rahmawati, menyimpulkan faktor yang berhubungan dengan pemberian imunisasi lengkap kepada bayi adalah pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan ibu. Faktor lain yang berhubungan dengan pemberian imunisasi dasar lengkap antara lain: sosialisasi imunisasi (Sutikno, Haida, & Sari), frekuensi membaca buku KIA (Mulyani, Shafira, & Haris), limitasi-limitasi, dukungan keluarga, komposisi vaksin (Hidayah, Sihotang, & Lestari). Di Kabupaten Lampung Selatan sendiri, balita yang mendapatkan imunisasi sudah cukup tinggi, baik BCG, DPT, Polio maupun campak di setiap kecamatannya. Untuk detailnya bisa dilihat dari data tabel berikut:

Tabel 8. Balita Yang Mendapatkan Imunisasi di Kabupaten Lampung Selatan

KECAMATAN	BCG	DPT	POLIO	CAMPAK
Natar	3.855	3.941	3.644	3.828
Jati Agung	2.224	2.212	2.206	2.216
Tanjung Bintang	1.657	1.662	1.661	807
Tanjung Sari	592	646	571	590

Katibung	1.371	1.437	1.291	1.336
Merbau Mataram	1.137	1.129	1.133	1.115
Way Sulan	564	556	552	565
Sidomulyo	1.426	1.448	1.375	1.314
Candipuro	1.055	1.030	983	994
Way Panji	383	374	375	355
Kalianda	1.757	1.723	1.663	1.750
Rajabasa	504	483	479	478
Palas	1.259	1.242	1.239	1.235
Sragi	748	732	731	733
Penengahan	782	803	809	780
Ketapang	962	1.088	901	922
Bakauheni	497	498	479	482
Lampung Selatan	20.773	21.004	20.092	19.509

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2019

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengeluarkan beberapa kebijakan berkaitan dengan hak anak, diantaranya: 1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok; 3) Peraturan Bupati Lampung Selatan No 53 Tahun 2017 Tentang Transformasi Perpustakaan di Lampung Selatan; 3) Keputusan Bupati Lampung Selatan No:B/261/IV.05/HK/2016 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019 – 2021.

Salah satu isu anak yang perlu direspon cepat secara nasional adalah permasalahan stunting. Di Provinsi Lampung, prevalensi stunting pada kelompok umur 0-59 bulan secara provinsi berada pada angka 31,6%. Hal ini menandakan bahwa Provinsi Lampung masuk dalam kategori masalah kesehatan masyarakat berat. Diantara 15 kabupaten/kota, terdapat 7 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting diatas prevalensi provinsi dan 8 kabupaten dengan prevalensi di bawah prevalensi provinsi. Dari 8 kabupaten/kota dengan prevalensi dibawah prevalensi provinsi, 2 kabupaten masuk dalam masalah kesehatan masyarakat berat, yaitu Kabupaten Lampung Selatan (30,3%) dan Kabupaten Way Kanan (30,7%). Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah merilis dua kebijakan sebagai respon terhadap isu stunting, yakni 1) Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting, 2) Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 216 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Langkah ini laik diapresiasi sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleharganya.

C.3. Potensi Kapital Sosial Kabupaten Lampung Selatan: Identifikasi Kelembagaan dan Nilai Lokal

Kenyataan menunjukkan bahwa sangat sulit atau bahkan hampir tidak mungkin bagi anggota masyarakat secara individu dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Secara faktual, diperlukan rasa kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi itu. Poin inilah yang menjadi titik awal munculnya ide dan pemikiran tentang konsep modal sosial.

Cara memandang masyarakat butuh kebersamaan dan kerjasama, pada awal abad ke 20 menginspirasi Lyda Judson Hanifan--seorang pendidik di Amerika Serikat untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Tulisannya berjudul *'The Rural School Community Centre'* (Hanifan, 1916:130) Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Kendati awal abad ke-20 sudah ada pakar yang telah menggunakan istilah modal sosial, namun istilah tersebut baru mulai dikenal oleh kebanyakan lingkungan akademis sejak akhir tahun 1980an.

Sosok sosiolog Perancis kenamaan, Bourdieu (1986) dalam sebuah tulisan *"The Forms of Capital"* mengemukakan untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk-bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial. Perbedaan antara modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial dapat digambarkan dari kemudahan ketiganya untuk dikonversikan.

Modal ekonomi, menurut Bourdieu, dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang, dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Tetapi dalam kondisi tertentu modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilembagakan, seperti kualifikasi pendidikan. Demikian pula modal sosial dalam kondisi tertentu dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi dan bahkan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar keserjanaan. Sekalipun diperoleh melalui perguruan tinggi yang sama dan dalam jangka waktu pendidikan yang sama, masing-masing gelar keserjanaan dengan bidang keahlian yang berbeda memiliki “nilai jual ekonomi” yang berbeda. Bahkan gelar keserjanaan dalam bidang sama tetapi diperoleh dari perguruan tinggi yang berbeda akan mengandung nilai ekonomi yang berbeda. Seorang tamatan perguruan tinggi yang memiliki nilai akreditasi tinggi pada umumnya akan lebih mudah mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang tamatan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang rendah nilai akreditasinya.

Berpangkal atas gambaran kemudahan konversi itu, Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif. Selanjutnya ia mengatakan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya (Bourdieu, 1986: 249). Dengan demikian modal sosial ditinjau dari aspek kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang mentautkan modal ekonomi, budaya dan sosial.

Lebih lanjut Hasbullah (2006) menjelaskan modal sosial merupakan salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesaling percayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Modal sosial merupakan modal yang lebih menekankan pada modal yang dimiliki masyarakat sebagai hasil dari hubungan-hubungan sosial yang terjalin di antara semua anggota masyarakat.

Coleman dalam sebuah tulisan yang berjudul “*Social Capital in the Creation of Human Capital*” (1988) memperkenalkan modal sosial sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi-- Proses dan logika ekonomi diintoduser ke dalam proses sosial.

Coleman membahas bagaimana modal sosial terbentuk dan menyoroti modal sosial dalam tiga bentuk yang berbeda. Dengan menggunakan data yang berasal dari sebuah penelitian mengenai siswa di sebuah sekolah menengah, ia menggambarkan bagaimana modal sosial (*social capital*) berperan dalam menciptakan modal manusia (*human capital*) dengan cara memperlihatkan apa yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat dalam proses perkembangan pendidikan anak-anak. Hal pentingnya adalah keterlibatan orang tua murid dan para guru dalam wadah untuk bersama-sama membahas langkah-langkah terbaik guna meningkatkan kemajuan anak didik.

Coleman berpendapat bahwa pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya. Sekalipun sebenarnya terdapat banyak fungsi modal sosial tetapi ia mengatakan bahwa pada dasarnya semuanya memiliki dua unsur yang sama, yakni: (1) modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial, dan (2) modal sosial memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut. Ia memberi penekanan terhadap dua aspek dari struktur sosial yang sangat penting dalam memudahkan tercipta dan berkembangnya modal sosial dalam berbagai bentuk. Pertama, aspek dari struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu. Kedua, adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya Coleman mengidentifikasi tiga unsur utama yang merupakan pilar modal sosial. Pertama, kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial. Ia mengambil contoh sistem arisan yang populer dalam masyarakat di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sistem arisan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan pertemanan, tetangga atau kekerabatan merupakan sebuah contoh yang jelas tentang bagaimana pentingnya arti kepercayaan. Pilar kedua modal sosial menurut Coleman adalah pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat. Arus informasi yang tidak lancar cenderung menyebabkan orang menjadi tidak tahu atau ragu-ragu sehingga tidak berani melakukan sesuatu. Pilar ketiga adalah norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif. Tanpa adanya seperangkat norma yang disepakati dan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat maka yang muncul adalah keadaan anomie dimana setiap orang cenderung berbuat menurut kemauan sendiri tanpa merasa ada ikatan dengan orang lain. Juga tidak ada mekanisme untuk menjatuhkan sanksi karena tidak ada norma yang disepakati bersama berkaitan dengan sanksi tersebut. Dengan demikian pengembangan modal sosial pada dasarnya ditujukan untuk membangun ketiga pilar yang dimaksudkan Coleman itu.

Putnam (1993: 36) dalam buku *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, mendefinisikan modal sosial sebagai *features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that*

facilitate coordination and co-operation for mutual benefit, ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama. Lebih lanjut, Putnam menganggap modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang. Maksudnya modal sosial terdiri dari “*networks of civic engagements*” jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Jadi, menurut Putnam, ada dua hal yang merupakan asumsi dasar dari konsep modal sosial, yakni adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling mendukung guna mencapai kemanfaatan bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut. Wujud modal sosial berupa norma-norma dan jaringan keterikatan (*networking*) sebagai prakondisi interaksi dan interelasi yang memberikan manfaat bersama. Putnam juga menegaskan bahwa modal sosial merupakan prasyarat mutlak yang diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian. Pertama, adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. Kedua, kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. Ketiga, berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya.

Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat. Kapital sosial akan menjadi faktor penguat jikalau keberagamannya dipandang sebagai aset, kekayaan dan simbol pemersatu kearah terciptanya kolaborasi untuk tujuan bersama. Dan kitapun harus sadar bahwa makna kesatuan dalam konteks sosial bukan berarti satu, tetapi kebhinekaan (keberagaman) yang dihimpun dalam sebuah kesatuan.

Beragam kajian akademik yang menempatkan pentingnya kapital sosial dalam kehidupan masyarakat. Modal sosial merupakan nilai-nilai dasar dan ikatan kelembagaan (kelompok) yang menjadi kearifan lokal sebagai pengikat dan pemicu masyarakat bekerjasama dan membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama, khususnya perbaikan kualitas kehidupan. Dari deskripsi yang telah diketengahkan, maka paling tidak yang menjadi dimensi modal sosial adalah: (1) nilai, norma dan sikap yang mendorong terjalannya rasa empati, kepercayaan, solidaritas, keguyuban, tanggungjawab sosial, kegotongroyongan dll yang tumbuh, berkembang dan merupakan entitas kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama; (2) jaringan yang terlembaga dalam struktur sosial yang menunjuk pada segi organisasi sosial yang melekat dalam kehidupan suatu masyarakat dengan konteks latar belakang sosial, ekonomi dan politiknya.

Berikut akan diketengahkan identifikasi potensi kapital sosial (kelembagaan dan nilai-nilai lokal) masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan yang diangkat dari observasi dan turun lapang tim peneliti.

Provinsi Lampung terkenal dengan sebutan miniatur Indonesia yang mana hampir merepresentasikan semua rumpun etnik dan agama yang ada di nusantara ini. Demikian juga halnya dengan Lampung Selatan yang merupakan salah satu kabupaten bagian dari Provinsi Lampung juga merupakan daerah yang memiliki keberagaman etnik, agama dan kultur didalamnya. Proses dan perjalanan yang membentuk keberagaman ini sudah lama terjadi—era dan interaksi kerajaan lokal nusantara; masa kolonialisasi; dan di era kemerdekaan Indonesia (orde lama, orde baru sampai di masa orde reformasi saat ini). Perpindahan dan mobilitas penduduk dengan ragam etnik, agama dan budaya terjadi di daerah ini yang membentuk pemukiman dan komunitas, bahkan nama pemukiman juga membawa nama pemukiman mereka di daerah asal masing-masing dan begitu juga dengan nama perkumpulan yang mereka bentuk juga membawa entitas asal etnik dan daerah asal mereka.

Lampung secara keseluruhan dan secara khusus wilayah sasaran penelitian, yaitu Kabupaten Lampung Selatan mempunyai keunikan tersendiri di bandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat etnik Lampung (masyarakat adat Lampung Saibatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun), sikap dan perilaku sangat terbuka dengan semua kalangan, kelompok dan golongan. Makna sangat terbuka itu lebih kepada rasa penghormatan kepada tamunya (dalam konteks tulisan ini adalah masyarakat pendatang). Bahkan dalam observasi penelitian ini, jika ada tamu yang datang sudah lebih dari 2 orang (walaupun anggota tuan rumah yang menyambut jumlahnya lebih banyak), maka bahasa yang digunakan langsung berubah menggunakan bahasa Indonesia bahkan cenderung mengikuti bahasa tamunya. Bahasa yang digunakan pada momen itu, untuk sesama anggota keluarga mereka dihadapan tamu juga cenderung mengikuti bahasa tamunya. Berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya yang bila ada salah satu orang saja yang serumpun (etnik) maka cenderung akan menggunakan bahasa etnik mereka sebagai linguapranka dalam forum umum tersebut.

Oleh karenanya, maka tidak heran jika dalam keseharian di pasar tradisional, etnik Jawa masih menggunakan bahasa jawa, etnik Bugis dengan bahasanya, etnik Sunda, Banten, rumpun etnik Sumatera lainnya tetap dengan bahasa daerah masing-masing; bahkan sangat jarang ditemui bahasa keseharian intraksi lintas etnik, bahasa Lampung yang dipakai. Fakta ini menunjukkan keterbukaan masyarakat etnik Lampung di Provinsi ‘Sang Bumi Ruwa Jurai’ ini sebagai falsafah tentang rumah tangga yang agung dan bahagia. Poin ini penekanannya

pada kesatuan dalam keberagaman entitas kehidupan merupakan wujud dan esensi rumah tangga (daerah) penuh keagungan dan kedamaian. Keberagaman adalah fitrah dan anugerah Illahiah, aset dan kekayaan yang dapat memberikan keagungan dan kedamaian dengan pengelolaan tepat, penuh kearifan dan penghormatan diantara semua unsur stakeholders yang ada.

Tataran praksisnya, Sang Bumi Ruwa Jurai didukung oleh prinsip-prinsip yang terimplementasikan dalam interaksi kehidupan masyarakat sebagai ajaran yang termaktub dalam kitab Kuntara Raja Niti, yaitu: (1) *Piil-Pesenggiri* (malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri); (2) *Juluk-Adok* (mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya); (3) *Nemui-Nyimah* (saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu); (4) *Nengah-Nyampur* (aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis); dan (5) *Sakai-Sambaian* (gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya).

Nilai-nilai kearifan lokal tersebut, dalam konteks demokrasi kekinian yang menghendaki penyelenggaraan dan lingkungan tata pemerintahan yang demokratis pula (*democratic governance*), maka esensi *democratic governance* harus ditempatkan pada titik sejauh mana introdusir nilai-nilai kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat mewarnai tatanan pemerintahan.

Kehidupan dan lingkungan tata pemerintahan yang merupakan energi pendorong sekaligus merupakan tuas pengungkit terciptanya demokratisasi tatanan masyarakat sipil yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga grassroots (akar rumput). Lembaga grassroots adalah asosiasi masyarakat sipil yang dibentuk atas dasar kesukarelaan, persamaan latar belakang dan persamaan tujuan pada skala lokal dan domain spesifik di kalangan masyarakat akar rumput (tumbuh dari lapisan bawah). Ia tidak terstruktur sampai ketinggian internasional, bahkan tidak jarang, Grassroots Organization (GRO) ini tumbuh hanya pada tingkatan lokal dengan ciri-ciri yang melekat, yaitu: (1) mekanisme pengendali pelayanan adalah suatu asosiasi sukarela; (2) pembuatan keputusan pelayanan dilakukan secara bersama-sama oleh pemimpin dan anggota; (3) pedoman perilaku adalah persetujuan anggota; (4) kriteria keberhasilan suatu keputusan adalah terakomodasinya interest anggota; (5) sanksi yang ada berupa tekanan sosial anggota dan (6) modus operandi pelayanan dilakukan dari bawah (*bottom up*).

Secara umum lembaga *grassroots* ini mencakup keragaman ruang, aktor, dan bentuk kelembagaan dengan variasi tingkat formalitas, otonomi dan kekuasaannya masing-masing. Arena lembaga grassroots seringkali diwujudkan dalam bentuk organisasi-organisasi seperti lembaga-lembaga amal, organisasi-organisasi pembangunan non-pemerintah, kelompok-kelompok komunitas (perkumpulan, paguyuban, lembaga adat), organisasi-organisasi kaum perempuan, organisasi-organisasi berbasis iman, asosiasi-asosiasi profesional, serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok swadaya, gerakan-gerakan sosial, asosiasi-asosiasi bisnis, koalisi-koalisi dan kelompok-kelompok advokasi. Singkatnya, semua lembaga atau organisasi diluar konteks '*state organization*' dan '*private organization*' dapat dikelompokkan kedalam lembaga *grassroots*.

Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris, yaitu '*non governmental organization*' (NGO) dikenal sebagai Organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP). Organisasi ini bukan menjadi bagian dari pemerintah/birokrasi ataupun negara, strukturnya jelas dan bahkan jangkauan mulai dari tingkat internasional sampai ke tingkat individual. Oleh karenanya, secara garis besar organisasi non pemerintah dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu: 1) bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara; 2) dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba); 3) kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi. Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan.

Pasca reformasi tampak muncul banyak organisasi kemasyarakatan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat. Pasal mengenai Hak Asasi Manusia menjiwai ketetapan-ketepatan Pasal 28 C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 E (2) tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, (2) hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan¹. Sebelum UUD '45 diamandemen bolak-balik, kita telah memiliki aturan tentang organisasi yang didirikan masyarakat atau yang dewasa ini dikenal dengan NGO (Non Government Organization), yaitu Undang-undang R.I Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada pasal 1 memberikan definisi bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Asas Ormas

¹ Lihat Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat.

ditetapkan kembali dalam Pasal 2 yaitu Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara). Kemudian, didalam penjelasan Undang-undang ini menetapkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di-Pancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Lebih lanjut, tujuan Ormas sesuai kekhususannya diatur dalam Pasal 3. Kekhususan Ormas seperti yang ada saat ini, misal dalam bidang lingkungan hidup (Walhi, Kalhi, dll), hukum (Bina Kesadaran Hukum Indonesia, Rifka Annisa, LBH Apik), Agama (NU, Muhammadiyah, FPUB, Institut Dialog Antar Iman Di Indonesia), Budaya, Kesehatan, dll. Dijelaskan pula bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara fungsi Ormas dijelaskan Pasal 5 d, yaitu sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah. Disamping itu, regulasi kedalam (internal) sesuai pasal 7, Ormas diharuskan memiliki AD/ART.

Tataran praktek kekinian, Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis (kekuasaan). Istilah semula adalah "Organisasi Massa" yang disingkat "Ormas". Namun sejak dikeluarkannya Permendagri nomor 33 tahun 2012 istilahnya diganti menjadi "Organisasi Kemasyarakatan" dan disingkatan "Orkemas"². Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Orkemas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial dll.

Istilah Lembaga Adat mengacu kepada entitas Masyarakat Adat sebagai komunitas masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia. Sementara dalam ilmu hukum dan teori secara formal, lembaga adat atau masyarakat adat sering kali dikaitkan dengan istilah Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup semua aspek dan tingkatan kehidupan. Oleh karenanya, terkadang istilah masyarakat hukum adat tidak selalu mencerminkan semua aspek kehidupan masyarakat adat (lembaga adat)³. Konsep lain yang sering dipakai aktivis sebagai gerakan dan upaya pemberdayaan, masyarakat adat atau lembaga adat adalah masyarakat pribumi yang merujuk pada: (1) penduduk asli atau bumi putra; (2) kaum minoritas; dan (3) kaum tertindas atau marginal karena identitas mereka berbeda dari dari identitas yang dominan di suatu negara atau wilayah⁴.

Sem Kambora seperti yang dikutip Duadji (2012:104) menyatakan Deklarasi Masyarakat Hak Asasi Adat (atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Masyarakat Adat, atau disebut juga Deklarasi Masyarakat Adat) menyatakan "secara praktis ternyata istilah 'bumiputra' dan 'masyarakat adat' sebagai sinonim dan sering dipertukarkan, seperti tampak pada kutipan berikut:

"many of these peoples refer to themselves as "indigenous" in order to fall under discussions taking place at the United Nations. For practical purposes the terms "indigenous" and "tribal" are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda".

Kebanyakan dari mereka yang menyebut diri sebagai "bumiputra" agar mereka dapat dimasukkan ke dalam diskusi-diskusi yang sedang belangsung di tingkat PBB. Untuk tujuan praktis istilah "bumiputra" dan "masyarakat adat" dipakai sebagai sinonim dalam sistem PBB, saat orang-orang yang bersangkutan mengidentifikasi diri mereka di bawah agenda masyarakat asli.

Deskripsi diatas menyiratkan masih ada perdebatan panjang tentang makna kedua istilah secara semantik, normatif, kronologis, politis dan sebagainya, tetapi secara praktis masyarakat yang merasa dirinya sedang ditangani dan dilayani lewat Deklarasi ini mengidentifikasi diri mereka sebagai bumiputra (indigenous). Dalam Konvensi ILO dan Deklarasi ini sendiri disebutkan bahwa identifikasi diri sendiri dari masyarakat merupakan kunci dalam menempatkan sebuah entitas sosial sebagai masyarakat adat. Identifikasi diri merupakan hak dasar yang dijamin dalam berbagai hukum universal yang sudah berlaku sejak pendirian PBB. Dalam Konvensi ILO No. 169 tahun 1986 menyatakan bahwa:

Bangsa, suku dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada

² Lihat BAB I pasal 1 ayat 1 Permendagri nomor 33 tahun 2012

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_adat,

⁴ Duadji, Noverman. 2012:102. Administrasi Pembangunan. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu sukubangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial, dan sistem hukum mereka⁵.

Pengertian ILO diatas tentu saja tidak merujuk kepada defenisi secara tertutup tetapi lebih kepada kriteria pemberian kesempatan yang besar kepada komunitas untuk melakukan *self identification*/mengidentifikasi dirinya sendiri. Pengertian lembaga adat yang lebih populer dan masih dipakai sampai saat ini adalah konsep yang dirumuskan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun 1999. Lembaga adat adalah *'komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya'*⁶.

Tabel 9. Bentuk Organisasi Grassroots di Kabupaten Lampung Selatan

BENTUK ORGANISASI/LEMBAGA									
LSM		ORMAS		LEMBAGA BENTUKAN PEMDA		LEMBAGA ADAT		TOTAL	
JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%
66	11.8	120	21.5	7	1.3	365	65.4	558	100

Sumber: Diolah dari dokumen pencatatan ormas Dinas Kesbangpol, catatan observasi dan angket isian di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020

Hasil investigasi tim peneliti menunjukkan bahwa pendataan dan registrasi lembaga grassroots di Kabupaten Lampung Selatan didasarkan pada akte pendirian (akte notaris) dan pelaporan resmi pengurus lembaga kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten tersebut. Sesuai dokumen pencatatan dan registrasi Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan bahwa tercatat 66 LSM dan 120 Ormas yang memiliki akte pendirian (Akta Notaris). Sementara pada sisi lain, tim peneliti berhasil mendata 365 lembaga adat dan 7 lembaga bentukan pemda yang oleh Kesbangpol setempat tidak atau belum dilakukan pencatatan dan registrasi karena dianggap bukan organisasi resmi.

Bila ditinjau dari sisi proses, selain kelembagaan yang sudah memiliki kelembagaan induk pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota, hasil investigasi tim peneliti menunjukkan bahwa pola pembentukan LSM dan Ormas di Kabupaten Lampung Selatan memiliki kemiripan. Sebagian besar terbentuknya kelembagaan lokal di daerah ini dimulai dari siklus awal yang ditandai oleh dilakukannya *share* ide dan diskusi terbatas beberapa elit untuk merumuskan nama, bidang, tujuan dan menyusun kepengurusan lembaga yang akan dibentuk. Kemudian beberapa orang tersebut menghadap notaris setempat untuk membuat akte pendirian dan pencatatan resmi pengurus kepada Kesbangpol setempat. Dengan demikian, eksistensi organisasi atau kelembagaan lokal bukan beranjak dari aktivitas yang menyangkut persoalan, kebutuhan dan keseharian kehidupan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat kemudian baru dilembagakan sebagai langkah dan upaya untuk memperkuat jaringan, bangunan struktur dan eksistensi kelembagaan di masa depan, tetapi lebih pada pelembagaan terlebih dahulu, sementara aktivitas dan orientasi kelembagaan baru ditentukan kemudian. Demikian juga dengan rekrutmen anggota, baru dilakukan setelah organisasi secara resmi berbadan hukum (akte notaris) dan terkadang lembaga yang bersangkutan tidak merekrut anggota sehingga praktis aktivitas kelembagaannya hanya untuk dan dijalankan oleh pengurus intinya saja.

Seperti pada Tabel 9, jika diamati pada sisi keterkaitan antara lembaga lokal di Kabupaten Lampung Selatan tersebut dengan profesi dan latar belakang aktor pembentuk maka secara umum dapat dijelaskan beberapa hal, yaitu: 32.27% lembaga lokal didirikan oleh pengurus partai politik, 6.48% oleh partisan partai politik, 53.88% oleh aktivis dan tokoh masyarakat yang bukan merupakan pengurus dan partisan partai politik; dan 7.37% didirikan oleh PNS atau pensiunan.

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Villarin dalam Gaventa dan Valderama (2001) tentang bentuk partisipasi warga, maka dapat dijelaskan bahwa konteks dan substansi partisipasi organisasi atau kelembagaan lokal di Kabupaten Lampung Selatan, pola afiliasi (ikatan) kelembagaan mengikuti kecenderungan orientasi kegiatan.

⁵ Duadji, Noverman. 2012:106. Administrasi Pembangunan. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

⁶ ibid

Tabel 10. Keterkaitan profesi dan latar belakang aktor pendiri dengan lembaga/organisasi lokal di Kabupaten Lampung Selatan

Bentuk Organisasi	AKTOR PEMBENTUK								Total	
	Pengurus Partai		Partisan Partai		Aktivis dan tokoh masyarakat (bukan Pengurus dan Partisan Partai)		PNS atau Pensiunan			
	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
LSM	37	56.06	9	13.64	13	19.70	7	10.61	66	100
ORMAS	103	85.83	2	1.67	9	7.50	6	5.00	120	100
Lembaga Bentuk Pemda	2	28.57	1	14.29	0	-	4	57.14	7	100
Lembaga Adat	4	1.10	11	3.01	338	92.60	12	3.29	365	100
Total	146	26.16	23	4.12	360	64.52	29	5.20	558	100

Sumber: Diolah dari dokumen pencatatan ormas Dinas Kesbangpol, catatan observasi dan angket isian di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020

Tabel 11. Pola Afiliasi (Ikatan) Berdasarkan Kecenderungan Orientasi Kegiatan Kelembagaan Lokal di Kabupaten Lampung Selatan

Bentuk Organisasi	BENTUK/POLA PARTISIPASI										Total	
	PP		GM		PDP		PK		PL			
	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
LSM	0	0	4	6.06	3	4.55	59	89.4	0	0	66	100
ORMAS	0	0	0	0	0	0	120	100	0	0	120	100
Lembaga Bentuk Pemda	0	0	0	0	7	100	0	0	0	0	7	100
Lembaga Adat	0	0	0	0	0	0	365	100	0	0	365	100
Total	0	0	4	0.72	10	1.79	544	97.5	0	0	558	100

Keterangan: PP: Partisipasi politik; GM: Gerakan massa; PDP: Partisipasi demokratis dalam pemerintahan; PK: Partisipasi komunitas; dan PL: Partisipasi lainnya.

Sumber: Diolah dari dokumen pendataan dan registrasi Kesbangpol dan catatan observasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

Untuk kasus kelembagaan di Kabupaten Lampung Selatan berhasil diidentifikasi bahwa pola afiliasi LSM sebesar 6,06% kecenderungan orientasi kegiatannya mengarah pada pola partisipasi gerakan massa. Wujud atau bentuknya berupa mobilisasi, aksi dan demonstrasi massa dengan karakter gerakan tertuju pada upaya mem-*blow up* isu publik, mengkritisi dan menekan kebijakan pemerintah daerah.

Sebesar 4,55% tergolong sebagai Partisipasi demokratis dalam pemerintahan (PDP) dengan bentuk aksi (partisipasi) yaitu mewakili komponen (elemen) masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan, baik pada level musrenbang desa/kelurahan, kecamatan maupun di tingkatan kabupaten. Pola ini karakternya masih pada partisipasi atas mandat pemerintah daerah, hubungan bersifat spontan dan jangka pendek serta keuntungan yang diperoleh masih sebatas pemenuhan kepentingan dan aliansi elit yang belum menyentuh persoalan substantif anggota masyarakat (publik) yang lebih luas.

Kemudian, sebesar 89,4% dari jumlah LSM yang ada, partisipasinya lebih berorientasi pada partisipasi komunitas (PK). Bentuknya, LSM ini mendapat mandat dari pemerintah daerah untuk melakukan *hearing* (dengar pendapat) kepada pihak eksekutif atau legislatif daerah tentang hal-hal yang berkenaan dengan persoalan warga atau melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan di wilayahnya masing-masing. Karakter pola ini masih sebatas pada gerakan pemenuhan hak penyampaian pendapat dan pernyataan sikap sebagai media pengawasan warga atas penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi program pembangunan (*governance*).

Sementara untuk 120 Ormas dan 365 lembaga adat yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, pola orientasi kegiatannya 100% tertuju pada partisipasi komunitas. Bentuknya, mereka mendapatkan mandat dari pemerintah

daerah untuk melakukan *hearing* (dengar pendapat), penyampaian sikap, pernyataan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan di wilayahnya masing-masing. Karakter pola ini masih sebatas pada gerakan spontan sebagai upaya pemenuhan hak dan kebebasan konstitusional warga untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat atas berbagai macam persoalan komunitas mereka. Sedangkan terhadap 7 lembaga/organisasi bentukan pemerintah daerah, pola afiliasi lebih berorientasi pada partisipasi demokratis dalam pemerintahan (PDP). Kendati lembaga ini mencoba melakukan aliansi strategis dengan melibatkan diri dalam perencanaan, penganggaran dan monev program pembangunan tetapi lebih merepresentasikan dan sebagai instrumen kekuatan pemerintah daerah untuk mengimbangi kekuatan LSM, Ormas dan lembaga adat yang dibentuk warga masyarakat. Oleh karenanya aliansi strategis yang dibangun masih bersifat '*psudo*' (semu) dan secara substantif baru menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan komunitas tertentu dan belum merupakan gerakan permanen ke arah kepentingan publik yang lebih luas.

Kaitannya dengan perumusan program pembangunan di daerah, maka dapat dijelaskan bahwa LSM, Ormas, Lembaga adat maupun lembaga yang dibentuk pemerintah daerah baik atas kesadaran sendiri maupun undangan formal dari pemerintah sudah berpartisipasi, walaupun baru sebatas keterlibatan pasif. Artinya dalam makna substansial belum dapat secara faktual mempengaruhi keputusan atau program yang akan diambil. Pemerintah daerah masih menganggap kelembagaan lokal hanya sebatas justifikasi legal formal perencanaan pembangunan sesuai tuntutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan yang disyaratkan atau dikehendaki oleh Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan di daerah.

Secara umum yang menjadi media partisipasi dan relasi otoritas antara kelembagaan lokal dengan pemerintah daerah adalah: 1) forum musrenbang desa dan kecamatan, 2) *public hearing* dengan legislatif dan eksekutif daerah, dan 3) momen dan siklus lima-tahunan, yaitu penyelenggaraan pesta demokrasi khususnya pada saat pileg DPRD Kabupaten dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta musyawarah dan rapat adat masing-masing lembaga adat. Adapun bentuk atau pola partisipasinya masih sebatas pada: (1) usulan program; (2) pernyataan sikap, pendapat dan harapan warga terhadap kandidat anggota DPRD maupun pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang akan dipilih. Pola-pola ini tidak atau belum bersifat mengikat. Disamping itu, karena pendirian lembaga lokal lebih didominasi oleh elit (pengurus dan simpatisan partai, tangan kanan kepala daerah, tokoh masyarakat dan PNS yang berafiliasi kepada kekuasaan tertentu) maka sering kali pola-pola ini sengaja diciptakan sebagai '*political marketing media*' figur tertentu agar mendapat dukungan masa yang lebih besar dan pemenuhan intres tertentu para elit yang berafiliasi pada centrum kekuasaan agar mendapat manfaat lebih. Artinya media dan bentuk/pola seperti ini belum terlalu memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran rakyat atau tujuan kepublikan yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya media partisipasi dan relasi otoritas antara kelembagaan lokal dengan pemerintah daerah seperti pada Tabel 3.11 dibawah ini.

Tabel 12. Media dan bentuk/pola partisipasi Lembaga dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Selatan

Bentuk Organisasi	Media Partisipasi dan Relasi Otoritas	Bentuk/Pola Partisipasi
LSM	Forum Musrenbangdes/kec Public Hearing	Menjadi peserta aktif Inisiator dan Penggagas
ORMAS	Forum Musrenbangdes Public Hearing	Menjadi peserta aktif Inisiator dan Penggagas
Lembaga Bentukan Pemda	Forum Musrenbangdes/kec	Menjadi peserta pasif
Lembaga Adat	Musyawarah dan Rapat Adat Pesta Demokrasi	Usulan Program Kegiatan Pernyataan sikap dan penentuan pilihan baik untuk Kepala Pekon maupun Bupati dan Wakil Bupati

Sumber: Diolah dari catatan observasi dan wawancara terhadap lembaga lokal di Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 13. Kecenderungan Nilai Lembaga Lokal di Kabupaten Lampung Selatan

No	Bentuk Organisasi	Kecenderungan Nilai		
		Sosial	Ekonomi (Pengembangan Usaha produktif)	Politik dan Pembangunan (Tatanan Governance)
1	LSM	Orientasi Kepentingan Elit	Belum terbangun	Issue maker Negosiasi kepentingan

				dengan pemerintah
2	Ormas	Orientasi Kepentingan Elit	Belum terbangun	Issue maker Negosiasi kepentingan dengan pemerintah
3	Lembaga Bentuk Pemda	Penyeimbang kekuatan sosial kemasyarakatan	Pemberian bantuan atas nama elit pemerintahan	Instrumen kekuatan pemerintah
4	Lembaga Adat	Guyub dan kerukunan Toleransi Kegotongroyongan Kekeluargaan Kerikatan etnik dan budaya Kepedulian sosial Kepatuhan pada tokoh adat	Belum terbangun	Partisipasi baru sebatas usulan, pernyataan sikap dan keikutsertaan dalam pesta demokrasi

Sumber: Diolah dari data riset Duadji & Tresiana 2020

Bila dikaitkan dengan konteks sosial, ekonomi dan politik dengan nilai kelembagaan lokal di Kabupaten Lampung Selatan ternyata mengikuti kecenderungan. Atas dasar data lapang hasil observasi dan penelusuran dokumen, Agustus 2020, peserta simulasi dan FGD yang terdiri dari tim peneliti, *peer group*, tokoh masyarakat dan beberapa pakar dapat dijelaskan 3 (tiga) hal penting. **Pertama**, kecenderungan nilai LSM, Ormas dan lembaga bentukan pemerintah daerah ada untuk ranah sosialnya masih sebatas mengutamakan kepentingan (intres) elit sebagai penyeimbang kekuatan sosial kemasyarakatan. Sementara pada ranah politiknya sebagai pembuat isu, instrumen kekuatan penguasa dan negosiasi atau *share* kepentingan. **Kedua**, kecenderungan nilai sosial Lembaga adat mengarah kepada sifat-sifat guyub dan kerukunan, toleransi; kegotongroyongan; kekeluargaan; kerikatan etnik dan budaya; kepedulian sosial; dan kepatuhan pada tokoh. Sedangkan pada ranah politiknya, partisipasi lembaga adat masih sebatas usulan, pernyataan sikap dan keikutsertaan dalam pesta demokrasi. **Ketiga**, kesemua kelembagaan lokal yang ada di kedua kabupaten belum mengarah pada upaya pembangunan ekonomi produktif yang luas kepada warga.

Memperhatikan bentuk, pola dan nilai kelembagaan masyarakat sebagaimana telah dideskripsikan, maka secara umum banyak kapital sosial yang ada pada lingkup wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Namun jika meminjam konsep Maltz tentang kehampaan⁷, kecenderungan organisasi (kelembagaan) di Kabupaten Lampung Selatan belum mampu hidup kreatif, belum mampu menggunakan keanekaragaman potensi dan talenta sumber dayanya, arah dan tujuannyapun masih spontanitas, sehingga masih perlu faktor pendorong sebagai ‘driver’ dari pemerintah ke arah pemandirian lembaga masyarakat yang ada. Jika tidak terjadi driver dari pemerintah, dikhawatirkan lembaga-lembaga ini akan mati-suri atau menjadi parasit bagi pemerintah daerah.

Tampaknya sinyalemen Maltz diatas menjadi penting untuk dipertimbangkan. Pada beberapa daerah yang lain menunjukkan terjadinya efek elastis negatif kehampaan. Lembaga lokal silih-berganti kemunculan, bahkan ada kasus di beberapa daerah di Indonesia dimana respon masyarakatnya kurang simpati atau bahkan alergi terhadap kehadiran lembaga-lembaga lokal ini, sehingga tidak heran jika ada pernyataan dari masyarakat yang mengatakan bahwa LSM ataupun Ormas tidak lebih dari ‘preman berdasi’, pelembagaan dan legalisasi tindakan kriminal kolektif seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Kendati ada yang baik, LSM dan Ormas sekarang lebih banyak buruknya. Kehadirannya silih-berganti. Pada era awal reformasi, seolah-olah menjadi resep dan obat kuat sebagai suplemen penambah energi masyarakat yang loyo dibelenggu rezim Orde Baru. Sekarang nafas dan ruh perubahan hampir boleh dikata sudah mulai sirna. Lembaga-lembaga itu hanya dibuat alat orang-orang politik untuk nakut-nakuti pemerintah, minta proyek atau sumbangan pada rakyat. Terkadang mereka memaksa dan memeras. Walau tidak semua, saya menganggap mereka tidak lebih preman berdasi, atau pengorganisasian tindak kejahatan kelompok”⁸.

Kesemua uraian diatas merupakan hasil pengembangan wacana kegiatan simulasi dan FGD yang sudah dilakukan. Kemudian rumusan konsep yang tidak kalah-menariknya adalah penjelasan tentang polarisasi afiliasi kelembagaan lokal. Kultur masyarakat di Provinsi Lampung dibangun atas pondasi kemajemukan etnik, agama, bahasa dan sub-kultur lain (heterogenitas), termasuk Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga tidak mengherankan kalau Provinsi Lampung dikenal sebagai miniatur Indonesia. Oleh karenanya kemajemukan ini menjadi sumber daya dan potensi yang sangat luar biasa jika pemanfaatannya optimal melalui konvergensi keberagaman dalam

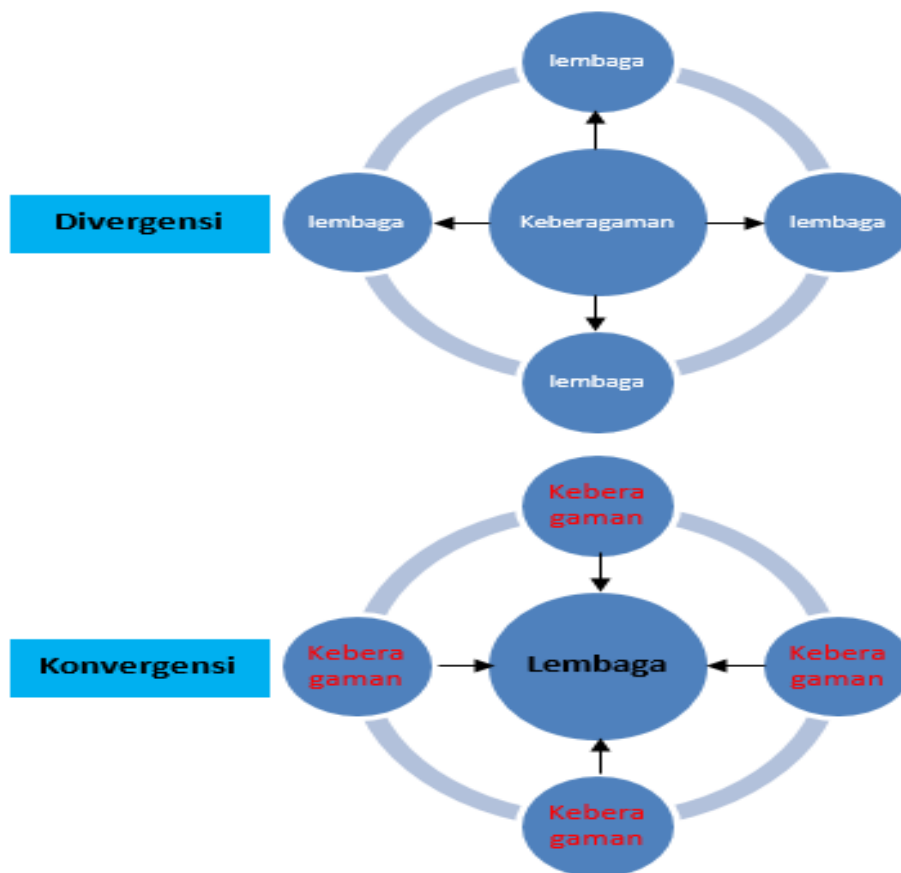
⁷ Maltz, Maxwell. 2004:248. Psycho-Cybernetics Mutakhir.

⁸ Hasil Wawancara dengan salah satu tokoh adat Kalianda, Juli 202014.

pembentukan lembaga lokal. Artinya, kondisi keberagaman akan menjadi rahmat (berkah) sebagai modal sosial berupa kekayaan, pengikat, pemersatu jaringan dan surga sebagai tempat tumbuh suburnya gerakan pemberdayaan masyarakat.

Namun kenyataannya menunjukkan hal sebaliknya. Pola afiliasi kelembagaan lokal di daerah ini cenderung mengikuti divergensi keberagaman dalam pembentukan kelembagaan. Artinya keberagaman akan terbiaskan menuju pecahan dan serpihan-serpihan kecil. Akibatnya struktur dan interaksi masyarakat menjadi terkotak-kotak. Interaksi dan jejaring sosial membentuk ‘blocking’ bukan saja dalam makna teritorial tetapi dalam makna ‘*mental blocking*’. Pola ini berimbas pada terjadinya disharmoni interaksi sosial dan ekonomi di kawasan ini yang memicu gesekan (konflik), seperti yang terjadi antara Desa Balinuraga dan Desa Ragom di Kabupaten Lampung Selatan. Seolah-olah keberagaman mendatangkan bencana sosial, ekonomi dan bahkan bencana politik bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, pola afiliasi kelembagaan lokal di Kabupaten Lampung Selatan seperti pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Pola afiliasi kelembagaan lokal di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Duadji & Tresiana, Laporan Penelitian 2020

C.4. Bridging Bonding Social Capital

Mengacu pada deskripsi tentang potensi kapital sosial masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dapat disarikan beberapa poin-poin penting. Pertama, dari konteks kelembagaan terdapat 558 lembaga/organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari 66 LSM, 120 Ormas, 7 lembaga bentukan pemda dan 365 lembaga adat dengan beberapa variasinya. Kedua, bila ditinjau dari sisi kecenderungan nilai lembaganya, maka: (1) untuk nilai LSM dan Ormas lebih kepada gerakan sosial sebagai *Issue maker* dan menjalankan negosiasi kepentingan dengan pemerintah, namun masih didominasi oleh kepentingan elit yang membentuknya; (2) kecenderungan nilai lembaga bentukan pemda merupakan gerakan sosial dan ekonomi sebagai instrumen kekuatan pemerintah penyeimbang eksistensi lembaga masyarakat di wilayahnya; dan (3) kecenderungan nilai lembaga adat merupakan

gerakkan sosial yang ditandai nilai-nilai guyub dan kerukunan, toleransi, kegotongroyongan, kekeluargaan, kerikatan etnik dan budaya tertentu, kepedulian sosial dan lebih menekankan kepatuhan pada tokoh adat. Peran yang dijalankan oleh lembaga adat masih sebatas *Issue maker* dan menjalankan negosiasi kepentingan kelompoknya kepada pemerintah.

Dengan demikian, potensi kapital sosial masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan masih merupakan serpihan-serpihan kearifan lokal yang berserakkan seperti analog butiran emas yang masih terkandung didalam bebatuan alam. Walau harganya mahal jikalau belum diolah, dibersihkan dan dipisahkan dari bebatuannya tentu belum nampak nilai ekonominya bahkan terkadang bebatuan tajam pembungkus emas tersebut seringkali melukai pendulangannya dan orang yang meniti bebatuan tajam itu. Artinya potensi kapital sosial itu perlu dihimpun dan dipisahkan dari sisi-sisi negatif yang terkadang bersemayam didalamnya, suatu misal hal-hal yang bersinggungan dengan dominasi kepentingan dan orientasi elit pendirinya; sebagai instrumen kepentingan individu penguasa sebagai kekuatan politis dan penyeimbang lembaga kemasyarakatan di wilayahnya; dan kuatnya egosentris terhadap etnik, agama dan ideologi sosial-politik tertentu.

Disamping itu, gambar 3 memberikan ilustrasi dua sisi kapital sosial tentang pola afiliasi kelembagaan lokal di Kabupaten Lampung Selatan tentang yang ada. *Pertama*, pola divergen artinya keberagaman masyarakat menjadi pemicu lahir, tumbuh dan berkembangnya lembaga. Sampai pada poin ini masih bisa dianggap wajar dalam tataran kehidupan yang demokratis. Tetapi jika tidak terkelola dengan baik, maka efek negatif kebalikan akan muncul dari pola divergen ini, seperti menimbulkan priksi, konflik dan berujung pada perpecahan. Tentu saja kondisi seperti ini sebagai resiko negatif dari demokratisasi. *Kedua*, pola konvergen yaitu keberagaman menjadi penghias dan pengkayaan lembaga. Nilai-nilai keberagaman perlu dihimpun dalam sebuah lembaga sebagai rumah bersama tempat menjalankan aktivitas sosial kemasyarakatan, silaturahmi, sharing, berdiskusi, pusat pembelajaran dan kerjasama untuk memecahkan persoalan bersama. Dari sini maka komunikasi akan terbangun, toleransi akan tumbuh, kebersamaan dan solidaritas akan tercipta, alkulturasi akan berjalan dan mental blocking akan terbuka sehingga rasa percaya diantara sesama terbangun.

Telah disinggung sebelumnya, kapital sosial masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan masih berserakkan dan kecenderungannya masih ke arah divergen. Oleh karenanya maka perlu dihimpun dan direorientasikan ke arah pola konvergen. Seperti pemikiran yang disampaikan Putnam "*networks of civic engagements*". Modal sosial merupakan seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang, jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas.

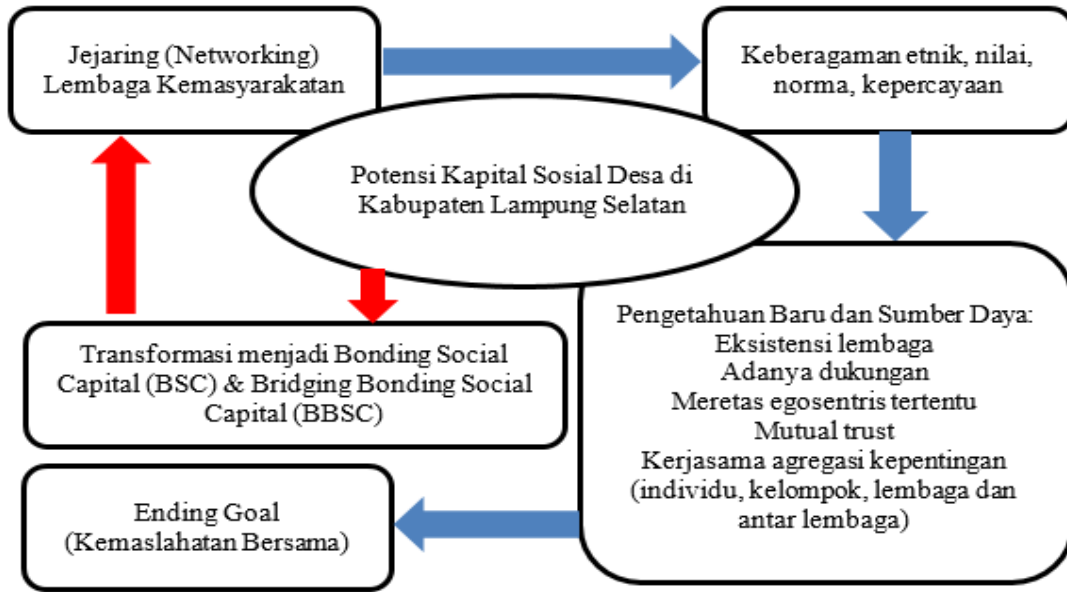
Dengan demikian, maka kapital sosial masyarakat akan memiliki nilai guna bagi kemaslahatan masyarakat dengan adanya perekat yang mengatur keharmonisan dan solidaritas hubungan internal sesama anggota kelompok. Inilah yang disebut dengan istilah *bonding social capital* (kapital sosial pengikat). Perubahan kapital sosial menjadi kapital sosial pengikat memungkinkan terciptanya kerjasama dan hubungan yang saling menguntungkan diantara sesama anggota kelompok. Untuk mengikat kelompok (etnik, agama, ideologi sosial politik) lain, tentu saja diperlukan energi peretas perbedaan dengan lebih mengutamakan persamaan dan sebagai jembatan agregasi semua sumberdaya serta kepentingan masing-masing menjadi sebuah gerakan solidaritas masif untuk mencapai tujuan bersama yang lebih luas (public goal). Hal ini lebih dikenal dengan konsep *bridging bonding social capital* (jembatan kapital sosial pengikat).

Disebut jembatan modal sosial pengikat karena dengan konsep ini diyakini akan mampu menjembatani perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara kelompok masyarakat yang memiliki keberagaman nilai-nilai budaya, agama, etnik dan haluan ideologi sosial politik. Tanpa adanya *bridging bonding social capital*, tentu saja setiap kelompok masyarakat ini cenderung lebih mementingkan kelompok sendiri, bersifat eksploitatif dan mudah terlibat dalam konflik dengan kelompok lain dan sudah tentu akan saling melemahkan dan merugikan masing-masing kelompok masyarakat.

Dengan demikian, maka dapat dibangun asumsi bahwa dengan sekedar kapital sosial tidak cukup dan untuk bekerja efektif dan menjadi daya ungkit perjuangan kemaslahatan masyarakat, kapital sosial harus ditransformasi menjadi *bonding social capital* (kapital sosial pengikat). Untuk itu ada syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan ini sudah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan berupa eksistensi lembaga kemasyarakatan. Norma-norma dan jaringan saling berkaitan dan merupakan prakondisi adanya lembaga kemasyarakatan yang memungkinkan terciptanya koordinasi, komunikasi, sharing dan berdiskusi diantara sesama anggota masyarakat yang memiliki latar beragam. *Kedua*, terciptanya dukungan (saling mendukung) diantara anggotanya guna mencapai keberhasilan tujuan yang diinginkan. *Ketiga*, kepentingan-kepentingan pribadi, dominasi dan instrumen elit dan rasa egosentris tertentu harus diretas dan dibersihkan. *Keempat*, kepercayaan (*mutual trust*) harus ditumbuhkan dan dipupuk terus-menerus. Kelima, kerjasama yang terbangun diantara para anggota merupakan agregasi, yakni basisnya bukan hanya pemenuhan kepentingan pribadi, tetapi mewujudkan kepentingan kolektif dan kebutuhan lembaga.

Dengan berpedoman pada narasi dan deskripsi yang telah disajikan, maka pada bagian ini dapat dibuat ikhtisar sebagai ilustrasi temuan penelitian dari aspek kapital sosial pengikat di Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk gambar berikut.

Gambar 4. Jaringan Pengikat Internal Kelompok dan Lintas Kelompok



Sumber: Duadji & Tresiana, Laporan Penelitian, 2020

C.5. Mentautkan Model Driver-Trigger dengan Bridging Bonding Social Capital dalam Musrenbangda: Pekon Ramah Anak

Bonding social capital dan *bridging bonding social capital* baru bekerja efektif berskala sempit, yaitu pada titik penyelesaian sebagian persoalan dan pemenuhan kebutuhan kelompok dan lintas kelompok, belum memiliki jangkauan yang lebih luas terhadap keberagaman persoalan dan kebutuhan warga masyarakat. Banyak hal yang menjadi penyebabnya—(1) keterbatasan sumberdaya yang dimiliki; (2) keterbatasan kompetensi; (3) spontanitas dan parsialisme kegiatan yang dijalankan; dan (4) terlebih lagi kurangnya dukungan maksimal dari pemerintah setempat. Lalu bagaimana dengan isu dan persoalan yang dihadapi anak-anak?

Tataran praksis, di Indonesia termasuk di Kabupaten Lampung Selatan, isu dan persoalan anak-anak sangat beragam dan kompleks. Ada persoalan tumbuh-kembang anak (gizi buruk, masalah kesehatan, pendidikan, pengasuhan); masalah perlindungan anak (kekerasan, penculikkan, perdagangan anak, pekerja anak, kejahatan seksual terhadap anak, kejahatan berbasis siber); perkawinan anak; hingga pada persoalan pengabaian pemenuhan hak dasar anak lainnya yang diakibatkan perceraian, bencana sosial (konflik dan peperangan berkepanjangan, radikalisme), bencana alam termasuk pandemi covid-19 seperti sekarang ini dll. Pada titik ini menekankan negara wajib hadir dan berstrategi untuk menuntaskan isu-isu (masalah) anak di Indonesia.

Jumlah anak di Kabupaten Lampung Selatan 354.204 jiwa dan yang bersekolah berjumlah 97.785 jiwa. Artinya persoalan pertama yang dihadapi anak adalah tingginya angka anak yang belum atau putus sekolah, yaitu sebesar 256.419 jiwa (72,39%) atau bila dibandingkan dengan anak yang bersekolah maka rasionya 262,23%. Kondisi demikian juga didukung oleh penurunan drastis Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 16-18 tahun (64,49%) yang menginformasikan bahwa banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan SMA/SMK/Madrasah Aliyah. Kemudian persoalan anak lainnya adalah stunting. Diantara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, terdapat 7 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting diatas prevalensi provinsi dan 8 kabupaten dengan prevalensi di bawah prevalensi provinsi. Dari 8 kabupaten/kota dengan prevalensi dibawah prevalensi provinsi, 2 kabupaten masuk dalam masalah kesehatan masyarakat berat, yaitu Kabupaten Lampung Selatan (30,3%) dan Kabupaten Way Kanan (30,7%). Semua persoalan dan permasalahan yang masih menyelumuti tumbuh-kembang anak ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam mengatasi persoalan di lingkungan masing-masing. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebabnya. *Pertama*, persoalan anak terkadang dianggap tidak penting karena minimnya kemampuan, wawasan dan cara pandang masyarakat terhadap persoalan dan masalah ini, bahkan pada kelompok tertentu adalah hal biasa mengajak atau mengikutsertakan anak mencari nafkah keluarga. Anak dijadikan tulang punggung penopang keluarga dan dianggap lumrah. *Kedua*, kurangnya kemampuan finansial dan sarana lain akibat belenggu kemiskinan keluarga. *Ketiga*, belenggu budaya sebagai dampak dari apa yang disebut

Maltz dengan kehampaan *social capital value* (kehampaan nilai kapital sosial), seperti misalnya tabu untuk melakukan perubahan tertentu diluar konteks pengetahuan dan nilai yang dikenalnya. Ini jelas menunjukkan bahwa ada sisi negatif tertentu dari budaya, nilai dan kepercayaan masyarakat. *Keempat*, polarisasi dan divergensi kepentingan, baik di kalangan internal keluarga, kelompok dan lintas kelompok dalam lingkungan masyarakat. *Kelima*, minimnya sarana, prasarana serta dukungan dari pemerintah setempat. Kelima hal ini menjadi *starting point* tentang pentingnya perubahan isu dan persoalan masyarakat (masalah anak) menjadi isu dan agenda publik.

Menyikapi persoalan dan masalah anak dan sebagai wujud respon nyata, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengeluarkan beberapa kebijakan. *Pertama*, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. *Kedua*, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Ketiga*, Peraturan Bupati Lampung Selatan No 53 Tahun 2017 Tentang Transformasi Perpustakaan di Lampung Selatan. *Keempat*, Keputusan Bupati Lampung Selatan No:B/261/IV.05/HK/2016 tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan Periode 2019 – 2021. *Kelima*, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting. *Keenam*, Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 216 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Langkah ini laik diapresiasi sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi oleharganya. Kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tentu saja tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dan kolaborasi diantara elemen masyarakat dengan pemerintah.

Hasil penelitian, secara umum di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa pada sisi perencanaan program dan penganggaran dana desa, hampir tidak ada desa yang mengalokasikan dana untuk program-program berbasis hak anak sebagai prioritas utama, kecuali melalui program dan dana afirmatif dari pemerintah kabupaten, provinsi atau melalui program dan pendanaan nasional yang ditempatkan di daerah. Prioritas desa masih tertuju pada program-program pembangunan infrastruktur. Kendatipun demikian, ketika ada desa yang merencanakan program yang dilandasi pemenuhan hak anak lebih disebabkan atas peran dan advokasi pihak eksternal ‘intelektual lokal’ yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Tentu saja posisinya sebagai katalisator pembaharu kreatif yang mencoba untuk memasukan agenda-agenda pro-anak, baik dalam tataran diskursus maupun tataran pendampingan penyusunan program dalam proses musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Namun demikian, program-program yang disusun lebih bersifat normatif, terkesan asal ada dan belum mengarah pada penciptaan upaya dan kreasi untuk menuntaskan akar persoalan dan masalah anak. Hal normatif yang selama ini sering dilakukan adalah program pendidikan seperti PAUD, TK, TPA, ataupun kesehatan seperti program posyandu. Program ini sebagai dasar kebutuhana anak dan memang wajib adanya. Memenuhi standar normatif itu penting, tetapi dari sisi dan konteks fungsi administrasi publik yang lebih luas, hal demikian belumlah cukup; dan yang jauh lebih utama adalah hal-hal substantif yang dilakukan semua *stakeholders* terkait yang berkenaan secara langsung dengan solusi akar persoalan yang dihadapi masyarakatnya, termasuk hak anak-anak dan upaya kearah terwujudnya desa ramah anak—sebuah konsep desa yang memberikan proteksi dan memfasilitasi hak tumbuh-kembang anak.

Melihat kondisi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Selatan, rasanya tidak mungkin persoalan dan masalah anak mampu dituntaskan oleh masyarakat sendiri. Sebagai penegasan ulang tentang kondisi masyarakat pedesaan di Kabupaten Lampung Selatan, baik dalam tataran internal lembaga masyarakat maupun pada tingkat pemerintahan desa masih memposisikan dan menganggap isu dan persoalan anak tidak terlalu penting, mungkin dapat disebut walaupun sudah merespon tetapi posisinya ada pada level ketiga, keempat dan seterusnya. Ini tidak dapat juga mutlak dipersalahkan. Masih banyak persoalan dan belunggu yang dialami masyarakat desa dalam keseharian kehidupannya, demikian juga halnya pemerintahan desa masih banyak keterbatasan-keterbatasan—sebut saja kemampuan dan kompetensi aparatur dan minimnya dukungan anggaran, sarana dan prasarana desa. Dari sisi masyarakat desanya, lebih disebabkan minimnya kemampuan, wawasan dan cara pandang masyarakat terhadap persoalan dan masalah; kurangnya kemampuan finansial dan sarana lain karena faktor kemiskinan keluarga; belunggu budaya sebagai dampak kehampaan *social capital value* (kehampaan nilai kapital sosial); polarisasi dan divergensi kepentingan, baik di kalangan internal keluarga, kelompok dan lintas kelompok dalam lingkungan masyarakat; dan hal yang tidak kala pentingnya adalah minimnya sarana, prasarana serta dukungan dari pemerintah setempat. Negara perlu hadir melalui dukungan, dorongan, pembinaan dan pengarahannya kepada masyarakat setempat.

Program Desa/Pekon Ramah Anak sebagai kerangka menuju Kabupaten Ramah Anak haruslah ditempatkan sebagai program milik semua. Strategi perencanaan Program Desa/Pekon Ramah Anak tentu saja perlu dikemas sebagai program berbasis masyarakat ‘Community Based Programe’ (CBP). Jika memang gagasannya demikian, maka paling tidak memerlukan tiga hal, yaitu: a) mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; b) adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan program desa/pekon ramah anak; dan c) perlunya driver dan trigger untuk menguatkan partisipasi aktif masyarakat seperti dijelaskan Shrestha (2015).

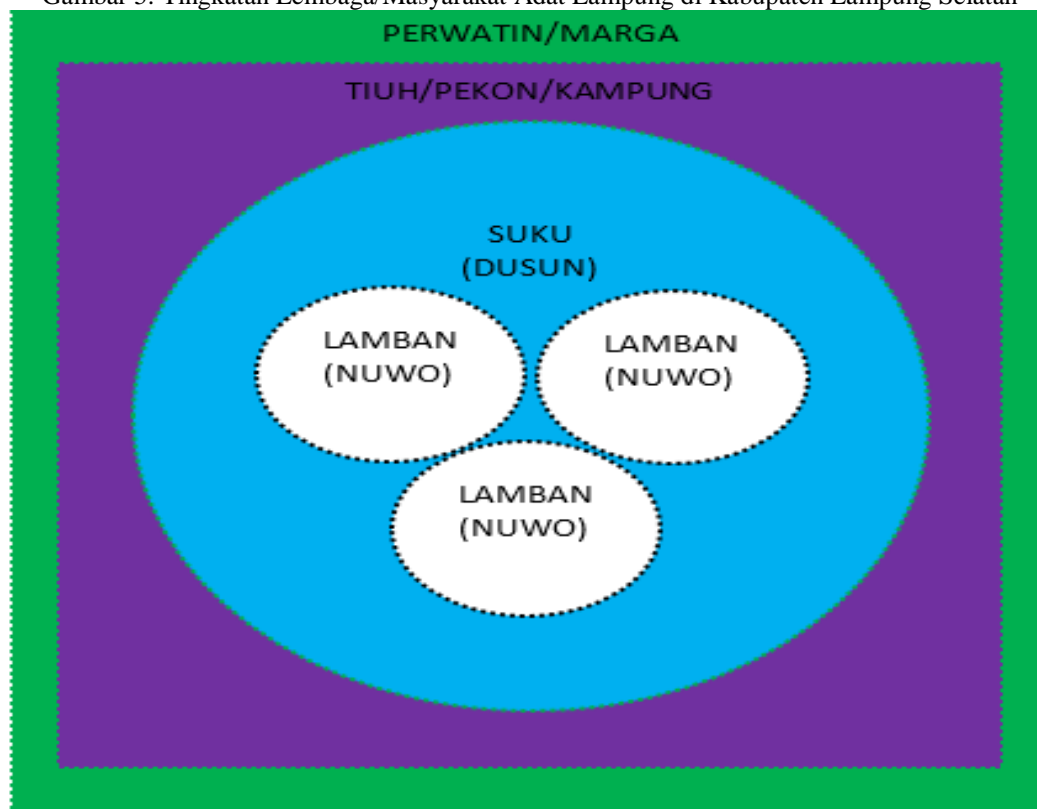
Penjelasan pada bagian terhadulu telah mengungkap tentang keberagaman potensi kapital sosial masyarakat desa di Kabupaten Selatan. Daerah ini dikaruniahi multi-etnik, budaya, nilai, norma dan kepercayaan

dengan 558 lembaga kemasyarakatan yang ada terdiri dari 66 LSM, 120 Ormas, 7 Lembaga Bentukan Pemerintah dan 365 Lembaga Adat . Lembaga masyarakat ini telah melakukan aksi partisipasi dengan beberapa pola atau bentuk partisipasi: (a) partisipasi politik; (b) gerakan massa; (c) partisipasi demokratis dalam pemerintahan; (d) partisipasi komunitas; (e) bentuk partisipasi sosial lainnya seperti penggalangan dana, turut menjadi sukarelawan bencana dll.

Kecenderungan nilai sosial yang berlaku di desa-desa Lampung Selatan mengarah kepada sifat-sifat guyub dan kerukunan, toleransi; kegotongroyongan; kekeluargaan; keterikatan etnik dan budaya; kepedulian sosial; dan kepatuhan pada tokoh (Duadji & Tresiana, 2016). Temuan ini senada dengan kajian klasik yang dilakukan oleh Collette (1987) mengemukakan gotong royong telah berurat-berakar dan tersebar dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan menjadi pranata sosial yang paling penting dalam pembangunan. Hal ini bisa dilihat seperti adanya istilah sambatan, bersih desa yang berlaku di masyarakat Jawa atau istilah krama di Bali yang menunjukkan aktivitas gotong royong di daerah-daerah (Kartodirjo, 1987). Hal inilah yang menunjukkan karakter desa yang khas di tengah gempuran globalisasi, kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional masih terawat, termasuk di desa-desa di Lampung Selatan. Dengan demikian, kepercayaan telah terinternalisasi dalam praktik-praktik keseharian guyub masyarakat, tetapi kepercayaan tersebut belum diekstrapolasi menjadi kekuatan desa untuk membangun diri agar menjadikan desa ramah anak.

Lebih lanjut, jika ditinjau dan ditelusuri pada akar sejarah masyarakat Lampung (termasuk Kabupaten Lampung Selatan) memandang bahwa konsep desa (Lampung: pekon) tidak lain merupakan kumpulan keluarga (rumah tangga) dan diantara mereka diikat oleh garis keturunan (suku) yang sama. Jadi konsep desa di Lampung lebih merepresentasikan sistem pemerintahan adat berdasarkan ikatan genokolog (Gambar 5.), yang mana di era sekarang ini dengan adanya penyeragaman desa dan pembubaran otoritas marga, maka pemerintahan adat menjelma sebagai lembaga adat.

Gambar 5. Tingkatan Lembaga/Masyarakat Adat Lampung di Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Diolah & direkonstruksi atas dasar hasil interpretasi Duadji & Tresiana, 2020

Berpangkal dari Gambar Gambar 5, ada beberapa substansi penting sebagai penciri khusus kearifan lokal berkenaan dengan lembaga adat atau masyarakat adat Lampung: (1) sangat terbuka dan toleran yang ditandai dengan kemampuan lembaga ini untuk memberikan ruang gerak dan pengakuan keberagaman akan eksistensi masyarakat pendatang yang diakomodir kedalam tatanan kehidupan sosial budaya dan penyelenggaraan pemerintahan melalui perwakilan lembaga kepenyeimbangan pada semua jenjang kepenyeimbangan lembaga/masyarakat adat Lampung; (2) keikhlasan penyerahan hak keulayatan kepada masyarakat pendatang; dan (3) nilai-nilai 'angkon' sebagai prinsip menjunjung tinggi nilai-nilai soliditas sosial (kesatuan dan persatuan).

Penciri kearifan lokal sebagaimana dideskripsikan diatas menjadi penguat keyakinan akan gagasan tim peneliti bahwa sesungguhnya eksistensi lembaga adat Lampung pada level suku/dusun atau pekon/tiuh/kampung ini dapat menjadi wadah atau forum musrenbang desa dan tentu saja hal ini senafas dengan '*bhineka tunggal ika*' sesuai falsafah Bangsa Indonesia. Artinya pada aras makro, keberagaman sumber-daya dan entitas dipandang sebagai rahmat, anugerah dan kekayaan yang akan saling melengkapi serta menjadi perekat persatuan bangsa. Realitas demikian ini bila dikaitkan dengan konteks dan substansi otonomi daerah tentu saja merupakan '*home base*' yang akan memperkuat bangunan *governance* yang dikehendaki dalam penyelenggaraan '*democratic governance*' (tata kelola pemerintahan yang demokratis) dan tentu saja memberikan penekanan khusus kepada perlunya penempatan kapital sosial dalam reposisi administrasi publik kekinian, sekarang dan di masa mendatang.

Tak dapat dinamfikan, selain keberagaman potensi kapital sosial yang dimiliki memberikan energi positif, tetapi fenomena lapang juga memunculkan adanya energi negatif berupa polarisasi dan divergensi lembaga, LSM, Ormas, dan lembaga bentukan pemerintah. Tetapi piranti peraturan perundang-undangan dan eksistensi kesbangpol-linmas kabupaten dapat menjadi pengarah konvergensi keragaman lembaga dalam sebuah bingkai kebhineka tunggal ika dan sebuah keniscayaan (*conditio sine quanon*) sebagai falsafah negara.

Potensi kapital sosial masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan sangatlah beragam, tetapi tidak cukup hanya mengandalkannya. Upaya mewujudkan desa/pekon ramah anak sebagai kerangka bangunan kabupaten layak anak memerlukan bekerjanya semua fungsi stakeholders (pemerintah dan elemen kemasyarakatan yang ada); membutuhkan kerja dan dana ekstra sebagai tanggungjawab bersama. Pengelolaan potensi keberagaman kapital sosial tidak cukup hanya mengandalkan gerakan alamiah (evolusi). Hal demikian membuat jalannya kapital sosial kurang optimal bahkan cenderung memberikan efek berkebalikkan (dampak buruk). Energi potensial kapital sosial akan berubah menjadi energi faktual jika sengaja diberikan triggers (pemicu). Artinya memerlukan intervensi untuk mendorong Bergeraknya potensi kapital sosial.

Tanpa adanya *triggers kapital sosial*, mustahil mekanisme kapital sosial bekerja; maka dampak simultan dari program desa/pekon ramah anak sebagai Community Based Programe (CBP) tidak akan bertahan lama; dan demikian pula program kabupaten ramah anak tidak pernah akan terwujud--mengingat CBP bersifat partisipatif dan untuk tujuan keuntungan seluruh anggota masyarakat sadar dan bertanggungjawab atas semua persoalan dan masalah yang dihadapi anak-anak di daerahnya.

Hasil inventarisasi lapang menunjukkan bahwa yang memungkinkan untuk menjadi triggers (pemicu): (a) berupa kesamaan tujuan dari masyakat atas persoalan dan masalah anak; baik dari sisi tanggungjawab maupun pada hal benefit yang akan diperoleh bagi keluarga, kelompok dan lembaga masyarakat; (b) wawasan, pengetahuan dan kesadaran bersama diantara semua stakeholders tentang urgensi program desa/pekon ramah anak dan kabupaten ramah anak; dan (c) walau sesuatu yang tidak diharapkan, adanya bencana alam, termasuk adanya bencana sosial seperti sekarang ini 'semakin meluas dan masifnya pandemi covid-19.

Lalu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bagaimana dengan kondisi masyarakat desa yang masih serba minim? Pada poin ini, maka harus ada *driver* (penggerak). Pemerintah setempat merupakan penggerak utama yang harus memberikan dorongan, pembinaan dan pendampingan untuk meretas semua hambatan dan belenggu kehampaan *social capital value* melalui program afirmatif (*supporting and affirmative programe*) yang akan menyertai mendampingi program desa/pekon ramah anak dan kabupaten ramah anak sebagai program utama (*main programe*). Lazimnya sebuah resep yang diberikan dokter kepada pasiennya, tidaklah cukup memberikan obat untuk penyakit utamanya, tanpa diikuti dengan pemberian obat untuk menghilangkan gejalanya (*symptomatic*). Jadi pemerintah perlu juga memberikan program pengembangan kapasitas bagi aparatur dan masyarakat desa.

Kirit Patel seperti dikutip Triana (2010:191), menyatakan *capacity building* sebagai: "...encompasses the country's human, scientific, technological, organizational, institutional and resources capabilities. A fundamental goal of capacity building is to enhance the ability to evaluate and address the crucial questions related to policy choices and modes of implementation among development options, based on an understanding of environment potentials and limits and of needs perceived by people of the country concerned".⁹

Kutipan diatas memberikan gambaran bahwa pengembangan kapasitas meliputi kemampuan manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi, kelembagaan dan sumber daya pada suatu Negara. Tujuan mendasar dari pengembangan kapasitas adalah peningkatan kemampuan untuk mengevaluasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang berkaitan dengan pilihan kebijakan (program) dan cara pelaksanaan antara pilihan pembangunan, berdasarkan pemahaman tentang potensi lingkungan dan batas-batas dan kebutuhan yang dirasakan oleh orang-orang dari negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, *capacity building* merupakan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja *governance* melalui: (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) penguatan organisasi; (3) reformasi kelembagaan; dan (4) pembentukan dan penguatan jaringan sosial (*networking*). Kesemua ini merupakan langkah pembinaan, penguatan dan dorongan yang mesti dilakukan

⁹ Kirit Patel dalam Rochayati Wahyuni Triana. Global Warning: Quo Vadis Ilmu Administrasi Negara dalam Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto. Rivitalisasi Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu. Tahun 2010.:191.

oleh pemerintah kepada masyarakat, lembaga masyarakat dan aparat pemerintah serta stakeholders terkait lainnya.

Sebagai driver, langkah berikut yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan pembinaan secara kontinyu, memberikan bantuan finansial dan dukungan sarana-prasarana. Pemerintah juga perlu mendorong terciptanya ruang publik (*public arena* atau *public space*). Terciptanya ruang publik menjadikan keterbukaan bagi semua masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan dan elemen stakeholders terkait lainnya mendapatkan akses berpartisipasi aktif secara timbal-balik. Tidak ada lagi belenggu struktural, semua dapat menyuarakan, melontarkan gagasan, merundingkan aspirasi dan bernegosiasi dalam sebuah forum demokratis diikuti rasa tanggungjawab moral dan kesetaraan. Isu, persoalan, opini, dan masalah yang dihadapi didiskusikan secara transparan, termasuk wujud partisipasi dalam bentuk bantuan fasilitas, finansial dan lain-lain juga dimungkinkan dalam forum ini.

Ruang publik sebagai ajang produksi dan sirkulasi diskursus maupun bertukar pengalaman, ide dan gagasan. Ruang publik juga merupakan arena mediasi semua sesama elemen masyarakat atau kepada pemerintah (negara). Dengan kondisi demikian, maka mendorong desa/pekon maupun kabupaten menjadi ruang publik yang sesungguhnya melalui sebuah kanal ruang publik, yaitu pada forum musyawarah pembangunan (musrenbang) dalam semua level dan mekanismenya, khususnya mengenai rancang-bangun program desa/pekon dan kabupaten ramah anak. Tentu saja hal ini berkesesuaian dengan konsep desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal asal-usul yang bersifat istimewa. Dalam hal ini desa dipandang sebagai kumpulan komunitas dengan segala keberagaman entitasnya; dan paralel juga dengan konsep pekon yang dikenal di tatar masyarakat Lampung Selatan. Desa adalah *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri berarti desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat (Widjaja, 2003).

Sedangkan pemerintahan desa (lembaga dan aparaturnya) merupakan lembaga perpanjangan dan representasi pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Jadi, pemerintahan desa bisa dimaknai sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran berkenaan dengan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003). Pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawaarganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan.

Hasil studi terhadap desa-desa di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan kapital sosial masyarakat desa telah bekerja pada dimensi proteksi, hak dasar dan tumbuh-kembang anak-anak mereka dalam kehidupan keseharian. Namun, tentu saja hal demikian belumlah cukup, karena begitu beragamnya (multi-dimensi) persoalan, masalah, kebutuhan dan hak anak yang wajib diperjuangkan untuk dipenuhi. Karenanya, kapital sosial yang sudah berjalan pada lingkungan keluarga masih perlu diseleksi (*bonding social capital*), perlu dikembangkan media yang mampu menjembatani dengan lembaga masyarakat dan antar lembaga masyarakat (*bridging bonding social capital*) dan ending-nya adalah institusionalisasi dalam sebuah ruang publik melalui musrenbang. Institusionalisasi merupakan proses pelembagaan (formalisasi dan pengakuan) kapital sosial yang terseleksi, baik itu norma, nilai, budaya, prinsip, kepercayaan maupun lembaga kemasyarakatan yang ada yang diintodisir dan diintegrasikan dengan rana penyelenggaraan administrasi publik, khususnya dalam semua tata kelola pemerintahan menjalankan fungsinya sebagai *public service official*, *development agent*, *regulatory* dan *law enforcement*. Lugasnya adalah internalisasi *bonding social capital* dan *bridging bonding social capital* kedalam praktek-praktek administrasi publik.

Pada konteks program ramah anak menghendaki terkondisinya lingkungan protektif terhadap anak, memberikan fasilitas yang aman untuk tumbuh-kembang anak, lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak untuk mengeksplor diri dan lingkungan, bermain dan belajar; lingkungan yang memberikan dukungan dan memfasilitasi kebutuhan dan hak dasar anak (IULA & UNICEF, 2001). Pekon merupakan desa, tentu saja sebagai lingkungan administratif terdekat bagi anak yang membutuhkan topangan komunitas yang kuat perhatian dan fokus terhadap hak dasar dan persoalan anak. Pada sisi inilah merupakan poin penting makna keterlibatan multi-stakeholders dalam mendukung program pekon/desa ramah anak.

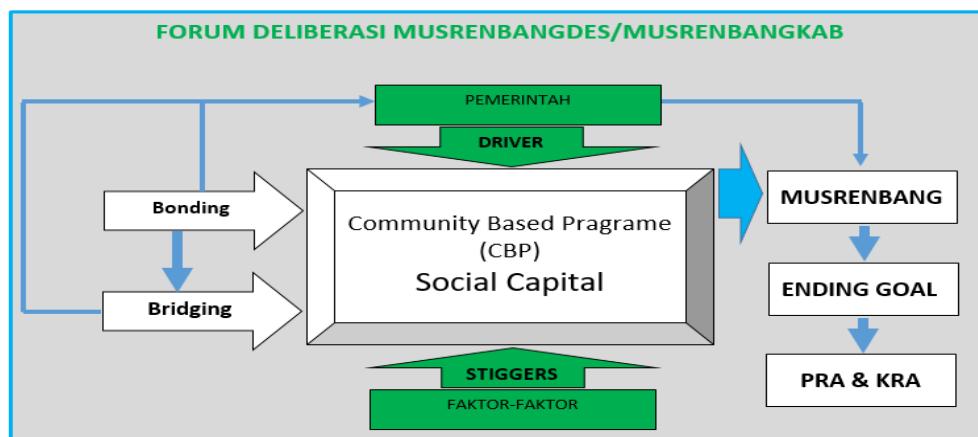
Manifestasi dan wujud konkret adanya internalisasi *bonding social capital* dan *bridging bonding social capital* kedalam praktek-praktek administrasi publik merupakan suatu kebutuhan bersama (multi-stakeholders)—sesuatu yang tak dapat dinamikkan. Itulah tampilan wajah baru dari ruang publik dan tahapan awalnya harus dimulai dari level pekon sebagai struktur pemerintahan terkecil melalui jalur musrenbangdes.

Idealnya dengan musrenbangdes akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa dimana pemetaan potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa, serta daftar inventarisasi masalah (DIM) dapat dilakukan bersama. Diskusi, share pengalaman, tukar pengetahuan dan gagasan akan memperkaya warna dan semakin komprehensifnya telaah tentang program desa. Karenanya, musrenbangdes merupakan forum dan media pembelajaran stakeholders semua elemen *governance*

menjadi sangat urgen dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan desa (Duadji & Tresiana, 2016). Forum publik seperti ini diyakini akan mampu memperbaiki situasi faktual yang kerap terjadi yang mana forum musrenbangdes selama ini belum mampu memproduksi kebijakan/program pembangunan yang unggul (Tresiana & Duadji, 2016). Musrenbangdes masih berjalan secara formalistik dan dijalankan secara elitis. Kondisi demikian mengisyaratkan isu hak anak menjadi pembahasan yang belum banyak dibicarakan dalam forum, atau mungkin tidak pernah disinggung sama sekali. Dialog dalam forum masih didominasi oleh peran pemerintah desa yang bersifat elit, alih-alih melibatkan masyarakat luas dan pihak swasta dari awal. Tentunya hal ini menjadi sesuatu kekurangan yang serius dan inheren dalam musrenbangdes sebagai manifestasi ruang publik. Hal ini menciptakan kecenderungan bias interpretasi elit dalam menuangkan program yang berkaitan dengan hak anak. Padahal bila masyarakat, termasuk sektor privat mulai memiliki rasa kepercayaan terhadap suatu kebijakan publik maupun program mereka akan turut ambil bagian bila merasa dilibatkan dalam proses persiapan, perencanaan, sampai pelaksanaan (Conyers, 1994). Hal ini yang semestinya diupayakan terjadi pada musrenbangdes di Kabupaten Lampung Selatan, termasuk dalam pembahasan isu hak anak: (a) Pemenuhan hak sipil Anak; (b) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (c) Kesehatan dan Kesejahteraan; (d) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan (e) Perlindungan Khusus. Kelima klaster hak anak ini mejadi parameter penting bagi terwujudnya pekon dan kabupaten ramah/layak anak.

Sebagai penutup bab ini, maka disajikan rumusan model driver-striggers melalui bridging bonding social capital dalam musrenbangdes/kab seperti pada gambar berikut.

Gambar 6. Model Driver-Striggers melalui mekanisme Bridging Bonding Social Capital dalam Musrenbangdes/kab Ramah Anak



Sumber: Diolah dari hasil FGD, Duadji & Tresiana, 2020

C.6. Kesimpulan

Lensa kapital sosial merupakan dimensi lama administrasi publik yang terlupakan di era sekarang ini. Lensa kapital sosial bagian dari ekologi atau lingkungan administrasi publik. Dekade tahun 1970 sampai dengan 1980-an, banyak program pembangunan dari lembaga-lembaga internasional yang diberikan kepada negara berkembang, dan walhasil banyak diantara program itu yang sulit diimplementasikan, bahkan menemui kegagalan total. Beranjak dari hal ini, maka banyak kajian administrasi publik yang mengkaitkan dirinya dengan ekologi (lingkungan sosial kemasyarakatan) lintas negara. Diperoleh *blue print* tentang kegagalan program pembangunan di negara berkembang yang diberikan lembaga donor yang mendorong lahirnya SALA Model tentang masyarakat prismatic. Pola-pola administrasi publik di negara maju (industri) tidak sertamerta langsung dapat diterapkan dan sekaligus merupakan obat mujarab bagi negara berkembang. Perlu adaptasi, inovasi dan kreasi administrasi publik untuk lebih adaptif dengan kondisi baru pada wilayah lain yang berbeda. Artinya pada sisi konteks dan konten, praktek-praktek administrasi tidak lepas dari nilai dan kultur masyarakat bangsa suatu negara—sebut saja kajian *policy value* dalam sebuah proses pengambilan dan penetapan keputusan. Tatanan struktur dan gaya kepemimpinan administrasi publik berbeda antara suatu wilayah satu dengan daerah atau negara lain. Sehingga wajar dan benar jikalau administrasi publik itu disebut sebagai sebuah kajian multi disiplin dan bidang keilmuan terapan yang terikat oleh budaya (*culture bound*). Dari sini pula banyak lahir konsep dan bidang keilmuan baru dari administrasi publik itu, ada *comparative public administration*, administrasi pembangunan, ekologi administrasi publik, bahkan akhir-akhir ini ada konsep tentang *society public administration*. Keberagaman dimensi pandang ini menyebabkan khasanah administrasi publik menjadi dinamis, menarik, meluas dan terus

berkembang kearah yang lebih kompleks; termasuk lahirnya gagasan *democratic public administration*, *democratic policy*, governansi dan masih banyak paradigma dan perspektif lain yang sesungguhnya diinspirasi oleh kajian lensa kapital sosial ini; bahkan good governance sesungguhnya merupakan hasil interpretasi jejaring dan kolaborasi antara pemerintah dengan rakyatnya.

Keragaman potensi kapital sosial merupakan anugerah yang luasbiasa. Potensi ini masih perlu diseleksi dan ditrasformasikan menjadi energi pengikat yang disebut dengan *bounding social capital* (kapital sosial yang menjadi pengikat/perekat interaksi agar memperoleh *mutual benefit* masing-masing anggota dalam internal kelompoknya. Untuk menggerakkan terjadinya *networking* dan *linking* antar kelompok, maka diperlukan *bridging bounding social capital*. Perubahan lebih besar lagi akan terjadi jika proses ini masuk kedalam ranah publik melalui Musrebangdes/kab, sehingga suatu saat reposisi administrasi publik kearah lensa kapital sosial semakin meluas hingga terjadinya deliberasi masif pada semua arena (administrasi) publik.

...

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas.

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal

Luaran Wajib

No	Luaran yang Direncanakan (Proposal) Wajib	Capaian	Keterangan
1	Publikasi jurnal internasional	Judul artikel: Profile Analysis of Child Marriage and Related Public Policies in Indonesia. Nama Jurnal yang dituju: Public Policy and Administration ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603. Tim peneliti juga menyiapkan 1 artikel tambahan dari hasil riset yang sama dengan judul: Democratic Governance: Identification and Internalization of Social Capital in the Child Friendly Village Program in South Lampung Regency. Jurnal yang dituju "journal of asian and african studies". Penulisan naskah baik dari sisi konteks maupun kontens mendapatkan masukan dari FGD dan mendapatkan pendampingan dari tim ahli yang disiapkan Unila. Proofreading menggunakan jasa professional.	Naskah artikel sudah di-submit ke Public policy and Administration: Research Journal. Status Waiting Assignment. Bukti terlampir. Naskah/artikel untuk journal of asian and african studies sudah di-submit dan sedang direview. Bukti: karena kapasitas simlitabmas terbatas dlm menyimpan dokumen, maka bukti hanya cuplikan yg dimix dg bukti artikel pertama.

Luaran Tambahan

No	Luaran yang Direncanakan (Proposal) Tambahan	Capaian	Keterangan
1	Buku Hasil Penelitian (Buku Referensi)	Draft Buku Referensi, dengan judul "Judul buku: LENZA KAPITAL SOSIAL DAN REPOSISI	Dalam proses editing pihak penerbit, mengusulkan

		ADMINISTRASI PUBLIK: Membangun <i>Bridging Social Capital</i> Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Melalui Desa Ramah Anak". Penulis Dr. Noverman Duadji, M.Si & Dr, Novita Tresiana, M.Si. Naskah akhir sudah ditelaah dalam FGD dan telaah peer group. Sudah diserahkan ke penerbit, dikoreksi & sudah ada kontrak.	kelengkapan legalitas untuk mendapatkan ISBN. Catatan: draft buku & bukti terlampir.
2	Desain (model) (Sudah selesai)	Nama desain: Buku Rancangan Pekon Ramah Anak (PRA). Pemegang desain: Dr. Noverman Duadji dan Dr. Novita Tresiana. Link video dokumentasi ujicoba/simulasi desain: https://youtu.be/iKZbLj6pUmo Penyusunan desain dengan melalui pendampingan, FGD & telaah peer group. Desain yang sudah jadi akan segera didaftarkan untuk mendapatkan HAKI.	Kami sudah mengunggah: a) Deskripsi dan spesifikasi desain; b) Dokumen hasil uji coba/simulasi terakhir desain; dan c) Dokumentasi (foto) uji coba/simulasi terakhir desain
3	Keikutsertaan dalam Seminar Nasional (Terdaftar)	Naskah artikel sudah disiapkan dengan judul: Child-Friendly And Disaster Response Village Policies (Study in South Lampung Regency Indonesia).Penulis: Noverman Duadji & Novita Tresiana. Lembaga penyelenggara LIPI → The First International Conference on Government Education Management and Tourism (ICoGEMT) 2021. Conference Day: Saturday, January 9th, 2021 Pada bulan november 2020 (yang lalu) juga mengikuti kegiatan ULICoSS (Universitas Lampung International Conference on Social Sciences 2020. Judul artikel: Democratic Governance: Identification and Internalization of Social Capital in the Child Friendly Village Program in South Lampung Regency. Disampaikan oleh: Dr. Noverman Duadji, M.Si & Dr, Novita Tresiana, M.Si	Dalam proses persiapan pelaksanaan. Bukti submit terlampir

...

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas.

Riset yang dilakukan berupa riset dasar dan eksplor atau penjajagan untuk merumuskan konsep dan desain (pemodelan). Hasil temuan riset dasar baru dapat diaplikasikan jika sudah ditemukan prinsip-

prinsip dasar atau model tertentu yang akan diuji cobakan. Oleh karenanya, secara formal belum ada kontrak kerjasama (MOU) secara langsung dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Realisasi kerjasama (MOU) baru dapat tindaklanjuti setelah tahapan riset dasar ini terselesaikan. Namun demikian, kontribusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan adalah memberikan izin, pendampingan, data dan terlibat dalam FGD.

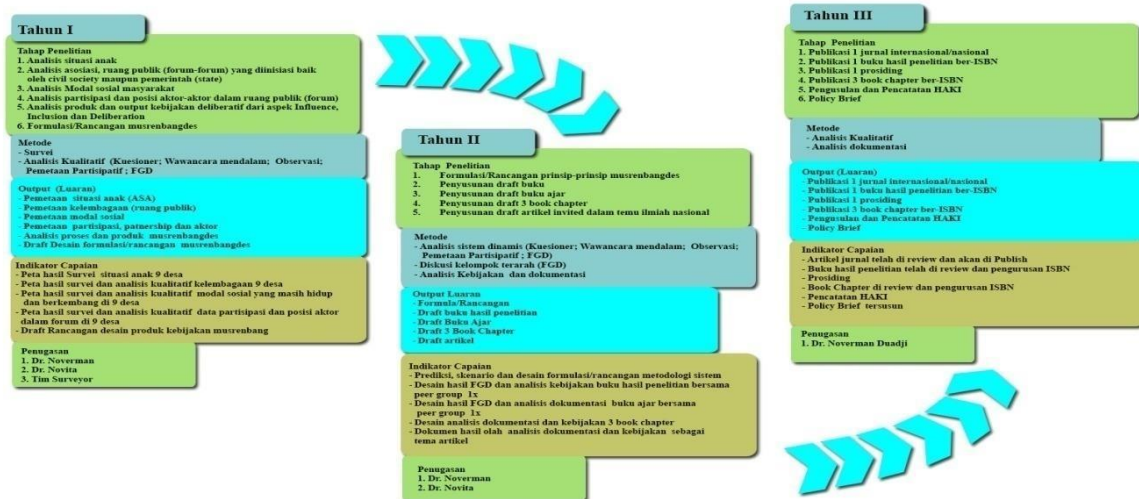
F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan riset tahun 2020 ini. Pertama, akibat adanya pandemi covid-19 kontrak dan pembiayaan tertunda, demikian juga dengan topik disesuaikan dengan refocusing pandemi covid-19. Kegiatan terkait persiapan dan pelaksanaan teknis turun lapang juga mengalami keterlambatan dan penyesuaian-penyesuaian. Kedua, telaah dan kajian hasil riset dan output riset juga perlu menyesuaikan protokoler penanganan covid-19 sehingga interaksi FGD, meeting peer group serta aktivitas pendampingan juga terkendala dan mengalami hambatan.

Kendati hambatan terjadi, tetapi hasil evaluasi tim terhadap progress report pelaksanaan riset dan pengkajian output riset, kemajuan yang dicapai sudah 100%. Artinya laporan dan output riset dapat diwujudkan (direalisasikan).

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Rencana Penelitian Selanjutnya



Gambar 4.2 Diagram Alir Penelitian

Penelitian tahun kedua (2020), penyusunan formulasi/rancangan tata kelola dan penguatan kapasitas *musrenbangdes*, penyusunan Draft buku hasil penelitian, Draft Buku Ajar, Draft artikel sebagai *invited* dalam temu ilmiah nasional. Metode analisis system dinamis digunakan untuk menyusun rancangan, metode analisis kebijakan dan dokumentasi dalam penyusunan artikel jurnal internasional, artikel *invited* dalam temu ilmiah nasional, Dokumen buku, Dokumen buku ajar.

Penelitian tahun ketiga (2021), publikasi 1 jurnal internasional bereputasi sudah terbit bahkan setidaknya ada 2 jurnal internasional, 1 buku hasil penelitian ber-ISBN sudah terbit, konferen sudah terselenggara dengan 1 prosiding terbit, HAKI sudah terdaftar dan *Policy Brief juga sudah dicetak dan memperoleh HAKI*.

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. BPS Lampung Selatan. 2016. Lampung Selatan Dalam Angka.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. 2019. Laporan Tahunan
3. Puslit Wanita, Anak dan Pembangunan LP2M Unila. 2019. Buku Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung . Universitas Lampung
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, 2019
5. Hanifan, L. J. 1916. "The Rural School Community Center", *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 67: 130-138.
6. Bourdieu, Pierre. (1986) "The Forms of Capital", dalam J. Richardson, ed. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood Press.
7. Coleman, J. S. 2009. Social capital in the creation of human capital. In *Knowledge and Social Capital*. <https://doi.org/10.1086/228943>
8. Putnam, Robert dengan Robert Leonardi dan Rafaella Nanetti (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
9. Duadji, Noverman. 2012. Administrasi Pembangunan. Bandar Lampung: Universitas Lampung
10. Gaventa, J. & Vaidya, C. (2001). Participation, Citizenship and Local Government: Background note prepared for workshop on Strengthening participation in local governance. Institute of Development Studies.
11. Maltz, Maxwell. 2004. Psycho-Cybernetics Mutakhir
12. Shrestha, R. K., Cameron, D. C., Coutts, J., & Cavaye, J. 2015. Building and Maintenance of Social Capital in Rural Farming Community of the Western Hills of Nepal. *International Journal of Asian Business and Information Management*. <https://doi.org/10.4018/ijabim.2015070103>
13. Kartodirjo, S. 1987. Gotong Royong: Saling Menolong dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia. In J. C. Nat & U. Kayam (Eds.), *Pengantar Ilmu Antropologi*. Yayasan Obor Indonesia.
14. Triana, Rochayati Wahyuni. 2010 . Global Warning: Quo Vadis Ilmu Administrasi Negara dalam Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto. Rivitalisasi Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu. Tahun 2010.
15. Widjaja, H. A. . 2003. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada.
16. IULA, & UNICEF. 2001. *Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities*. UNICEF Innocenti Research Centre.
17. Tresiana, N., & Duadji, N. 2016. Kegagalan pemaknaan "Lembaga Musawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa" dalam mewujudkan deepening democracy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*. <https://doi.org/10.20473/mkp.v29i42016.191-203>
18. Conyers, D. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Gadjah Mada University Press.

Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional

Target: accepted/published

Dicapai: Sedang direview

Dokumen wajib diunggah:

1. Bukti sedang direview
2. Naskah artikel

Dokumen sudah diunggah:

1. Bukti sedang direview
2. Naskah artikel

Dokumen belum diunggah:

- Sudah lengkap

Nama jurnal: public policy and administration dan journal of asian and african studies

Peran penulis: first author | EISSN: ISSN online 2029-2872

Nama Lembaga Pengindek: Scopus

URL jurnal: <https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/login?source=%2Fajs%2Fpublic-policy-and-administration%2Fauthor>
dan <https://journals.sagepub.com/home/jas>

Judul artikel: Profile Analysis of Child Marriage and Related Public Policies in Indonesia; dan Democratic Governance: Identification and Internalization of Social Capital in the Child Friendly Village Program in South Lampung Regency

Penelitian Kompetitif Nasional Skim Penelitian Dasar dengan judul “Pekon Tanggap Covid-19: Membangun Bridging Sosial Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Lampung Selatan” dengan tim peneliti Dr. Noverman Duadji, M.Si dan Dr. Novita Tresiana, M.Si, untuk pelaksanaan tahun ke 2 (2020) menghasilkan 2 artikel Publikasi jurnal internasional dengan judul masing-masing artikel:

1. Profile Analysis of Child Marriage and Related Public Policies in Indonesia. Author: Noverman Duadji, Novita Tresiana, Rialdi Azhar. Disubmit pada **Journal: Public Policy and Administration**. (Artikel & bukti terlampir).
2. Democratic Governance: Identification and Internalization of Social Capital in the Child Friendly Village Program in South Lampung Regency, Author: Noverman Duadji, Novita Tresiana. Disubmit pada **Journal of Asian and African Studies** (Artikel & bukti terlampir).

ARTIKEL 1

Profile Analysis of Child Marriage and Related Public Policies in Indonesia

Noverman Duadji^{1*}, Novita Tresiana¹, Rialdi Azhar²

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas Lampung

Department of Accounting, Faculty of Economic and Business, Universitas Lampung

*Email: noverman.duadji@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

Child marriage could be one social issue that occurs more often in emerging countries, particularly Indonesia, and it definitely needs an attention from government to control its growth, as it can be potentially be a serious problem that symmetrically affects the economy if its number keeps increasing. The aim of this study is to apply profile analysis approach to measure a significant difference and to understand the characteristic of child marriage in each provinces in Indonesia, which is divided into 4 regions based on the main development area over 4 years from 2016 to 2019. The finding suggest that from parallel hypothetical test, profile from each region is not parallel, so profile of child marriage in each region has their unique characteristic. Therefore, appropriate policies should be introduced separately for each region, such as the enhancement of education quality, social assistance and protection programs for children, social participation model, and collaborative governance-based city/village program.

Keywords. Profile Analysis, Child Marriage, Multivariate of Variance, Policy

INTRODUCTION

Child marriage is a social problem that still occurs in Indonesia today. Even, It occurs at the intersection of two hierarchies: sex and age. Women are always in the position of the least power, and at the worst without power and generally have to surrender to men. In contrast, in the age hierarchy as teenagers, they must obey their parents and family members or older members of society (Grijns and Horii, 2018). Vogelstein (2013) states that cases of child marriage also indicate one of the slowdowns in economic growth in a region. Child marriage has an impact on low levels of education, and the long-

term impact is a risk to children's health, especially women who are threatened (Jensen and Thornton 2003). Meanwhile, Arthur et al. (2017) in their empirical research stated that the high rate of child marriage in many countries shows that there are various views on the definition of childhood, and the cases of girls who are forced to marry underage are much higher than boys.

Unicef Data (2020) reports that several factors that are closely related to the practice of child marriage include economic, culture, health, education, social protection and employment factors. Several of these factors simultaneously act as a driving force and protection for preventing the practice of child marriage, as long as it is used with the right approach.

This research was conducted by mapping child marriage through profile analysis based on the main region of development planning areas in Indonesia. Main regional development is one of the ways for the government to achieve successful development implementation. Based on the Ministry of National Development Planning (2018), main regional development will be aimed at growth and equitable development.

The analysis profile based on the division of this area aims to identify the characteristics of child marriage in each development planning area, so that policy recommendations are more specific in each region. In addition, statistical analysis for mapping characteristic profiles with multiple groups can apply multivariate or MANOVA analysis of variance (Huberty and Olenjnik, 2005; Johnson and Wichern, 2002; Morrison, 1976; Timm, 2002). Da Silva et al. (2015) used MANOVA to be able to analyse the characteristics of two groups, namely the millennial generation and the X generation. She found that the personalities between the two groups in each group of students differed significantly. Furthermore, Lowe et al. (2003) found that there was a significant difference between profile variations for performance on memory tests across the sexes, and in particular, he revealed relative strengths for women on verbal tasks and men on spatial tasks.

METHOD AND PROCEDURES

To form profile analysis, we apply some procedures before identifying any possible similarities within the treatment effects. Some assumptions should be satisfied before conducting profile analysis. First, Box (1949) was introduced Box's M test to check the homogeneity assumption of variance-covariance matrixes. The null hypothesis is being rejected if the data from all groups have common variance-covariance matrix, called as heterogeneous. The null hypothesis is as follows.

$$H_0 = \Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma_3 = 0$$

The next is to check the data distribution, of which the multivariate data should be distributed normally for each group, by checking Shaprio-Wilks for univariate normality and Mardia's skewness and kurtosis for multivariate normality. The null hypothesis is given as follows.

$$H_0 = \epsilon \sim N_4(0, \Sigma)$$

Given the assumption of compound symmetry is not met, the repeated measurement of multivariate analysis of variance (Manova) is then applied (Timm, 1975). It is naturally chosen as it is the most appropriate to design the sort of complete random data across times and multiple dependent variables (Tabacknick and Fidel, 2007). In this study we assume E_{abc} , $a=1,2,\dots,r$; $b=1,2,\dots,p_i$; $c=1,2,\dots,y$, as the response in a repeated measurement. Where a is the main development regions in Indonesia; b is number of provinces included in each region; c is dependent variable of year; r is four main development regions; p_i = total number of provinces in b -th region; and $y = 4$ year-groups.

Provided subject in the a -th region and b -th province, and y -th year-group and its mean response are:

$$E_{abc} = [e_{ab1}, e_{ab2}, \dots, e_{aby}] \quad (1)$$

Equation (1) implies the response vector for the b -th province within the a -th region, and

$$\bar{E}_{abc} = [\bar{e}_{a1}, \bar{e}_{a2}, \dots, \bar{e}_{ay}] \quad (2)$$

Equation (2) implies the mean response vector for the a -th region group. Anderson (2017) argued that profile analysis provides tests have more specific hypothesis than the standard hypothesis of:

$$H_0 = \mu_1 = \mu_2 = \mu_g$$

This is because it can be developed by considering $c \times I$ mean vector as profiles for each group. Hence, Usman (2013) stated that to have more understanding in profile analysis it needs to construct some hypothetical tests with the condition of accepted hypothesis from previous one before conducting another one. Sabbag (2019) specified three main basic questions that should be arisen for profile analysis in groups, which are:

1. Are the groups parallel?
2. Are the groups coincidental?
3. Are the groups horizontal?

Should any of these questions have a no answer, there would be a significant effect. Therefore, we can develop three hypothesis from those questions as follows.

- H_{01} = The r region profile is in parallel form;

Parallel is to form each profile to have significant similarities among groups, and it is considered as the main test in profile analysis. The subtraction of segment matrix from the group mean for each individual results the within-group variance, while the subtraction of each group mean segment matrix from the grand mean segment matrix results the between groups variance. If the null hypothesis is not rejected then it can be through to second hypothesis.

- H_{02} = The profiles have equal level, with condition parallel profile;

It is simply mathematically by measuring the relative contributions of between-groups and within-groups to the sum of squared residuals. If the group levels are different significantly, so the coincident null hypothesis is rejected.

- H_{03} = The profiles experience flatness.

The horizontal null hypothesis is measured if the multiple segments in the profile are zero, hence the slop is zero and the profile is flat. If the line is not flat, any segment varies significantly from zero and within-group main effect.

Khattree and Naik (2005) argued in their empirical study that there are at least four multivariate tests that can be applied to test parallel, coincident, and horizontal profile, which are Wilks' Lambda, Pillai's Trace, Hotelling-Lawley Trace, and Roy's Greatest Root. We reject the null hypothesis if probability value of all tests are less than its alpha level of 5%, or if F statistics exceeds its critical value. If only if the first hypothesis is the region of rejection, then the last two hypothetical tests are not being conducted as they will be considered meaningless (Usman, 2013).

RESULTS AND DISCUSSION

Data Analysis and Results

Data of child marriage in Indonesia over the last 4 years is gathered from Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data is obtained from 34 provinces divided into 4 regions based on the main development area. Region A consists of 5 provinces including Aceh, North Sumatra, West Sumatra, Riau, and Kepulauan Riau; region B has 11 provinces, namely Jambi, South Sumatra, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, and West Kalimantan; region C includes 6 provinces of East Java, Bali, Central Kalimantan, North Kalimantan, East Kalimantan, and South Kalimantan; and region D consists of 12 provinces, which are West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, West Sulawesi, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, Central Sulawesi, Gorontalo, North Sulawesi, Maluku, North Maluku, Papua, and West Papua. The under-age-marriage population is divided into 4 groups of year-group, including year1 (2016), year2 (2017), year3 (2018), and year4 (2019).

With the assistance of SAS 9.4 software, first we conduct the test of MANOVA criteria to measure any differences among dependent variables, as shown on Table 1.

Table 1. MANOVA Test Criteria

Statistic	Value	F Value	Num DF	Den DF	Pr > F
Wilks' Lambda	0.24154796	4.25	12	71.727	<.0001
Pillai's Trace	0.91363424	3.17	12	87	0.0009

Statistic	Value	F Value	Num DF	Den DF	Pr > F
Hotelling-Lawley Trace	2.51056700	5.48	12	43.121	<.0001
Roy's Greatest Root	2.23774099	16.22	4	29	<.0001

Table 1 measures statistically that all 4 dependent variable in group have to reject the null hypothesis as having less than 0.05 probability value. In other words, it can be stated that there are one or more differences among the four mean vectors for the four groups.

Having the significant difference in mean vectors for all multivariate groups, the next procedure is to ensure homogeneity assumption. The discriminant procedure is shown on Table 2 as follows.

Table 2. Test Homogeneity of Within Covariance Matrix

Chi-Square	DF	Pr > ChiSq
30.932852	30	0.4187

Since the probability Chi-squared is 0.4187 which is more than the significant value of 5%, then it can be said that the Box's M test has common variance-covariance matrix for all groups, hence the assumption is not violated.

The next procedure that needs to be satisfied is normality test. Here Table 3 is the test of Shapiro-Wilks and Mardia Skewness as well as Mardia Kurtosis to see the normal distribution among the groups.

Table 3. Normality Test

Equation	Test Statistic	Value	Prob
r1	Shapiro-Wilk W	0.96	0.3082
r2	Shapiro-Wilk W	0.96	0.2077
r3	Shapiro-Wilk W	0.97	0.6108
r4	Shapiro-Wilk W	0.96	0.2372
System	Mardia Skewness	20.98	0.3981
	Mardia Kurtosis	-0.77	0.4399
	Henze-Zirkler T	0.64	0.8027

From Table 3, it can be indicated that for univariate normality test shown on the test statistic of Shapiro-Wilk W for equation r1 to r4 the data are normally distributed. In addition, for multivariate normality tests, indicated by Mardia Skewness and Kurtosis as well as Henze-Zirkler T test statistic, the data is being normally distributed. To confirm this statistic test, the multivariate normality can be assessed graphically. Figure 1 indicates that for each pair of residual vectors for bivariate normality test, they have a strong positive relationship, or if one residual vector increases, another residual vector will

increase. The further graphical measurement will look at the histogram of each vector of the residuals along with its corresponding QQ-plot. From Figure 2, it can be seen clearly that all four residual vectors have a normal distribution and they have a strong correlation in normal quantiles.

Figure 1. Scatter Plots for Pairs of Residual Vector

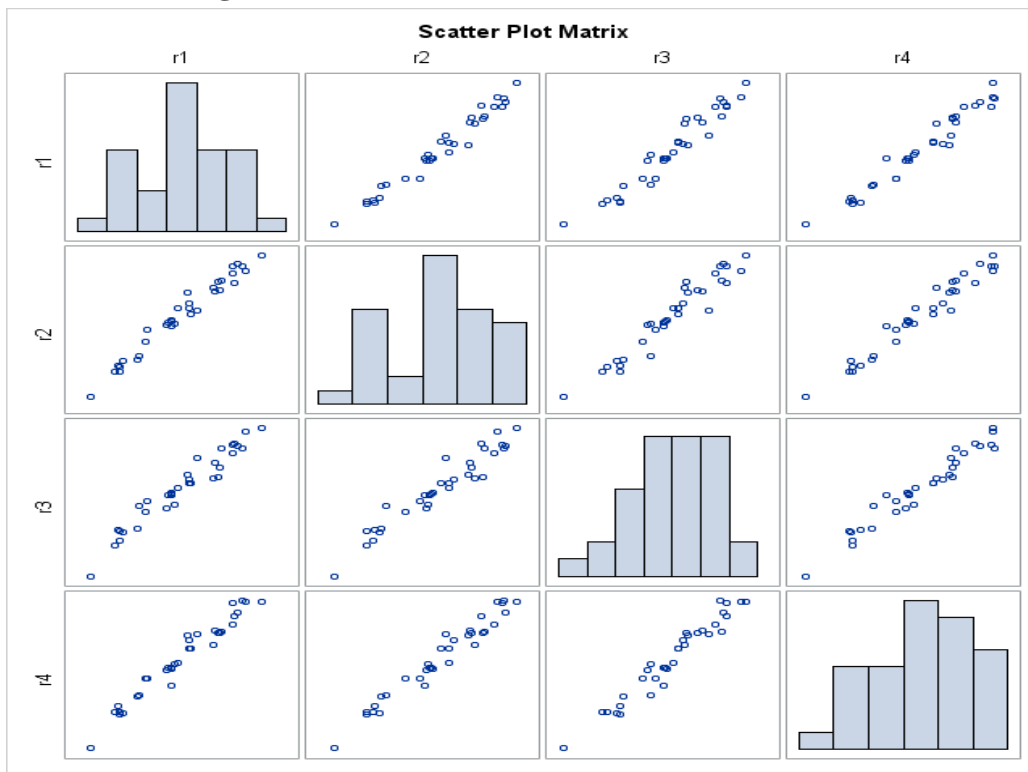
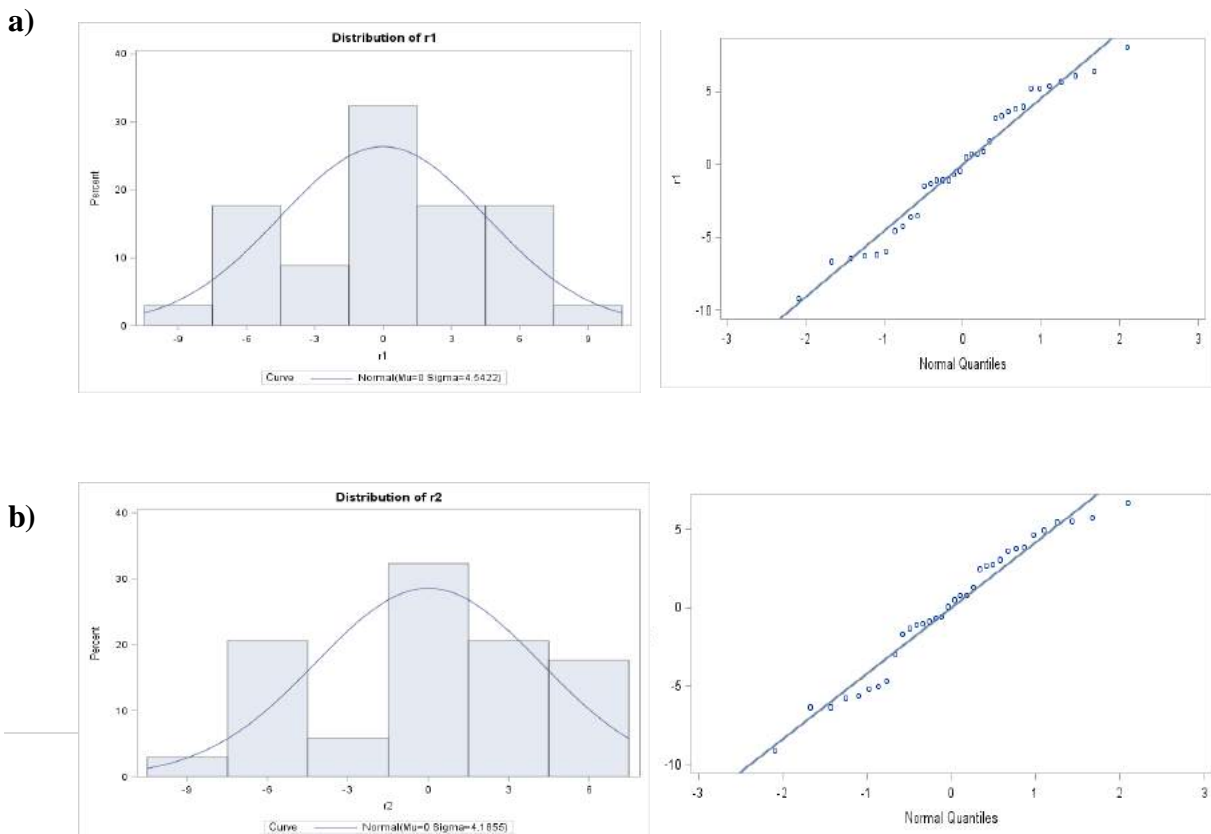


Figure 2. a) Distribution Histogram and Probability Plot for r1; b) Distribution Histogram and Probability Plot for r2; c) Distribution Histogram and Probability Plot for r3; d) Distribution Histogram and Probability Plot for r4



c)

d)

Furthermore, once the assumptions have been satisfied, we can then test overall treatment effect. The output of MANOVA test criteria on Table 1 can be used to test the null hypothesis of $H_0 = \mu_1 = \mu_2 = \mu_g$, and it refers to rejection, thus it indicates that there is at least one of the four regions has a significant impact on early marriage.

After some procedural test in conducting MANOVA assessment, to understand more regarding the profile analysis the first question needs to be answered, whether the within-groups are parallel or not. Table 4 informs that all four statistic measurement test have significant value of less than 0.05, making we reject the null hypothesis and conclude that the profiles of early marriage has no parallel profile within the groups of year-regions. Figure 3 support the statistic result as the plots for profile of early marriage groups in 4 years for 4 regions are not parallel.

Table 4. Parallel Profile Test

Statistic	Value	F Value	Num DF	Den DF	Pr > F
Wilks' Lambda	0.28688953	5.09	9	68.295	<.0001
Pillai's Trace	0.76752225	3.44	9	90	0.0011

Statistic	Value	F Value	Num DF	Den DF	Pr > F
Hotelling-Lawley Trace	2.29601400	6.97	9	40.933	<.0001
Roy's Greatest Root	2.21021718	22.10	3	30	<.0001

NOTE: F Statistic for Roy's Greatest Root is an upper bound.

Figure 3. Region Groups Profile for Marriage Rate Profiles



From Figure 3, it shows that region B shown on Red line has the highest mean rate of early marriage over the years, while region A (shown on green line) has the lowest mean value during the observation time. Meanwhile, region B and C are at second and third in mean rate respectively.

Discussion

The results of data processing in general show that each region has a significant difference or each has different characteristics. The difference in these characteristics indicates the need for specific treatment policy proposals for each region. Figure 3 reveals that the average order of child marriage cases according to the division of main development program with the highest cases in region C, followed by region B, region D and lastly region A. The trend of cases in each region seems to be unique. Regional C has a fluctuated trend over the years. Meanwhile, regional B and regional D converges only at the second year, however they go as initial year of data for the rest of years. Furthermore, the trend in regional A shows that the cases that occur every year have an average value that is relatively the same as the highest number of child marriage cases.

The presumption of the root of the problem is first used before proposing policies for handling child marriage cases as Akoglu et al. (2015) argued that mapping with suspicion will provide anomaly of

accuracy in the analysis results. In region C, the alleged root of the problem for the high number of child marriages is due to low access to education services, in particular educational services that support knowledge of sexual and reproductive health. It is because the coverage of quality education services is also crucial in the child-age years. The alleged root problem in regional B is high poverty rates. The proposed policy solution for region B is to increase the capacity of primary caregivers for children, and is also important in efforts to strengthen the child welfare system, for example social assistance and protection programs. The impact of child marriage will not only be experienced by children who are married off, but will also have an impact on children born and have the potential to create intergenerational poverty.

Furthermore, for Regional D it is likely that the root of the problem that occurs is a low level of health awareness. The proposed recommendation is probably to implement a social participation model (Duadji and Tresiana, 2018a) for all level of ages through community forums to strengthen the awareness of health in order to prevent the child marriage in the future. Lastly, in region A, the number of cases tends to average every year, strengthening the policy of the laws and regulations is highly recommended. As Duadji and Tresiana (2018b) empirical study, the collaborative governance-based city program can be applied as the proper policies from each district government might be developed holistically, interactively and has a sustained character.

In general, the policy proposals for each region on child marriage in Indonesia are the policy implementation of Law No. 16/2019 concerning amendments to Law No. 1/1974 concerning increasing the minimum age of marriage for women from 16 years to 19 years. Furthermore, the role of parents and community is regulated in the Child Protection Act Law No. 35 of 2014 which stipulates that parents and community are obliged to prevent child marriage. Finally, good implementation and planning of child marriage prevention policies will increase children's productivity for their future lives.

CONCLUSION

Child marriage has been a major issue in the world, including in Indonesia. As developing country, Indonesia finds this issue as one of priorities to be solved the most because it can have impact on the economic growth. Indonesian government has determined the 4 main regions of development planning to solve not only the economy but also the social welfare. This study is to classify and analyse the characteristic profiles of each regions for their respective number of child marriage by implementing profile analysis approach. The results found that each region has a significant difference for child marriage, as from parallel hypothetical test they are not parallel.

Therefore, different policies are recommended for different regions as each has their root problems that need a special treatment. Region C, as the highest mean of child marriage, enhancing in the quality

services on education is needed the most. Next, Region B is proposed to have social assistance and protection programs for children, while Region C is recommended to have social participation model to increase the health awareness, particularly reproduction health. The last region of D is suggested to have the collaborative governance-based city program to strengthen communities' knowledge of health (reproduction health) regulations.

REFERENCES

- Akoglu, Leman., Tong, Hanghang., and Koutra, Danai. 2015. *Graph based anomaly detection and description: a survey*.
- Anderson, T.W. 1984. *An Introduction to Multivariate Statistical Analysis*. 2nd Edn. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Arthur, Megan., Earle, Alison., Raub, Amy., Vincent, Ilona., Atabay, Efe., Latz, Isabel., Kranz, Gabriella., Nandi, Arijit., and Heymann, Jody. Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities. *Journal of Women, Politics and Policy*. <http://dx.doi.org/10.1080/1554477X.2017.1375786>.
- Box, G.E.P. 1949. A general distribution theory for a class of likelihood criteria. *Biometrika*, 36(3-4), 317-346.
- Da Silva, Rodrigo C., Dutra, Joel., Veloso, Elza F.R., and Trevisan, Leonardo N. 2015. Generational perceptions and its influences on organizational commitment. *Management Research*, 13(1), 5-30.
- Duadji, Noverman., and Tresiana, Novita. 2018a. A Participation model based on community forum as a reproductive health knowledge transaction space to increase male participation in vasectomy. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 31(1), 1-13.
- Duadji, Noverman., and Tresiana, Novita. 2018b. Kota layak anak berbasis collaborative governance. *Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1-22.
- Grinjs, Mies., and Horii, Hoko. 2018. Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 1-14.
- Huberty, C.J., and Olejnik, S. 2005. *Applied MANOVA and Discriminant Analysis*.
- Indonesian Government. 2019. Law No. 16 concerning amendments to Law No. 1/1974 concerning increasing the minimum age of marriage for women. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jensen, Robert., and Thornton, Rebecca. 2003. Early Female Marriage in the Developing World. *Gender and Development*, 11(2), 9-19. doi:10.1080/741954311.
- Johnson, R.A. and Wichern, D.W. 2002. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. 5th Edn. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Khattree, R. and Naik D.N. 2005. *Applied Multivariate Statistics with SAS Software*. 2nd ed. North Carolina: SAS Institute, Inc.
- Lowe, P.A., Mayfield, J.W., and Reynolds, C.R. 2003. Gender differences in memory test performance among children and adolescents. *Archives of Clinical Neuropsychology* 18(8), 865-878.
- Ministry of National Development Planning. 2018. *Indonesia Open Government Partnership National Action Plan 2018-2020*. Jakarta.
- Morrison, D.F. 1976. *Multivariate Statistical Methods*. 2nd Ed. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Sabbag, Anelise. G. 2019. Handbook of Educational Measurement and Psychometrics Using R. *The American Statistician*, 73(4), 415-416. DOI: 10.1080/00031305.2019.1676110.
- Tabacknick, B.G. and L.S. Fidell. 2007. *Using Multivariate Statistics*. 5th Edn. New Jersey: Prentice-Hall. Inc.
- Timm, N.H. 1975. *Multivariate Analysis with Application in Education and Psychology*. California: Brooks/Cole.
- Timm, N.H. 2002. *Applied Multivariate Analysis*. New York: Springer-Verlag.
-

- Unicef. 2020. Child marriage is a violation of human rights, but is all too common. Available at: <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/> (accessed at: 10 August 2020).
- Usman, Mustofa., Barusman, Yusuf S., Elfaki, Faiz A.M., and Daoud, Jamal I. 2013. Profile Analysis of Population Based on Age-Group in Sumatra. *Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Mathematical Applications in Engineering)*, 116-123. doi: 10.5829/idosi.mejsr.2013.13.mae.10003.
- Vogelstein, Rachel B. 2013. Ending Child Marriage. New York: Council on Foreign Relations. <http://www.cfr.org/children/ending-child-marriage/p30734> (Accessed at 10 August 2020).

ARTIKEL 2

Democratic Governance: Identification and Internalization of Social Capital in the Child Friendly Village Program in South Lampung Regency

Noverman Duadji^{1*}, Novita Tresiana²

^{1*,2} Public Administration Departement, Faculty of Social Sciencies and Politics, Lampung University

^{1*} noverman.duadji@fisip.unila.ac.id, ² novita.tresiana@fisip.unila.ac.id

Abstract

The research aims: (a) to identify the potential and binding of social capital of rural communities in South Lampung Regency; and (b) internalization and institutionalization of binding social capital into village and district program planning deliberations.

The method used is a qualitative method. Collecting data by observation, interviews and documentation. Data is presented in the form of narration, tables and figures. Analysis with categorization and interpretation of meaning with comparative concepts / theories. Then the formulation of new meanings and the formulation of the conceptual logic link.

It can be explained that the potential for social capital in South Lampung Regency is reflected in the diversity of ethnicities, cultures, values, norms and beliefs. There are 558 social organizations consisting of 66 NGOs, 120 Ormas, 7 Government-formed Institutions and 365 Customary Institutions. Participation patterns of community institutions: (a) political participation; (b) mass movement; (c) democratic participation in government; (d) community participation; (e) other forms of social participation such as fundraising, volunteering for disasters etc. The value of social capital contains the nature of cohesiveness and harmony, tolerance; mutual cooperation; kinship; ethnic and cultural attachments; social care; and obedience to character. The binder of social capital as a divergence guide to convergence is networks of civic engagements (Putnam, 2001) through bonding social capital: (a) the existence of a joint institution where they carry out social activities, gatherings, share, discuss, study centers and collaborations to solve various problems; (b) building communication, tolerance, togetherness and solidarity, encouraging and mutual trust.

The existence of triggers and drivers makes the boundaries of social capital work into the program/ development planning deliberations (DPDs or musren). Triggers include: (a) common goals of society for children's problems and problems; both in terms of responsibilities and benefits obtained by families, groups and institutions; (b) insight, knowledge and awareness with all stakeholders about the urgency of child-friendly village / pekon and district programs; and (c) the existence of a social disaster emergency as it is today 'the more widespread and massive the covid-19 pandemic. While the condition of the village community is still minimal, therefore there must be a driver for which the local government is the main mover. The community needs to get encouragement, guidance and government assistance to break down barriers and shackles of social capital value emptiness (Maltz, 2004). The government needs to launch an affirmative program (supporting and affirmative program) & a capacity building program for village officials and communities.

This research is an assessment to identify social capital and its binding as well as drivers and triggers as an instrument for the transformation of social capital into village and district program musren, especially the child-

friendly village program (PDRA) in South Lampung Regency. To make modeling more concrete, improvements and trials are still needed through further research.

The findings can be used to reposition public administration, particularly the placement of social values and capital into a forum for planning a child-friendly village program in South Lampung Regency and for comparison for other regions. The focus of this research study is the repositioning and reconstruction of social capital into the development of the dimensions of good & democratic governance, especially in the practice of musren (development planning deliberations).

Keywords: *Bridging and bounding; Social capital; Driver and striggers*

INTRODUCTION

Democracy, civil society and participation are a series of unified concepts. Three concepts are fairly old terms and are often pronounced by many parties. Democracy shows the meaning of recognizing and essentially glorifying the existence and sovereignty of the people in the life of the nation and state - according to the general meaning that attaches to democracy, namely 'from, by and for the benefit of the people' (Duadji & Tresiana, 2016). Civil society refers to the phenotype of a civil society order that is sweet, open and responsible; have freedom of association, assembly and voice their civil rights in the administration of governance (governance or public administration). Thus, the public space becomes open, the arena for discussion becomes intense and sharing of ideas, needs, experiences and options for solving problems will occur. This is an important point of community activeness, involvement and participation in public forums for the implementation of governance to solve public problems which are commonly known as participation as the basic value of democracy.

The word of democracy which is placed in democratic governance, the orientation of course is that the government order is for the people and becomes the people's arena; In democratic policy, inherent vision is that of policy for the people. Democracy gives special appreciation to the people and as an instrument to fight for the interests of the people. Conceptually, public administration has provided space for democracy and the development of public participation, at least as stated in the ideas of participatory management by Osborne and Gaebler in (Duadji, N; Tresiana, 2015) on 'reinventing governance'. There are 2 principles that intersect with public participation, namely: (a) society which emphasizes the important role of government in the dimension of empowering society rather than carrying out its serving function; and (b) the principle of 'decentralized government: from hierarchy to participation and teamwork' which shows the importance of participatory management. From the internal side of the organization, it is marked by the delegation of authority to the structure under it and the repositioning of the public apparatus as a working team unit, not a work instrument. Then from the external side, there is public participation (citizens) in the administration of public administration. Because of this, this research considers an impossibility, democracy without the effort to place the dimensions of social capital and community participation in the realm of democratic governance — something *conditio sine qua non*¹.

A general term that is very often encountered, instead of being democratic, it is far from fighting for the interests and hopes of the people. This is the practice of democracy in governance. Development services, policies and programs are distorted into maladministration that only benefits the rulers, cronies and certain groups; meanwhile most of the people are only spectators and even tend to be marginalized by the system, including what is being experienced by South Lampung Regency. Ironic portrait. Development policies and programs are increasing, both in terms of increasing funds and the types and variations thereof. However, poverty and community powerlessness have not been overcome. Evidence shows that of the 6.75 million inhabitants of Lampung Province 22.63% or 1.53 million people are categorized as poor so that this province is the second poorest in Sumatra Island. Although poverty reduction, empowerment and improvement of the quality of community life have been carried out through central, provincial and district / city government programs, however, there has been no significant change (Duadji, N; Tresiana, 2015).

What about the problem of children in South Lampung Regency? In general, the issues, problems and problems

¹ *Sine qua non* atau *conditio sine qua non* is an indispensable and essential act, condition, or element. This term was originally a Latin legal term for "[a condition] without which it is impossible", or "but for ..." or "without which there would be nothing". This pattern of consideration in criminal law is known as the *conditio sine qua non* theory, meaning that each effect can be determined for its causes and each cause has an influence on the occurrence of an effect.

that children often face are varied and complex, not only in South Lampung District, but Indonesia is even globalized (almost in all countries). This issue is of course a serious theme and is the responsibility of all parties. As one of the vulnerable groups, children tend to be powerless in facing all problems, both those coming from outside parties and those from the family environment; ranging from small things about bullying to high-risk issues - namely child labor, child trafficking, child sexual crimes, child prostitution, child neglect and other cases that very often accompany the lives of children in Indonesia. In general, child issues, problems and problems can be classified into several clusters: (1) child protection; and (2) fulfillment of children's civil rights; (3) fulfillment of children's development and development rights which include: (a) family environment and alternative care; (b) health and welfare; (c) education, use of leisure time and cultural activities; and (d) special child protection and services.

Children are often victims of neglect of the fulfillment of their basic rights or neglect due to divorce and parental conflicts. Intimidation and humiliation are considered commonplace and still occur frequently in schools, around 18% occur in girls and 24% occur in boys, and besides that boys also often face the risk of physical assault at school. Teachers also often use physical and emotional punishment to discipline children. Children tend to ignore this and lack the knowledge and skills to recognize and report violence and refer students to services to address problems they experience. Teenage girls tend to be more vulnerable to harmful traditional practices such as child marriage and female genital mutilation (FGM) than boys. One in nine girls is married before the age of 18, and girls from the poorest families are five times more likely to marry at a very early age than their richer peers. The rate of female genital mutilation (FGM) is still high, namely 52 percent. Child marriage, apart from violating children's rights by forcing them to drop out of school, also results in intergenerational poverty, undermines their long-term education, their ability to earn a living, and ironically can increase in number. On the legal side, violence against children has not been prohibited in all settings (rape in marriage is still permitted), and the justice system for children has not prioritized protection for all children who are in contact with the law. The government budget dedicated to protecting children from violence is less than 0.1 percent of the total budget. Complex public administration procedures and a lack of mandated powers for child protection make it difficult to provide effective services to vulnerable children. In addition, around 17% of children under 18 years of age do not have birth certificates, which makes it difficult for them to access main services. Whether we realize it or not, sad events that happen to children and keep repeating itself justify that the environment still perpetuates such attitudes and behaviors. This condition requires the initiation of social and behavioral changes as well as encouragement for changes in policies and programs related to children, including child-friendly village programs.

Regarding the urgency of democratic governance, especially with regard to child-friendly village programs in South Lampung Regency, the issues that will be discussed in this article are: (a) how is the picture and the binding of social capital for rural communities in South Lampung Regency; (b) how to internalize and institutionalize social capital ties into the musren for child-friendly village programs.

RESEARCH METHODOLOGY

The research method is a procedure guiding instrument for answering questions (problems) and achieving research objectives. In this regard, qualitative methods are used (Oevermann & Klein, 2006). Data collection was carried out by: (a) collecting evidence, data and information in the form of child-friendly village program documents that exist in the South Lampung Regency government, the Lampung provincial government and policy documents from the central government; (b) extracting information from several informants who are directly related to the child-friendly village program (PDRA). The data and information obtained are presented in the form of tables and verbal narrative (etics). Then the meaning is categorized and interpreted and compared with the concept and theory of rest as a comparison to find new meanings (as novelty). At the end of the analysis, a formulation of the findings of the FGD and peer group analysis is prepared.

RESULTS AND DISCUSSIONS

The fact shows that it is very difficult or even almost impossible for individual members of society to overcome various problems at hand. It takes a sense of togetherness and cooperation of all community members who have an interest in overcoming the problems at hand. This point is the starting point for the emergence of ideas and thoughts about the concept of social capital (Duadji & Tresiana, 2020; (Bourdieu, 2018). Social capital is one of

the main components in driving togetherness, mobility of ideas, mutual trust and mutual benefit to achieve mutual progress. Social capital is capital that places more emphasis on the capital owned by the community as a result of the social relationships that exist among all members of society.

The definition of social capital is determined by its function. Even though there are actually many functions of social capital, he said that basically all of them have two elements in common, namely: (1) social capital includes a number of aspects of the social structure, and (2) social capital makes it easy for people to do things within a structural framework. social. He emphasized two aspects of the social structure which are very important in facilitating the creation and development of social capital in various forms. First, the aspect of the social structure that creates a confinement in a social network that makes everyone relate to each other in such a way that obligations and sanctions can be imposed on everyone who is a member of the network. Second, there is a social organization that can be used to achieve common goals (Coleman, 2009). Furthermore, there are three main elements which are the pillars of social capital. First, obligations and expectations that arise from a sense of trust in the social environment. Second, the importance of a smooth flow of information in social structures to encourage the development of activities in society. The flow of information that is not smooth tends to cause people to be ignorant or hesitant so they do not dare to do something. Third, norms that must be adhered to with clear and effective sanctions. Without a set of norms that are agreed upon and obeyed by all members of the community, what emerges is a state of anomie.

As a research location, South Lampung Regency has quite diverse social capital potentials in rural communities (Duadji, Noverman; Tresiana, 2020), the important points are: First, from the institutional context there are 558 social institutions / organizations consisting of 66 NGOs, 120 Ormas, 7 institutions formed by local governments and 365 customary institutions with several variations. Second, when viewed from the point of view of the tendency of institutional values, then: (1) the value of NGOs and CBOs is more to social movements as issue makers and to carry out negotiations on interests with the government, but still dominated by the interests of the elite who form them; (2) the tendency of the value of institutions formed by regional governments to be social and economic movements as an instrument of government power that balances the existence of community institutions in the region; and (3) the tendency of the value of customary institutions to be a social movement characterized by the values of association and harmony, tolerance, mutual cooperation, kinship, certain ethnic and cultural ties, social concern and more emphasis on obedience to traditional leaders. The role played by customary institutions is still limited to the issue maker and negotiating the interests of the group with the government.

The potential for social capital of the village community is still a fragment of local wisdom. The potential of social capital needs to be collected and separated from negative sides, such as those that intersect with the domination of interests and the orientation of the founding elite; as an instrument of the interests of the rulers' political power as a counterweight to social institutions in their territory; and the strong egocentric ethnicity, religion and certain socio-political ideology. In addition, the results of the study illustrate two sides of social capital regarding the patterns of local institutional affiliation in South Lampung Regency (Duadji, Noverman; Tresiana, 2020). First, the divergent pattern means that the diversity of society triggers the birth, growth and development of institutions. Up to this point it can still be considered normal in a democratic level of life. But if it is not managed properly, the opposite negative effects will arise from this divergent pattern, such as causing fiction, conflict and leading to division. Of course this condition is a negative risk of democratization. Second, the convergent pattern, namely diversity to decorate and enrich the institution. The values of diversity need to be collected in an institution as a common home for carrying out social activities, gathering, sharing, discussing, learning centers and collaboration to solve common problems. From here, communication will be built, tolerance will grow, togetherness and solidarity will be created, acculturation will run and mental blocking will be opened so that trust among others is built.

As already mentioned, the social capital of the people in South Lampung Regency is still scattered and the tendency is still divergent. Therefore, it needs to be collected and oriented towards a convergent pattern. It needs special coaching that directs its existence towards the convergence of institutions to strengthen the diversity of the nation, as put forward by Putnam (2001) "networks of civic engagements". Social capital is a set of horizontal relationships between people, a network of social bonds governed by norms that determine the productivity of a community group or community.

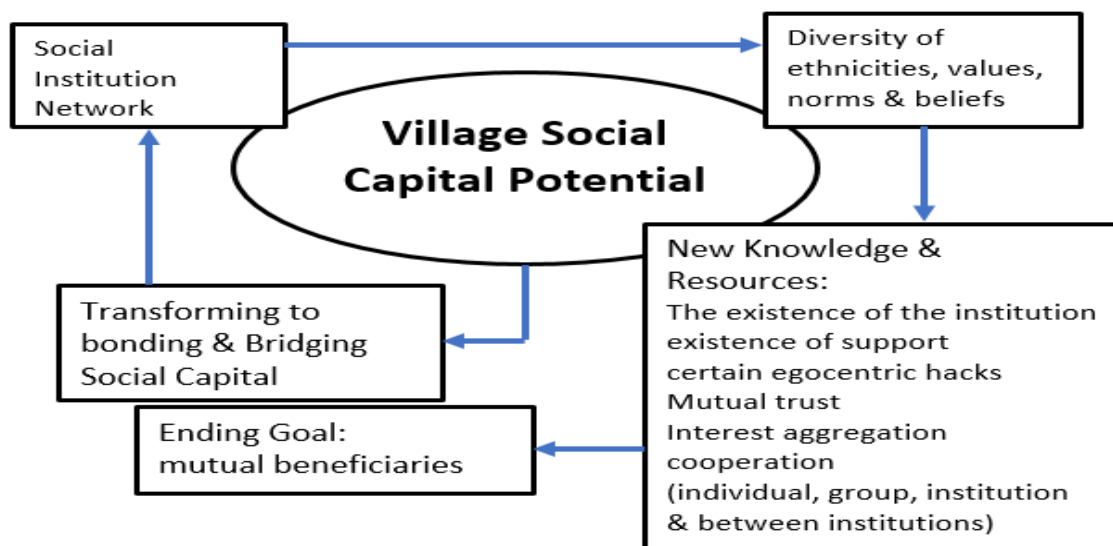
The social capital will have a useful value for the benefit of society with the presence of an adhesive that regulates the harmony and solidarity of internal relationships among group members. This is what is known as the bonding social capital. The change of social capital into binding social capital enables the creation of cooperation and mutually beneficial relationships among group members. To bind other groups (ethnicity, religion, socio-political ideology), of course, it takes the energy of hacking differences to prioritize equality and as a bridge to aggregate all resources and their respective interests into a massive solidarity movement to achieve a broader common goal (public goal). This is better known as the concept of bridging bonding social capital (Putnam, 2001).

It is called the bridging social capital because with this concept it is believed to be able to bridge the differences that exist between groups of people who have a variety of cultural, religious, ethnic values and socio-political ideologies. Without the bridging bonding social capital, of course each community group tends to be more concerned with its own group, is exploitative in nature and easily gets involved in conflicts with other groups and of course it will mutually weaken and harm each community group.

Thus, the assumption can be built that simply social capital is not enough and in order to work effectively and leverage the struggle for the benefit of society, social capital must be transformed into bonding social capital. For that there are conditions that must be met. First, there is a network of relationships with related norms, and this has happened in South Lampung Regency in the form of the existence of social institutions. Norms and networks are interrelated and are preconditions for the existence of social institutions that enable coordination, communication, sharing and discussion among community members who have various backgrounds. Second, the creation of support (mutual support) among its members in order to achieve the desired goals. Third, vested interests, domination and elite instruments and a certain sense of egocentricity must be hacked and cleaned up. Fourth, mutual trust must be cultivated and nurtured continuously. Fifth, the cooperation that is built between the members is an aggregation, that is, the basis is not only the fulfillment of personal interests, but also to realize collective interests and institutional needs.

Guided by the narrative, description and interpretation of meaning (emic) by comparing it with the concept and theory of rest, then the illustration of the logical link about the transformation of social capital as a unitary bound component follows.

Figure 1. Internal Group and Cross-Group Binding Networks



Source: Research Report, (Duadji, Noverman; Tresiana, 2020)

How to link the Driver-Trigger Model with Bridging Bonding Social Capital in Musrenbangda: Child Friendly Pekon?

Social capital bonding and bridging social capital bonding have only worked effectively on a narrow scale, namely at the point of solving some problems and meeting the needs of groups and across groups, not yet having a wider reach to the diversity of problems and needs of community members. There are many reasons for this—

(1) limited resources; (2) limited competence; (3) spontaneity and partiality of the activities carried out; and (4) moreover, the support from the local government is not maximal.

Then what about the issues and problems faced by children? At the practical level, in Indonesia including in South Lampung District, the issues and problems of children are very diverse and complex. There are child development problems (malnutrition, health problems, education, care); child protection issues (violence, kidnapping, child trafficking, child labor, sexual crimes against children, cyber-based crimes); child marriage; to the issue of neglecting the fulfillment of other basic rights of children due to divorce, social disasters (conflict and prolonged warfare, radicalism), natural disasters including the current Covid-19 pandemic etc. At this point, it emphasizes that the state must be present and have a strategy to resolve children's issues (problems) in Indonesia.

The number of children in South Lampung Regency is 354,204 people and those who attend school are 97,785 people. This means that the first problem faced by children is the high number of children who have not or dropped out of school, which is 256,419 people (72.39%) or when compared to children who go to school the ratio is 262.23%. This condition is also supported by a drastic decrease in the School Participation Rate (APS) for the 16-18 year age group (64.49%) which informs that many children do not continue their education to the SMA / SMK / Madrasah Aliyah education levels. Then another child problem is stunting. Among the 15 districts / cities in Lampung Province, there are 7 districts / cities with a prevalence of stunting above the provincial prevalence and 8 districts with a prevalence below the provincial prevalence. Of the 8 districts / cities with a prevalence below the provincial prevalence, 2 regencies are included in serious public health problems, namely South Lampung District (30.3%) and Way Kanan District (30.7%). All the problems and problems that still surround the development of children show that people do not have the ability and independence to solve problems in their respective environments. There are several possible causes. First, the problem of children is sometimes considered insignificant because of the lack of ability, insight and community perspective on these problems and problems, even in certain groups it is common to invite or involve children to make a living for the family. Children are used as the backbone to support the family and are considered normal. Second, the lack of financial capacity and other means due to the shackles of family poverty. Third, cultural shackles as a result of what Maltz called the emptiness of social capital value, such as taboo to make certain changes outside the context of knowledge and values he was familiar with. This clearly shows that there are certain negative sides to the culture, values and beliefs of society. Fourth, the polarization and divergence of interests, both among the internal family, groups and across groups within the community. Fifth, the lack of facilities, infrastructure and support from the local government. These five things are the starting points regarding the importance of changing community issues and problems (children's issues) into public issues and agendas.

Responding to children's problems and problems and as a form of real response, the South Lampung Regency Government has issued several policies. First, the Regional Regulation of South Lampung Regency No. 4 of 2015 concerning the Implementation of Child Protection. Second, the Regional Regulation of South Lampung Regency No. 3 of 2018 concerning Non-Smoking Areas. Third, South Lampung Regent Regulation No. 53 of 2017 concerning Library Transformation in South Lampung. Fourth, the Decree of the South Lampung Regent No: B / 261 / IV.05 / HK / 2016 concerning the Determination of the Management of the South Lampung Regency Children's Forum for the 2019-2021 Period. Fifth, the South Lampung Regent Regulation Number 10 of 2019 concerning Stunting Reduction. Sixth, South Lampung Regent Decree Number 216 of 2019 concerning the Formation of a Team for the Acceleration of Stunting Reduction. This step deserves to be appreciated as a form of government attention to the problems faced by its citizens. The policies that have been made by the South Lampung Regency Government will of course not run effectively without support and collaboration between elements of society and the government.

The results of the study, in general, show that on the program planning and budgeting side of village funds, almost no village in South Lampung District allocates funds for child rights-based programs as a top priority, except through affirmative programs and funds from district, provincial governments. or through national programs and funding placed in the regions. Village priorities are still focused on infrastructure development programs. However, when there are villages that plan programs based on the fulfillment of children's rights, it is more due to the role and advocacy of external "local intellectuals" who carry out community service activities (PKM). Of course, his position is as a catalyst for creative reformers who try to include pro-child agendas, both at the discourse level and at the level of assistance in programming in the musrenbang process (deliberation for development planning). However, the programs that are structured are more normative in nature, seem to have

existed and have not led to the creation of efforts and creations to resolve the root of problems and problems of children. The normative thing that has often been carried out is educational programs such as early childhood education, kindergarten, TPA, or health programs such as the posyandu program. This program is the basis for children's needs and is indeed mandatory. Meeting normative standards is important, but from the perspective and context of the broader public administration function, this is not enough; and what is far more important are the substantive matters carried out by all relevant stakeholders that are directly related to the solution to the root problems faced by the community, including children's rights and efforts towards the realization of a child-friendly village - a village concept that provides protection and facilitates the right to grow - child development.

Seeing the social conditions in South Lampung Regency, it seems unlikely that children's problems and problems can be solved by the community itself. As a reaffirmation of the condition of rural communities in South Lampung Regency, both at the internal level of community institutions and at the village government level, they still position and consider children's issues and problems as not very important. Even if they have responded, their position is at the third, fourth level and so on. This cannot also be absolutely blamed. There are still many problems and shackles experienced by the village community in their daily lives, as well as the village government there are still many limitations - namely the ability and competence of the apparatus and the lack of budget support, village facilities and infrastructure. From the perspective of the village community, it is more due to the lack of ability, insight and perspective of the community on problems and problems; lack of financial capacity and other means due to family poverty; cultural shackles as a result of the emptiness of social capital value (social capital value emptiness); polarization and divergence of interests, both among the internal family, groups and across groups within the community; and what is not less important is the lack of facilities, infrastructure and support from the local government. The state needs to be present through support, encouragement, guidance and direction to the local community.

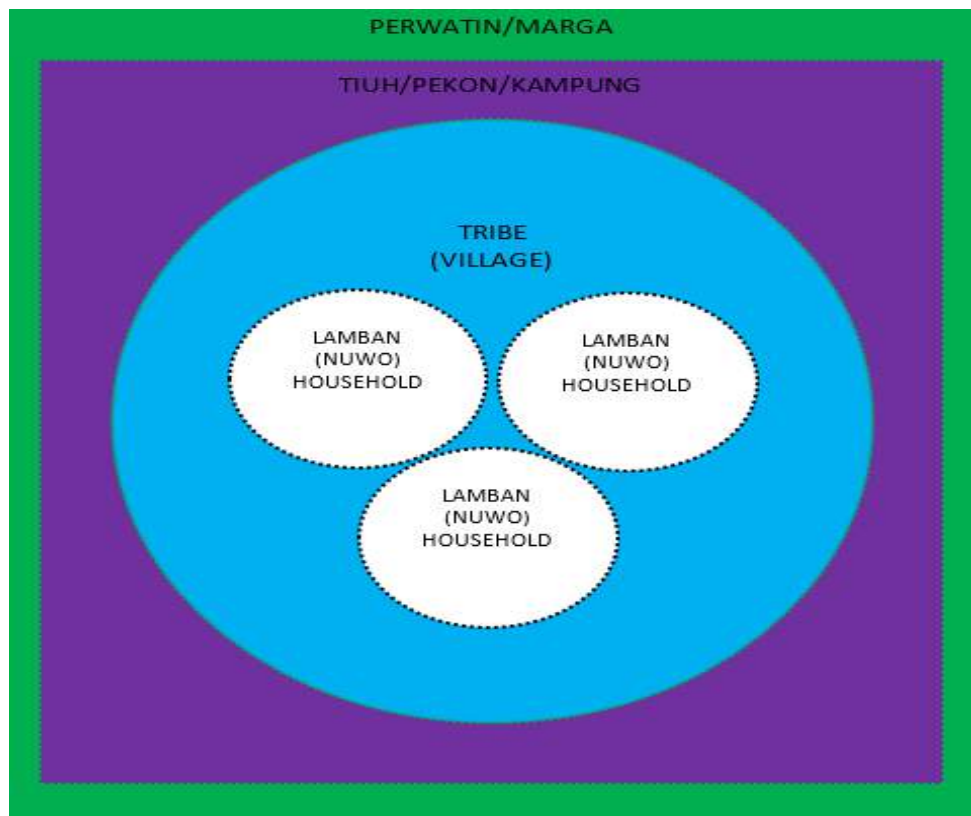
The Child Friendly Village / Pekon Program as a framework towards a Child Friendly District must be placed as a program belonging to all. The planning strategy for the Child Friendly Village / Pekon Program, of course, needs to be packaged as a community-based 'Community Based Program' (CBP) program. If the idea is true, then at least three things are needed, namely: a) involving community members in decision making; b) there is certainty that the local community will receive the benefits of the child-friendly village / pekon program; and c) the need for drivers and triggers to strengthen active community participation as explained by Shrestha (2015).

The diversity of social capital potentials of rural communities in South Regency is that this area is blessed with multi-ethnicity, culture, values, norms and beliefs with 558 existing social institutions consisting of 66 NGOs, 120 Organizations, 7 Government-Formed Institutions and 365 Customary Institutions. These community organizations have taken participatory actions with several patterns or forms of participation: (a) political participation; (b) mass movement; (c) democratic participation in government; (d) community participation; (e) other forms of social participation such as fundraising, volunteering for disasters etc.

The trend of social values prevailing in the villages of South Lampung leads to the characteristics of friendship and harmony, tolerance; mutual cooperation; kinship; ethnic and cultural attachments; social care; and obedience to figures (Duadji, Noverman; Tresiana, 2020). This finding is in line with the classic study conducted by Collette (1987) which states that mutual cooperation has been entrenched and spread in social life in Indonesia and has become the most important social institution in development. This can be seen in the presence of the term *sambatan*, village clean which applies in Javanese society or the term *krama* in Bali which indicates mutual cooperation activities in the regions (Kartodirjo, 1987). This is what shows the distinctive character of the village in the midst of the onslaught of globalization, local wisdom and traditional values are still preserved, including in villages in South Lampung. Thus, trust has been internalized in the daily practices of community associations, but this belief has not been extrapolated into the strength of the village to develop itself to make the village child-friendly.

Furthermore, if it is examined and traced to the historical roots of the people of Lampung (including South Lampung Regency), the concept of the village (Lampung: *pekon*) is nothing but a collection of families (households) and among them are bound by the same lineage (tribe). So the village concept in Lampung more represents a customary government system based on genocological ties (Figure 2), where in the current era, with village uniformity and the dissolution of clan authority, *adat* government has become a customary institution.

Figure 2. Levels of Lampung Indigenous Peoples / Institutions in South Lampung Regency



Source: Duadji & Tresiana, Research Report, 2020

Starting from Figure 2, there are several important substances as specific characteristics of local wisdom with regard to the customary institutions or indigenous peoples of Lampung: (1) very open and tolerant which is marked by the ability of this institution to provide space and recognition of diversity in the existence of immigrant communities that are accommodated in socio-cultural life order and governance through representatives of balancing institutions at all levels of balancing institutions / indigenous peoples of Lampung; (2) sincerity in handing over the parental rights to the immigrant community; and (3) 'angkon' values as the principle of upholding the values of social solidarity (unity and unity).

The characteristics of local wisdom as described above reinforce the belief in the idea of the research team that in fact the existence of Lampung traditional institutions at the tribal / hamlet or pekan / tiuh / village level can be a forum or village musrenbang forum and of course this is in line with 'bhineka Tunggal Ika'. according to the philosophy of the Indonesian Nation. This means that at the macro level, the diversity of resources and entities is seen as a blessing, gift and wealth that will complement each other and become the glue of national unity. This reality when linked to the context and substance of regional autonomy is of course a 'home base' that will strengthen the desired governance structure in the implementation of 'democratic governance' and of course give special emphasis to the need to place social capital in repositioning of public administration today, now and in the future.

It cannot be defined, in addition to the diversity of potential social capital that is owned by providing positive energy, field phenomena also give rise to negative energies in the form of polarization and divergence of institutions, NGOs, CSOs, and government-formed institutions. However, statutory tools and the existence of district-level social and political affairs can lead to convergence of institutional diversity within a single diversity frame and a necessity (*conditio sine qua non*) as the state philosophy.

The potential for social capital of rural communities in South Lampung Regency is very diverse, but it is not enough to just rely on it. Efforts to create a child-friendly village / pekan as a child-friendly district building framework require the functioning of all stakeholder functions (government and existing community elements); requires extra work and funds as a shared responsibility. Managing the diversity potential of social capital is not

enough to rely solely on natural movements (evolution). This makes the course of social capital less than optimal and even tends to have the opposite effect (bad impact). The potential energy of social capital will turn into factual energy if triggers are intentionally given. This means that it requires intervention to encourage the movement of the potential for social capital.

Without the triggers of social capital, the social capital mechanism must work; hence the simultaneous impact of the child-friendly village / pekon program as a Community Based Program (CBP) will not last long; and likewise the child-friendly district program will never materialize. CBP is participatory in nature and for the benefit of all members of society. On this basis also the emergence of public awareness and responsibility for the problems and problems of children in the area.

The results of the field inventory show that what is possible to become triggers (triggers): (a) in the form of common goals of the community on children's problems and problems; both in terms of responsibilities and benefits to families, groups and community institutions; (b) shared insight, knowledge and awareness among all stakeholders regarding the urgency of child-friendly village / pekon programs and child-friendly districts; and (c) even if something is not expected, there are natural disasters, including social disasters like now 'the more widespread and massive covid-19 pandemic.

The condition of the village community in South Lampung Regency is still minimal, so there must be a driver (activator). The local government is the main mover that must provide encouragement, guidance and assistance to break all the barriers and shackles of social capital value through affirmative programs (supporting and affirmative programs) that will accompany the child-friendly village / pekon program and child-friendly districts as the main program (play the program). Usually a prescription given by a doctor to his patient is not enough to provide a cure for the main disease, without being followed by a drug to relieve the symptoms (symptomatic). So the government also needs to provide capacity building programs for village officials and communities.

Kirit Patel, as quoted by Triana (2010: 191), states capacity building as: “.....encompasses the country's human, scientific, technological, organizational, institutional and resources capabilities. A fundamental goal of capacity building is to enhance the ability to evaluate and address the crucial questions related to policy choices and modes of implementation among development options, based on an understanding of environment potentials and limits and of needs perceived by people of the country concerned”.²

The quote above illustrates that capacity development includes human capabilities, science, technology, organizations, institutions and resources in a country. The fundamental objective of capacity building is the enhancement of the ability to evaluate and answer important questions relating to policy (program) choices and the means of implementation among development options, based on an understanding of the potential of the environment and its boundaries and the needs felt by the people of the country. concerned. In other words, capacity building is a strategy aimed at improving governance performance through: (1) human resource development; (2) organizational strengthening; (3) institutional reform; and (4) establishment and strengthening of social networks (networking). All of these are steps of guidance, strengthening and encouragement that must be carried out by the government to the community, community institutions and government officials and other relevant stakeholders.

As a driver, the next step that the government needs to take is to provide continuous guidance, provide financial assistance and support for infrastructure. The government also needs to encourage the creation of a public space (public arena or public space). The creation of a public space makes openness for all village communities, social organizations and other elements of relevant stakeholders to gain access to reciprocal active participation. There are no longer structural shackles, everyone can voice, convey ideas, negotiate aspirations and negotiate in a democratic forum followed by a sense of moral responsibility and equality. Issues, problems, opinions, and problems faced are discussed in a transparent manner, including the form of participation in the form of assistance, financial facilities and others are also possible in this forum.

The public space is a place for the production and circulation of discourse as well as the exchange of experiences, ideas and ideas. The public sphere is also an arena for mediation of all elements of society or the government (state). With this condition, it encourages villages / pekon and regencies to become real public spaces through a

² Kirit Patel in Rochayati Wahyuni Triana. Global Warning: Quo Vadis Ilmu Administrasi Negara dalam Falih Suaedi dan Bintoro Wardiyanto. Rivitalisasi Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu. Tahun 2010.:191.

public space channel, namely the development deliberation forums (*musrenbang*) at all levels and their mechanisms, especially regarding the design and construction of child-friendly village / *pekon* and district programs. Of course this is in line with the concept of a village which is a legal community unit which has an original structure based on matters of special origin. In this case the village is seen as a collection of communities with all the diversity of their entities; and it is also parallel to the *pekon* concept that is well known among the people of South Lampung. The village is a self-community, namely a community that regulates itself, meaning that the village has the authority to manage and regulate the interests of its community according to local conditions and socio-culture (Widjaja, 2003).

Meanwhile, the village government (institutions and apparatus) is an extension agency and representation of the central government that has a strategic role in regulating village communities and the success of national development. So, village government can be interpreted as a subsystem of the government administration system, so that the village has the authority to regulate and manage the interests of its community. The foundation of thought regarding village governance is diversity, participation, autonomy, democratization and community empowerment (Widjaja, 2003). The village government has a significant role in managing social processes in the community. The main task that is carried out by the village government is how to create a democratic life, provide good social services so that they can lead their citizens to a prosperous, peaceful, and just life.

The results of a study on villages in South Lampung Regency show that the social capital of the village community has worked on the dimensions of protection, basic rights and development of their children in their daily life. However, of course this is not enough, because there are so many (multi-dimensional) problems, problems, needs and rights of children that must be fought for. Therefore, social capital that is already running in the family environment still needs to be selected (bonding social capital), it is necessary to develop media that is able to bridge with community institutions and between community institutions (bridging bonding social capital) and the ending is institutionalization in a public space through *musrenbang*. Institutionalization is a process of institutionalization (formalization and recognition) of selected social capital, be it norms, values, culture, principles, beliefs and existing social institutions that are introduced and integrated with the means of implementing public administration, especially in all governance governance that carries out its functions as a public service official, development agent, regulatory and law enforcement. Its duties are internalizing social capital bonding and bridging social capital bonding into public administration practices.

In the context of child-friendly programs, it requires a protective environment for children, providing safe facilities for children's growth and development, a comfortable and safe environment for children to explore themselves and the environment, play and learn; an environment that supports and facilitates the basic needs and rights of children (IULA & UNICEF, 2001). *Pekon* is a village, of course, as the closest administrative environment for children who need strong community support that focuses on basic rights and children's problems. On this side, it is an important point in the meaning of multi-stakeholder involvement in supporting child-friendly *pekon* / village programs. The manifestation and concrete manifestation of the internalization of social capital bonding and bridging social capital bonding into public administration practices is a multi-stakeholder requirement - something that cannot be defined. That is the appearance of a new face from the public sphere and the initial stages must be started from the *pekon* level as the smallest government structure through the *musrenbangdes* route.

Ideally, the *Musrenbangdes* will be able to build an understanding of the interests and progress of the village where mapping of potential and available development resources from both inside and outside the village, as well as a list of problem inventory (DIM) can be done together. Discussions, share experiences, exchange knowledge and ideas will enrich the color and the more comprehensive the study of village programs. Therefore, *musrenbangdes* is a forum and learning media for stakeholders, all elements of governance are very urgent in implementing governance and village development. Public forums like this are believed to be able to improve the factual situation that often occurs where the *musrenbangdes* forum has not been able to produce superior development policies or programs. (Duadji, Noverman; Tresiana, 2020). *Musrenbangdes* are still running formally and are run elitist. This condition indicates that the issue of children's rights has not been discussed in many forums, or perhaps never at all. Dialogue in the forum is still dominated by the role of the village government which is elite in nature, instead of involving the wider community and the private sector from the start. Of course this is a serious and inherent deficiency in the *musrenbangdes* as a manifestation of public space. This creates a tendency for elite interpretation bias in pouring programs related to children's rights. Yet if the community, including the private sector, begins to have a sense of trust in a public policy or program, they will

take part if they feel involved in the process of preparation, planning, and implementation (Conyers, 1994). This should be attempted at the musrenbangdes in South Lampung Regency, including in the discussion of the issue of children's rights: (a) Fulfillment of children's civil rights; (b) Family environment and alternative care; (c) Health and Wellbeing; (d) Education, use of leisure time and cultural activities; and (e) Special Protection. The five clusters of children's rights are important parameters for the realization of a Pekon and a child-friendly district.

In closing this section, the driver-striggers model formulation through bridging bonding social capital in musrenbangdes / districts is presented as shown in Figure 3 below.

Figure 3. The Driver-Striggers Model through the Bridging Social Capital mechanism in child-friendly village and district development planning meetings



Source: Duadji & Tresiana, 2020 Research Report

CONCLUSION

In general, the potential for diversity of social capital in South Lampung Regency is that this area is blessed with multi-ethnicity, culture, values, norms and beliefs with 558 existing social institutions consisting of 66 NGOs, 120 Ormas, 7 Government-Formed Institutions and 365 Customary Institutions. These community organizations have taken participatory actions with several patterns: (a) political participation; (b) mass movement; (c) democratic participation in government; (d) community participation; (e) other forms of social participation such as fundraising, volunteering for disasters etc. The trend of social values prevailing in the villages of South Lampung leads to the characteristics of friendship and harmony, tolerance; mutual cooperation; kinship; ethnic and cultural attachments; social care; and obedience to character (Duadji, N; Tresiana, 2015). On the other hand, the substance and special characteristics of local wisdom inherent in the traditional Lampung institutions: (1) very open and tolerant, which is marked (1) by the ability of this institution to provide space and recognition of diversity in the existence of immigrant communities which are accommodated in the socio-cultural life and organization and governance through representatives of balancing institutions at all levels of institutions / indigenous peoples of Lampung; (2) sincerity in handing over the parental rights to the immigrant community; and (3) 'angkon' values as the principle of upholding the values of social solidity (unity and unity). All of these become the colors of 'diversity in diversity'.

The potential for existing social capital still needs to be transformed into a form of bounding social capital. And finally to encourage the operation of social capital, drivers and triggers are needed as real energy to integrate social capital into the development planning deliberations, at the village, sub-district and district levels. The diversity of resources and entities is a gift, grace and wealth that will complement each other and become the glue of national unity. This reality, from the context and substance of regional autonomy, is a 'home base' that will strengthen the desired governance structure in the implementation of 'democratic governance' as a stress point for the need to place social capital in the repositioning of public administration today, now and in the future.

LIMITATION AND STUDY FORWARD

This research is an assessment, of course there are many aspects that have not been covered in this research, in addition to other limiting factors. Some of the limitations of this research are: (a) it is an initial inventory of the

potential for social capital in the area which is the research setting; (b) the formulation of the concept produced is only limited to the initial formulation, it still needs sharpening and development; (c) the new concept that is built is a logical link to existing empirical data, has not been tested and needs further study with a combination of methods and the addition of several variables which are the focus of research to make modeling.

ACKNOWLEDGEMENT

Many parties and organizations became contributors, providing support and financial assistance for the preparation and completion of this manuscript. Our appreciation and respect for that, although it is impossible to mention them individually. We are grateful to the Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia for funding our research. The same goes for LPPM Unila, informants and the South Lampung Regency Government.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The author declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

FUNDING

The author(s) disclosed receipt of the following financial support for the research, authorship, and/or publication of this article: This article is based on research funded by the Penelitian Dasar Dirjendikti Kemendikbud RI Nomor Kontrak: 4375/UN26.21/PN/2020.

REFERENCES

- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Gadjah Mada University Press.
- Duadji, N; Tresiana, N. (2015). *Laporan Penelitian Kompetitif Nasional Skim Trategis Nasional DIKTI Kemendikbud dengan judul PUBLIC SERVICE DELIVERY MODEL (Pemetaan Organisasi Grassroots dan Pembentukan Governance Sounds Berbasis Lembaga Adat Untuk Menciptakan Ruang dan Peningkatan*.
- Duadji, Noverman; Tresiana, N. (2020). *Laporan Penelitian Kompetitif Nasional Skim Penelitian Dasar: Pekon Tanggap Covid-19: Membangun Bridging Sosial Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*. Universitas Lampung. Tidak dipublikasikan.
- IULA, & UNICEF. (2001). *Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities*. UNICEF Innocenti Research Centre.
- Oevermann, M., & Klein, R. (2006). A Cartesian grid finite volume method for elliptic equations with variable coefficients and embedded interfaces. *Journal of Computational Physics*.
<https://doi.org/10.1016/j.jcp.2006.04.010>
- Widjaja, H. A. . (2003). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada.
-

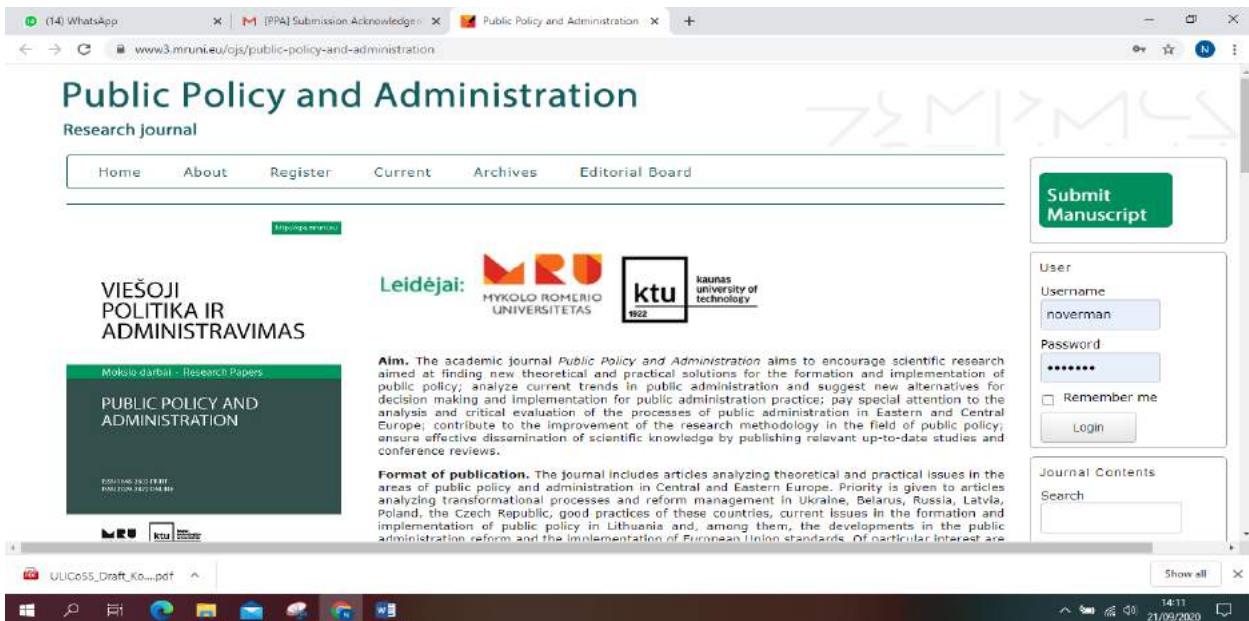
Judul Naskah Jurnal

Profile Analysis of Child Marriage and Related Public Policies in Indonesia

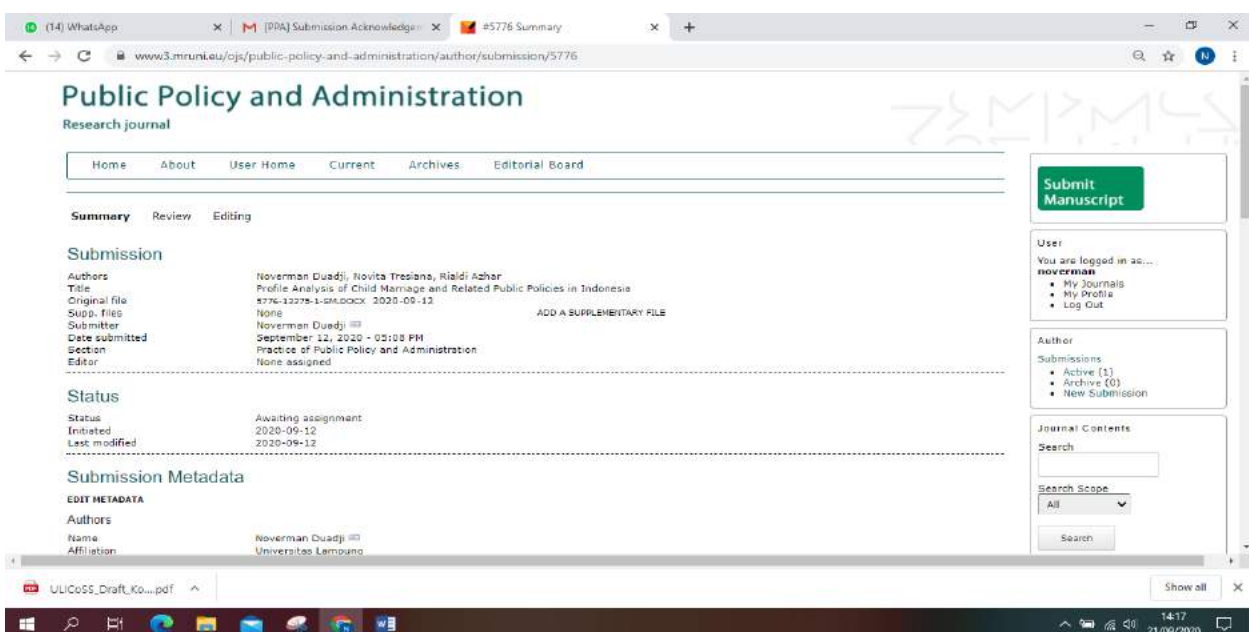
Nama Jurnal yang dituju
Public Policy and Administration
ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603

Laman Jurnal:

<https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/login?source=%2Fojs%2Fpublic-policy-and-administration%2Fauthor>



Bukti Pengiriman Naskah/Artikel kepada Jurnal yang dituju Public Policy and Administration yang dikelola Mykolas Romeris University



Satu lagi artikel hasil penelitian dasar ini dikirim ke journal of asian and african studies

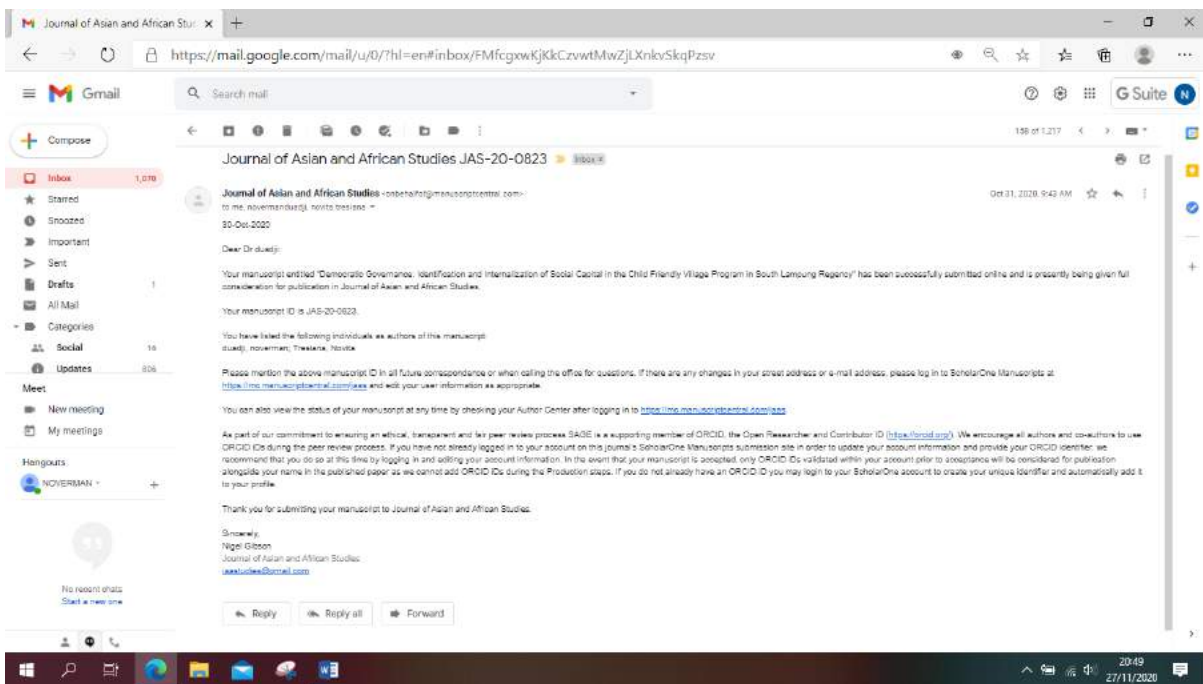
Judul:

Democratic Governance: Identification and Internalization of Social Capital in the Child Friendly Village Program in South Lampung Regency

Noverman Duadji^{1*}, Novita Tresiana²

BUKTI & PROGRESS ARTIKEL JURNAL


Artikel sudah dikirim & sedang dalam penelaahan (reviewer) dari “Journal of Asian and African Studies”, laman web: [Journal of Asian and African Studies - All Issues \(sagepub.com\)](http://Journal of Asian and African Studies - All Issues (sagepub.com)). Jika hasil telaah tim reviewer jurnal ini memutuskan bahwa artikel ini layak dan sudah dilakukan perbaikan, maka akan masuk pada Volume 55, Issue 11, Current Issue February 2021



multi-hasil-Proofreading_Review_artikel_jaa - Word

File Home Insert Design Layout References Mailings Review View Tell me what you want to do... Sign in Share

Journal of Asian and African Studies



Democratic Governance: Identification and Internalization of Social Capital in the Child Friendly Village Program in South Lampung Regency

Journal:	<i>Journal of Asian and African Studies</i>
Manuscript ID:	Draft
Manuscript Type:	Original Article
Keywords:	Bridging, bounding, Social Capital, Driver and Striggers, Policy, Public Administration
Abstract:	The research aims: (a) to identify the potential and binding of social capital of rural communities in South Lampung Regency; and (b) internalization and institutionalization of binding social capital into village and district program planning deliberations. The method used is a qualitative method. Collecting data by observation, interviews and documentation. Data is presented in the form of narration, tables and figures. Analysis with categorization and interpretation of meaning with comparative concepts / theories. Then the formulation of new meanings and the formulation of the conceptual logic link.

Page 1 of 17 8977 words English (United States) 7349 05/12/2020

Dokumen pendukung luaran Tambahan #1

Luaran dijanjikan: Keikutsertaan dalam Seminar Nasional

Target: terdaftar

Dicapai: Submitted

Dokumen wajib diunggah:

1. Naskah artikel
2. Bukti submit

Dokumen sudah diunggah:

1. Bukti submit
2. Naskah artikel

Dokumen belum diunggah:

-

Peran penulis: first author

Nama Konferensi/Seminar: The First International Conference on Government Education Management and Tourism (ICoGEMT) 2021

Lembaga penyelenggara: LLDIKTI Regional IV Jawa Barat - Banten bekerjasama dengan European-Asian Research Community

Tempat penyelenggara: Bandung Indonesia

Tgl penyelenggaraan mulai: 9 Januari 2021 | Tgl selesai: 9 Januari 2021

Lembaga pengindeks: LIPI, SCOPUS

URL website: <http://conference.loupiasconference.org/index.php/ICoGEMT/index>

Judul artikel: Child-Friendly And Disaster Response Village Policies (Study in South Lampung Regency Indonesia)

Child-Friendly And Disaster Response Village Policies (Study in South Lampung Regency Indonesia)

Noverman Duadji¹, and Novita Tresiana²

¹Public Administration, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia,
Soemantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung, Indonesia

noverman.duadji@fisip.unila.ac.id and novita.tresiana@fisip.unila.ac.id

Corresponding author: noverman.duadji@fisip.unila.ac.id

Abstract. The issue of coastal child Rights has a complex character. There is a connection between the trust of the community, with the quality of governance. The study aims at: 1) the condition mapping and potential child-based real data in coastal areas; 2) The strategy of configuring social capital and governance in establishing a public trust in the fulfillment of children's rights. The study used a social mapping approach with survey techniques, with the main subjects being governments, communities (families/parents, and community leaders). The results of this study first, there are several child rights clusters that have been fulfilled, secondly, the public Trust on the fulfillment program of child rights to the Government capital to improve the quality of governance.

Keyword: Children's rights; Community trust; Sound governance body

1. Introduction

Decentralized governance provides creative space for local governments to identify, set priorities and respond to current issues and problems. The integration of knowledge, local resources, and legislative and local government authority in the planning process is believed to be the basis for creating policy innovations that are able to prosper and fulfill the rights of children. The strategy is to strengthen the participation of children and child practitioners (child care groups) contribute to expressing the priority problems and needs of children in development planning meetings (DPM) or the local term is called musrenbang.

The research is motivated by the still found negative images and synergies about village decentralization governance that affect the conditions of children, namely weak coordination, technical capacity and knowledge (human resources, data, monitoring), harmonization depreciation in each government structure and limited participation in DPM.

Considerations for choosing DPM as the object of study material: 1) One of the "village-building" translator platforms, namely the "Child Friendly Pekon Program" as the basis for districts / cities that are child-friendly by involving multistakeholders. It was found that a number of villages had opened spaces for the community to argue and mutually criticize proposed development programs, but the involvement of children had not been considered important, either because of their weak participation or the dominance of the village elite; 2) The state guarantees children's rights to express their opinions according to their age and intelligence level. The legal framework for child participation has been regulated by Law No. 6/2014, Keppres N0 36/1990, Law No. 23/2002 then revised with Law No. 35/2014; 3). Involving children is the application of a democratic model and deliberative policy is a new movement of village tradition to accommodate the interests of all, especially vulnerable communities including children. From an early age, children as the next generation of the nation need

to be prepared, introduced and trained in democracy so that they become a generation that has character, responds to the surrounding environment and is able to voice their rights.

The framework for formulating new ideas in this research is to elaborate the conception of deliberative democracy, deliberative policy, sound governance body and citizenship education. The idea of deliberative policy [1] is a form of derivation of deliberative democracy [2]. Both experts have initiated the role of civil society emancipatively through communication processes, the achievement of open "consensus" in "public space", deliberation and equality into preconditions before the creation of consensus, and this process must be separate from state and market policy interventions.

Reality shows it is difficult to realize the concept of Habermas. [3] found the response of public space in Indonesia, including in the local government because public spaces are generally in the form of citizen forums initiated by the government. Citizens' forums, including children's forums are not empty spaces, there are political and market maneuvers, even their existence is an affirmative policy for vulnerable groups. Habermas deliberative ideas certainly require a reorientation of the context of participation and planning, as a basis for the idea of innovation in the "forum" public space that is formed, so that the forum called public space can secure publicity through the strengthening of local pro-child social culture.

The idea of Sound Governance Body put forward by [4] and the idea of Citizenship Education proposed, became a meeting point for new orientations synergizing Habermas deliberative with the context of policy innovation to strengthen public space through the design process of maturity, maturation and early recognition in children so that citizens find collective intelligence to behave. Adequate knowledge enables children and citizens to participate in the Sound Governance Body as a reflection of the state, market and civil society. Continuous capacity building and governance management strategies for public participation in musrenbangdes through multistakeholder community activities. Although there has been direct selection of key public positions (village heads) in musrenbangdes, public participation is the main thing so that the musrenbangdes review including implementation practices is important to be reviewed and urgently to produce novelty. Therefore, the aim of the research is to formulate a model of public space in the Musrenbangdes as a catalyst for governance and strengthen the capacity of musrenbangdes stakeholders to realize policy innovations that are pro-child and Child-Friendly Pekon.

2. Methodology

The method is a tool to achieve research objectives. Related to the research objective is to formulate a model of public space in the musrenbangdes as a catalyst for governance (governance) and strengthening the capacity of musrenbangdes stakeholders to realize policy innovations that are pro-child and Child-Friendly Pekon, then qualitative methods are chosen.

In general, the territory of South Lampung Regency as a location. Be more specific in 9 selected villages. The research team conducted a survey to inventory information about: 1) children's problems and issues; and (2) identification of institutional potential, social capital, participation, partnerships. Data collection is done by (a). Questionnaire (b). In-depth interview (c). Observation (d). Participatory Mapping and e). FGD. While the analysis and synthesis of data is done by interpreting the data by comparing it with the concepts used to obtain certain meanings as research findings.

3. Result and Discussion

3.1. General Condition of Children Profile in South Lampung Regency

Indonesia's commitment to the protection of children's rights can be traced to the juridical side. First, it is stated in Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the

Rights of the Child (CRC). Secondly, at the macro level, the 1945 Constitution includes imperatives for the survival of children, namely articles 28b and 28c. Furthermore, over time in the process, many developments both institutionally and in regulation are being pursued by Indonesia so that the right of children's survival is maintained. This commitment is followed up by various local governments by making their regions "compete" as City/District Eligible Children (KLA). The KLA is an effort by the district/city government to accelerate the implementation of the CRC from the legal framework into a factual shutter regarding development definitions, strategies and interventions through child-friendly policies, institutions and programs. For the context of the Lampung Provincial Government, the KLA is substantively seen as an effort to improve children's survival and is placed as one of the priorities for health development. This becomes important in the context of efforts to build superior human resources in Indonesia, because the development of human quality needs to be preceded by good health, including health in childhood, even when the child is still in the womb.

After the presence of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, the village now has autonomy, therefore the village level government also has the responsibility in protecting the right to life of children. The village is the spearhead in the implementation of Child Friendly Villages. The aim of the Child Friendly Village / Village is addressing issues related to children such as child infrastructure towards school, human rights, children's playgrounds, and so on.

Mapping the existing conditions regarding children's rights and survival in South Lampung Regency is very important, so it is necessary to explain in this section. Further Lebij also needs to analyze the institutional (public space), social capital, participation, partnerships and actors related to child-friendly villages / villages.

Table 1. Number of Children in South Lampung Regency

Sub Districts	Male	Female	Total
Tanjung Bintang	12.043	14.105	26.148
Sragi	5.538	6.324	11.862
Ketapang	8.720	10.171	18.891
Bakauheni	3.118	3.736	6.854
Way Sulan	3.405	4.319	7.724
Way Panji	3.596	3.740	7.336
Kalianda	13.451	15.982	29.433
Raja Basa	4.542	20.806	8.267
Palas	11.044	13.728	20.806
Penengahan	7.421	64.696	13.728
Natar	34.953	22.941	64.696
Katibung	12.549	10.871	22.941
Tanjung Sari	5.939	39.631	10.871

Jati Agung	21.629	24.768	39.631
Sidomulyo	13.318	20.704	24.768
Candipuro	11.159	19.544	20.704
Merbau Mataram	10.557	20.806	19.544
Lampung Selatan	162.716	191.488	354.204

The data shows that the number of children in South Lampung Regency is 354,204 with details of 162,716 boys and 181,488 girls. Children in South Lampung Regency are great potentials and successors to the ideals of Indonesian fighters, especially the future of South Lampung. Children need to be protected - they need to be guaranteed their full physical, mental and social growth and development.

Children's education is one important element as a guarantee of children's growth and development. This description is shown by the participation of the population in utilizing formal schooling education facilities or commonly known as the APS (School Participation Rate) issued by the Central Statistics Agency (BPS). The data shows the number of population according to certain age groups accommodated by educational institutions (schools). Thus, the APS shows the size of the school-age population that is in school, a measure of absorption, equity and access to education, especially school-age population.

Table 2. School Participation Rate in South Lampung Regency

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah
7-12	99,41
13-15	92,95
16-18	64,49

Health is also an important part of the dimension of child protection rights. In this case, immunization is one of the most effective health protection measures for children against several diseases (PD3I) . Immunization is the most cost effective in the context of efforts to improve public health. In Law No. 36 on Health in 2009, it is stated that every child has the right to obtain basic immunization in accordance with the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided through immunization. The government is required to provide complete immunizations to every baby and child. In Lampung Province, coverage of complete basic immunization is still around 45%. This figure is still below the national figure of around 59%.

In South Lampung Regency itself, toddlers receiving immunizations are quite high, both BCG, DPT, Polio and measles in each of their districts, as contained in Table 4.

Table 3. Data of Children in School in South Lampung Regency

Sub-District Name	Number of Children in School					Number of Children in School					Number of Children in School					GT
	Primary School		M. Ibtidaiyah		Total	Junior high school		M. Tsanawiyah		Total	Senior high school		M. Aliyah		Total	
	Female	Male	Female	Male		Female	Male	Female	Male		Female	Male	Female	Male		
Natar	4.414	4.784	107	153	9.458	1.999	2.073	121	122	4.315	1.106	1.121	55	48	2.330	16.103
Jati Agung	2.148	2.396	85	90	4.719	855	865	64	71	1.855	470	445	22	20	957	7.531
Tanjung Bintang	2.122	2.274	11	21	4.428	940	955	13	16	1.924	459	481	4	0	944	7.296
Tanjung Sari	1.116	1.233	1	1	2.351	500	560	8	4	1.072	192	251	1	2	446	3.869
Katibung	2.521	2.670	130	138	5.459	1.077	1.120	83	103	2.383	526	536	17	25	1.104	8.946
Merbau Mataram	1.655	1.635	117	124	3.531	678	700	80	78	1.536	329	285	11	3	628	5.695
Way Sulan	636	661	265	316	1.878	243	311	184	160	898	210	233	31	33	507	3.283
Sidomulyo	1.584	1.773	63	68	3.488	656	672	60	77	1.465	321	288	6	4	619	5.572
Candipuro	1.225	1.349	207	197	2.978	433	452	223	182	1.290	236	248	71	50	605	4.873
Way Panji	268	321	11	14	614	147	106	9	14	276	57	51	1	4	113	1.003
Kalianda	2.693	2.915	43	50	5.701	1.101	1.112	95	128	2.436	603	641	53	55	1.352	9.489
Rajabasa	727	847	18	21	1.613	268	307	65	50	690	157	162	17	19	355	2.658
Palas	1.723	1.791	70	110	3.694	569	627	183	171	1.550	352	318	31	20	721	5.965
Sragi	1.146	1.221	53	59	2.479	349	406	169	164	1.088	206	183	18	23	430	3.997

Penengahan	1.197	1.315	47	68	2.627	464	461	101	102	1.128	275	287	22	10	594	4.349
Ketapang	1.439	1.546	79	93	3.157	551	523	117	121	1.312	266	270	19	13	568	5.037
Bakauheni	617	584	22	39	1.262	260	247	26	28	561	148	146	2	0	296	2.119
														Jlh Total		97.785

Table 4. Toddlers Who Get Immunizations in South Lampung Regency

Sub-District Name	BCG	DPT	POLIO	MEASLES
Natar	3.855	3.941	3.644	3.828
Jati Agung	2.224	2.212	2.206	2.216
Tanjung Bintang	1.657	1.662	1.661	807
Tanjung Sari	592	646	571	590
Katibung	1.371	1.437	1.291	1.336
Merbau Mataram	1.137	1.129	1.133	1.115
Way Sulan	564	556	552	565
Sidomulyo	1.426	1.448	1.375	1.314
Candipuro	1.055	1.030	983	994
Way Panji	383	374	375	355
Kalianda	1.757	1.723	1.663	1.750
Rajabasa	504	483	479	478
Palas	1.259	1.242	1.239	1.235
Sragi	748	732	731	733
Penengahan	782	803	809	780
Ketapang	962	1.088	901	922
Bakauheni	497	498	479	482
Lampung Selatan	20.773	21.004	20.092	19.509

The South Lampung Regency Government has issued several policies relating to children's rights, including: 1) South Lampung Regency Regulation No. 4 of 2015 concerning Implementation of Child Protection; 2) South Lampung Regency Regulation No 3 of 2018 concerning No-Smoking Areas; 3) South Lampung Regent Regulation No. 53 of 2017 Concerning Library Transformation in South Lampung; 3) Decree of the South Lampung Regent No: B / 261 / IV.05 / HK / 2016 concerning the Appointment of the South Lampung Regency Children's Forum Management Period 2019-2021.

One issue of children that needs to be responded quickly nationally is the problem of stunting. The prevalence of stunting in the age group of 0-59 months, Lampung Province is at 31.6%. This means that Lampung Province is included in the category of severe public health problems. In 15 districts / cities in Lampung Province, there are 7 districts / cities with stunting prevalence above the provincial prevalence and 8 districts with prevalence below the provincial prevalence. Of the 8 regencies / cities

with a prevalence below the provincial prevalence, 2 districts entered into severe public health problems, namely South Lampung District (30.3%) and Way Kanan District (30.7%).

In the context of the South Lampung Regency Government in response to the stunting issue, the Regional Government has released two policies namely 1) South Lampung Regent's Regulation Number 10 of 2019 concerning Stunting Reduction, 2) South Lampung Regent's Decree Number 216 of 2019 concerning the Formation of the Stunting Decrease Team . This step should be appreciated as a form of government attention to the problems faced by its citizens.

3.2. *Considering Institutional: Encouraging Villages as Child-Friendly Public Spaces*

Theoretical side, in the public sphere all citizens have access to voice and negotiate their aspirations to encourage public opinion. This public opinion has a role to influence everything in the public sphere, both formally and informally, to carry out the production and circulation of discourse which in principle is very important for the country. Public space in other words is a space that mediates between society and the state where the public organizes and organizes itself as the owner of public opinion [5]. In the context of this research, the village / village complex can be encouraged as a child-friendly public space. The purpose of this Child Friendly Pekon is when the village / pekon is able to become a shared space that is able to protect all dimensions of children's rights. Therefore, the village government needs to facilitate by organizing a public space canal to conduct deliberations in building consensus on the direction of village development relating to children.

The village is a legal community unit that has an original structure based on special origins. The village is a self-community, that is a self-governing community, meaning that the village has the authority to manage and regulate the interests of its people in accordance with local social and cultural conditions [6]. Whereas village government is an extension of the central government that has a strategic role in regulating rural / urban communities and the success of national development [7]. Village government can be interpreted as a subsystem of the government administration system, so that the village has the authority to regulate and manage the interests of its people. The rationale regarding village governance is diversity, participation, autonomy, democratization and community empowerment [6]. The village government has a significant role in managing social processes in the community. The main task carried by the village government is how to create democratic life, provide good social services so that it can bring its citizens to a prosperous, peaceful, and just life.

The results of studies in nine villages in South Lampung Regency show that culturally, families in village communities have given attention to the growth and development of their children in daily life. However, this attention has not been optimized based on the multi-dimensional rights of children. Therefore, the attention of the family as the main agency in realizing children's rights needs to be re-institutionalized. The process of institutionalization is a process that is passed by a norm or value of a new society to become part of one of the social institutions. Social institutions are considered as regulations if these norms limit and regulate the behavior of people within the institution's environment [8]. Actually, institutionalization does not just stop, but it can continue further until the community is not only institutionalized in people's lives, but has internationalized in people's lives. In this case, the village government needs to make efforts to internalize new values for families in providing a more comprehensive understanding of children's rights.

The best environment for children is an environment that has a strong physical and social community, a community that has clear and strict rules, which provides opportunities for children, and educational facilities that give children the opportunity to learn and investigate their environment and world [9]. Pekon / village as the closest administrative environment for children needs to be supported by a strong community in paying attention to children's rights. Therefore, multi-stakeholder involvement is needed in supporting child-friendly villages.

A concrete manifestation of public space at the village level is the existence of village development planning meetings. Ideally, through musrenbangdes will be able to build an understanding

of the interests and progress of the village, by mapping the potential and development resources available both from within and outside the village. In other words, village development will not move forward if one of the three components between the government, the community, the private sector does not play a role and take part in it. Therefore, musrenbangdes is a forum and learning media for stakeholders of all elements of governance to be very urgent in the governance and village development [10]. But unfortunately, the situation on the ground shows that the Musrenbangdes forum has not been able to produce superior development policies / programs [3]. Musrenbangdes are still running formally and elitistly. Such conditions indicate the issue of children's rights as a discussion that has not been much discussed in the forum. Even the private sector has not been much involved in the musrenbangdes forum. Yet if people begin to have a sense of trust in a public policy or program if they feel involved in the process of preparation, planning, and implementation [11]. This did not occur at the Musrenbangdes in South Lampung Regency, including in the discussion of the issue of children's rights. Dialogue in the forum is still dominated by the role of village government that is elite, rather than involving the wider community and the private sector from the start. Surely this has become a serious and inherent shortcoming in the musrenbangdes as a manifestation of public space. This creates a tendency for elite interpretation to pour in programs related to children's rights.

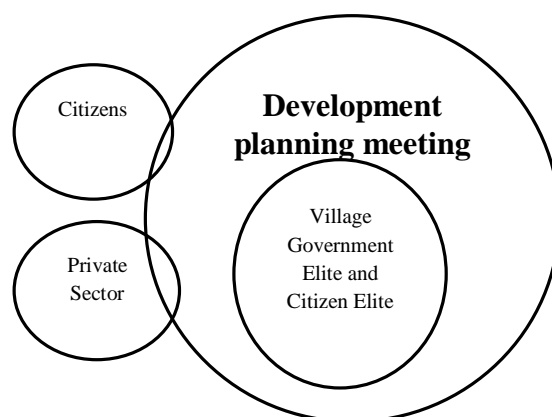


Figure 1. Deliberation Diagram at Development planning meeting (DPM/Musrenbangdes)

This interpretation bias met with an ironic point when the village apparatus and several elite parties did not have sufficient capacity to discuss the issue of children's rights. On the other hand, in terms of public space it is ideal if the discourse built in the community as participants is limited to the common goods and interests, not individual interests [12]. Goodness and common interests are difficult to materialize if the parties within do not yet have a capable ability to understand a problem. The ideal condition of public space has not been realized until now, but that does not mean pessimism is a door that will be opened. The process of revamping public spaces at the village level can be continuously improved by direct involvement of villagers, at least to absorb the problems faced by residents with a community consultation or consultation meeting approach.

Both theoretical and empirical experience, it shows that without authentic dialogue, people will never really reach a point of mutual understanding or correct identification of problems [13]. Authentic dialogue is a process that allows all stakeholders to speak openly, honestly and be heard by all parties. This needs to be constructed as an anchor in any deliberative activity held by all parties who have an interest in the implementation of child-friendly villages.

The development of a child-friendly village requires a broad involvement of all parties in it. Often the approach used in developing child-friendly villages is a rights-based approach model. However, often in the field of implementation in the field is very different from the ideal concept. Seeing

the condition of the village, there are several models of approaches and strategy development that can be done to make children's rights as the main stream of development.

Families, community members, community leaders, religious leaders, institutions and institutions in the village and village government. All must play a role in efforts to develop a child-friendly village. This is a joint work that will take a long time to bring about a transformation of the paradigm of society and all its components.

In deliberative democracy, all citizens as participants have the same right in contributing to formulate something that is fair and unjust. In deliberative democracy, the democratic process is realized through a forum where all the differences in a group of people are united without coercion [14]; [15]. This is the biggest challenge for stakeholders in implementing child-friendly villages / villages. Because of its reality, differences of opinion must have come to surround the deliberation process. Then, the difference will result in the dominance of a handful of parties or not. This needs to be explored more deeply. Collaboration between participants who have different interests will succeed in achieving common ground if dialogue is truly authentic, not rhetorical or ritualistic [16]. To be authentic, dialogue must meet certain conditions [2]; [17], where each participant must represent each interest, must speak sincerely, must make statements that can be understood by others, and each statement must be accurate. To free the individual (subject) from various interests, a continuous dialogical (intersubjective) condition is needed, which is free from domination. This is certainly not an easy job, because to trace one's sincerity in a dialogue cannot be measured accurately. Therefore, the possible thing to do is to see the quality of the arguments and the objectives to be agreed upon, and of course the important thing is the process during the dialogue.

3.3. *Potential for Social Capital*

Everything that belongs to the village is a resource that needs to be optimized in its effective use. Like the logic of "Glass half-filled or half-empty," the village government should focus on contents, instead of focusing on empty ones. Something that is owned by the community is social capital. Social capital is one of the main components in driving togetherness, mobility of ideas, mutual trust and mutual benefit to achieve mutual progress [18]. Social capital is capital that emphasizes more on the capital owned by the community as a result of the social relations that exist between all members of the community.

Social capital can be an alternative to mainstream discourse that always puts material capital like economic capital. In several academic studies many important findings that explain the urgency of social capital in addition to economic capital in people's lives. Talking about social capital means learning how people work together to build a network to achieve a common goal to improve the quality of life. The main dimension in the study of social capital is the pattern of interaction between individuals within groups and between groups with space for attention on social networks, norms, values and trust between people born from a group [5].

[19] revealed, social capital has a very broad dimension regarding everything that makes a community allied to achieve a common goal on the basis of togetherness, and in it is bound by values and norms that grow and obey. On the other hand, [20] previously described social capital as an aggregate of actual and potential resources associated with the ownership of a network of institutionalized introductory and recognition relationships that gave each of its members collective capital support. The social capital described by Bourdieu is assumed as a vehicle for agents to achieve instrumental goals.

Social capital is the result of social structures that point to the aspects of social organization such as beliefs, norms, and networks inherent in the life of a society with the context of its socioeconomic and political background [21]. With strong social capital, it is hoped that a strong social organization will be built. In the context of child-friendly villages, an important emphasis of social capital is community togetherness to work together to begin building child-friendly village institutions for the future of their children. In this context, it is precisely what Burt explained [22] which explains

social capital as a form of community's ability to associate with each other so that it becomes a very important force, not only in economic aspects but also in the social sphere.

Humans in meeting their daily needs cannot walk alone. Humans need each other and work together, therefore humans are always called social beings. The network that connects the collaboration is social capital. Social capital is the key to success of a social organization [21]. Social capital provides a foundation for the construction of the meaning of trust, togetherness, tolerance and participation that is closely related to the survival strategy. In this case, social capital in the villages of South Lampung Regency experienced an anomaly. Partially, several aspects of social capital such as trust, networking, and social norms work well. The dynamics of social capital in each village can be different, but when faced with the context of institutionalizing village development, particularly with regard to child rights issues, social capital has not been able to properly convert into a driving factor.

There are still many villages in South Lampung Regency that have not made child rights-based programs a top priority. Village priorities still encourage many infrastructure development programs. Whereas when a village plans a program based on the fulfillment of children's rights due to the presence of local intellectuals as a creative minority who try to include pro-child agendas. But the programs compiled are more normative, rather than innovative. This does not mean that normative programs are not important, but program innovation needs to be pursued more optimally by child-friendly village stakeholders. Of course, normative education programs such as PAUD, TK, TPA, or health such as the Posyandu program are mandatory basic programs. But of course, this is not sufficient in the context of the wider functions of public administration. More serious efforts are needed to read more holistically the totality of the fulfillment of children's rights, so that the state is present not merely to a minimum. In the era of contemporary village autonomy, villages actually have the opportunity to create various innovations to meet the real needs of their citizens, including children.

One important aspect of social capital is trust. Trust is the most important element in public discourse. In the context of the shift in the paradigm of public administration towards governance, there is a transformation in increasing the collective capacity of the community to better organize and manage their collective interests. In this context, informal institutions are now part of the locus of governance that can be key in achieving these collective goals [19]. This informal interaction opens opportunities to strengthen and deepen mutual trust within the community. Community trust in villages in the South Lampung region is quite strong. This is indicated by various social activities that are often carried out by villagers in the form of mutual cooperation. The tendency of social values prevailing in the villages of South Lampung leads to the nature of harmony and harmony, tolerance; mutual cooperation; kinship; ethnic and cultural attachment; social care; and adherence to figures [10]. This finding is in line with the classic study conducted by [23] suggesting that mutual cooperation has been entrenched and spread in social life in Indonesia and is the most important social institution in development. This can be seen as the term *splice*, village cleansing that prevails in Javanese society or the term *krama* in Bali which indicates mutual cooperation activities in regions [24]. This is what shows the typical village character in the midst of the onslaught of globalization, local wisdom and traditional values are still maintained, including in villages in South Lampung. Thus, trust has been internalized in the daily practices of the community, but the trust has not been extrapolated to become the village's power to develop itself to make the village child-friendly.

If the child-friendly village has become a common goal, then to realize it needs to be based on mutual trust. Development and mutual trust are interconnected, and the accompanying processes then accumulate mutual trust. The mutual trust of the villagers can be the initial force that is encouraged, not anymore individual strength, but social strength. Mutual trust is the collective energy of the community to overcome common problems and a source of motivation to achieve mutual economic progress. This mutual trust grows and is rooted in the values inherent in group culture.

Based on document review, in general, village communities in South Lampung Regency are still classified as poor. This condition is a challenge in pushing the child-friendly village agenda, because the village community will focus more on matters relating to their basic economic needs. However, that's where the point of urgency is. The poverty cycle that occurred in the villages of South Lampung

needs to be hacked by starting to discuss seriously the future of the village in the present. One of them, of course, is about the development of children in the village. Because they are the ones who will become the successors of village development. Based on the relatively strong aspects of trust, village governments and stakeholders who have a concern for children need to make efforts to intervene in knowledge to organize themselves in organizing child-friendly villages. This can be done by inventorying all the resources owned by each village, so that the village can focus on its "assets", rather than just focus on the shortages. Community empowerment based on community assets has become a new paradigm in carrying out social transformation in a particular community / region. In the context of this research, this paradigm is more optimistic, because it will focus on the resources of the village. These resources do not need to be material, but can be sourced from the experience of each village. Each village must have experienced activities related both directly and indirectly in terms of fulfilling children's rights. Each village must also have a different character and uniqueness. These things can be strengthened and deepened their role in the implementation of child-friendly villages in the future.

Furthermore, the potential for social capital that needs to be explored is the norms and values that apply and develop in the villages of South Lampung. In the context of this research locus, villages in South Lampung have certain norms that are held tightly by the community. This is still closely related to the mutual trust that has been explained before because trust is one visualization of the existence of collective strength to hold social norms to work together. On the other hand, related to the governance perspective which is the paradigm of this research, norms and values in social capital are important in supporting the sustainability of governance platforms. Governance brings together a number of organizational pluralities, so its presence is also built by a variety of value systems and norms that are carried at the supra-organizational, inter-organizational and inter-organizational levels. In this context the governance is actually loaded with the ties of the value system available in the deposit of its social system.

In developing a child-friendly village, the approach taken must truly be able to touch all parties who have an interest in children's rights, starting from the family, community members, community leaders, religious leaders, institutions and institutions in the village and the village government. A rights-based approach based on values and norms that apply in areas of child-friendly village development can be an effective approach. This approach model tends to be easily accepted by the community considering that the village community is very thick with the values and norms that have long been held by them. Therefore, there needs to be an effort to explore the values and norms that have and are rooted in the life of village communities. Then these findings are developed as a source of strength, as social capital for social transformation in society. Thus the community will not be resistant to the changes made.

Following [19] explanation, social capital as a set of informal values and norms that are shared between members that enable cooperation between them, so there are important points, namely on informal values and norms. This is relevant to village life that is accustomed to an informal lifestyle. Communal values, collectivity and family are inherently inherent in the daily life of villages in South Lampung. Local values of the community are still very awake such as mutual consultation, religious, family and togetherness, mutual cooperation culture, and a friendly community towards the visitors. The dynamics of the process that takes place in the informal village are gradually strengthening trust. Because trust is not born spontaneously. Hierarchical norms are not too significant to foster a commitment of trust in a society. Therefore formal norms that are designed with a strong hierarchical basis, will not help much the emergence of trust [19].

The social formation of the community is determined by the presence of this spirit of mutual trust, and the emergence of this trust is also largely determined by the ties of a more cultural character. Therefore, exploring the culture and matters of local wisdom that are rooted in the life of the village community can be a further step. This is important to find a meeting point between the concept of children's rights and Indonesian culture. There must be no counter-productive assumptions such as children's rights similar to Western cultural products. Yet if you explore, the nation's culture holds various kinds of wisdom that one breath with the convention of children's rights.

Another important aspect of social capital is networking. Networks or relationships in social capital are potentials to synergize and uncover other potentials and capital. The potential of networking and relationships are at the core of the dynamics of community development. The complexity of networks and relationships that are built in a community is one indicator of the strength of the community. Networks and relationships are not only horizontal, but also vertical. Therefore, all forms of networking and relationships are important to be expanded as a dynamic effort for the community to overcome the problems they face [25]. With the presence of networks or relationships allows for coordination and communication that can increase mutual trust that has existed before [21].

Based on observation, the potential of networks in villages in South Lampung is relative. There are villages that have actual networks, some are still potential. For certain villages, social capital in the form of networking has been used outwardly. Villages that are close to the center of government and the center of the economy, social capital is satisfactory and outward oriented. However, unfortunately this social capital only works in the economic field and social capital between villages is not yet optimally connected.

Networking or relationships are one dimension of social capital in addition to trust. The concept of networking focuses more on aspects of bonding between vertices that can be people or groups. In this case there is an understanding of social relations that are bound by the existence of trust which trust is maintained and maintained by existing norms. In the concept of networking, there is an element of work, which through social relations media becomes cooperation. Basically, networks are formed because of a sense of mutual knowledge, mutual information, mutual reminders, and mutual assistance in implementing or overcoming something. In essence, the concept of networking refers to all relationships with other people or groups that enable activities to run efficiently and effectively [26]. This network becomes part of social capital if it is able to be optimized by community members. Networking becomes a resource that gives possibilities for the acceleration of a development process carried out by the community. In this context, limited network capacity is held and utilized by creative minorities who are still elitist in the villages. The creative minorities here are a number of parties, such as community leaders or village elites and village governments who are doing something that has a social impact on their area. From the results of the study of researchers, this happens because the network ecosystem has not yet been developed between villages in South Lampung, so collaboration between villages occurs. The networks that are currently being built are more accidental, rather than starting with a mature empowerment process. Therefore, joint work that needs to be pursued in the future in order to improve the social capital network of villages in South Lampung is to build a collaborative ecosystem between villages. This idea provides an opportunity to strengthen the potential of the village.

Social capital can develop if there is support from an institution that is able to organize the potential of its members. Therefore, extra efforts are needed to develop the capacity of organizations in villages to encourage potential social capital to be more actual. This organization can focus on producing new knowledge and inventorying village resources. In the context of a child-friendly village, the organizations that can be developed can be the village government, community organizations, and of course the children's forum.

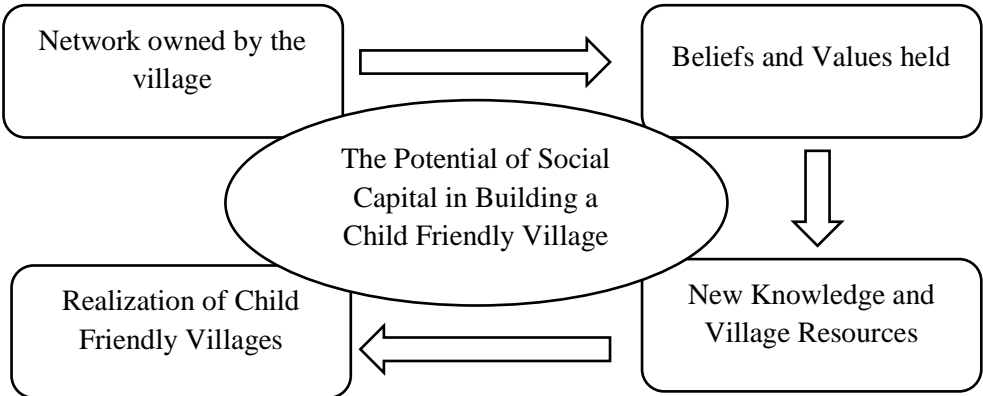


Figure 2. The Potential of Social Capital in Building a Child Friendly Village

From the previous explanation, the researcher compiles an overview that villages in South Lampung basically already have social capital even though the quality is not uniform. This has good potential and can be used as a foundation and a driving force in the development of a child-friendly village. By optimizing village-owned networks (Figure 2), village institutions can cultivate the beliefs and values that are held tightly in the community to be pushed into new knowledge by utilizing the resources of the village. The first step taken in developing a child-friendly village is the existence of an awareness process through education. The production of new knowledge for village communities can be done through various campaigns, workshops and trainings for children, families, communities and village government. This awareness and understanding are the most important and most vulnerable in the effort to develop a child-friendly village. The wrong step will be an obstacle in the next process.

3.4. Actor Participation and Dynamics

South Lampung Regency gradually began to establish itself as a Child-Friendly City (KLA). This commitment needs to be maintained not only at the urban center level, but to the remote villages in South Lampung. City / District Eligible Children is a district / city development system that integrates the commitment and resources of the government, the community and the business world that is planned in a comprehensive and sustainable manner in policies, programs and activities for the fulfillment of children's rights. Finally, in 2019 South Lampung achieved the achievements of the City of Eligible Children along with seven other regions in Lampung Province. This is in line with the mission of the Governor and Deputy Governor of Lampung, namely the empowerment of women in realizing Lampung as a child-friendly province. If all regencies / cities in Lampung Province have won KLA, then the opportunity of Lampung Provincial Government to become a Child-Friendly Province (Provila) in 2020 may be achieved. The fulfillment of children's rights can be realized concretely, for example by establishing a child-friendly school. In this case, it does not mean that the teaching staff concerned, but starting from the snacks must be healthy, a healthy environment, including parenting.

Fulfillment of children's rights is fundamental and must be carried out by the state. However, these efforts must be done synergistically. It is not only a matter of related instantiation, but also all parties ranging from Bappeda, the Education Office, the Health Office, to PUPR must work together, both at the provincial and city level, including when pushed to the village.

To become a KLA, at least the region must fulfill 5 clusters of fulfilling children's rights, namely: (1) Fulfillment of children's civil rights; (2) Family environment and alternative care; (3) Health and Welfare; (4) Education, use of leisure time and cultural activities; and (5) Special Protection.

The five clusters, in several contexts, have been fulfilled by South Lampung Regency which until finally in 2019 won the KLA. However, the challenge now is that the fulfillment of children's rights based on the 5 clusters must be encouraged to be implemented at the village level. In this case, the results of the study of researchers show the fulfillment of children's rights is not optimal. The village, has not given special priority to the fulfillment of children's rights. In fact, the village, as the administrative area closest to the citizens, has great potential to provide child-friendly services. Padahal children are the hope of every parent and family. In a deeper perspective, children are the hope and future of the nation and even the world. Therefore, it becomes crucial and a shared commitment to fulfill the rights of children as human beings and create a world that is appropriate for them. Children are part of the younger generation as one of the human resources who are the potential and successors of the ideals of the nation's struggle, who have a strategic role and have special characteristics and traits, need guidance and protection in order to guarantee their physical, mental and social growth and development.

South Lampung Regency has released several regulations to mainstream children's rights. Among them, 1) South Lampung Regency Regulation No 4 of 2015 concerning Implementation of Child

Protection, 2) South Lampung Regency Regulation No 3 of 2018 concerning Non-Smoking Areas, 3) South Lampung Regent Regulation No 53 of 2017 Regarding Library Transformation in Lampung Selatan, 4) South Lampung Regent Decree No: B / 261 / IV.05 / HK / 2016 concerning the Establishment of South Lampung Regency Children's Forum Management Period 2019 - 2021. The presence of these regulations can be a direction that can be used as a basis for all stakeholders has attention in fulfilling children's rights in South Lampung.

According to the Regulation of the Minister of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 3 of 2011 Article 1 Paragraph 2, "Child Participation is the involvement of children in the process of making decisions about everything related to themselves and carried out on mutual awareness, understanding and willingness so that children can enjoy the results or benefit from the decision. Children need to be involved in decision making, including in making regional development plan decisions to create a city that is feasible for them..

The above shows that children's participation is actually the basis and point of the important parties that guarantee that children are subject to the same human rights so that they are not always the object of a development process. At present, the government has formed and fostered a platform for children's participation called the Children's Forum, which consists of all children and the caretaker consists of representatives of child groups. Children's forum stands with the aim to bridge the interests of children and the interests of adults. A children's forum is a medium, forum or institution for fulfilling the right of participation of the child, to specifically emphasize article 10 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.

In the empowerment paradigm, the community is invited to participate and play a role in the planning, implementation and monitoring and evaluation processes. In fact, it comes to managing the funds and resources available for development. Community participation is community participation starting in the process of identifying problems and potential that exists in the community, as well as finding alternative solutions to solve problems, implementing selected solutions and conducting direct evaluations of changes that occur [27]. Community participation in development such as blood flow in the body; become a necessity. Because the success of a development now cannot rely solely on the government. It is the community as the main subject of development, that involvement can solve the problem of development gaps that occur. Without participation a non-democratic organization is created. In general, this is certainly a contradiction with the task of village government. Whereas the village government has the main task of creating democratic life, providing good social services so that it can bring its citizens to a prosperous, peaceful, and just life [28]. As a form of commitment in responding to the understanding of the importance of children's participation rights to create a world that is suitable for children, the South Lampung District Government also facilitated the establishment of the Children's Forum. However, this seems also still difficult to implement. Children until now are still in the background in the development process. Child welfare is assumed to occur if the development goes well. So the child only exists in the notion and was never put forward consciously and deliberately as an insight into development and not the subject of development. They are only indicators of development, such as infant mortality, infant and child mortality, degrees of participation in education, and so on. The concept of children themselves is also still biased. Children are sometimes seen as adults who are not yet 'made', or are in the process of 'becoming', so they don't need to be taken into account. Though children are resourceful citizens who are able to help better future development for everyone. In fact, in the contemporary context, in the era of rapid information technology transformation, now the opportunity for children is wide open in accelerating their knowledge. With the formation of the South Lampung Regency Children's Forum, this forum needs to be included in the musrenbang activities in South Lampung Regency.

Table 5. Map of Governance at the Village Level

Elemen Governance	Actors	Arena	Relational Issues
--------------------------	---------------	--------------	--------------------------

State	Village head and village official	Regulation, control of society, management, policy, finance, services	Accountability, Transparency, Responsiveness, and Capacity
Political Society	Village Representative Body	Representation, Articulation, Aggregation, Formulation, Legislation, Socialization, Control	Capacity, Responsiveness, and Accountability
Civil society	Social Institutions, Social Organizations, Children's Forums, Community Citizens	Self-help, cooperation, mutual cooperation, social networks	Participation (Voice, Access and Control)
Economic Community	Economic actors and organizations	Production and distribution	Policy Access, Social Accountability

4. Conclusions

In accordance with the objectives of the study, several important things can be formulated as research findings, namely:

1. Fulfillment of children's rights is an absolute must and must be fulfilled to create a nation's next generation of quality and national character.
2. Musrenbang at any level is a forum that must be able to bring together and facilitate the interaction of elements and related actors (stakeholders) to aggregate interests in the program as a quality musrenbang product.
3. As a media and instrument for character formation and awareness of the nation's next generation, early learning and direct involvement of children in musrenbang. Children will get a transformation of knowledge, experience, and self-maturity.
4. deliberative democracy will be carried out in the musrenbang if there is space and opportunity for the interaction and participation of relevant stakeholders.
5. Policy innovation to create child-friendly districts / cities must start at the most basic level, namely village / village development planning meetings.
6. Realization of child-friendly villages / workshops is an aggregation of the functions of social capital, village networks, and the potential of village resources (human resources, village local potential).

References

- [1] Hajer, Maarten, A. and Henderik Wagenaar (eds), 2003. *Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in The Network Society*. Cambridge: Cambridge University Press

- [2] Habermas, J. , 2006, Teori Tindakan Komunikatif Buku I; Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- [3] Tresiana, N., & Duadji, N. ,2016, Kegagalan pemaknaan “Lembaga Musawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa” dalam mewujudkan Deepening Democracy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, **29(4)**, 191–203.
- [4] Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt, 2007, The New Public Service: Serving, Not Steering, (Expanded Edition), New York: M.E. Sharpe.
- [5] Faedlulloh, D., Prasetyanti, R., & Indrawati. , 2017, Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara. *Spirit Publik*, **12(2)**, 43–60.
- [6] Widjaja, H. A. ,2003, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Rafsanjani, H., Supriyono, B., & Suwondo, 2010, Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Adminintrasi Publik*, **1(4)**.
- [8] Soekanto, S. ,1997, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- [9] IULA, & UNICEF, 2001, Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities. (Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
- [10] Duadji, N., & Tresiana, N. , 2016, Pemodelan dalam Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, **12(2)**, 1829–1844.
- [11] Conyers, D. ,1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [12] Kadarsih, R. , 2008, Demokrasi dalam Ruang Publik. *Jurnal Dakwah*. **IX (1)**
- [13] Booher, D. ., & Innes, J. ,2002, Network Power in Collaborative Planning. *Journal of Palnning Education and Research*, **21(3)**, 221–236.
- [14] Chambers, S.,2003,. Deliberative Democratic Theory., *Annual Review of Political Science*, **6(1)**, 307–326.
- [15] Young, I.,2000, Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press.
- [16] Issacs, W, 1999, Dialogue and the Art of Thinking Together. New York: Random House.
- [17] Fox, C. ., & Miller, H. , 1996, Postmodern Public Administration: Toward Discourse. Thousand Oaks: Sage Publication
- [18] Hasbullah, J. , 2006, Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta: MR-United Press.
- [19] Fukuyama, F. ,2001, Sosial Capital: Civil Society and Development. *Third World Quarterly*, **22**.
- [20] Bourdieu, P, 1986, The Form of Capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education. New York: Greenwood Press.
- [21] Putnam, R. , 1993, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press
- [22] Kusumastuti, A. , 2015, Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Insfrastruktur. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, **20(1)**, 81–97.
- [23] Collette, N. , 1987, Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [24] Kartodirjo, S. , 1987, Gotong Royong: Saling Menolong dalam Pembangunan Pembangunan Masyarakat Indonesia. In J. C. Nat & U. Kayam (Eds.), Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [25] Abdullah, S. 2016, Potensi dan kekuatan modal sosial dalam suatu komunitas. *Socius: Jurnal Sosiologi*, **12(1)**, 15–21.
- [26] Lawang, R. M. ,2005, Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik. Depok: FISIP UI Press.
- [27] Isbandi, R. A. , 2007, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran

Menuju Penerapan. Depok: FISIP IU Press.

[28] Sidik, F. , 2015, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, **19(2)**, 115–131.

Acknowledgments

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan pembiayaan melalui skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi tahun Anggaran 2020
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung

LINK:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM8aCYFJ5cP_rt0Dd_r86O65Eaa0e5f3UuRTmB3QSBc_1VEA/viewform?pli=1



Registration Form of The 3rd IC... Registration Form of The 3rd IC...

idoc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS..._r00d_y60831u6c101u40vE83226..._fVA/viewform?usp=1

Email *

newman.dua@fkip.uns.ac.id

Full Name *

Dr. Noveman Duardi M.Si

WhatsApp *

08127564068

Presenter or Participant *

Presenter

Participant

Article Title

Registration Form of The 3rd IC... Registration Form of The 3rd IC...

idoc.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS..._r00d_y60831u6c101u40vE83226..._fVA/viewform?usp=1

Article Title

Child-Friendly And Disaster Response Village Policies
(Study in South Lampung Regency Indonesia)

Topic

public policy

Author 1 (Full Name, Institution, Email)

Dr. Noveman Duardi M.Si

Author 2 (Full Name, Institution, Email)

Dr. Novita Tresiana M.Si

Article Title

Child-Friendly And Disaster Response Village Policies
(Study in South Lampung Regency Indonesia)

Topic

public policy

Author 1 (Full Name, Institution, Email)

Dr. Novriani Rusdi, M.Si

Author 2 (Full Name, Institution, Email)

Dr. Novita Tresiana, M.Si

Transfer:
Account Number: BRN 1408 9100 4814 985 - Irah Masrifah

Upload evidence of transfer here

[Add file](#)

Contact Persons: Dila Novita (+6281210588543), Kamilah Sa'diah (+6281287427279)

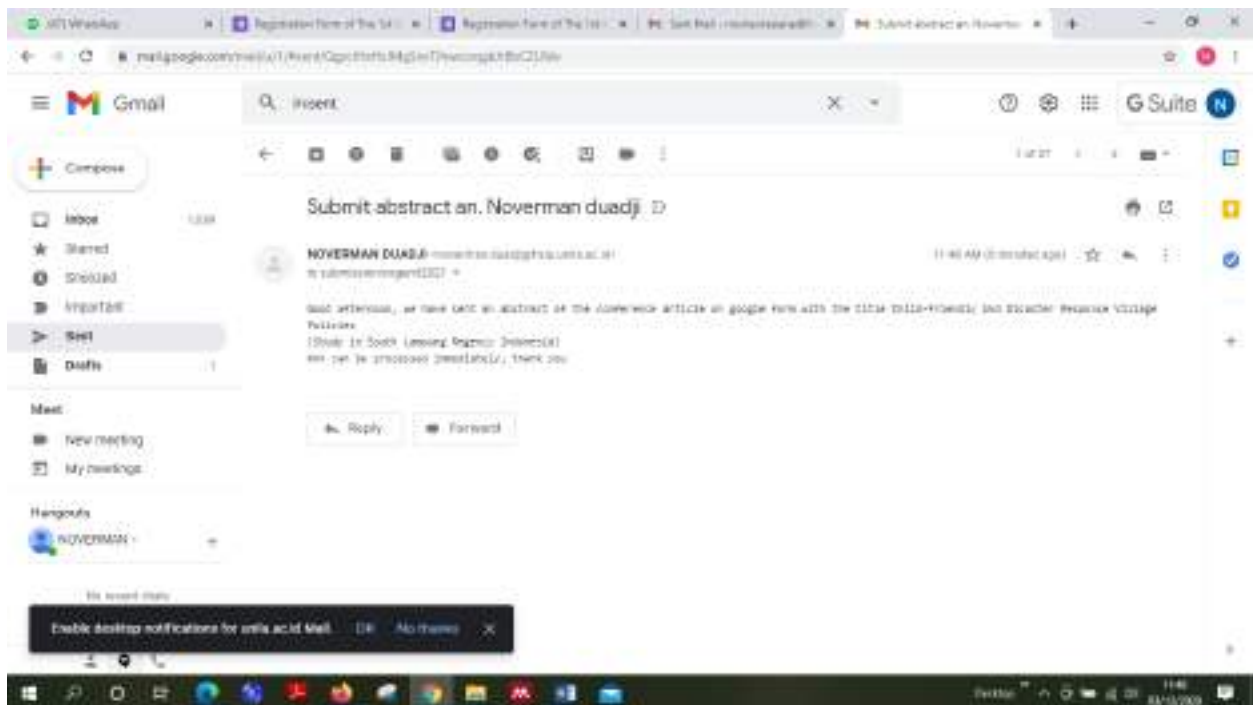
Contact Persons: Dila Novita 📞 0813-1958-8648
Kamilah Sa'diah 📞 0812-8742-7279

Submit

View as PDF, print, or share through Google Forms

This form was created outside of your account. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms



ABSTRACT
Child-Friendly And Disaster Response Village Policies
(Study in South Lampung Regency Indonesia)

Noverman Duadji¹, and Novita Tresiana²

¹Public Administration, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, Soemantri
Brojonegoro 1, Bandar Lampung, Indonesia

noverman.duadji@fisip.unila.ac.id and novita.tresiana@fisip.unila.ac.id

Corresponding author: noverman.duadji@fisip.unila.ac.id

Abstract. The issue of coastal child Rights has a complex character. There is a connection between the trust of the community, with the quality of governance. The study aims at: 1) the condition mapping and potential child-based real data in coastal areas; 2) The strategy of configuring social capital and governance in establishing a public trust in the fulfillment of children's rights. The study used a social mapping approach with survey techniques, with the main subjects being governments, communities (families/parents, and community leaders). The results of this study first, there are several child rights clusters that have been fulfilled, secondly, the public Trust on the fulfillment program of child rights to the Government capital to improve the quality of governance.

Keyword: Children's rights; Community trust; Sound governance body

Dokumen pendukung luaran Tambahan #2

Luaran dijanjikan: Desain

Target: produk

Dicapai: Selesai

Dokumen wajib diunggah:

1.

Dokumen sudah diunggah:

1. Dokumen hasil uji coba/simulasi terakhir desain

Dokumen belum diunggah:

-

Nama Desain: Buku Rancangan Pekon Ramah Anak (PRA)

Pemegang Desain: Dr. Noverman Duadji dan Dr. Novita Tresiana

Link Video Dokumentasi Pengujian: <https://youtu.be/iKZbLj6pUmo>



BUKU PEDOMAN MERANCANG PEKON RAMAH ANAK (PRA)

**Tim Penyusun
Dr. Noverman Duadji, M.Si
Dr. Novita Tresiana, M.Si**

Bandar Lampung, 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Prakata	iii
Pengantar	v

BAB I. RANCANGAN PENGEMBANGAN PEKON

RAMAH ANAK (PRA)

Tahapan Kegiatan Pengembangan PRA	6
Syarat Atau Pra-Syarat Pengembangan PRA ...	7
Langkah-Langkah Pengembangan PRA	10
Instrumen yang digunakan dalam identifikasi masalah	12

BAB II. PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS

MASYARAKAT (PATBM)

Lingkup Kegiatan	21
Memulai PATBM	23
Merencanakan Kegiatan PATBM	26

BAB III. SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)

Konsep Sekolah Ramah Anak	32
Prinsip Sekolah Ramah Anak	33
Tahapan Pembentukan SRA	34

Persiapan	35
Penyusunan Kebijakan SRA	36
Konsultasi Anak	36
Pembentukan Tim SRA	37
Identifikasi Potensial	39
Perencanaan	40
Pelaksanaan	41

BAB IV. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Peran dan Fungsi <i>Community watch</i> PP-TPPO	46
Struktur organisasi <i>Community watch</i> PP-TPPO	47
Mekanisme kerja kepengurusan <i>Community watch</i> PP-TPPO	47
Pembagian tugas <i>Community watch</i> PP-TPPO	48
Sarana penunjang <i>Community watch</i> PP-TPPO	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Pengantar



Alhamdulillah *rabbi'aalamin*, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yaha Maha Penyayang. Tanpa karunia-Nya, mustahil naskah Buku Pedoman Merancang Pekon (desa) Ramah Anak dapat terselesaikan. Perwujudan buku pedoman produk penelitian dasar kompetitif nasional. Buku pedoman ini dituliskan berbasis hasil penelitian dan isu-isu strategis di Kabupaten Lampung Selatan, termasuk isu tindak pidana perdagangan anak dengan berbagai modus, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan

Terselesaikannya penulisan buku ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, Fasilitator PATBM. Meskipun telah berusaha untuk menghindarkan kesalahan, penulis menyadari jika bahwa Buku pedomana rancangan ini masih mempunyai kelemahan sebagai

kekurangannya, karena itu, penulis berharap agar pembaca berkenan menyampaikan kritikan.

Dengan segala harapan agar pengharapan dan keterbukaan, penulis menyampaikan rasa terimakasih dengan setulus-tulusnya. Akhir kata, penulis berharap agar Buku Pedomana merancang Pekon Ramah Anak (PRA) ini dapat membawa manfaat kepada pembaca.

Bandar Lampung, November 2020

Tim Peneliti

BAB I

RANCANGAN PENGEMBANGAN PEKON RAMAH ANAK (PRA)

Indonesia berkomitmen pada pemenuhan hak anak seperti yang termuat dalam KHA, sebagaimana terumuskan pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat.

Tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak diupayakan oleh Kementerian PPA sebagai urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

Pengertian Hak Anak dalam Kerangka Konvensi Hak Anak Pengembangan Kebijakan PRA merujuk kepada Konvensi

Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

Prinsip yang menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak anak tersebut adalah:

- a. Non-Diskriminasi Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan Terbaik bagi Anak Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

- d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Dalam kebijakan pengembangan PRA ada beberapa pengertian yang perlu dipahami bersama.

1. Yang dimaksud dengan ANAK adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Yang dimaksud dengan HAK ANAK adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Yang dimaksud dengan Desa/kelurahan Layak anak (PRA) adalah pembangunan desa dan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka: memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan

berkelanjutan. PRA identik dengan pemberian label bahwa aspirasi anak dipertimbangkan dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kebijakan Pengembangan PRA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

1. Non-diskriminasi: Yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan terbaik bagi anak, Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
4. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Desa/kelurahan dan kecamatan merupakan wilayah yang tepat untuk melakukan inisiatif pengembangan PRA, pada wilayah desa/kelurahan atau kecamatan terdapat kewenangan atau otoritas untuk membuat komitmen politik yang lebih kuat. Selanjutnya komitmen politik tersebut diimplementasikan di tingkat desa atau kelurahan.

Tahapan Kegiatan Pengembangan PRA

1. Sosialisasi pengembangan PRA di pekon/desa/kelurahan Untuk memastikan bahwa aparat desa/kelurahan dan warga desa/kelurahan memiliki pemahaman yang sama tentang pembangunan kesejahteraan perlindungan anak dan kebijakan kabupaten/kota layak anak;
2. Advokasi pemilihan RT, RW atau kawasan pemukiman, kompleks perumahan seperti perumnas, BTN, kavling dll menjadi Desa/Kelurahan Layak Anak (PRA);
3. Penelaahan kebutuhan (*Needs Assessment* PRA) Menginventarisir apa potensi desa/kelurahan yang dapat mendukung kebijakan RT, RW atau kawasan pemukiman, kompleks perumahan seperti perumnas, BTN, kavling dll ramah anak;

4. Asistensi pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak
5. Implementasi desa/kelurahan ramah anak, mengikuti tahapan seperti pengembangan PRA.

Syarat Atau Pra-Syarat Pengembangan PRA

Kemauan dan komitmen aparat desa/kelurahan
Komitmen politik merupakan langkah pertama pengembangan PRA. Hal ini diwujudkan dalam bentuk keputusan atau kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan di bidang anak yaitu; aparat kecamatan, desa /kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan pimpinan organisasi kemasyarakatan di wilayah tersebut, untuk mewujudkan kecamatan, desa/kelurahan yang layak bagi anak. Komitmen tersebut perlu disosialisasikan sehingga semua warga desa dewasa maupun anak-anak mengetahui bahwa di desa/kelurahan mereka dikembangkan PRA anak.

Adanya surat keputusan atau surat edaran kepala desa/kelurahan sebagai implementasi Perda, SK, Instruksi atau Surat Edaran bupati/walikota tentang perlindungan anak dan/atau pengembangan PRA Keputusan hukum tentang pengembangan PRA harus ada di desa/kelurahan sebagai dasar hukum pelaksanaan PRA dan dipelajari

secara sungguh-sungguh oleh aparat kecamatan, desa/kelurahan. Sehingga pelaksanaan PRA di wilayah tersebut resmi dan berdasarkan kebijakan atau hukum yang berlaku. Bila tidak ada kebijakan dalam bentuk perda, SK bupati/walikota dan sejenisnya maka kepala desaa/lurah dapat membuat surat keputusan sendiri berdasarkan kebutuhan anak-anak di desa/kelurahan tersebut. Keputusan tersbut hendaknya merujuk kepada produk hokum yang lebih tinggi seperti UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Kesejahteraan Anak dll.

Adanya baseline data/data basis dan peta anak

Data basis anak diperlukan untuk membuat perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang lebih baik, tepat sasaran dan tepat waktu.

Data basis tersebut dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan, untuk itu data basis sebaiknya berdasarkan 5 klaster pemenuhan hak anak yang terpilah jenis kelamin.

Sosialisasi hak anak Untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Sosialisasi hak anak dapat di masukkan dalam berbagai kegiatan penyuluhan lainnya. Pengajian dan perkumpulan warga

yang ada di desa/kelurahan seperti pengajian, arisan, mimbar jum'at, khutbah jum'at, kebaktian atau acara keagamaan lainnya dapat dijadikan media sosialisasi hak anak.

Partisipasi anak dalam bentuk forum anak

Ada upaya kepala desa/lurah untuk bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat di bidang perlindungan anak

Langkah-Langkah Pengembangan PRA

1. Membuat kesepakatan pengembangan PRA
2. Membentuk panitia pelaksana DLA (gugus tugas PRA)
3. Mengumpulkan data dasar anak
4. Menentukan fokus dan prioritas program pengembangan desa/kelurahan layak anak
5. Menyusun rencana kegiatan kegiatan pengembangan desa/kelurahan layak anak
6. Monitoring dan Evaluasi

Identifikasi masalah pemenuhan hak anak adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah pemenuhan hak anak dalam lima klaster hak anak.

Masalah pemenuhan hak anak bisa ditemukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan (observasi, atau survey).

Identifikasi masalah dibutuhkan untuk pengembangan desa/kelurahan layak anak (PRA) dalam rangka Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Indonesia. Dengan mengidentifikasi masalah, maka posisi program KLA dapat diketahui dari gambaran atas kondisi existing pemenuhan hak anak, isu sgrategis, serta menganalisis peran dan mekanisme kelembagaan untuk pengembangan kelurahan layak anak. Tanziha *et al* (2014) menjadikan data mengenai posisi PRA tersebut sebagai sumber bagi pengambilan keputusan atas masalah yang dihadapi untuk pengembangan PRA berdasarkan kriteria:

1. Penguatan hukum yaitu Kebijakan/aturan kelurahan, SK gugus tugas dan komitmen pimpinan
2. Koordinasi program berupa Kerjasama dan koordinasi antar gugus tugas, lembaga lokal terkait dan partisipasi masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur berupa Kapasitas sumberdaya manusia, pelatihan kader, anggaran dan fasilitas fisik.

Dalam identifikasi masalah, kita harus sudah mengetahui tentang hak-hak anak, tentang target pencapaian pemenuhan hak anak, dan tentang proses atau mekanisme pemenuhan hak anak dalam lingkup pengembangan PRA.

Instrumen yang digunakan dalam identifikasi masalah

Pentunjuk:

1. Instrumen disusun berdasarkan kelembagaan dan lima klaster pemenuhan hak anak.
2. Pengisian hasil observasi dilakukan dengan mengisi pada kolom keterangan.
3. Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap aparat desa, kader, tokoh masyarakat, pengusaha, dan orang tua anak atau melalui analisis data sekundair dari laporan desa/kelurahan, data posyandu atau dari data UPT terkait.
4. Identifikasi masalah dalam bentuk fisik atau lingkungan dilakukan melalui observasi.
5. Pengisian hasil wawancara/observasi dilakukan pada kolom kondisi real.

Dalam Permen PPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan bahwa Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di

tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Demikian juga Gugus Tugas PRA adalah lembaga koordinatif di desa/kelurahan, yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan PRA. Gugus Tugas menjadi daya ungkit yang kuat bagi terwujudnya PRA. Selain Gugus Tugas, maka sumberdaya yang dapat digunakan untuk menguatkan kelembagaan PRA.

Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Upaya untuk menumbuhkan suasana dan lingkungan tempat tinggal yang memastikan bahwa anak menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dimulai dari pemetaan identifikasi masalah dalam pelaksanaan KLA.

Menurut Permen PP dan PA no 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila

telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Indikator KLA meliputi:

a. Penguatan kelembagaan dan kluster hak anak. Penguatan kelembagaan KLA yang dimaksud yaitu:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
4. Tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
5. Tersedia data anak terpilah;
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; *Stakeholder* dalam kelembagaan KLA meliputi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Untuk tujuan penguatan kelembagaan KLA maka data mengenai identifikasi masalah perlu disampaikan untuk mengetahui isu strategis yang berlangsung

dan posisi kelembagaan KLA yang sedang dibangun.

Alokasi anggaran Dana Desa berdasarkan UU Desa yang tercantum dalam Permendes No 5 adalah untuk:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa
3. Pembangunan potensi ekonomi local
4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Dengan demikian maka kebutuhan anak coba didekati melalui alokasi no 1, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana serta prasarana desa. Pemenuhan kebutuhan dasar sudah memuat alokasi untuk sarana kesehatan Pos Kesehatan Desa, Posyandu, dan PAUD, sementara itu untuk pembangunan sarana desa belum banyak mengakomodir kebutuhan anak dimana alokasinya digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan tani, hingga irigasi. Oleh karena itu masih diharapkan peran dari Dinas-Dinas pemerintah lainnya yang terkait pemenuhan hak anak baik dalam intervensi dana koordinasi maupun membuat anggaran program untuk pemenuhan hak anak.

BAB II
RANCANGAN DAN FORMULA MELAKSANAKAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM)

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Pemerintah dan berbagai lembaga terkait telah banyak melakukan program/kegiatan yang mendukung terpenuhinya perlindungan anak. Beberapa tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, diterapkan dan ditegakan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan.
- b. Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk

mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan

- c. Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan

Terbangunnya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi, mendeteksi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku Anak. Beberapa tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Ada kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak- anak korban kekerasan
- b. Tersedia layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman diakses oleh korban atau keluarga korban, atau pelapor lainnya.
- c. Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku dan menangani anak beresiko.

Sasaran utama yang akan dilindungi adalah anak, untuk mewujudkan perlindungan anak.

Lingkup Kegiatan

1. Tingkat anak-anak: kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan.
2. Tingkat Keluarga: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga.
3. Tingkat Komunitas atau masyarakat desa: Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut serta membangun responsibilitas masyarakat.

PATBM merupakan sumbangan masyarakat yang sangat berarti bagi perlindungan anak di Indonesia ini, karena melalui PATBM bisa dibudayakan norma sosial dan budaya yang melindungi anak, memperkuat ketrampilan orang tua dalam pengasuhan anak, melatih anak agar bisa melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan kekerasan yang bisa terjadi serta masyarakat mampu untuk mengenali dan menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan.

Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

PATBM: sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak yang kegiatannya mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan anak pada tingkat desa/ kelurahan.

Memulai PATBM

Pada dasarnya ide PATBM bisa dibicarakan di antara semua unsur masyarakat.

1. Buatlah Tim Inti untuk memudahkan koordinasi yang terdiri dari beberapa orang yang berkomitmen tinggi.
2. Tim Inti yang telah dibentuk menyampaikan ide dan gagasan tersebut kepada perangkat desa (Kepala Desa/Lurah)
3. Dalam membentuk PATBM perlu adanya keyakinan dan komitmen yang disampaikan dan disepakati bersama tentang prinsip dasar yaitu:
 - a. Peduli terhadap kepentingan anak

- b. Bertanggung jawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak.
- c. Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat.
- d. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
- e. Non diskriminasi
- f. Bisa bekerjasama dengan anak dan mendukung partisipasi anak.
- g. Membangun kerjasama dengan lembaga desa, perangkat desa dan mitra masyarakat lainnya.
- h. Memperkuat kegiatan perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

Merekrut atau memilih aktivis di desa/ kelurahan untuk melaksanakan PATBM. Dalam memulai kegiatan, Pemerintah Desa di bantu oleh Tim Inti bisa mengidentifikasi orang-orang yang akan menjadi aktivis PATBM. Tugas Aktivis:

1. Mengenalkan PATBM dan menggerakkan partisipasi warga untuk ikut menjadi kader dalam kegiatan ini, serta menggalang dukungan (material

maupun non material termasuk sumbangan pemikiran) untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan PATBM.

2. Membangun tim aktivis yang kompak dan efektif dalam mengelola kegiatan perlindungan anak di wilayahnya.

Tahapan dalam memetakan permasalahan anak di desa/kelurahan

1. Mulailah kegiatan dengan memetakan permasalahan anak di desa/kelurahan
2. Mengidentifikasi dan memahami peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala kekerasan yang ada maupun yang mungkin terjadi, mencermati sebab-akibatnya, upaya yang sudah dijalankan, merumuskan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, mengidentifikasi dan menilai kemungkinan pendayagunaan sumber daya yang ada

Merencanakan Kegiatan PATBM

1. Yakini langkah ini penting untuk menyusun rencana kegiatan agar lebih efektif
2. Catat peristiwa atau gejala kekerasan yang pernah terjadi, rinci jenisnya dan perbedaan korbannya,

tingkat keseriusannya, di mana saja tersebar dan jumlah di setiap titik wilayah tertentu. Diskusikan di mana saja ada kerawanan terjadinya kekerasan misalnya terkait peristiwa peristiwa konflik.

3. Buat peta wilayah, dan buat tanda (simbol) yang menunjukkan di mana saja pernah terjadi jenis kasus atau kerawanan kekerasan dan tingkat keseriusan, dan jumlah anak korban maupun yang berada dalam situasi rawan.
4. Diskusikan keadaan masalah, sebab, dan akibat yang ditimbulkan.

Menggerakkan sumber daya dalam melaksanakan kegiatan PATBM. Untuk menggerakkan sumberdaya dalam melaksanakan PATBM di desa/kelurahan bisa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Ajaklah warga masyarakat yang potensial dan mempunyai kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan
2. Ajaklah berdiskusi tentang konsisi anak, kekerasan anak dan dampaknya serta cara pencegahannya.
3. Yakinkan bahwa perlindungan anak merupakan kebutuhan setiap anggota masyarakat
4. kan bahwa warga tersebut mampu mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan

pengecegan dan penanganan kekerasan anak tersebut secara bersama- sama

5. Sampaikan bahwa di desa/kelurahan sudah ada PATBM dan tiap warga masyarakat yang bersedia bisa menjadi kader untuk menggerakkan masyarakat disekitarnya melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pengelolaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan PATBM. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan PATBM, yaitu:

1. Bersifat terbuka: semua unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian dan berminat pada perlindungan anak di desa/ kelurahan bisa bergabung dalam PATBM
2. Sukarela: sistem kerjanya adalah sukarela, tanpa paksaan dan sebagai pekerja sosial tanpa dibayar.
3. Transparan: kegiatan yang dilaksanakan dan pembiayaan yang ditimbulkan dikelola dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat
4. Non Diskriminasi: kegiatan dilaksanakan dan ditujukan untuk semua unsur masyarakat tanpa memandang ras, suku, agama, golongan dan status social.

Ukuran keberhasilan dibutuhkan untuk:

1. Memberikan informasi yang lengkap atas kegiatan yang telah dikembangkan dan dilaksanakan dalam rangka menanggapi suatu kebutuhan atau kondisi tertentu dalam melaksanakan perlindungan anak oleh PATBM.
2. Sebagai patokan keberhasilan dari capaian PATBM

Pembagian kerja perlu dilakukan untuk mempermudah cara kerja dalam melaksanakan PATBM. Pembagian kerja ditentukan oleh aktifis PATBM berdasarkan musyawarah. Dengan adanya pembagian kerja diharapkan Aktifis PATBM bisa menyesuaikan antara tugas-tugas yang dilaksanakan setiap hari dengan tugas sosial di PATBM. Kegiatan PATBM disarankan dilaksanakan menyatu dengan kegiatan masyarakat setempat yang telah ada.

1. Penggerakan masyarakat agar berpartisipasi dalam mendukung, melaksanakan, dan mengevaluasi PATBM dilakukan oleh aktivis PATBM dan para pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat setempat melalui perbuatan-perbuatan yang menjadi contoh tauladan dalam

melindungi anak, memafaatkan pelayanan PATBM, dan kampanye.

2. Berbagai bentuk kampanye yang dapat dilakukan antara lain melalui media (leaflet, kartun, foto atau film), dialog interaktif atau kampanye yang dipadukan dengan kegiatan seni atau olah raga atau bazaar sehingga menarik perhatian
3. Publikasi kesuksesan atau testimoni, atau perbandingan pengalaman dalam pengelolaan kegiatan perlindungan anak dari lokasi lain yang memiliki catatan sukses
4. Memberian penghargaan terhadap Tim PATBM atau orang-orang yang telah memberi kontribusi besar dalam pengembangan PATBM atau pada pemerintah lokal yang sudah dinilai berhasil mengembangkan PATBM

Sesuai sifat kegiatan PATBM yang terbuka, maka setiap warga masyarakat yang tertarik untuk bergabung dengan PATBM bisa menjadi kader PATBM di desa. Oleh karena itu aktifis bisa bekerja dengan dibantu kader-kader ataupun bahkan semua anggota masyarakat yang sukarela membantu kegiatan PATBM.

Tugas utama PATBM pada intinya adalah memberikan informasi tentang cara-cara melakukan perlindungan anak

agar anak-anak terhindar dari kekerasan dan hak-haknya sebagai anak bisa dipenuhi.

Informasi yang dicari tidak semata-mata yang berkaitan dengan materi perlindungan anak saja tetapi informasi tentang cara-cara informasi ini bisa disosialisasikan dan diterapkan untuk kegiatan dengan anak, orang tua maupun masyarakat.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh PATBM baik kegiatan yang dilakukan secara bersama atau kegiatan yang dilakukan oleh individu harus dicatat dalam buku catatan. Buku catatan meliputi catatan kegiatan dan catatan administrasi (keuangan).

Buku catatan kegiatan yang perlu disediakan adalah:

1. Buku catatan kegiatan: buku ini mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM yang berisi informasi tentang nama kegiatan, tempat kegiatan, sasaran, materi kegiatan dan daftar hadir serta notulensi kegiatan.
2. Buku catatan individu: buku ini adalah catatan harian kegiatan individu tiap aktifis tentang kegiatan yang dilakukan terkait perlindungan anak yang dilaksanakan secara formal maupun informal.

3. Buku catatan kasus kejadian kekerasan anak: Buku ini adalah buku yang berisi catatan kejadian kekerasan anak (fisik, psikis, seksual) di desa/kalurahan yang diketahui oleh aktifis baik itu dilaporkan ataupun tidak dilaporkan.

Buku administrasi yang perlu disediakan adalah:

1. Buku laporan keuangan: buku ini berisi tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh PATBM
2. Buku Data Dasar: buku ini berisi data-data tentang kondisi masyarakat setempat seperti data jumlah penduduk, data jumlah anak, jumlah anak putus sekolah, jumlah anak difabel dll.
3. Buku Tamu: buku ini disediakan untuk mendata tamu dan kunjungan di PATBM setempat.

Beberapa pertemuan yang bisa diagendakan adalah sebagai berikut:

Pertemuan rutin aktifis: diperlukan untuk menjaga rutinitas kegiatan yang dilaksanakan serta membicarakan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Pertemuan rutin dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota, tetapi setidaknya satu kali dalam 1 bulan.

Pertemuan insidental: pertemuan yang dilakukan pada waktu tertentu apabila ada sesuatu yang penting harus dibicarakan. Pertemuan ini dikoordinasi oleh ketua aktifis.

Pertemuan koordinasi: pertemuan yang dilaksanakan antara aktifis serta perangkat desa serta tokoh masyarakat. Pertemuan ini membicarakan langkah-langkah strategis dan perkembangan pencapaian PATBM di desa. Pertemuan setidaknya dilakukan dalam satu kali selama 6 bulan.

Kualitas kegiatan PATBM ditentukan dari proses dilaksanakannya kegiatan. Proses yang baik akan menentukan kualitas hasil kegiatan yang lebih baik (mutu yang baik).

Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) perlu dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan apakah kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi memberikan informasi yang berguna untuk penyempurnaan strategi gerakan ini dan menyampaikan laporan kepada pihak lain seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. Proses monitoring dan evaluasi harus berjalan bersamaan dengan pelaksanaan program sehingga proses ini mampu

mendorong terjadinya perbaikan pelaksanaan kegiatan secara terus menerus.

Secara garis besar ada empat jenis indikator yang dikembangkan dalam pelaksanaan M&E dalam implementasi PATBM ini yaitu:

1. Indikator program yang pada dasarnya mencakup ukuran- ukuran untuk melihat PATBM mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
2. Indikator Perilaku yang mencakup ukuran untuk menilai perubahan perilaku terkait dengan perubahan persepsi tentang kekerasan dan norma tentang kekerasan dan perilaku yang mendukung perlindungan anak.
3. Indikator dampak yang pada dasarnya mencakup ukuran untuk menilai kualitas hidup anak khususnya dengan kejadian kekerasan terhadap anak dalam masyarakat.

Banyak pihak yang bisa diajak untuk mengembangkan PATBM di Desa, yaitu:

1. Dari Internal Desa: Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh

Masyarakat atau masyarakat lain yang bisa dan bersedia ikut mengembangkan PATBM

2. Dari Eskternal Desa: Individu atau Lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan anak

Regenerasi adalah bagian dari keberhasilan berjalannya PATBM di desa, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Regenerasi dilakukan dengan mengajak dan menggerakkan lebih banyak masyarakat untuk menjadi kader perlindungan anak.

Untuk memastikan keberlanjutan PATBM, maka perlu dilakukan pembicaraan dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, orang tua dan seluruh unsur masyarakat di desa. Langkah yang dilakukan adalah:

1. Meyakinkan bahwa PATBM adalah bagian dari kebutuhan masyarakat oleh karena itu harus didukung terus-menerus dan memastikan mereka mengikuti setiap kegiatan.
2. Ajak mereka bicara untuk memberi masukan tentang rencana keberlanjutan baik dari sisi kegiatan, SDM dan Pembiayaan

3. Pastikan ada dukungan dari perangkat desa terkait penggunaan dana desa sebagai bagian pembiayaan kegiatan PATBM

Untuk mengamankan pendanaan PATBM, maka harus ada sumber pembiayaan yang sifatnya permanen untuk operasional dan dukungan kegiatan. Sumber dana permanen yang bisa diusahakan adalah melalui pemanfaatan dana desa. Untuk memastikan bisa mendapatkan dana desa maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pastikan bahwa ada kegiatan perlindungan anak atau lebih spesifik lagi kegiatan PATBM di dalam rencana kerja desa sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat melalui tatacara musrenbangdes
2. Untuk bisa memasukkan kegiatan dalam anggaran desa, maka PATBM harus sudah mempunyai SK Kepala Desa
3. Selanjutnya bisa mendorong pihak desa menerbitkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak untuk mendapatkan dasar kegiatan yang lebih mantab

Dalam kegiatan PATBM ini anak tidak hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek, artinya anak harus ikut berperan dalam kegiatan tersebut. Peran anak sangat penting sebagai bagian dari pemenuhan hak.

Berbagai catatan tentang keterlibatan anak adalah sebagai berikut:

1. Pendapat anak perlu didengar dalam menentukan kebijakan, kegiatan dan langkah ke depan PATBM oleh karena itu perlu melibatkan anak pada proses tersebut
2. Anak-anak bisa mengusulkan kegiatan yang dilaksanakan PATBM
3. Anak-anak atau perwakilannya dilibatkan untuk menjadi aktifis

BAB III

MERANCANG SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)

Sekolah Ramah Anak lahir tidak terlepas dari adanya Program untuk mengembangkan Kota Layak Anak karena di dalam Kota Layak Anak pemenuhan 31. Hak anak salah satunya melalui adanya Sekolah Ramah Anak. SRA merupakan salah satu indikator penting dari evaluasi Kota Layak Anak. Selain itu tujuan disusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Keinginan untuk menjadikan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah dan menyenangkan, sebagai bentuk perwujudan dari Sekolah Ramah Anak sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh

berbagai pihak. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Konsep Sekolah Ramah Anak

Konsep Sekolah Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.

Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Data sampai bulan Desember 2015, sampai saat ini ada 278

kab/kota yang telah menginisiasi menjadi Kab/Kota Layak Anak.

Prinsip Sekolah Ramah Anak

Pembentukan dan Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Nondiskriminasi** yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
2. **Keentingan terbaik bagi anak** yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
3. **Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan** yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
4. **Penghormatan terhadap pandangan anak** yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal

yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah;
dan

5. **Pengelolaan yang baik**, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Komponen Sekolah Ramah Anak

Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini:

1. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak; Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
2. Sarana dan Prasarana yang ramah anak;
3. Partisipasi Anak; Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

Tahapan Pembentukan Sekolah Ramah Anak

Langkah-langkah dalam penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dimulai dari persiapan dan

perencanaan melalui kegiatan Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dan SRA, Penyusunan Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan, Konsultasi anak, dan Pembentukan Tim Pelaksana SRA, pelaksanaan dan pemantauan sebagaimana proses manajemen yang selama ini kita kenal. Selengkapnya langkah-langkah dalam tahapan pembentukan SRA adalah sebagai berikut:

PERSIAPAN

Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Sosialisasi menekankan hakikat sekolah ramah anak untuk memastikan bahwa di dalam lingkungan sekolah anak mendapatkan haknya, serta mendapat perlindungan. Ketika anak bersekolah, anak sudah mendapatkan haknya atas pendidikan, namun hak atas pendidikan itu tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip KHA, oleh karena itu sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak harus dilakukan baik sekolah bekerjasama dengan instansi terkait. Dalam proses sosialisasi ditekankan akan pentingnya warga sekolah menyadari bahwa sekolah bukanlah lembaga yudikatif

yang berfungsi memberikan hukuman untuk efek penjeratan kepada anak melainkan dikembalikan kepada fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, pembinaan dan tempat dimana 8 jam sehari atau 1/3 waktu anak sehari-hari berada dalam pengasuhan guru sebagai pengganti orang tua.

Penyusunan Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Komitmen tentang pemenuhan dan perlindungan anak di satuan pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak perlu diperkuat dengan menyusun kebijakan tentang pelaksanaan SRA di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan SRA di Satuan Pendidikan yang berasal dari unsur Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Guru, Wakil Guru BK, Wakil OSIS, Wakil peserta didik dari setiap jenjang kelas, wakil dari Komite Sekolah/madrasah, wakil dari persatuan Orang Tua/Wali atau dapat ditambahkan juga wakil dari alumni untuk mewujudkan SRA.

Konsultasi Anak

Sesuai dengan salah satu prinsip dalam Konvensi Hak Anak yakni menghargai pandangan anak, maka perlu dilakukan konsultasi dengan anak untuk memberikan ruang kepada

anak untuk turut berpartisipasi dalam persiapan dan perencanaan SRA ini.

Tata cara melakukan konsultasi anak

1. Perwakilan anak perempuan dan anak laki-laki dipilih dari setiap kelas oleh sesama peserta didik.
2. Konsultasi dilakukan dengan metode partisipatif untuk menggali sebanyak mungkin informasi tentang apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan sekolah dalam menjamin, melindungi dan menghormati hak anak.
3. Konsultasi anak dipimpin oleh pendidik.
4. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyusun Rekomendasi hasil konsultasi anak tersebut.

Pembentukan Tim Pelaksana SRA

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana SRA:

- (1) Pembentukan Tim SRA di Satuan Pendidikan yang berasal dari unsur Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Guru, Wakil Guru BK, Wakil OSIS, Wakil peserta didik dari setiap jenjang kelas, wakil dari Komite Sekolah/madrasah, wakil dari persatuan

Orang Tua/Wali atau dapat ditambahkan juga wakil dari alumni

- (2) Pembentukan Tim SRA yang merupakan gabungan dari Tim internal di satuan pendidikan (poin dengan tim Gugus tugas KLA pada Kluster 4. Pembentukan Tim maupun penyusunan kebijakan didampingi dan dapat difasilitasi oleh Kemen PP dan PA/Badan PP dan PA /Unit yang menangani anak di daerah/ Bappeda/atau unsur lainnya yang berkepentingan.

Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana SRA

- (1) Tugas Tim Pelaksana SRA secara umum adalah mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA
- (2) Tugas masing-masing bidang:
Pembina: Mendampingi dan memfasilitasi proses pembentukan dan pengembangan SRA;
Penanggung Jawab: Memastikan semua program berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketua pelaksana: memastikan dan mengontrol semua pelaksanaan SRA dari mulai pembentukan sampai pelaksanaan program untuk mendukung tercapainya SRA;

Bidang Pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah anak: memastikan dan mengawasi penggunaan disiplin positive dalam proses ajar mengajar di sekolah termasuk menginventarisir dan membuat komitmen penggunaan disiplin positive yang akan diterapkan;

Bidang Koordinasi dan Sosialisasi: mengkoordinasikan semua program dengan pihak terkait termasuk memastikan keterlibatan anak dalam proses pembentukan dan pengembangan SRA;

Bidang Monitoring dan Evaluasi: melakukan monitoring atas pelaksanaan semua program sejak pembentukan sampai pelaksanaan program. Perlu dicatat anggota Tim monitoring harus melibatkan unsur peserta didik/anak.

Identifikasi Potensi

Proses mengidentifikasi potensi dilakukan bersama wakil pendidik dan tenaga kependidikan bersama saam wakil

anak serta wakil dari kelompok yang ada di sekolah. Dalam proses dipetakan potensi yang telah dimiliki atau yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk membantu mewujudkan SRA.

PERENCANAAN

Dalam tahap ini dilakukan proses penyusunan rencana atau program inovasi untuk mewujudkan SRA termasuk merencanakan kesinambungan program dan kerjasama menyusun skema pengembangan SRA di sekolah sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam RKAS dengan jejaring, khususnya dengan dinas atau lembaga yang sudah mempunyai program yang berbasis sekolah dan program tersebut mendukung SRA. Contoh : Sekolah Adiwiyata, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Aman, Sekolah Tanpa Kekerasan, Sekolah/kawasan Tanpa Rokok, Kawasan Anti NAPZA, Pangan Jajan Sehat, Kantin Kejujuran, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Gerakan Makan Ikan, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan lain-lain. Diperlukan upaya untuk menyesuaikan situasi, kondisi dan kemampuan satuan pendidikan dengan mengoptimalkan semua sumberdaya sekolah,

bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu jika diperlukan dibuat perbaikan tata tertib agar dapat mengakomodir suara anak dan isi tata tertib tidak larangan maupun bersifat hukuman namun dibuat sebagai suatu kesepakatan yang disepakati bersama antara pendidik dan tenaga kependidikan bersama anak. Dalam tahapan ini pula dibuat mekanisme pengaduan (contoh terlampir) sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak. Mekanisme pengaduan dibuat untuk tiga kondisi yaitu 1). Korban, 2). Saksi yang melihat adanya korban dan 3). warga sekolah yang melihat adanya situasi yang dapat mengakibatkan adanya korban segera dapat meminta bantuan untuk mencegah hal tersebut terjadi atau untuk korban dapat segera ditangani. Mekanisme pengaduan melibatkan Tim SRA yang ada di Sekolah dan jejaring penanganan kasus yang berada di luar sekolah.

PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan adalah tahapan dimana Tim dan seluruh warga sekolah melaksanakan program yang telah

dibuat bersama untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Dalam tahapan ini komitmen dan kerjasama antara Tim dan jejaring dan warga sekolah sangatlah penting dan diuji agar program yang sudah direncanakan dan disepakati bersama dapat dilaksanakan secara benar dan berkesinambungan.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam tahapan ini dilakukan proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan melibatkan Tim Sekolah dan Tim gabungan dengan sasaran pada anak, pendidik dan tenaga kependidikan.

- A. Pelaksanaan pemantauan disarankan dilakukan dengan cara:
1. Memberikan kuesioner kepada Kepala Sekolah dan wakil dari pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam proses ini diperlukan terlebih dahulu penyusunan kuesioner sebagai instrument pemantauan.
 2. Pemantauan bersama yang merupakan gabungan dari dinas dan lembaga terkait SRA ke sekolah untuk melihat langsung dan berbincang langsung serta mendapatkan informasi dari sekolah

khususnya anak mengenai kondisi sekolah secara riil, apa yang mereka rasakan serta keluhkan.

Dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas KLA. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program terkait lainnya agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemantauan Internal

Tim Internal satuan pendidikan menyusun instrument pemantauan dengan bantuan pendamping dengan mengacu kepada instrument yang dibuat oleh KPPPA.

b. Pemantauan Eksternal

Tim SRA yang melibatkan gugus tugas KLA kluster 4 dan Dinas/ lembaga lainnya melakukan pemantauan dengan mengacu kepada instrument yang dibuat oleh KPPPA dan dimungkinkan disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak menutup kemungkinan pemantauan dilakukan oleh KPP dan PA sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

MERANCANG KOMUNITAS PEDULI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN ANAK

Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan angka putus sekolah serta rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat, khususnya perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mengantisipasi hal itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA RI) mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas. Dalam pencegahan TPPO, salah satunya diluncurkan dokumen sebagai fokus pokok program dan kebijakan, yaitu: inisiasi pembentukan *Community Watch* (komunitas peduli).

Community Watch, di tingkat desa merupakan sebuah sistem mekanisme berbasis komunitas masyarakat yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang perdagangan orang ke seluruh lapisan masyarakat. Program ini mirip sistem keamanan lingkungan atau

siskamling dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama karena mereka yang tahu persis keadaan daerahnya untuk ikut mengawasi adanya indikasi TPPO. Melalui *Community Watch* diharapkan terbangun perspektif, mekanisme kerja TPPO berbasis komunitas, juga tercipta koordinasi kerja secara terpadu, dukungan dan sinergi dalam pencegahan dan penanganan TPPO antara lembaga formal dengan komunitas. Dalam tataran implementasi, *community watch* harus berpegang teguh pada prinsip kemandirian, imparialitas (perlakuan yang adil), sinergitas, partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan (KPPPA RI, 2018).

Membangun mekanisme *Community Watch* diperlukan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu:

1. Siapa pihak yang terlibat dalam pembangunan *community watch*;
2. Bagaimana langkah-langkah pembangunan *community watch*;
3. Bagaimana kedudukan dan fungsi *community watch* PP-TPPO. Pengertian *community watch* Secara umum, peran serta masyarakat (perorangan/lembaga) yang ada di tingkat desa merujuk kepada lembaga masyarakat formal & dengan kewenangan yang kuat & jelas.

Payung Hukum *community watch* PP-TPPO a) UU Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 60 dan 61; b) UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; c) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

Kedudukan *community watch* PP-TPPO a) *Community watch* PP-TPPO merupakan bagian dari sistem perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat; b) Memiliki link/jejaring langsung dengan pusat-pusat layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Status Hukum *Community watch* PP-TPPO a. Memiliki SK (ditetapkan) oleh Kades/Lurah b. Memiliki perangkat-perangkat kelembagaan yang jelas (identitas, visi-misi, AD/ART, dll).

Peran dan Fungsi *Community watch* PP-TPPO

1. Melakukan pemantauan
2. Melakukan layanan pencegahan (primer)
3. Menerima pelaporan dan memberikan respon
4. Memberikan layanan rehabilitasi sosial (optional)
5. Memberikan layanan reintegrasi sosial

6. Melakukan pengawasan/monitoring
7. Melakukan advokasi kebijakan & penganggaran
8. Melakukan koordinasi dan penguatan sistem rujukan

Struktur Organisasi *community watch* PP-TPPO

1. *community watch* PP-TPPO ditugasi oleh Pemerintah Desa untuk membantu Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. *community watch* PP-TPPO bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
3. *community watch* PP-TPPO dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
4. Seorang koordinator *community watch* PP-TPPO dibantu oleh seorang sekretaris dan bendahara;
5. Semua anggota *community watch* PP-TPPO memiliki hak yang sama;

Mekanisme Kerja Kepengurusan *community watch* PP-TPPO

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah yang melibatkan semua anggota;
2. Program dan kegiatan *community watch* PP-TPPO diputuskan dalam musyawarah;

3. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan dilakukan melalui dan dalam musyawarah;
4. Musyawarah dilakukan secara teratur tergantung pada kesepakatan anggota;
5. Dalam menjalankan program/kegiatannya, *community watch* PP-TPPO wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

Pembagian Tugas *community watch* PP-TPPO

1. Koordinator bertugas memimpin rapat dan mewakili CW PP-TPPO.
2. Sekretaris bertugas membuat notulen rapat, membuat surat-surat dan menyimpan dokumen yang penting.
3. Bendahara bertugas menyimpan dan membukukan uang dan aset KPTPPO.

Sarana Penunjang *community watch* PP-TPPO

1. Sarana penunjang untuk melaksanakan peran dan fungsi *community watch* PPTPPO diusahakan sendiri dengan memberdayakan aset personal atau aset Pemerintah Desa yang diberikan/dipinjamkan secara sukarela dan tidak mengikat.

2. *community watch* PP-TPPO dapat mencari dana untuk mendukung pelaksanaan fungsi dengan memperhatikan dan tunduk dengan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan *Community Watch* perlu dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan apakah kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi harus dipandang sebagai sebuah bagian integral dari praktek dan pengelolaan sehari-hari. Oleh karena itu proses monitoring dan evaluasi harus berjalan bersamaan dengan pelaksanaan program sehingga proses ini mampu mendorong terjadinya perbaikan pelaksanaan kegiatan secara terus menerus. Hasil evaluasi dan monitoring juga akan mendorong pengambilan kebijakan untuk menentukan langkah-langkah penting terkait dengan komunitas ini di masa yang akan datang misalnya penentuan sumber daya, pengembangan wilayah komunitas atau mengubah strategi agar menjadi lebih efektif.

Agar bisa mengukur berbagai hasil yang diharapkan dalam proses monitoring dan evaluasi maka dikembangkan berbagai macam indikator. Pengembangan indikator diarahkan untuk:

1. Memantau kemajuan implementasi semua komponen rencana kegiatan *Community Watch* pada tingkat desa, kabupaten kota, provinsi dan nasional;
2. Mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam pelaksanaan *community watch*;
3. Mengukur efektivitas *Community Watch* yang sudah dilakukan sehingga bisa digunakan untuk merencanakan, memprioritaskan, mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk program-program di masa yang akan datang.

Metode evaluasi pengukuran keberhasilan *community watch*, di arahkan pada 4 dimensi besar bekerjanya sistem *community watch*, yaitu:

1. Dimensi Administrasi Kelembagaan;
2. Dimensi Perencanaan dan Implementasi Program;
3. Dimensi Kemampuan Berjejaring dan Fundrasing dan
4. Dimensi Kemampuan Personal anggota tim.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita. 1989, Permasalahan Perlindungan Anak, Akademi Presindo, Jakarta.

Deputi Tumbuh Kembang Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2015. *Panduan Sekolah Ramah Anak*, Jakarta.

Ima Susilowati. 1999. Konvensi Hak Anak, Sahabat Remaja PBKI, Yogyakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Jakarta.

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Jakarta. Undang-Undang No 35 2014 tentang Perlindungan Anak.

Rachel Hodgkin & Peter Newell, 1988, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, UNICEF.

Ratnasari Diah Utami, Mulat Kurniasih, F. N. kartikasari. (2017). Implementasi Penerapan sekolah Ramah Anak pada Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah

Dasar. The 5th Urecol Proceeding, 18 (February), 170–176.

Ruth Rosenberg, 2003. Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta: ICMC

T.O. Ihromi dan A.S. Luhulima, 2004, Hak Asasi Perempuan, Jakarta: Conventional Watch UI dan Yayasan Obor

Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Wiwik KUSDARYANI, I. P. dan A. Tika D. (2016). Penguatan Kultur sekolah Untuk Mewujudkan Pendidikan ramah Anak. Cakrawala Pendidikan, 1(35), 125– 133.

LAMPIRAN: INDIKATOR PEKON RAMAH ANAK (PRA)

KELOMPOK HAK ANAK	NO	INDIKATOR	SKOR/LEVEL PENILAIAN			
			1	2	3	4
KELEMBAGAN	1	Tersedia data anak terpilah Menurut → jenis kelamin, umur, di tingkat kelurahan	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tidak berfungsi	Ada, lengkap dan menjadi dasar pembuatan kebijakan
	2	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi
	3	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi
	4	Adanya gugus tugas di tingkat kecamatan/desa	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi
	5	Adanya peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Desa Layak Anak	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi

	6	Adanya alokasi dana desa untuk kesejahteraan anak	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	7	Ada keterlibatan anak (wakil kelompok anak = usia 15-18 th) dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan)	Belum ada	< 5%	5% - < 10%	10% - 15%
	8	Ada dan berfungsinya forum/kelompok /paguyuban anak di kelurahan	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjaringan dan melakukan advokasi
	9	Ada data/profil anak di kelurahan	Belum ada	Ada, tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tapi data di update > setahun	Ada, lengkap dan data di update tiap setahun sekali
	10	Setiap anak punya Akta Kelahiran	< 35%	35% - < 70%	70% - < 100%	100%
	11	Keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Belum ada	10% - < 20%	20% - < 30%	30%
	12	Adanya Peraturan Desa/ Kelurahan yang berpihak kepada kepentingan anak	Belum ada	Ada dan belum terlaksana	Sudah ada dan sudah terlaksana	Ada, sudah terlaksana dan ada money periodik

	13	Semua anak terdaftar di dalam kartu Kepala Kelaruga (KK)	< 35%	35% - < 70%	70% - < 100%	100%
	14	Setiap keluarga mengalokasikan tabungan anak	< 25%	25% dan < 50%	50% dan < 75%	75% - 100%
HAK KESEHATAN DAN HAK KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR KESEJAHTERAAN DASAR	15	Prosentase balita datang ke posyandu	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%
	16	Kualitas pelayanan posyandu	PRATA MA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
	17	Status gizi balita baik	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 85%	> 85%
	18	Prosentase ibu hamil memeriksakan kandungan minimal 4x (Antenatal)	< 30%	> 30% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%
	19	Ibu yang memeriksakan bayinya 2x (Neonatus)	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%
	20	Ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 75%	> 75% - 100%
	21	Prosentase bayi mendapatkan imunisasi lengkap	< 50%	> 51% - < 75%	> 75% - < 90%	> 90%
	22	Prosentase bayi mendapatkan ASI eksklusif	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%

23	Prosentase bayi (6-12 bulan) mendapatkan vitamin A	< 35%	> 35% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%
24	Prosentase anak balita (1-5 tahun) mendapatkan vitamin A	< 35%	> 35% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%
25	Prosentase kunjungan masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan di kelurahan	< 15%	> 15% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%
26	Ada petugas kesehatan	Belum ada	Ada tapi tinggal diluar kelurahan	Ada tapi merangkap di beberapa kelurahan	Ada dan siap melayani setiap saat
27	Tersedia ambulan kelurahan	Belum ada	Sudah ada tapi belum terjadwal	Ada dan terjadwal	Ada dan tersedia 24 jam
28	Tersedianya sukarelawan donor darah pendamping di kelurahan	Belum ada	Ada < 25% dari total jumlah KK	Ada < 25% - 80% dari total jumlah KK	Ada > 80% dari total jumlah KK
29	Adanya kerja bakti untuk kebersihan lingkungan di kelurahan	Tidak ada	Setahun dua kali	sekali	Seminggu sekali
30	Infrastruktur kelurahan memenuhi standar ramah anak	Tidak ada	Minimal memenuhi 3 standar	Minimal memenuhi 6 standar	Minimal memenuhi 7 standar

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	31	Prosentasi tempat tinggal keluarga ramah anak	<25%	>25% dan < 50%	> 50% dan < 88%	>88% dan < 100%
	32	Prosentase keluarga yang mengakses air bersih	< 25%	>25% - < 50%	> 50% dan < 88%	>75% dan < 100%
	33	Prosentasi rumah yang memiliki SPAL sesuai standar kesehatan	<25%	>25% dan < 50%	> 50% dan < 88%	>88% dan < 100%
	34	Tersedia tempat sampah yang memenuhi standar ramah anak	< 25%	>25% - < 50%	> 50% dan < 88%	>75% dan < 100%
	35	Ada kawasan hijau (untuk tujuan pelestarian dan perlindungan alam)	Belum ada	Ada minimal 5% dari luas kelurahan	Ada, dengan luas antara 5%-15% dari luas kelurahan	Ada lebih dari 15% dari luas kelurahan
	36	Prosentase lembaga usaha ekonomi di desa yang menyumbangkan sebagian keuntungan untuk kesejahteraan anak	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	50% - 75 %
	37	Prosentase keluarga yang memiliki mata pencaharian	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	> 75%
	38	Prosentase usia produktif memiliki mata pencaharian (18-65 tahun)	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	> 75%

	39	Kelurahan memiliki kegiatan menyiapkan tenaga terampil yang berbasis sumber daya lokal	Belum ada	25% - 50%	50% - 75 %	> 75%
HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	40	Ada lembaga pendidikan formal dan non formal untuk anak	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	Ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap
	41	Anak usia 0-4 tahun belajar di PAUD non formal	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	42	Anak usia 4-6 tahun belajar di PAUD formal	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	43	Jumlah SD di desa/kelurahan yang menerapkan SRA	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap
	44	Anak usia 7-15 tahun wajib belajar	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	45	Anak usia 16-18 tahun melanjurkan ke SMA/ sederajat	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	46	Ketersediaan sarana bermain di kelurahan	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	Ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap
	47	Anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah mengikuti kursus keterampilan	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	48	Kelurahan/desa memberlakukan wajib jam belajar	Belum ada	Ada tetapi belum berjalan	Ada, berjalan, tetapi belum semua warga	Ada, berjalan dan semua warga sudah terlibat

	49	Tersedia sanggar anak yang dapat diakses semua anak	Ada 1 sanggar	Ada 2 sanggar	Ada 3 sanggar	Lebih dari 3 sanggar
	50	Ada event untuk berespresi di kelurahan dan desa	ada diadakan 1 setahun sekali	Ada diadakan 2 kali setahun	Ada diadakan 3 kali dalam setahun	Lebih dari 3 kali dalam setahun
	51	Ada kelompok olahraga di kelurahan/desa	Ada 1 organisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
	52	Ada kelompok kesenian di desa yang diikuti anak	Ada 1 organisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
	53	Ada kelompok belajar anak	Ada 1 organisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
	54	Ada lembaga kursus keterampilan di desa	Ada 1 organisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
HAK PERLINDUNGAN KHUSUS	55	Ada lembaga yang mengurus soal anak di desa/kelurahan	Belum ada	Ada tapi tidak berfungsi	Ada dan diakses sebagian kecil warga	Ada dan diakses semua warga
	56	Ada data pilah anak cacat di desa/kelurahan	Belum ada	Ada tetapi tidak ada pelayanan	Ada dan sebagian anak cacat memperoleh pelayanan	Ada dan semua anak cacat mendapat pelayanan
	57	Anak yang menikah di bawah 18 tahun	>50%	25% - 50%	10% - 25%	0%
	58	Tingkat kekerasan di rumah tangga melibatkan anak	Ada 3 kasus/tahun	Ada 2 kasus/tahun	Ada 1 kasus/tahun	Tidak ada kasus

	59	Ada pengawasan informasi yang mengandung muatan pornografi, dan NAPZA	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsikan dengan baik
	60	Ada data mengenai anak yang dipekerjakan	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsikan dengan baik
	61	Ada rumah aman di desa/kelurahan untuk anak korban kekerasan	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsikan dengan baik
	62	Tidak ada perkelahian/tawuran warga melibatkan anak per tahun	Ada 3kasu s/ tahun	ada 2 kasus/tahun	Ada 1 kasus/tahun	Tidak ada kasus

<https://youtu.be/iKZbLj6pUmo>

VIRTUAL International Conference of Science, Technology and Environment (ULICOSTE)



Identification of Child Problems & Tracking Policies for the Protection and Fulfillment of Children's Basic Rights in South Regency as a Coastal Zone of Lampung Province

Noverman Duadji^{1,3} and Novita Tresiana^{2,4}

^{1,2}Public Administration, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, Soemantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung

³noverman.duadji@fisip.unila.ac.id

⁴novita.tresiana@fisip.unila.ac.id

Abstract. The issue of children is a global public problem and is directly related to government programs and activities. To solve children's problems requires commitment and accuracy of action with the intended targets. This research is oriented towards achieving **goals**, namely identifying children's problems and their causes; describes the macro framework for policies and programs to fulfill children's basic rights. Achievement of objectives requires a method, the author chooses **a qualitative method**. Primary data were collected through observation and interviews with selected informants, while secondary data were obtained from related documents. The research scope covered all South Lampung regencies. The analysis was carried out with a cross-matrix based on the technique of causal relationships on data to provide meaning. **The results of the study** show that the issue of children regarding education, health and employment which is considered by the government as the main problem is actually only symptomatic (impact) of environmental problems (poverty) of parents. The programs and activities carried out are more about relieving symptoms, while the main problems have only been partially addressed. Macro policies need to be lowered into the main program to solve poverty problems and be accompanied by affirmative programs to solve problems faced by children as symptoms. Contribution: guidelines for designing programs and activities that are relevant to the root of the problem, and placing the policy design on the main program substance and affirmative programs.

Keyword: *Policies, Programs, Activities, Children's Rights, Main Programs, Affirmative Programs*

1. Introduction

Children are divine gifts to the family and as the next generation who at certain times will become a development force towards changes in the progress of the nation. Children have an important position and are part of the potential of future human resources so that they need to get guidance and legal protection on the basic rights for wholeness, harmony and balance of physical, mental and social development. The right of children to feel safe, comfortable and prosperous is the responsibility of the family, environment and government (state).

Every child has the right to live, grow and develop and participate fairly in accordance with dignity and receive protection from all forms of violence and discrimination [1]. Indonesia intends to realize a Child Friendly Indonesia and therefore supports the Convention on the Rights of the Child (KHA). On this basis, the local government has given a serious response, both at the provincial level and at the district / city government level.

There are still many problems that occur to children regarding the right to health, education and other rights that need serious attention from the government. Moreover, as a research location, South Lampung Regency is one of the coastal areas in Lampung Province. The community is of course a coastal community that has its own character that distinguishes it from non-coastal areas.

Coastal communities are people who live and carry out related socio-economic activities and have a high enough dependence on the potential and conditions of coastal and marine resources. Regarding the problem of children, it also has differences with people who live in non-coastal areas [2].

In general, South Lampung District still finds problems related to children's rights. Some children still don't get good parenting in the family environment. There are also cases of children who have not had the opportunity for education and the opportunity to play. There are still indications of weak legal protection for children, for example related to personal identity (birth certificate). Children also often receive discriminatory treatment and acts of violence, namely an act of abuse against children by parties within or outside the environment where the child lives. Violence against children can be in the form of physical, emotional, verbal and sexual violence. Children also often become victims of neglect due to problems experienced by their parents [2].

There are also cases of marriage and child labor. This condition is more related to household economic problems (poverty). Sometimes there are also problems of discrimination between girls and boys. Generally, the culture of society places boys as the successor and support of the household so that they get special treatment from their parents. While girls are seen as a burden on the family, so they do not get attention, even in certain societies, girls are married off at a young age (under age) [2].

Recognition of the Convention on the Rights of the Child (CRC) is an initial form of the government's will to create a Child Friendly Indonesia. This is not enough, but it needs to be followed up with the availability of a legal basis for action and support for substantive programs, namely programs that directly address the problems faced by children, both at the central and local government levels (provincial and district / city). So the seriousness of the government can be seen from the interventions carried out in the form of policies.

This essay focuses on: (a) identifying problems of children in South Lampung District; and (b) identify the legal basis for the fulfillment and protection of children's rights at the macro level as well as policies, programs and activities at the level of the South Lampung Regency Government.

2. Methodology

The location which is the background of the research is South Lampung Regency as part of the coastal area in Lampung Province. In general, this study aims to trace the formal legal basis for the fulfillment and protection of children's rights; identification of strategic problems of children; and analyzing the suitability of program activities with children's strategic issues. To achieve the research objectives, an instrument is needed, namely a method concerning the techniques and procedures that must be followed. In accordance with the characteristics of the objectives, the researcher chose a qualitative method [3]. To obtain the necessary information (data), the research team did several things. First, conducting a survey to collect data related to children's strategic problems. Second, conducting interviews with selected informants to obtain information related to the experiences of the target group and actors in the protection and fulfillment of children's rights. Third, collecting documents related to the Child Friendly District Program (KLA). Fourth, data (information) is processed and presented in the form of narratives, tables, graphs etc. Fifth, data analysis by interpreting the data based on the theory that becomes the reference for formulating research findings.

3. Result and Discussion

3.1. Identification of Cases and Problems of Children in South Lampung District

As a coastal area, South Lampung Regency has a character that is dominated by maritime elements. To determine strategic issues relating to the protection and fulfillment of children's rights in South Lampung Regency, the following will present demographic data describing the condition of children in this region.

Demographically, as in Table 1, the number of children in South Lampung Regency is 354,204, with details of 162,716 boys and 181,488 girls. Children in South Lampung Regency are a great potential and a successor to Indonesia's fighting ideals, especially the future of South Lampung. Children need protection — it is necessary to ensure the continuation of their full physical, mental and social growth and development.

Table 1
Amount of Children in South Lampung Regency

Districts	Male	Female	Total
Tanjung Bintang	12.043	14.105	26.148
Sragi	5.538	6.324	11.862
Ketapang	8.720	10.171	18.891
Bakauheni	3.118	3.736	6.854
Way Sulan	3.405	4.319	7.724
Way Panji	3.596	3.740	7.336
Kalianda	13.451	15.982	29.433
Raja Basa	4.542	20.806	8.267
Palas	11.044	13.728	20.806
Penengahan	7.421	64.696	13.728
Natar	34.953	22.941	64.696
Katibung	12.549	10.871	22.941
Tanjung Sari	5.939	39.631	10.871
Jati Agung	21.629	24.768	39.631
Sidomulyo	13.318	20.704	24.768
Candipuro	11.159	19.544	20.704
Merbau Mataram	10.557	20.806	19.544
Lampung Selatan	162.716	191.488	354.204

Source: processed from Disdukcapil data of South Lampung Regency

Then for children who have received education, it is illustrated in Table 2 about the following data for school children.

Table 2.
Data on Children with Education Level in South Lampung Regency

Districts	Amount of Children with education					Amount of Children with education					Amount of Children with education					GT
	SD/SDLB/Paket A		M. Ibtidaiyah		T	SMP/SMPLB/Paket B		M. Tsanawiyah		T	SMA/SMK/S MALB/Paket C		M. Aliyah		T	
	F	M	F	M		F	M	F	M		F	M	F	M		
Natar	4.414	4.784	107	153	9.458	1.999	2.073	121	122	4.315	1.106	1.121	55	48	2.330	16.103
Jati Agung	2.148	2.396	85	90	4.719	855	865	64	71	1.855	470	445	22	20	957	7.531
Tanjung Bintang	2.122	2.274	11	21	4.428	940	955	13	16	1.924	459	481	4	0	944	7.296
Tanjung Sari	1.116	1.233	1	1	2.351	500	560	8	4	1.072	192	251	1	2	446	3.869
Katibung	2.521	2.670	130	138	5.459	1.077	1.120	83	103	2.383	526	536	17	25	1.104	8.946
Merbau Mataram	1.655	1.635	117	124	3.531	678	700	80	78	1.536	329	285	11	3	628	5.695
Way Sulan	636	661	265	316	1.878	243	311	184	160	898	210	233	31	33	507	3.283
Sidomulyo	1.584	1.773	63	68	3.488	656	672	60	77	1.465	321	288	6	4	619	5.572
Candipuro	1.225	1.349	207	197	2.978	433	452	223	182	1.290	236	248	71	50	605	4.873
Way Panji	268	321	11	14	614	147	106	9	14	276	57	51	1	4	113	1.003
Kalianda	2.693	2.915	43	50	5.701	1.101	1.112	95	128	2.436	603	641	53	55	1.352	9.489
Rajabasa	727	847	18	21	1.613	268	307	65	50	690	157	162	17	19	355	2.658
Palas	1.723	1.791	70	110	3.694	569	627	183	171	1.550	352	318	31	20	721	5.965
Sragi	1.146	1.221	53	59	2.479	349	406	169	164	1.088	206	183	18	23	430	3.997
Penengahan	1.197	1.315	47	68	2.627	464	461	101	102	1.128	275	287	22	10	594	4.349
Ketapang	1.439	1.546	79	93	3.157	551	523	117	121	1.312	266	270	19	13	568	5.037
Bakauheni	617	584	22	39	1.262	260	247	26	28	561	148	146	2	0	296	2.119
															Jlh Total	97.785

*M = Male; F = Female; T = Total; GT = General Total

Source: processed from data from the South Lampung Regency Education Office

Comparing the data in Table 1 with Table 2, it is clear that from the total number of children of 354,204, accumulatively only 28% or 97,785 people (44,921 boys and 52,864 girls) attend school. There are still 256,419 (72%) children who have not been able to continue their schooling. Furthermore, this is also strengthened by a picture of school participation which shows a drastic decrease in APS (age group 16-18 years) in Kampung Selatan Regency. This means that there are quite a lot of children who do not continue their education until the SMA/SMK / Madrasah Aliyah education levels.

Table 3:
School Participation Rate in South Lampung Regency

Age group	School Participation Rate
7-12	99,41
13-15	92,95
16-18	64,49

Source: BPS South Lampung, 2019

In the Coordination Meeting for the submission of the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) of South Lampung Regency in the Sertung Bandiklat Kalianda Hall, it was explained that "South Lampung Human Development Index (HDI) in 2018 was 66.19% while in 2019 it was 66.96%, meaning that 0.5% increase. But in terms of poverty reduction efforts there has been no decrease, so the poverty rate in South Lampung Regency is still at the position of 15%, even since the tsunami disaster and the Covid-19 virus pandemic has tended to increase to 27.14% [4].

Looking at the data presented in Table 1, Table 2, Table 3 and the information recorded in the coordination meeting for the delivery of the RPJMD, it can be summarized that the first issue experienced by children in South Lampung Regency is as in Table 4 below.

Table 4:
Child Education Issues

Causes	Poverty of household Children are involved in earning a living Underage marriage Inequality and accessibility (accessibility) of school facilities / infrastructure
Result	High rates of children not attending school & declining school enrollment rates

Source: processed from the results of interviews and field observations

The health aspect is also an important dimension in protecting and fulfilling children's rights, and the South Lampung Regency government focuses on this issue, as evidenced by the provision of immunization to children (toddlers) as in Table 5 below.

Table 5:
Toddlers Who Get Immunization in South Lampung Regency

DISTRICTS	BCG	DPT	POLIO	CAMPAK
Natar	3.855	3.941	3.644	3.828
Jati Agung	2.224	2.212	2.206	2.216
Tanjung Bintang	1.657	1.662	1.661	807
Tanjung Sari	592	646	571	590

Katibung	1.371	1.437	1.291	1.336
Merbau Mataram	1.137	1.129	1.133	1.115
Way Sulan	564	556	552	565
Sidomulyo	1.426	1.448	1.375	1.314
Candipuro	1.055	1.030	983	994
Way Panji	383	374	375	355
Kalianda	1.757	1.723	1.663	1.750
Rajabasa	504	483	479	478
Palas	1.259	1.242	1.239	1.235
Sragi	748	732	731	733
Penengahan	782	803	809	780
Ketapang	962	1.088	901	922
Bakauheni	497	498	479	482
Lampung Selatan	20.773	21.004	20.092	19.509

Source: South Lampung District Health Office, 2019

The report from the South Lampung District Health Office states that through posyandu and puskesmas that are scattered in the working area, immunization for 4 types of vaccines recommended by the government has been carried out in all districts and has reached the target of 97%, leaving 3% unreached. The government's alertness is better and there is an increase in public awareness compared to the previous period. This means that the fulfillment of children's health rights to get immunization (vaccines) has been carried out.

Nationally, something that needs special attention regarding children is the issue of stunting. It was reported that the prevalence of stunting in the 0-59 month age group in Lampung Province was at 31.6%, which indicates a category of serious public health problems. Of the 15 districts / cities in Lampung Province, there are 2 districts with a prevalence below the provincial prevalence or as districts with serious public health problems, namely South Lampung Regency (30.3%) and Way Kanan Regency (30.7%).

Table 6:
Child Health Issues

Causes	Family poverty Lack of public understanding & knowledge Malnutrition
Result	Prevalence of stunting

Source: processed from the results of interviews and field observations, 2019

South Lampung Regency as a coastal area. It can be seen that the composition of the work of the people is 94% distributed into the agricultural, plantation, livestock, fishery and trade sectors; either as owners, cultivators or laborers. This condition reflects the atmosphere and character of life of rural communities in general.

In the 2019 national ranking, in real terms Lampung Province occupies the third position of the poorest provinces on the island of Sumatra after Aceh and Bengkulu. There was an increase in the number of poor people by 5.1%, so that the poverty rate in this province was 23.11%. As part of Lampung Province, the poverty rate in South Lampung Regency is 27.14%. More interestingly, South Lampung Regency (27.14%) exceeds the Lampung Province poverty rate (23.11%) and the national poverty rate (11.47%) [5]. This means that in addition to contributing to the increase in the poverty

rate in Lampung Province, in real terms the people of South Lampung Regency are still experiencing poverty problems.

Data from the Manpower & Transmigration Office of South Lampung Regency recorded that from a cumulative 354,204 children in South Regency, among children aged 10-18 years, there were a total of 25,401 children (7.17%) who became child laborers and were distributed into the work sector as in Table 7 below.

Table 7:
Amount and Percentage of Child Laborers aged 10-18 Years by Employment in South Lampung Regency

No	Jobs	Amount	%
1	Agriculture (plantation, fishery, livestock)	24.440	96,22
2	Mining	3	0,012
3	Industries	1	0,004
4	Electricity and gas	25	0,098
5	Buildings	389	1,53
6	Trading	230	0,91
7	Transport and Communication	267	1,05
8	Finance	0	0
9	Services	1	0,004
	Total	25.401	100

Source: Data processed from the South Lampung District Manpower Office Report, 2019

Children (aged 0-18 years) are assets of human resources and the nation's future generation. At this age, the protection and fulfillment of the basic rights of children become the collective responsibility (parents, society and the state). Although there have been many policies at the national level and at the local (regional) level to improve the quality of life for children, it seems that they are not enough.

Observing the description and data, the phenomenon shows that the conditions of poverty plagued by most families (households) in South Lampung Regency cause child labor, whether involved in making a living in the main family work sector or employed by other parties. This condition is in line with what the ILO (2011) stated [6] in Papua, especially in poor families, there is an assumption that children have high economic value, so that many children are involved in child labor”.

The results of the following interviews also show the same thing.

Interview with informant 1

“as parents, nurturing, fostering and meeting the needs of children is certainly our obligation. But with poor conditions like this, let alone fulfilling needs and providing facilities to children, it is difficult for us to do it for daily family needs alone. The family must stay alive for whatever reason. Life goes on, even eating can't be stopped. Children are our next generation and also an asset to us. Without being asked, parents are sure to provide everything their children ask for as long as they can. Make a will but it is the circumstances that make our children like this. Our children cannot continue with higher education, junior high school level is already good. Because we cannot afford

to pay for our children's further studies, while we have to work in the fields and in the garden. Instead of letting them live alone at home, or hanging around not knowing where their place is, children who are 10 years old can help their parents look after their younger siblings, help their mothers cook, clean the fields, gardens and harvest activities”.

Interview with informant 2

“Our unlucky family. It is still difficult for the family to meet their daily needs. Especially like me, who works as a laborer to cultivate and harvest agricultural land. Work is erratic and sometimes always changes according to other people's requests. Never mind thinking about the future of children and children's schools; It is still difficult for me to fulfill clothing, food and housing for my family. I take my children to work to earn a living”.

If we look closely, the issue of child labor is also a problem faced in South Lampung Regency.

Table 8:
Child Labor Issues

Causes	Poverty of household
Result	Height of child labor

Source: processed from the results of interviews and field observations, 2019

3.2. Macro Policy of protection and fulfillment of children's rights

The government's support for the protection and fulfillment of children's rights is reflected in the actions taken. Public policy is a 'decision as a basis for government action to allocate values and resources to target groups in order to solve problems that occur, meet needs and improve conditions for the better. The action includes programs, techniques or ways and activities carried out ' [7].

The issue of children's rights at the international level is covered by the Convention on the Rights of the Child (KHA) since November 20, 1989 which defines: "declaring to respect and guarantee the rights of every child without discrimination in any form regardless of race, color, sex, language, religion, political beliefs and other opinions, nationality, ethnic or social origin, wealth, disability, birth or other position of the child or the child's parents or legal guardians”

As a follow-up to the CRC, the UN general assembly on 20 November 1989 approved the concept of "World Fit For Children". The idea of a world worthy of children. The Millennium Summit also designed the Millennium Development Goals (MDGs) which substantively affirmed children's rights. Therefore, children are the next generation who will determine the world order of life in the future, so that children's problems are not only the responsibility of parents, families, communities, but become the world's attention. All states and peoples need to fully and seriously concentrate on creating a world order that provides protection and fulfillment of children's rights [8].

Indonesia is an inseparable part of international interaction and one of the members of the United Nations and is driven by a strong desire to realize a Child-Friendly Indonesia (ILA), so the right steps are to provide support for the CRC and the Government also directly ratifies Presidential Decree No. 36/1990 dated 25 August 1990. Since the Presidential Decree was signed, Indonesia has been bound by the provisions of the CRC. The next step is the enactment of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection on October 22, 2002 and substantively strengthening children's rights as stipulated in the Convention on the Rights of the Child. Several laws and regulations related to the protection and

fulfillment of children's rights: (a) Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights; (b) Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection; (c) Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Sharing of Government Affairs between the Government, Provincial Government and District / City Government; (d) Presidential Regulation Number 7 of 2005 concerning RPJMN; (e) Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning Ratification of the CRC; (f) Ministerial Regulation PP No. 3/2008 concerning Guidelines for the Implementation of Child Protection; and (g) Regulation of the Minister of Government Regulation Number 02 of 2009 concerning Policies for Child-Friendly Districts / Cities [9].

Institutionally, through the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, the Minister of PPPA Regulation No. 11 of 2011 on the Policy for the Development of a Child Friendly District / City (KLA) was issued. KLA is a district / city that has a child rights-based development system through the integration of commitments and resources from the government, society and the business world that are planned in a comprehensive and sustainable manner in policies, programs and activities to ensure the fulfillment of children's rights. On this side, it appears that the government is really serious about protecting and fulfilling children's rights. Then it was further strengthened by the PPPA Ministerial Regulation Number 13 Year 2010 concerning Technical Guidelines for District/City Eligibility for Children in Villages / Kelurahan with the coverage of: a) Preparation; (b) Planning; (c) Implementation; and (d) Development.

The international community focuses on child issues, and the issuance of various types of national policy products proves that the Indonesian Government is also serious in responding to issues of protection and fulfillment of children's basic rights in this country. [7], [10].

Regarding the conditions and problems faced by children, as a form of commitment and concern, the local government also issued similar policy products as derivatives of central government macro policies into a more operational form in accordance with the conditions of each region..

For this reason, the South Lampung Regency Government has made and approved several policies (programs) as a response to solving problems faced by children in the region. First, the Regional Regulation of South Lampung Regency Number 4 of 2015 concerning the Implementation of Child Protection in South Lampung Regency to promote the Child Friendly Village program with a local designation known as the 'Child-Friendly Pekon Program' (PLA Program). Second, the Decree of the South Lampung Regent No: B / 261 / IV.05 / HK / 2016 concerning the Determination of the Management of the South Lampung Regency Children's Forum for the Period of 2019 - 2021. Third, the South Lampung Regent Regulation No 53 of 2017 concerning Library Transformation in South Lampung. Fourth, the Regional Regulation of South Lampung Regency No. 3 of 2018 concerning Non-Smoking Areas. Fifth, Regional Regulation of South Lampung Regency No. 3 of 2018 concerning Non-Smoking Areas. Sixth, South Lampung Regent Regulation Number 10 of 2019 concerning Stunting Reduction. Seventh, South Lampung Regent Decree Number 216 of 2019 concerning the Formation of a Team for the Acceleration of Stunting Reduction.

Some of these policy products, normatively, illustrate that they already have a step forward and at the same time serve as a formal legal basis and guidelines for actions by the South Lampung Regency Government to be more operational and substantive to solve children's problems. If so, the important point is what programs and activities the government should carry out to solve children's problems?

Said by Wiliam Dunn in the Duadji & Tresian version [10], [11], "To solve the problems faced, the program design and activities to be carried out must touch and go directly to the root of the problem that is the cause. Policy actors, both formators and parties who will be involved in implementing programs and activities, must be able to find the main problems. The main problem is the source or root that causes

the occurrence or root of the problem, not the symptoms that arise. Meanwhile, in dealing with problems, policy actors must carry out two (technical) steps simultaneously, namely: (a) adjusting the design of programs and activities to address the main problem known as the main program; and (b) designing programs and activities related to the handling of emergent symptoms called the sporting or affirmative program.

In line with the above explanation, policy actors and parties involved need to have a ‘science and knowledge of policy’. The design of policies, programs and activities that will be carried out by the government to solve problems requires or is based on data. The problem inventory as outlined in the Problem Inventory List (DIM) must be available and upgraded at any time. This means that without the support of data, policies, programs and activities that will be carried out will be useless, like people who enter the forest aimlessly. Or like walking without a compass, you will get lost. Or like a doctor who only knows the symptoms that cause a disease without recognizing and knowing what kind of disease, then the medicine that is given will only be able to eliminate the symptoms in the patient, while the disease does not go away. [12], [13].

Random sampling of 100 children with problems shows that they come from poor families (households). Field investigations by the author team not only targeted formal data on related agencies in South Lampung Regency, but also visited several child activists and activists, namely the Mother and Child Protection Committee (KPAI) Lampung Province Representatives, NGO DAMAR, LMS LADA and members of activists and community groups who are members of the forum established by the South Lampung Regency Government, namely PATBM (Community-Based Integrated Child Protection) [14].

Table 9:
Issue Issues of Children Receiving Assistance **

Types of Child Cases handled	Number of Cases (Children) handled	Family's background	Companion Institution
Child sexual abuse cases	14 children (students)	Poor household	KPAI LADA DAMAR Dinas PPPA Lamsel
Child labor cases	2 children	Poor household	LADA DAMAR Dinas PPPA Lamsel Disnaker Lamsel
Child neglect cases	11 children	Poor household Parental divorce	KPAI LADA DAMAR Dinas Sosial
Total	27		

** there is no data on the number of factual cases & the exact number of children, what has been collected is the number handled (because there were reports and asked for assistance)

Source: processed from the results of interviews and field observations, 2019

So the problem of children, apart from the problems raised by the South Lampung Regency Government, there were also other problems. As seen in Table 9, the Team succeeded in gathering 27 children who experienced problems, namely: (a) 14 children experienced cases of sexual harassment at school by unscrupulous teachers; (b) 2 children affected by the problem of unpaid child labor; and (c) 11 children experienced neglect due to poverty and parental divorce. These cases and problems only come from data on the number of problems that have received assistance and have been successfully resolved. While exact data on the factual figures of children's problems based on similar incidents and other cases have not been recorded. And it is possible that there is a tendency to the iceberg phenomenon.

Furthermore, responding to a more specific case of children [15], namely the problem of child labor, from some of the results of its research in several countries and regions in Indonesia, the ILO stated that "child labor and poverty are two inseparable things, but they are related to one another.

Child labor problems have a relationship with poverty". The same thing was conveyed by Rocky R.J. Akarro and Nathan Anthon Mtweve [16] stated that poverty is the main cause of child labor. When compared to families with better economic conditions, poor households have a tendency to send their children to the labor market or involve children in their work.

Other factors that were also examined were gender, gender, head of the family, and the number of family members which significantly influence the creation of child labor".

In 3 coastal village areas of South Lampung Regency, the results of observations and interviews with Head of Household informants who involve children in their work illustrate similar things.

Interview with informant 1

"I work as a boat boy (the term fisherman boat worker). I have 5 children, ranging in age from 6 to 14 years. I have been working on this job since I was not married. Only graduated from elementary school from a poor family. Yes, I can only do this kind of modeling job. My children all go to school. 4 people have graduated from elementary school and helped me and my wife's work. Another one of my children is still in "SD" school at his grandmother's place and he also lives there, with my grandmother. Please understand that the names are difficult people. Me, my wife and 4 other children are busy working".

Interview with informant 2

"I have 3 children and all have graduated from elementary school. There is a desire to continue children's schooling, but my condition is like this, a small person like this, making the children unable to continue their schooling. I entrusted one child to my younger sibling's family in Java. My younger sibling is more capable and at least can reduce the burden and financial problems of my family. Two other children are mine, helping their mother as odd jobs. Sometimes they are called by the neighbors to be stepping stones, washing clothes scrubbers, cleaning the garden and Anyway what people have to offer. The important thing is to get a daily wage to help with his mother's shopping costs".

Taking into account the information from the two interviews above, there are trends that can be revealed in it. Poor households (families) perceive that conditions of poverty compel them: (a) to involve children in the child labor market, both in terms of helping the parenting profession and becoming child labor on the other side; (b) cannot facilitate further and better studies for the children's future; (c) child care for family / close relatives is a strategy or effort to reduce the burden of daily living expenses.

Although the information obtained from interviews with informants only represents labor (fishermen) and the agricultural sector, it is possible that households with other professional backgrounds also occur.

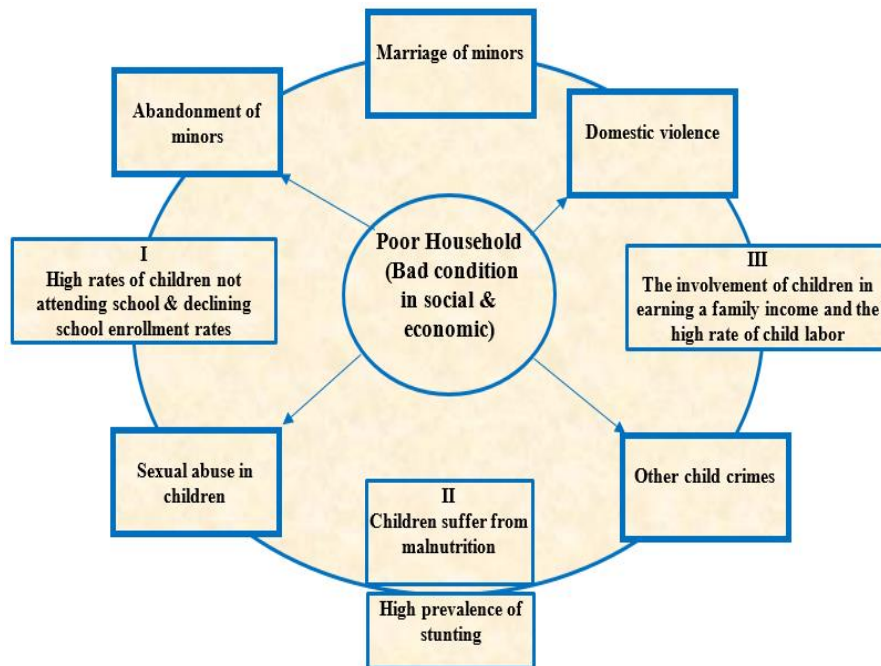
Furthermore, the issue of involving children into parental work or as child laborers in the labor market corresponds to [17] "child labor and poverty are siblings" inseparable "and related to one another. In some cases, child labor and poverty form links that pass on similar things to the next generation and conditions. Therefore, in addressing this problem, humanitarian activists and organizations with the concept of children declare that "child labor is a production machine for poverty and child crime". The exploitation of children into the labor market (child labor) will damage welfare and hinder children's education, development and future.

Children are the continuing resources of the world's life. This is a wise statement. If so, then it is not just the reason that children (under 18 years of age) are not able to be independent in many ways and are still very much dependent on their immediate environment, but in fact children need protection, assistance and fulfillment of their basic rights to grow. and growing. The family, community and state environment are responsible for it. Children should be free from all matters that are not directly related to their rights, namely helping their parents, earning a living and other jobs outside their own context. They are all subjects that still need freedom to explore the environment, play, learn and be creative for their future. Children are children themselves. Thus, children and their factual problems which are sometimes called the main problem are not actually a problem, but a phenomenon that appears as an impact or a product of their immediate environment..

This study points to the above explanation. In general, the data and information that have been presented illustrate that what the South Lampung Regency Government considers the 3 main problems related to the protection and fulfillment of children's basic rights (Table 4, Table 6 and Table 8), namely (a) Issues of education which is marked by the high number of children not attending school & decreasing school participation rate; (b) Health issues characterized by malnutrition which lead to the prevalence of stunting 'and (c) Labor issues characterized by involvement of children in earning family income and high rates of child labor.

By referring to the concept of Duadji & Tresiana [12] which states that the immediate environment is the root of the problems faced by children, the following will describe a scheme about the cycle of household poverty and the problems faced by children, especially in South Lampung Regency.

Picture 1:
Poverty Cycle & the Main Problems of Children in South Lampung Regency



Source: processed from the data and results of the Peer Goup FGD, 2019

Thus, to solve the problems (problems) faced by children, the South Lampung Regency Government (including policy actors and parties involved) of course needs the help of policy analysts to facilitate their work. Policy analysts have special abilities in inventorying and analyzing real problems so that the design of policies, programs and activities has relevance to the root of the problem (main problems & follow-up problems) [19].

Handling Child Issues

The South Lampung Regency Government has done many things related to the handling of issues (problems) faced by children in this area. Several regulations (policies) as previously explained, have been passed. In terms of handling the protection and fulfillment of children's basic rights, the government has formed 2 direct organizational units, namely: (a) the Office of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA), South Lampung Regency; and (b) PPPA Regional Technical Implementation Unit (UPTD).

Besides that, [19] the government views the issue of children as a shared responsibility. Handling children's issues requires joint and integrated movement of all elements. For this purpose, the government has formed an institution, namely the Community-Based Integrated Child Protection Forum (PATBM) whose members consist of elements of the government (Dinas PPPA), child activists and activists and the community (NGO) caring for children with very diverse backgrounds. The PATBM forum, its chairperson and secretary come from members who are not from the government element, the supporting facilities for the continuity of the organization are financed by the government (both from the Regency APBD and APBN assistance from the central government). The tasks of the PATBM Forum are (a) to collect data and analysis on child issues in the district area; (b) provide input, make considerations and propose annual programs and activities related to child issues to the PPPA Office; (c) provide counseling and education to the public regarding the protection and fulfillment of children's basic rights; (d) provide assistance and follow-up steps to child victims for problems that arise.

Handling Child Education Issues

Education is the most important thing in children's life. Education is not only intended as a need for child development, but as a determinant of the quality of the nation's human resources (state). The South Lampung Regency Government has implemented a program to meet the needs of primary and secondary education. For the cluster of children aged 4-6 years, almost every village / kelurahan (90%) already has Early Childhood Education as a means of childcare, playgrounds and arts and cultural activities. For the 6-18 year old cluster, the government implements 12 years of compulsory education. Because this is mandatory, the government is responsible for the school's operational costs, students (students) are exempt from all forms of fees. By requiring children aged 6-18 years to take part in the 12 year compulsory education program, the hope is that all children at that age participate and complete. In fact, until now, children's education is still an issue. There are 256,419 (72%) children who have not been able to continue their schooling (Table 2) and the low enrollment rate (APS) in the 16-18 age group (Table 3). This means that the programs run by the government have not been successful, it still leaves problems and of course there needs to be improvements.

Handling Child Health Issues

Handling children's health is carried out through the health program with the implementing organization units being the health office, the PPPA office, the UPTD PPPA and the PATBM Forum. The handling of health issues seems to focus more on cluster children aged 0-5 years and cluster children aged 6-12 years. Children in these two clusters are still at the PAUD and SD education levels, so that in addition to posyandu and puskesmas, kindergarten and elementary schools are used as routine monthly places for checks, provision of additional nutrition, exclusive breastfeeding and immunization. This activity was quite successful. The prevalence of malnutrition decreased to 0.6%. The trend of exclusive breastfeeding rose to 94.5%. Likewise, the trend of completeness of immunization increased to 98.1%.

Behind the success, on the other hand, there are things that need special attention from the South Lampung Regency government, namely the case of children with slow growth (stunted children). In late 2019, the prevalence of stunting in the 0-59 month age group in Lampung Province was at 31.6%, while for South Lampung Regency it was 30.3%. This means that for the issue of stunting, South Lampung is included in the category of areas with serious public health problems. For the handling of stunting, regulations have been issued, namely: (a) South Lampung Regent Regulation Number 10 of 2019 concerning Stunting Reduction; and (b) Decree of the South Lampung Regent Number 216 of 2019 concerning the Formation of a Team for the Acceleration of Stunting Reduction. The government has carried out: (a) area mapping and an inventory of stunting rates in all villages / kelurahan; (b) conduct health checks and provide additional nutritional supplements; (c) routine monitoring and health checks of stunting children; and (d) is preparing a follow-up program for handling children with stunting, including the budget. However, the stunting management programs and activities in 2019 have not achieved too many results.

Addressing Child Labor Issues

The data shows that rural communities with agricultural culture are still dominated by traditional patterns, conditions of economic difficulty are still dominant. There are 256,419 (72%) children who cannot complete the 12 year compulsory education program in South Lampung and all are involved in their parents' work. The government cannot do much to deal with cases of children's involvement in their parents' activities. Programs and activities carried out by the government are more directed at: (a) socialization in the family environment about the importance of protecting and fulfilling children's basic

rights; and (b) appeals to parents to encourage their children to join the 12 year compulsory education program. However, for the salient cases shown in Table 9, the government played an active role. For the case of 2 child laborers who were not treated properly and did not get a salary, the South Lampung Regency Government has formed an integrated team consisting of the PPPA Office, Manpower Office, Social Service, UPTD PPPA, LSM LADA, LSM DAMAR, KPAI and the PATBM Forum . This integrated team carries out investigations and negotiations with the employer who employs the child to provide all forms of compensation including salary. Matters that have been indicated as criminal acts have been resolved legally, while the children of the victims receive psychological, health and legal assistance at the social orphanage shelter as temporary housing. Children also receive skills and business training with life insurance from the government until they return to their parents and have a business.

Observing the problems faced by children, the condition of household problems and the programs and actions that have been taken by the government, in the future the model of protecting children's rights requires improvement in the governance system (governance). The issue of child problems does not run alone, but is mostly caused by problems in the immediate environment, especially the poverty conditions experienced by households. In connection with this condition, the function of protecting and fulfilling children's basic rights will be realized if the programs and activities carried out by the government are integrated for all sectors, between government organizational units and the private and community sectors. The real action that the government needs to take is to prepare program designs and activities to solve the causes of problems and resolve the effects of the problems. The government in designing actions requires data support and assistance as well as optimization of the policy analysts that have been available so far.

4. Conclusion and Recommendation

Problems that arise regarding the protection and fulfillment of children's basic rights are not a single problem that stands alone, but is more caused by problems in the immediate environment. This requires special handling with the support of all parties (government, private sector and society). On the basis of research results, recommendations that can be submitted to improve programs and activities that have been carried out by the government so far:

- The government needs data support and policy analyst assistance
- Integration and synchronization of programs and activities by across sectors and across government organizational units with the involvement of private parties and the community.
- Prepare a more comprehensive program design and activity towards solving the cause of the problem (main program) and solving the impact of the problem as a symptom (affirmative program).

References

- [1] Erdianti, (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Indonesia. *Justisia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
- [2] Duadji, N & Tresiana, N (2020). Laporan Hasil Penelitian. Pekon Tanggap Covid-19: Membangun Bridging Sosial Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak: Hibah Kompetitif Penelitian Dasar Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Universitas Lampung.
- [3] Creswell, J. W. (2007). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781849208956>
- [4] Laporan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan, 2019.
- [5] BPS-Statistic Indonesia, 2016, National Labor Force Survey (SAKERNAS), Jakarta
- [6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan 2016B Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka. Kalianda: BPS Kabupaten Lampung Selatan Indonesia

- [7] Van Woensel, L. (2020). A Bias Radar for Responsible Policy-Making. In *A Bias Radar for Responsible Policy-Making*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-32126-0>
- [8] Tresiana, Novita, and Noverman Duadji. "Multi Stakeholders Governance Body Model In Achieving the Excellence Public Policy." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 32.2 (2016): 401-411.
- [9] Duadji, N. (2013). Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 5(3), 197-203.
- [10] Dunn, William N. 1994. *"Pengantar Analisis Kebijakan Publik"*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- [11] Duadji, N. (2017). Model Percepatan Kota Layak Anak. *Laporan penelitian tidak dipublikasikan. Lampung: Universitas Lampung*.
- [12] Tresiana, N., & Duadji, N. (2016). Kegagalan pemaknaan "Lembaga Musawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa" dalam mewujudkan deepening democracy. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 29(4), 191-203.
- [13] Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1-22.
- [14] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2016 Petunjuk Pelaksanaan Industri Rumahan, Jakarta Indonesia
- [15] Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). A participation model based on community forum as a reproductive health knowledge transaction space to increase male participation in vasectomy. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 31(1), 1-13.
- [16] Akarro, Rocky R.J. and Nathan Anthon Mtweve. 2011. *Poverty and Its Association with Child Labor in Njombe District in Tanzania: The Case of Igima Ward*. Maxwell Scientific Organization, 2011.
- [17] Ortiz, Isabel dkk. 2012. *Child Poverty and Inequality: New Perspectives*. UNICEF, Division of Policy and Practice: New York.
- [18] Brown, Gordon. 2011. *Child Labor & Educational Disadvantage – Breaking the Link, Building Opportunity*. The Office of the UN Special Envoy for Global Education: London.
- [19] Duadji, N & Tresiana, N (2019). Laporan Penelitian Tahun ke-1 "Membangun Pekon Ramah Anak Berbasis Demokrasi Deliberatif : (Menggagas Sound Governance Body dan Citizenship Education dalam Musrenbangdes), Skema Kompetitif Nasional Penelitian Dasar Ditjendikti Kemenristekdikti.

Acknowledgments

On this auspicious occasion, allow our thanks to all those who have provided support, especially to:

1. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Republik Indonesia, melalui Skema Penelitian Kompetitif Nasional Penelitian Dasar Tahun 2020
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung

Internastional Conference on Marine and Coastal Engineering and Science



ICMACES
International Conference on Marine and Coastal Engineering and Sciences

UNIVERSITAS LAMPUNG

THE CERTIFICATE IS PRESENTED TO:

Dr. Noverman Duadji, M.Si

as
Presenter

on International Conference on Marine and Coastal Engineering and Sciences 2019
"Balancing Marine and Coastal Ecosystem to Support Blue Carbon and Sustainable Economic Development"
EMERSIA HOTEL BANDAR LAMPUNG, INDONESIA
August 23 - 24, 2019


REKTOR
Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
Rector
University of Lampung


UNIVERSITAS LAMPUNG
Warsono, Ph.D
Chairman Institute of Research Center and Community
Development University of Lampung


ICMACES
Endang Linirih Widiastuti, Ph.D
Chairman of the Committee

Fulfillment of children's rights in coastal area: how to create child friendly village

Noverman Duadji¹², and Novita Tresiana¹³

¹Public Administration, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia,
Soemantri Brojonegoro 1, Bandar Lampung, Indonesia

²noverman.duadji@fisip.unila.ac.id

³novita.tresiana@fisip.unila.ac.id

Abstract. The issue of coastal child Rights has a complex character. There is a connection between the trust of the community, with the quality of governance. The study aims at: 1) the condition mapping and potential child-based real data in coastal areas; 2) The strategy of configuring social capital and governance in establishing a public trust in the fulfillment of children's rights. The study used a social mapping approach with survey techniques, with the main subjects being governments, communities (families/parents, and community leaders). The results of this study first, there are several child rights clusters that have been fulfilled, secondly, the public Trust on the fulfillment program of child rights to the Government capital to improve the quality of governance.

Keyword: Children's rights; Community trust; Sound governance body

1. Introduction

Decentralized governance provides creative space for local governments to identify, set priorities and respond to current issues and problems. The integration of knowledge, local resources, and legislative and local government authority in the planning process is believed to be the basis for creating policy innovations that are able to prosper and fulfill the rights of children. The strategy is to strengthen the participation of children and child practitioners (child care groups) contribute to expressing the priority problems and needs of children in development planning meetings (DPM) or the local term is called musrenbang.

The research is motivated by the still found negative images and synergies about village decentralization governance that affect the conditions of children, namely weak coordination, technical capacity and knowledge (human resources, data, monitoring), harmonization depreciation in each government structure and limited participation in DPM.

Considerations for choosing DPM as the object of study material: 1) One of the "village-building" translator platforms, namely the "Child Friendly Pekon Program" as the basis for districts / cities that are child-friendly by involving multistakeholders. It was found that a number of villages had opened spaces for the community to argue and mutually criticize proposed development programs, but the involvement of children had not been considered important, either because of their weak participation or the dominance of the village elite; 2) The state guarantees children's rights to express their opinions according to their age and intelligence level. The legal framework for child participation has been regulated by Law No. 6/2014, Keppres N0 36/1990, Law No. 23/2002 then revised with Law No. 35/2014; 3). Involving children is the application of a democratic model and deliberative policy is a new movement of village tradition to accommodate the interests of all, especially vulnerable communities including children. From an early age, children as the next generation of the nation need to be prepared, introduced and trained in democracy so that they become a generation that has character, responds to the surrounding environment and is able to voice their rights.

The framework for formulating new ideas in this research is to elaborate the conception of deliberative democracy, deliberative policy, sound governance body and citizenship education. The idea

of deliberative policy [1] is a form of derivation of deliberative democracy [2]. Both experts have initiated the role of civil society emancipatively through communication processes, the achievement of open "consensus" in "public space", deliberation and equality into preconditions before the creation of consensus, and this process must be separate from state and market policy interventions.

Reality shows it is difficult to realize the concept of Habermas. [3] found the response of public space in Indonesia, including in the local government because public spaces are generally in the form of citizen forums initiated by the government. Citizens' forums, including children's forums are not empty spaces, there are political and market maneuvers, even their existence is an affirmative policy for vulnerable groups. Habermas deliberative ideas certainly require a reorientation of the context of participation and planning, as a basis for the idea of innovation in the "forum" public space that is formed, so that the forum called public space can secure publicity through the strengthening of local pro-child social culture.

The idea of Sound Governance Body put forward by [4] and the idea of Citizenship Education proposed, became a meeting point for new orientations synergizing Habermas deliberative with the context of policy innovation to strengthen public space through the design process of maturity, maturation and early recognition in children so that citizens find collective intelligence to behave. Adequate knowledge enables children and citizens to participate in the Sound Governance Body as a reflection of the state, market and civil society. Continuous capacity building and governance management strategies for public participation in musrenbangdes through multistakeholder community activities. Although there has been direct selection of key public positions (village heads) in musrenbangdes, public participation is the main thing so that the musrenbangdes review including implementation practices is important to be reviewed and urgently to produce novelty. Therefore, the aim of the research is to formulate a model of public space in the Musrenbangdes as a catalyst for governance and strengthen the capacity of musrenbangdes stakeholders to realize policy innovations that are pro-child and Child-Friendly Pekon.

2. Methodology

The method is a tool to achieve research objectives. Related to the research objective is to formulate a model of public space in the musrenbangdes as a catalyst for governance (governance) and strengthening the capacity of musrenbangdes stakeholders to realize policy innovations that are pro-child and Child-Friendly Pekon, then qualitative methods are chosen.

In general, the territory of South Lampung Regency as a location. Be more specific in 9 selected villages. The research team conducted a survey to inventory information about: 1) children's problems and issues; and (2) identification of institutional potential, social capital, participation, partnerships. Data collection is done by (a). Questionnaire (b). In-depth interview (c). Observation (d). Participatory Mapping and e). FGD. While the analysis and synthesis of data is done by interpreting the data by comparing it with the concepts used to obtain certain meanings as research findings.

3. Result and Discussion

3.1. General Condition of Children Profile in South Lampung Regency

Indonesia's commitment to the protection of children's rights can be traced to the juridical side. First, it is stated in Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child (CRC). Secondly, at the macro level, the 1945 Constitution includes imperatives for the survival of children, namely articles 28b and 28c. Furthermore, over time in the process, many developments both institutionally and in regulation are being pursued by Indonesia so that the right of children's survival is maintained. This commitment is followed up by various local governments by

making their regions "compete" as City/District Eligible Children (KLA). The KLA is an effort by the district/city government to accelerate the implementation of the CRC from the legal framework into a factual shutter regarding development definitions, strategies and interventions through child-friendly policies, institutions and programs. For the context of the Lampung Provincial Government, the KLA is substantively seen as an effort to improve children's survival and is placed as one of the priorities for health development. This becomes important in the context of efforts to build superior human resources in Indonesia, because the development of human quality needs to be preceded by good health, including health in childhood, even when the child is still in the womb.

After the presence of Law No. 6 of 2014 concerning Villages, the village now has autonomy, therefore the village level government also has the responsibility in protecting the right to life of children. The village is the spearhead in the implementation of Child Friendly Villages. The aim of the Child Friendly Village / Village is addressing issues related to children such as child infrastructure towards school, human rights, children's playgrounds, and so on.

Mapping the existing conditions regarding children's rights and survival in South Lampung Regency is very important, so it is necessary to explain in this section. Further Lebij also needs to analyze the institutional (public space), social capital, participation, partnerships and actors related to child-friendly villages / villages.

Table 1. Number of Children in South Lampung Regency

Sub Districts	Male	Female	Total
Tanjung Bintang	12.043	14.105	26.148
Sragi	5.538	6.324	11.862
Ketapang	8.720	10.171	18.891
Bakauheni	3.118	3.736	6.854
Way Sulan	3.405	4.319	7.724
Way Panji	3.596	3.740	7.336
Kalianda	13.451	15.982	29.433
Raja Basa	4.542	20.806	8.267
Palas	11.044	13.728	20.806
Penengahan	7.421	64.696	13.728
Natar	34.953	22.941	64.696
Katibung	12.549	10.871	22.941
Tanjung Sari	5.939	39.631	10.871
Jati Agung	21.629	24.768	39.631
Sidomulyo	13.318	20.704	24.768
Candipuro	11.159	19.544	20.704
Merbau Mataram	10.557	20.806	19.544
Lampung Selatan	162.716	191.488	354.204

The data shows that the number of children in South Lampung Regency is 354,204 with details of 162,716 boys and 181,488 girls. Children in South Lampung Regency are great potentials and successors to the ideals of Indonesian fighters, especially the future of South Lampung. Children need to be protected - they need to be guaranteed their full physical, mental and social growth and development.

Children's education is one important element as a guarantee of children's growth and development. This description is shown by the participation of the population in utilizing formal schooling education facilities or commonly known as the APS (School Participation Rate) issued by the Central Statistics Agency (BPS). The data shows the number of population according to certain age groups accommodated by educational institutions (schools). Thus, the APS shows the size of the school-age population that is in school, a measure of absorption, equity and access to education, especially school-age population.

Table 2. School Participation Rate in South Lampung Regency

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah
7-12	99,41
13-15	92,95
16-18	64,49

Health is also an important part of the dimension of child protection rights. In this case, immunization is one of the most effective health protection measures for children against several diseases (PD3I) . Immunization is the most cost effective in the context of efforts to improve public health. In Law No. 36 on Health in 2009, it is stated that every child has the right to obtain basic immunization in accordance with the provisions to prevent the occurrence of diseases that can be avoided through immunization. The government is required to provide complete immunizations to every baby and child. In Lampung Province, coverage of complete basic immunization is still around 45%. This figure is still below the national figure of around 59%.

In South Lampung Regency itself, toddlers receiving immunizations are quite high, both BCG, DPT, Polio and measles in each of their districts, as contained in Table 4.

Table 3. Data of Children in School in South Lampung Regency

Sub-District Name	Number of Children in School					Number of Children in School					Number of Children in School					GT
	Primary School		M. Ibtidaiyah		Total	Junior high school		M. Tsanawiyah		Total	Senior high school		M. Aliyah		Total	
	Female	Male	Female	Male		Female	Male	Female	Male		Female	Male	Female	Male		
Natar	4.414	4.784	107	153	9.458	1.999	2.073	121	122	4.315	1.106	1.121	55	48	2.330	16.103
Jati Agung	2.148	2.396	85	90	4.719	855	865	64	71	1.855	470	445	22	20	957	7.531
Tanjung Bintang	2.122	2.274	11	21	4.428	940	955	13	16	1.924	459	481	4	0	944	7.296
Tanjung Sari	1.116	1.233	1	1	2.351	500	560	8	4	1.072	192	251	1	2	446	3.869
Katibung	2.521	2.670	130	138	5.459	1.077	1.120	83	103	2.383	526	536	17	25	1.104	8.946
Merbau Mataram	1.655	1.635	117	124	3.531	678	700	80	78	1.536	329	285	11	3	628	5.695
Way Sulan	636	661	265	316	1.878	243	311	184	160	898	210	233	31	33	507	3.283
Sidomulyo	1.584	1.773	63	68	3.488	656	672	60	77	1.465	321	288	6	4	619	5.572
Candipuro	1.225	1.349	207	197	2.978	433	452	223	182	1.290	236	248	71	50	605	4.873
Way Panji	268	321	11	14	614	147	106	9	14	276	57	51	1	4	113	1.003
Kalianda	2.693	2.915	43	50	5.701	1.101	1.112	95	128	2.436	603	641	53	55	1.352	9.489
Rajabasa	727	847	18	21	1.613	268	307	65	50	690	157	162	17	19	355	2.658
Palas	1.723	1.791	70	110	3.694	569	627	183	171	1.550	352	318	31	20	721	5.965
Sragi	1.146	1.221	53	59	2.479	349	406	169	164	1.088	206	183	18	23	430	3.997
Penengahan	1.197	1.315	47	68	2.627	464	461	101	102	1.128	275	287	22	10	594	4.349
Ketapang	1.439	1.546	79	93	3.157	551	523	117	121	1.312	266	270	19	13	568	5.037
Bakauheni	617	584	22	39	1.262	260	247	26	28	561	148	146	2	0	296	2.119
															Jlh Total	97.785

Table 4. Toddlers Who Get Immunizations in South Lampung Regency

Sub-District Name	BCG	DPT	POLIO	MEASLES
Natar	3.855	3.941	3.644	3.828
Jati Agung	2.224	2.212	2.206	2.216
Tanjung Bintang	1.657	1.662	1.661	807
Tanjung Sari	592	646	571	590
Katibung	1.371	1.437	1.291	1.336
Merbau Mataram	1.137	1.129	1.133	1.115
Way Sulan	564	556	552	565
Sidomulyo	1.426	1.448	1.375	1.314
Candipuro	1.055	1.030	983	994
Way Panji	383	374	375	355
Kalianda	1.757	1.723	1.663	1.750
Rajabasa	504	483	479	478
Palas	1.259	1.242	1.239	1.235
Sragi	748	732	731	733
Penengahan	782	803	809	780
Ketapang	962	1.088	901	922
Bakauheni	497	498	479	482
Lampung Selatan	20.773	21.004	20.092	19.509

The South Lampung Regency Government has issued several policies relating to children's rights, including: 1) South Lampung Regency Regulation No. 4 of 2015 concerning Implementation of Child Protection; 2) South Lampung Regency Regulation No 3 of 2018 concerning No-Smoking Areas; 3) South Lampung Regent Regulation No. 53 of 2017 Concerning Library Transformation in South Lampung; 3) Decree of the South Lampung Regent No: B / 261 / IV.05 / HK / 2016 concerning the Appointment of the South Lampung Regency Children's Forum Management Period 2019-2021.

One issue of children that needs to be responded quickly nationally is the problem of stunting. The prevalence of stunting in the age group of 0-59 months, Lampung Province is at 31.6%. This means that Lampung Province is included in the category of severe public health problems. In 15 districts / cities in Lampung Province, there are 7 districts / cities with stunting prevalence above the provincial prevalence and 8 districts with prevalence below the provincial prevalence. Of the 8 regencies / cities with a prevalence below the provincial prevalence, 2 districts entered into severe public health problems, namely South Lampung District (30.3%) and Way Kanan District (30.7%).

In the context of the South Lampung Regency Government in response to the stunting issue, the Regional Government has released two policies namely 1) South Lampung Regent's Regulation Number 10 of 2019 concerning Stunting Reduction, 2) South Lampung Regent's Decree Number 216 of 2019 concerning the Formation of the Stunting Decrease Team . This step should be appreciated as a form of government attention to the problems faced by its citizens.

3.2. *Considering Institutional: Encouraging Villages as Child-Friendly Public Spaces*

Theoretical side, in the public sphere all citizens have access to voice and negotiate their aspirations to encourage public opinion. This public opinion has a role to influence everything in the public sphere, both formally and informally, to carry out the production and circulation of discourse which in principle is very important for the country. Public space in other words is a space that mediates between society and the state where the public organizes and organizes itself as the owner of public opinion [5]. In the context of this research, the village / village complex can be encouraged as a child-friendly public space. The purpose of this Child Friendly Pekon is when the village / pekon is able to become a shared space that is

able to protect all dimensions of children's rights. Therefore, the village government needs to facilitate by organizing a public space canal to conduct deliberations in building consensus on the direction of village development relating to children.

The village is a legal community unit that has an original structure based on special origins. The village is a self-community, that is a self-governing community, meaning that the village has the authority to manage and regulate the interests of its people in accordance with local social and cultural conditions [6]. Whereas village government is an extension of the central government that has a strategic role in regulating rural / urban communities and the success of national development [7]. Village government can be interpreted as a subsystem of the government administration system, so that the village has the authority to regulate and manage the interests of its people. The rationale regarding village governance is diversity, participation, autonomy, democratization and community empowerment [6]. The village government has a significant role in managing social processes in the community. The main task carried by the village government is how to create democratic life, provide good social services so that it can bring its citizens to a prosperous, peaceful, and just life.

The results of studies in nine villages in South Lampung Regency show that culturally, families in village communities have given attention to the growth and development of their children in daily life. However, this attention has not been optimized based on the multi-dimensional rights of children. Therefore, the attention of the family as the main agency in realizing children's rights needs to be re-institutionalized. The process of institutionalization is a process that is passed by a norm or value of a new society to become part of one of the social institutions. Social institutions are considered as regulations if these norms limit and regulate the behavior of people within the institution's environment [8]. Actually, institutionalization does not just stop, but it can continue further until the community is not only institutionalized in people's lives, but has internationalized in people's lives. In this case, the village government needs to make efforts to internalize new values for families in providing a more comprehensive understanding of children's rights.

The best environment for children is an environment that has a strong physical and social community, a community that has clear and strict rules, which provides opportunities for children, and educational facilities that give children the opportunity to learn and investigate their environment and world [9]. Pekon / village as the closest administrative environment for children needs to be supported by a strong community in paying attention to children's rights. Therefore, multi-stakeholder involvement is needed in supporting child-friendly villages.

A concrete manifestation of public space at the village level is the existence of village development planning meetings. Ideally, through musrenbangdes will be able to build an understanding of the interests and progress of the village, by mapping the potential and development resources available both from within and outside the village. In other words, village development will not move forward if one of the three components between the government, the community, the private sector does not play a role and take part in it. Therefore, musrenbangdes is a forum and learning media for stakeholders of all elements of governance to be very urgent in the governance and village development [10]. But unfortunately, the situation on the ground shows that the Musrenbangdes forum has not been able to produce superior development policies / programs [3]. Musrenbangdes are still running formally and elitistly. Such conditions indicate the issue of children's rights as a discussion that has not been much discussed in the forum. Even the private sector has not been much involved in the musrenbangdes forum. Yet if people begin to have a sense of trust in a public policy or program if they feel involved in the process of preparation, planning, and implementation [11]. This did not occur at the Musrenbangdes in South Lampung Regency, including in the discussion of the issue of children's rights. Dialogue in the forum is still dominated by the role of village government that is elite, rather than involving the wider community and the private sector from the start. Surely this has become a serious and inherent shortcoming in the musrenbangdes as a manifestation of public space. This creates a tendency for elite interpretation to pour in programs related to children's rights.

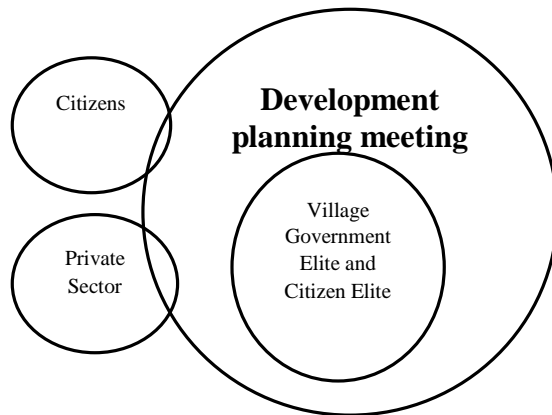


Figure 1. Deliberation Diagram at Development planning meeting (DPM/Musrenbangdes)

This interpretation bias met with an ironic point when the village apparatus and several elite parties did not have sufficient capacity to discuss the issue of children's rights. On the other hand, in terms of public space it is ideal if the discourse built in the community as participants is limited to the common goods and interests, not individual interests [12]. Goodness and common interests are difficult to materialize if the parties within do not yet have a capable ability to understand a problem. The ideal condition of public space has not been realized until now, but that does not mean pessimism is a door that will be opened. The process of revamping public spaces at the village level can be continuously improved by direct involvement of villagers, at least to absorb the problems faced by residents with a community consultation or consultation meeting approach.

Both theoretical and empirical experience, it shows that without authentic dialogue, people will never really reach a point of mutual understanding or correct identification of problems [13]. Authentic dialogue is a process that allows all stakeholders to speak openly, honestly and be heard by all parties. This needs to be constructed as an anchor in any deliberative activity held by all parties who have an interest in the implementation of child-friendly villages.

The development of a child-friendly village requires a broad involvement of all parties in it. Often the approach used in developing child-friendly villages is a rights-based approach model. However, often in the field of implementation in the field is very different from the ideal concept. Seeing the condition of the village, there are several models of approaches and strategy development that can be done to make children's rights as the main stream of development.

Families, community members, community leaders, religious leaders, institutions and institutions in the village and village government. All must play a role in efforts to develop a child-friendly village. This is a joint work that will take a long time to bring about a transformation of the paradigm of society and all its components.

In deliberative democracy, all citizens as participants have the same right in contributing to formulate something that is fair and unjust. In deliberative democracy, the democratic process is realized through a forum where all the differences in a group of people are united without coercion [14]; [15]. This is the biggest challenge for stakeholders in implementing child-friendly villages / villages. Because of its reality, differences of opinion must have come to surround the deliberation process. Then, the difference will result in the dominance of a handful of parties or not. This needs to be explored more deeply. Collaboration between participants who have different interests will succeed in achieving common ground if dialogue is truly authentic, not rhetorical or ritualistic [16]. To be authentic, dialogue must meet certain conditions [2]; [17], where each participant must represent each interest, must speak sincerely, must make statements that can be understood by others, and each statement must be accurate. To free the individual (subject) from various interests, a continuous dialogical (intersubjective) condition is needed, which is free

from domination. This is certainly not an easy job, because to trace one's sincerity in a dialogue cannot be measured accurately. Therefore, the possible thing to do is to see the quality of the arguments and the objectives to be agreed upon, and of course the important thing is the process during the dialogue.

3.3. *Potential for Social Capital*

Everything that belongs to the village is a resource that needs to be optimized in its effective use. Like the logic of "Glass half-filled or half-empty," the village government should focus on contents, instead of focusing on empty ones. Something that is owned by the community is social capital. Social capital is one of the main components in driving togetherness, mobility of ideas, mutual trust and mutual benefit to achieve mutual progress [18]. Social capital is capital that emphasizes more on the capital owned by the community as a result of the social relations that exist between all members of the community.

Social capital can be an alternative to mainstream discourse that always puts material capital like economic capital. In several academic studies many important findings that explain the urgency of social capital in addition to economic capital in people's lives. Talking about social capital means learning how people work together to build a network to achieve a common goal to improve the quality of life. The main dimension in the study of social capital is the pattern of interaction between individuals within groups and between groups with space for attention on social networks, norms, values and trust between people born from a group [5].

[19] revealed, social capital has a very broad dimension regarding everything that makes a community allied to achieve a common goal on the basis of togetherness, and in it is bound by values and norms that grow and obey. On the other hand, [20] previously described social capital as an aggregate of actual and potential resources associated with the ownership of a network of institutionalized introductory and recognition relationships that gave each of its members collective capital support. The social capital described by Bourdieu is assumed as a vehicle for agents to achieve instrumental goals.

Social capital is the result of social structures that point to the aspects of social organization such as beliefs, norms, and networks inherent in the life of a society with the context of its socioeconomic and political background [21]. With strong social capital, it is hoped that a strong social organization will be built. In the context of child-friendly villages, an important emphasis of social capital is community togetherness to work together to begin building child-friendly village institutions for the future of their children. In this context, it is precisely what Burt explained [22] which explains social capital as a form of community's ability to associate with each other so that it becomes a very important force, not only in economic aspects but also in the social sphere.

Humans in meeting their daily needs cannot walk alone. Humans need each other and work together, therefore humans are always called social beings. The network that connects the collaboration is social capital. Social capital is the key to success of a social organization [21]. Social capital provides a foundation for the construction of the meaning of trust, togetherness, tolerance and participation that is closely related to the survival strategy. In this case, social capital in the villages of South Lampung Regency experienced an anomaly. Partially, several aspects of social capital such as trust, networking, and social norms work well. The dynamics of social capital in each village can be different, but when faced with the context of institutionalizing village development, particularly with regard to child rights issues, social capital has not been able to properly convert into a driving factor.

There are still many villages in South Lampung Regency that have not made child rights-based programs a top priority. Village priorities still encourage many infrastructure development programs. Whereas when a village plans a program based on the fulfillment of children's rights due to the presence of local intellectuals as a creative minority who try to include pro-child agendas. But the programs compiled are more normative, rather than innovative. This does not mean that normative programs are not important, but program innovation needs to be pursued more optimally by child-friendly village stakeholders. Of course, normative education programs such as PAUD, TK, TPA, or health such as the Posyandu program are mandatory basic programs. But of course, this is not sufficient in the context of the wider functions of public administration. More serious efforts are needed to read more holistically the totality of the fulfillment

of children's rights, so that the state is present not merely to a minimum. In the era of contemporary village autonomy, villages actually have the opportunity to create various innovations to meet the real needs of their citizens, including children.

One important aspect of social capital is trust. Trust is the most important element in public discourse. In the context of the shift in the paradigm of public administration towards governance, there is a transformation in increasing the collective capacity of the community to better organize and manage their collective interests. In this context, informal institutions are now part of the locus of governance that can be key in achieving these collective goals [19]. This informal interaction opens opportunities to strengthen and deepen mutual trust within the community. Community trust in villages in the South Lampung region is quite strong. This is indicated by various social activities that are often carried out by villagers in the form of mutual cooperation. The tendency of social values prevailing in the villages of South Lampung leads to the nature of harmony and harmony, tolerance; mutual cooperation; kinship; ethnic and cultural attachment; social care; and adherence to figures [10]. This finding is in line with the classic study conducted by [23] suggesting that mutual cooperation has been entrenched and spread in social life in Indonesia and is the most important social institution in development. This can be seen as the term *splice*, village cleansing that prevails in Javanese society or the term *krama* in Bali which indicates mutual cooperation activities in regions [24]. This is what shows the typical village character in the midst of the onslaught of globalization, local wisdom and traditional values are still maintained, including in villages in South Lampung. Thus, trust has been internalized in the daily practices of the community, but the trust has not been extrapolated to become the village's power to develop itself to make the village child-friendly.

If the child-friendly village has become a common goal, then to realize it needs to be based on mutual trust. Development and mutual trust are interconnected, and the accompanying processes then accumulate mutual trust. The mutual trust of the villagers can be the initial force that is encouraged, not anymore individual strength, but social strength. Mutual trust is the collective energy of the community to overcome common problems and a source of motivation to achieve mutual economic progress. This mutual trust grows and is rooted in the values inherent in group culture.

Based on document review, in general, village communities in South Lampung Regency are still classified as poor. This condition is a challenge in pushing the child-friendly village agenda, because the village community will focus more on matters relating to their basic economic needs. However, that's where the point of urgency is. The poverty cycle that occurred in the villages of South Lampung needs to be hacked by starting to discuss seriously the future of the village in the present. One of them, of course, is about the development of children in the village. Because they are the ones who will become the successors of village development. Based on the relatively strong aspects of trust, village governments and stakeholders who have a concern for children need to make efforts to intervene in knowledge to organize themselves in organizing child-friendly villages. This can be done by inventorying all the resources owned by each village, so that the village can focus on its "assets", rather than just focus on the shortages. Community empowerment based on community assets has become a new paradigm in carrying out social transformation in a particular community / region. In the context of this research, this paradigm is more optimistic, because it will focus on the resources of the village. These resources do not need to be material, but can be sourced from the experience of each village. Each village must have experienced activities related both directly and indirectly in terms of fulfilling children's rights. Each village must also have a different character and uniqueness. These things can be strengthened and deepened their role in the implementation of child-friendly villages in the future.

Furthermore, the potential for social capital that needs to be explored is the norms and values that apply and develop in the villages of South Lampung. In the context of this research locus, villages in South Lampung have certain norms that are held tightly by the community. This is still closely related to the mutual trust that has been explained before because trust is one visualization of the existence of collective strength to hold social norms to work together. On the other hand, related to the governance perspective which is the paradigm of this research, norms and values in social capital are important in supporting the sustainability of governance platforms. Governance brings together a number of organizational pluralities, so its presence is also built by a variety of value systems and norms that are carried at the supra-

organizational, inter-organizational and inter-organizational levels. In this context the governance is actually loaded with the ties of the value system available in the deposit of its social system.

In developing a child-friendly village, the approach taken must truly be able to touch all parties who have an interest in children's rights, starting from the family, community members, community leaders, religious leaders, institutions and institutions in the village and the village government. A rights-based approach based on values and norms that apply in areas of child-friendly village development can be an effective approach. This approach model tends to be easily accepted by the community considering that the village community is very thick with the values and norms that have long been held by them. Therefore, there needs to be an effort to explore the values and norms that have and are rooted in the life of village communities. Then these findings are developed as a source of strength, as social capital for social transformation in society. Thus the community will not be resistant to the changes made.

Following [19] explanation, social capital as a set of informal values and norms that are shared between members that enable cooperation between them, so there are important points, namely on informal values and norms. This is relevant to village life that is accustomed to an informal lifestyle. Communal values, collectivity and family are inherently inherent in the daily life of villages in South Lampung. Local values of the community are still very awake such as mutual consultation, religious, family and togetherness, mutual cooperation culture, and a friendly community towards the visitors. The dynamics of the process that takes place in the informal village are gradually strengthening trust. Because trust is not born spontaneously. Hierarchical norms are not too significant to foster a commitment of trust in a society. Therefore formal norms that are designed with a strong hierarchical basis, will not help much the emergence of trust [19].

The social formation of the community is determined by the presence of this spirit of mutual trust, and the emergence of this trust is also largely determined by the ties of a more cultural character. Therefore, exploring the culture and matters of local wisdom that are rooted in the life of the village community can be a further step. This is important to find a meeting point between the concept of children's rights and Indonesian culture. There must be no counter-productive assumptions such as children's rights similar to Western cultural products. Yet if you explore, the nation's culture holds various kinds of wisdom that one breath with the convention of children's rights.

Another important aspect of social capital is networking. Networks or relationships in social capital are potentials to synergize and uncover other potentials and capital. The potential of networking and relationships are at the core of the dynamics of community development. The complexity of networks and relationships that are built in a community is one indicator of the strength of the community. Networks and relationships are not only horizontal, but also vertical. Therefore, all forms of networking and relationships are important to be expanded as a dynamic effort for the community to overcome the problems they face [25]. With the presence of networks or relationships allows for coordination and communication that can increase mutual trust that has existed before [21].

Based on observation, the potential of networks in villages in South Lampung is relative. There are villages that have actual networks, some are still potential. For certain villages, social capital in the form of networking has been used outwardly. Villages that are close to the center of government and the center of the economy, social capital is satisfactory and outward oriented. However, unfortunately this social capital only works in the economic field and social capital between villages is not yet optimally connected.

Networking or relationships are one dimension of social capital in addition to trust. The concept of networking focuses more on aspects of bonding between vertices that can be people or groups. In this case there is an understanding of social relations that are bound by the existence of trust which trust is maintained and maintained by existing norms. In the concept of networking, there is an element of work, which through social relations media becomes cooperation. Basically, networks are formed because of a sense of mutual knowledge, mutual information, mutual reminders, and mutual assistance in implementing or overcoming something. In essence, the concept of networking refers to all relationships with other people or groups that enable activities to run efficiently and effectively [26]. This network becomes part of social capital if it is able to be optimized by community members. Networking becomes a resource that gives possibilities for the acceleration of a development process carried out by the community. In this context, limited network

capacity is held and utilized by creative minorities who are still elitist in the villages. The creative minorities here are a number of parties, such as community leaders or village elites and village governments who are doing something that has a social impact on their area. From the results of the study of researchers, this happens because the network ecosystem has not yet been developed between villages in South Lampung, so collaboration between villages occurs. The networks that are currently being built are more accidental, rather than starting with a mature empowerment process. Therefore, joint work that needs to be pursued in the future in order to improve the social capital network of villages in South Lampung is to build a collaborative ecosystem between villages. This idea provides an opportunity to strengthen the potential of the village.

Social capital can develop if there is support from an institution that is able to organize the potential of its members. Therefore, extra efforts are needed to develop the capacity of organizations in villages to encourage potential social capital to be more actual. This organization can focus on producing new knowledge and inventorying village resources. In the context of a child-friendly village, the organizations that can be developed can be the village government, community organizations, and of course the children's forum.

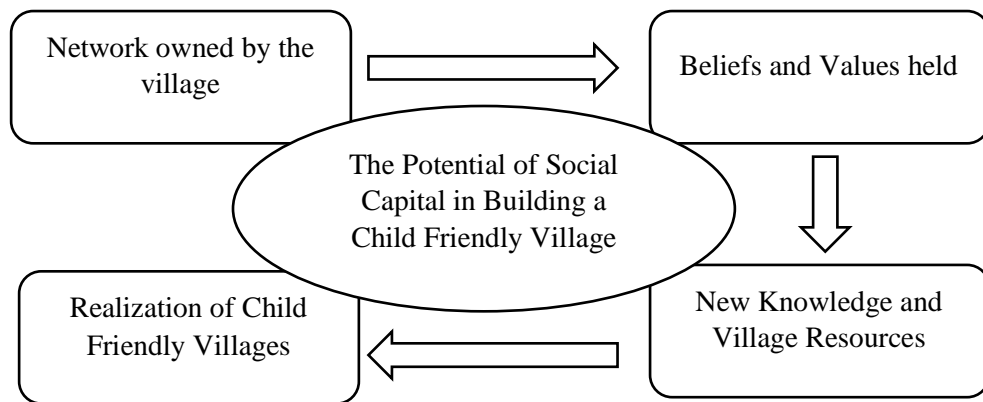


Figure 2. The Potential of Social Capital in Building a Child Friendly Village

From the previous explanation, the researcher compiles an overview that villages in South Lampung basically already have social capital even though the quality is not uniform. This has good potential and can be used as a foundation and a driving force in the development of a child-friendly village. By optimizing village-owned networks (Figure 2), village institutions can cultivate the beliefs and values that are held tightly in the community to be pushed into new knowledge by utilizing the resources of the village. The first step taken in developing a child-friendly village is the existence of an awareness process through education. The production of new knowledge for village communities can be done through various campaigns, workshops and trainings for children, families, communities and village government. This awareness and understanding are the most important and most vulnerable in the effort to develop a child-friendly village. The wrong step will be an obstacle in the next process.

3.4. Actor Participation and Dynamics

South Lampung Regency gradually began to establish itself as a Child-Friendly City (KLA). This commitment needs to be maintained not only at the urban center level, but to the remote villages in South Lampung. City / District Eligible Children is a district / city development system that integrates the commitment and resources of the government, the community and the business world that is planned in a comprehensive and sustainable manner in policies, programs and activities for the fulfillment of children's rights. Finally, in 2019 South Lampung achieved the achievements of the City of Eligible Children along

with seven other regions in Lampung Province. This is in line with the mission of the Governor and Deputy Governor of Lampung, namely the empowerment of women in realizing Lampung as a child-friendly province. If all regencies / cities in Lampung Province have won KLA, then the opportunity of Lampung Provincial Government to become a Child-Friendly Province (Provila) in 2020 may be achieved. The fulfillment of children's rights can be realized concretely, for example by establishing a child-friendly school. In this case, it does not mean that the teaching staff concerned, but starting from the snacks must be healthy, a healthy environment, including parenting.

Fulfillment of children's rights is fundamental and must be carried out by the state. However, these efforts must be done synergistically. It is not only a matter of related instantiation, but also all parties ranging from Bappeda, the Education Office, the Health Office, to PUPR must work together, both at the provincial and city level, including when pushed to the village.

To become a KLA, at least the region must fulfill 5 clusters of fulfilling children's rights, namely: (1) Fulfillment of children's civil rights; (2) Family environment and alternative care; (3) Health and Welfare; (4) Education, use of leisure time and cultural activities; and (5) Special Protection.

The five clusters, in several contexts, have been fulfilled by South Lampung Regency which until finally in 2019 won the KLA. However, the challenge now is that the fulfillment of children's rights based on the 5 clusters must be encouraged to be implemented at the village level. In this case, the results of the study of researchers show the fulfillment of children's rights is not optimal. The village, has not given special priority to the fulfillment of children's rights. In fact, the village, as the administrative area closest to the citizens, has great potential to provide child-friendly services. Padahal children are the hope of every parent and family. In a deeper perspective, children are the hope and future of the nation and even the world. Therefore, it becomes crucial and a shared commitment to fulfill the rights of children as human beings and create a world that is appropriate for them. Children are part of the younger generation as one of the human resources who are the potential and successors of the ideals of the nation's struggle, who have a strategic role and have special characteristics and traits, need guidance and protection in order to guarantee their physical, mental and social growth and development.

South Lampung Regency has released several regulations to mainstream children's rights. Among them, 1) South Lampung Regency Regulation No 4 of 2015 concerning Implementation of Child Protection, 2) South Lampung Regency Regulation No 3 of 2018 concerning Non-Smoking Areas, 3) South Lampung Regent Regulation No 53 of 2017 Regarding Library Transformation in Lampung Selatan, 4) South Lampung Regent Decree No: B / 261 / IV.05 / HK / 2016 concerning the Establishment of South Lampung Regency Children's Forum Management Period 2019 - 2021. The presence of these regulations can be a direction that can be used as a basis for all stakeholders has attention in fulfilling children's rights in South Lampung.

According to the Regulation of the Minister of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 3 of 2011 Article 1 Paragraph 2, "Child Participation is the involvement of children in the process of making decisions about everything related to themselves and carried out on mutual awareness, understanding and willingness so that children can enjoy the results or benefit from the decision. Children need to be involved in decision making, including in making regional development plan decisions to create a city that is feasible for them..

The above shows that children's participation is actually the basis and point of the important parties that guarantee that children are subject to the same human rights so that they are not always the object of a development process. At present, the government has formed and fostered a platform for children's participation called the Children's Forum, which consists of all children and the caretaker consists of representatives of child groups. Children's forum stands with the aim to bridge the interests of children and the interests of adults. A children's forum is a medium, forum or institution for fulfilling the right of participation of the child, to specifically emphasize article 10 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.

In the empowerment paradigm, the community is invited to participate and play a role in the planning, implementation and monitoring and evaluation processes. In fact, it comes to managing the funds and resources available for development. Community participation is community participation starting in

the process of identifying problems and potential that exists in the community, as well as finding alternative solutions to solve problems, implementing selected solutions and conducting direct evaluations of changes that occur [27]. Community participation in development such as blood flow in the body; become a necessity. Because the success of a development now cannot rely solely on the government. It is the community as the main subject of development, that involvement can solve the problem of development gaps that occur. Without participation a non-democratic organization is created. In general, this is certainly a contradiction with the task of village government. Whereas the village government has the main task of creating democratic life, providing good social services so that it can bring its citizens to a prosperous, peaceful, and just life [28]. As a form of commitment in responding to the understanding of the importance of children's participation rights to create a world that is suitable for children, the South Lampung District Government also facilitated the establishment of the Children's Forum. However, this seems also still difficult to implement. Children until now are still in the background in the development process. Child welfare is assumed to occur if the development goes well. So the child only exists in the notion and was never put forward consciously and deliberately as an insight into development and not the subject of development. They are only indicators of development, such as infant mortality, infant and child mortality, degrees of participation in education, and so on. The concept of children themselves is also still biased. Children are sometimes seen as adults who are not yet 'made', or are in the process of 'becoming', so they don't need to be taken into account. Though children are resourceful citizens who are able to help better future development for everyone. In fact, in the contemporary context, in the era of rapid information technology transformation, now the opportunity for children is wide open in accelerating their knowledge. With the formation of the South Lampung Regency Children's Forum, this forum needs to be included in the musrenbang activities in South Lampung Regency.

Table 5. Map of Governance at the Village Level

Elemen Governance	Actors	Arena	Relational Issues
State	Village head and village official	Regulation, control of society, management, policy, finance, services	Accountability, Transparency, Responsiveness, and Capacity
Political Society	Village Representative Body	Representation, Articulation, Aggregation, Formulation, Legislation, Socialization, Control	Capacity, Responsiveness, and Accountability
Civil society	Social Institutions, Social Organizations, Children's Forums, Community Citizens	Self-help, cooperation, mutual cooperation, social networks	Participation (Voice, Access and Control)
Economic Community	Economic actors and organizations	Production and distribution	Policy Access, Social Accountability

4. Conclusions

In accordance with the objectives of the study, several important things can be formulated as research findings, namely:

1. Fulfillment of children's rights is an absolute must and must be fulfilled to create a nation's next generation of quality and national character.
2. Musrenbang at any level is a forum that must be able to bring together and facilitate the interaction of elements and related actors (stakeholders) to aggregate interests in the program as a quality musrenbang product.
3. As a media and instrument for character formation and awareness of the nation's next generation, early learning and direct involvement of children in musrenbang. Children will get a transformation of knowledge, experience, and self-maturity.
4. deliberative democracy will be carried out in the musrenbang if there is space and opportunity for the interaction and participation of relevant stakeholders.
5. Policy innovation to create child-friendly districts / cities must start at the most basic level, namely village / village development planning meetings.
6. Realization of child-friendly villages / workshops is an aggregation of the functions of social capital, village networks, and the potential of village resources (human resources, village local potential).

References

- [1] Hajer, Maarten, A. and Henderik Wagenaar (eds), 2003. *Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in The Network Society*. Cambridge: Cambridge University Press
- [2] Habermas, J. , 2006, *Teori Tindakan Komunikatif Buku I; Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- [3] Tresiana, N., & Duadji, N. ,2016, Kegagalan pemaknaan “Lembaga Musawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa” dalam mewujudkan Deepening Democracy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, **29(4)**, 191–203.
- [4] Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt, 2007, *The New Public Service: Serving, Not Steering*, (Expanded Edition), New York: M.E. Sharpe.
- [5] Faedlulloh, D., Prasetyanti, R., & Indrawati. , 2017, Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara. *Spirit Publik*, **12(2)**, 43–60.
- [6] Widjaja, H. A. ,2003, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Rafsanjani, H., Supriyono, B., & Suwondo, 2010, *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*. *Jurnal Adminitrasi Publik*, **1(4)**.
- [8] Soekanto, S. ,1997, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- [9] IULA, & UNICEF, 2001, *Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities*. (Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
- [10] Duadji, N., & Tresiana, N. , 2016, Pemodelan dalam Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, **12(2)**, 1829–1844.
- [11] Conyers, D. ,1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [12] Kadarsih, R. , 2008, *Demokrasi dalam Ruang Publik*. *Jurnal Dakwah*. **IX (1)**
- [13] Booher, D. ., & Innes, J. ,2002, *Network Power in Collaborative Planning*. *Journal of Palnning Education and Research*, **21(3)**, 221–236.
- [14] Chambers, S.,2003,. *Deliberative Democratic Theory.*, *Annual Review of Political Science*, **6(1)**, 307–326.

- [15] Young, I., 2000, *Inclusion and Democracy*. Oxford: Oxford University Press.
- [16] Issacs, W, 1999, *Dialogue and the Art of Thinking Together*. New York: Random House.
- [17] Fox, C. ., & Miller, H. ., 1996, *Postmodern Public Administration: Toward Discourse*. Thousand Oaks: Sage Publication
- [18] Hasbullah, J. ., 2006, *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.
- [19] Fukuyama, F. ., 2001, *Sosial Capital: Civil Society and Development*. *Third World Quarterly*, **22**.
- [20] Bourdieu, P, 1986, *The Form of Capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- [21] Putnam, R. ., 1993, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press
- [22] Kusumastuti, A. ., 2015, *Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur*. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, **20(1)**, 81–97.
- [23] Collette, N. ., 1987, *Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [24] Kartodirjo, S. ., 1987, *Gotong Royong: Saling Menolong dalam Pembangunan Pembangunan Masyarakat Indonesia*. In J. C. Nat & U. Kayam (Eds.), *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [25] Abdullah, S. 2016, *Potensi dan kekuatan modal sosial dalam suatu komunitas*. *Socius: Jurnal Sosiologi*, **12(1)**, 15–21.
- [26] Lawang, R. M. ., 2005, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Depok: FISIP UI Press.
- [27] Isbandi, R. A. ., 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP IU Press.
- [28] Sidik, F. ., 2015, *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, **19(2)**, 115–131.

Acknowledgments

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan pembiayaan melalui skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi tahun Anggaran 2019
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung

VIRTUAL International Conference of Science, Technology and Environment (ULICOSTE)



The screenshot shows a Zoom meeting interface. At the top, there are several video thumbnails of participants. The main content is a slide titled "Environmental reporting". The slide has a green background with a circular graphic and the text "SUSTAINABILITY REPORT 2019". Below the graphic, it says "Figure 1. Example of Sustainability Report of a company" and provides a source URL: <https://www.madocct.com/who-we-are/sustainability/>. The slide also features the word "INTRODUCTION" in large letters. To the right of the slide, there is a bulleted list:

- Environmental reporting is
 - a means to communicate the environmental performance information by an organization to its stakeholders.
- The reporting comprises of
 - the impact of the organization's operation on climate change,
 - the environment,
 - performance in managing those impacts,
 - and contribution to ecological and sustainable development
- Environmental reporting is available
 - in the company annual report or sustainability reporting

At the bottom of the slide, it says "Figure 2. Example of Annual Report of a company" and provides a source URL: <https://lcom.co.id>. Below the slide, there is a footer that reads "ULICOSTE 2020" and "10th Virtual International Conference on Science and Technology, Universitas Lampung, Indonesia, 18 November 2020". On the right side of the screenshot, there is a chat window with the following text:

Chat

Dimohon untuk seluruh presenter menggunakan format nama Kode Room (A/B/C/D)_Nama_Kode Naskah

Dimohon untuk seluruh presenter menggunakan format nama Kode Room (A/B/C/D)_Nama_Kode Naskah

From Turmudi_Banmanan to Everyone: B/Turmudi_ULICOSTE139

From Room_C_Ulicoste154_FikriAlami to Everyone: Kalau ada 2 makalah dengan 1 presenter spt saya, saya cantumkan kode yg pertama dulu ya ?

From Room_C_Novman Duedi,147 to Everyone: let me joint to room_c

From Room_C_Ulicoste154_FikriAlami to Everyone: Saya bener di ruangan C ini kan untuk Paper Ulicoste154 dan 155 ?

From Moderator_Hendra Piaseta to Everyone: bener pak

From Room_C_Ulicoste154_FikriAlami to Everyone: dik terima kasih ...

From Moderator_Hendra Piaseta to Everyone: sama2 pak

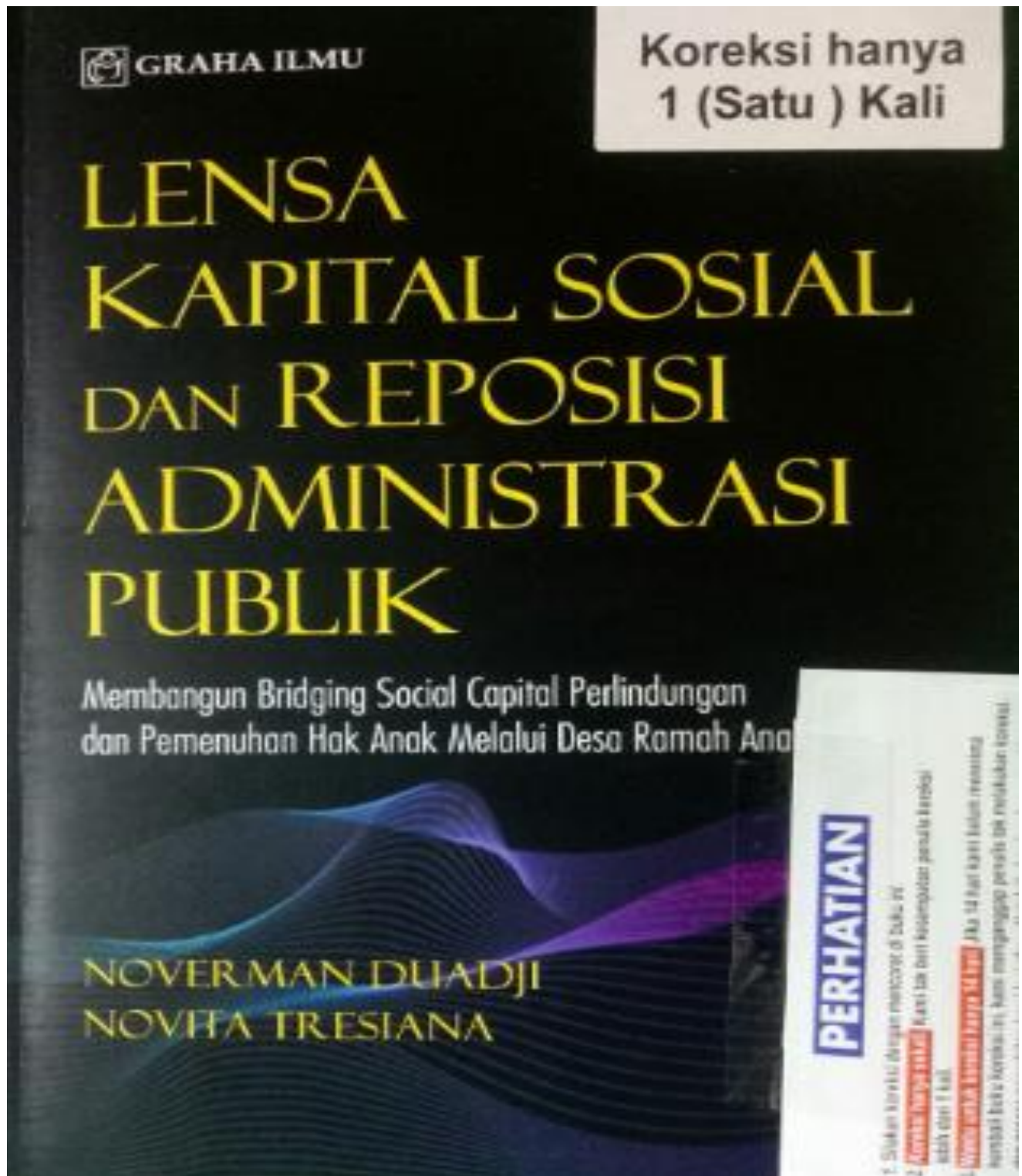
To: Everyone

Type message here...

Internasional Conference on Marine and Coastal Engineering and Science



UJICOBA PENULISAN DALAM BUKU REFERENSI



FGD ISU PERLINDUNGAN ANAK DALAM SDGs (Bappeda dan UCLG-ASPAC)



FGD: FASILITATOR PATBM, PEMERINTAH DAERAH DAN LPKA



FGD PRODUK PENELITIAN DENGAN KELOMPOK MEDIA



FGD PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



FGD REKAN SEJAWAT/ PENELITI DI LINGKUNGAN UNILA



FGD PERANGKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN





LOKAKARYA DAN DEKLARASI PEKON ANTI TRAFICKING BERSAMA COMMUNITY WATCH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG/ANAK DI 5 PEKON PILOT PROJECT LAYAK ANAK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Dokumen pendukung luaran Tambahan #3

Luaran dijanjikan: Buku Hasil Penelitian

Target: editing

Dicapai: Editing

Dokumen wajib diunggah:

1.

Dokumen sudah diunggah:

1. Bukti sedang dalam proses editing

Dokumen belum diunggah:

-

Judul Buku: LENSA KAPITAL SOSIAL DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK

Membangun Bridging Social Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Melalui
Desa Ramah Anak

Nama Penerbit: GRAHA ILMU

Website Penerbit: <https://grahailmu.id/>

ISBN:

Tahun Terbit:

Jumlah Halaman:

URL Buku:

LENSA KAPITAL SOSIAL DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK

Membangun *Bridging Social Capital* Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Melalui
Desa Ramah Anak

Penulis

Dr. Noverman Duadji, M.Si

Dr. Novita Tresiana, M.Si

Bandar Lampung, 2020

UCAPAN TERIMAKASIH

Banyak pihak yang telah mendukung terselenggaranya riset, baik dari sisi dukungan dan dari aspek finansial berupa bantuan pendanaan riset. Informasi dan data yang diperoleh melalui riset menjadi sandaran dan memberikan pengkayaan substansi buku ini. Pada kesempatan yang baik ini, ijinilah Tim penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (Dirjen Risbang) Kemenristekdikti/Kemendikbud Republik Indonesia.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung.

KATA PENGANTAR

Back to nature, barangkali sebagai ucapan pemantik untuk pembaca budiman yang sudah meluangkan waktunya untuk membaca karya ini hingga tuntas.

Isu, persoalan dan masalah anan-anak variatif dan kompleks serta sifatnya mengglobal (hampir terjadi pada semua negara). Beberapa yang terjadi di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan menjadi pusat perhatian dalam tulisan ini. Selain karena persoalannya ini beragam tetapi juga menuntut tanggungjawab bersama semua pihak melalui program desa/pekon ramah anak guna mencapai kabupaten ramah anak.

Fokus yang sering menjadi dimensi diskursus serius tentang administrasi publik sebagai *governance* terkait dengan organisasi, manajemen, kepemimpinan dan kebijakan. Sementara urusan nilai, moral dan etika sebagai turus kultural, dalam laju perjalanannya melamban bahkan cenderung untuk ditinggalkan. Namun sisi lain, isu-isu nilai, moral dan etika semakin mengemuka. *Governance* jikalau hanya sebatas itu tidaklah cukup—bajunya sudah kekecilan ditengah kencangnya tiupan angin demokratisasi.

Pada tataran lokal, nasional bahkan global sifatnya, banyak pihak yang menyuarakan persoalan dan masalah keadilan, kesetaraan, ketimpangan, marjinalisasi, dehumanisasi kelompok (hak asasi manusia), isu pemerataan hasil pembangunan, relasi antar pemerintah dalam suatu negara dan lintas negara, persoalan kerusakan lingkungan (alam dan sosial) yang kesemua ujungnya bermuara pada konteks kemanusiaan (*human being*) pada sentrum proses pembangunan dan penyelenggaraan negara—sebuah peradaban dan budaya. Segala bentuk hasil cipta, karsa dan rasa manusia adalah budaya—esensi dan cerminan manusia. Ilmu, pengetahuan dan teknologi termasuk administrasi publik adalah bagian dari budaya manusia.

Buku ini adalah sebuah karya Buku Referensi yang diangkat dari data-data faktual hasil riset penulis dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dengan tujuan untuk memberikan warna baru dalam pergumalan diskursus administrasi publik. Administrasi publik sebagai '*democratic governance* atau '*democratic policy*' tidak terpisahkan dari aspek budaya (*culture bound*). Artinya bagaimana penetrasi kapital sosial masuk dan menembus domain reposisi administrasi publik saat ini dan kedepan. Rancang-bangun pendekatan

ekologis dalam administrasi publik memasuki babak barunya yang sarat dengan sistem nilai, budaya, politik, informasi, komunikasi.

Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional memang turut membangun watak reposisi ini. Tetapi aspek yang lebih penting dan strategis menentukan karakter administrasi publik sesuai tuntutan, kebutuhan dan karakter bangsa Indonesia, yaitu bangunan besar administrasi publik yang dibalut dengan *kebhinekaan* bukan hanya sekedar mengadopsi ataupun mengimitasi dari negara lain. Bangunan inilah yang akan menjadi rumah besar keberagaman potensi kapital sosial tumbuh-kembang menuju *bounding social capital*, *bridging bounding social capital* melalui *driver* dari pemerintah yang didorong *striggers* menjadi karakter unik *democratic governance* di Indonesia. Upaya merajut kapital sosial kedalam bentuk internalisasi dan institusionalisasi kapital sosial (*bridging social capital*) kedalam domain administrasi publik menjadi salah satu kompas dan pengarah pengembangan studi administrasi publik.

Akhirnya semoga buku referensi bermanfaat bagi semua, khususnya bagi para praktisi, ilmuan dan pihak-pihak yang memiliki intrest pengkajian kapital sosial bagi pengembangan dan penajaman kapital sosial dalam reposisi administrasi publik di Indonesia.

Tak ada gading yang tak retak. Banyak hal yang perlu ditingkatkan dari karya ini, karenanya saran ke arah perbaikan kualitas buku ini sangat kami harapkan.

DAFTAR ISI

BAB 1	Pendahuluan	1
1.1.	Isu dan Kebijakan Pembangunan Anak	4
1.1.1.	Isu-Isu Strategis Anak	4
1.1.2.	Kebijakan Pembangunan Anak Berbasis Komunitas dan Warga	6
1.2.	Gambaran isu Buku hal penutupnya 17	15
BAB 2	Perspektif Lensa Kapital dan Reposisi Administrasi Publik	18
2.1.	Governance dan Reposisi Administrasi Publik	21
2.1.1.	Reposisi Administrasi Publik	21
2.1.2.	Governance	23
2.2.	Lensa Kapital dan Reposisi Administrasi Publik	29
2.3.	Lensa Kapital Sosial dalam Kasus Strategi Bertahan Hidup	34
2.3.1.	Driver Melalui Institusionalisasi Nilai-Nilai Budaya	34
2.4.	Kesimpulan (hal penutupnya 40)	
BAB 3	Membangun Model Bridging Social Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Melalui Desa Ramah Anak	41
3.1.	Deskripsi Umum Kabupaten Lampung Selatan	41
3.2.	Profil Anak di Kabupaten Lampung Selatan	46
3.3.	Potensi Kapital Sosial Kabupaten Lampung Selatan: Identifikasi Kelembagaan dan Nilai Lokal	51
3.4.	Bridging Bonding Social Capital	69
3.5.	Mentautkan Model Driver-Trigger dengan Bridging Bonding Social Capital dalam Musrenbangda: Pekon Ramah Anak (terakhir 84)	73
BAB 4	Peran Collaborative Governance Berbasis Perencanaan Warga	85
4.1.	Collaborative Governance	85
4.2.	Collaborative Governance Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	89
4.3.	Kegagalan Forum Musrenbangdes Sebagai Kegagalan Pelembagaan Kolaboratif	97
4.3.	Kesimpulan (hal terakhir 104)	102
BAB 5	Penutup	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Peta Kabupaten Lampung Selatan	42
Gambar 3.2.	Luas dan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan	42
Gambar 3.3.	Pola afiliasi kelembagaan lokal di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran	69
Gambar 3.4.	Jaringan Pengikat Internal Kelompok dan Lintas Kelompok	72
Gambar 3.5.	Tingkatan Lembaga/Masyarakat Adat Lampung di Kabupaten Lampung Selatan	77
Gambar 3.6.	Model Driver-Striggers melalui mekanisme Bridging Bonding Social Capital dalam Musrenbangdes/kab Ramah Anak	83
Gambar 4.1.	Tiga Tahap Proses Collaborative Governance dan Action Planning	86
Gambar 4.2.	Collaborative Governance Dalam membangun Kota Layak Anak	92
Gambar 4.3.	Model Koreksi Perencanaan Lokal Berbasis Multistakeholders Body	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kerangka Regulasi Penanganan anak	7
Tabel 1.2.	Indikator Pengelolaan PATBM	12
Tabel 1.3.	Indikator Pendanaan PATBM	12
Tabel 1.4.	Indikator SDM PATBM	13
Tabel 1.5.	Indikator Informasi PATBM	13
Tabel 1.6.	. Indikator Outcome PATBM	14
Tabel 3.1.	Tabel 3.1. Indikator Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan	43
Tabel 3.2.	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Selatan	44
Tabel 3.3.	Perkembangan Tenaga Kerja Kab. Lamsel menurut Lapangan Kerja Utama dan Jenis Kelamin	45
Tabel 3.4.	Indikator Ketenagakerjaan Kecamatan Rajabasa	45
Tabel 3.5.	Jumlah Anak di Kabupaten Lampung Selatan	47
Tabel 3.6.	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan	48
Tabel 3.7.	Data Anak Bersekolah di Kabupaten Lampung Selatan	48
Tabel 3.8.	Balita Yang Mendapatkan Imunisasi di Kabupaten Lampung Selatan	50
Tabel 3.9.	Bentuk Organisasi Grassroots di Kabupaten Lampung Selatan	61
Tabel 3.10.	Keterkaitan profesi dan latar belakang aktor pendiri dengan lembaga/organisasi lokal di Kabupaten Lampung Selatan	63

Tabel 3.11.	Pola Afiliasi (Ikatan) Berdasarkan Kecenderungan Orientasi Kegiatan Kelembagaan Lokal di Kabupaten Lampung Selatan	63
Tabel 3.12.	Media dan bentuk/pola partisipasi Lembaga dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Selatan	66
Tabel 3.13.	Kecenderungan Nilai Lembaga Lokal di Kabupaten Lampung Selatan	66

BAB 1

Pendahuluan

Isu anak pasca pandemic Covid 19, memiliki keterhubungan yang lebih kuat dengan desentralisasi desa untuk melahirkan program pro anak di desa. Pembinaan tata kelola pemerintahan desa melalui keterlibatan aktif (dimensi partisipatif) praktisi, tokoh masyarakat, warga masyarakat, pemuda, perempuan dan termasuk anak-anak dalam penentuan arah program desa berbasis kebutuhan anak menjadi penting. Praktek demikian dikenal dalam administrasi publik dengan *democratic governance*. Suasana seperti inilah yang diyakini dapat meningkatkan tercapainya tujuan, terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak di desa

Kebijakan desentralisasi tata kelola pemerintahan memberikan ruang kreatif pemerintah lokal mengidentifikasi ciri, memprioritaskan dan merespon secara tepat isu dan kendala khusus. Penyatuan pengetahuan lokal (nilai-nilai lokal), kewenangan legislatif dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan alokasi sumber daya di desa, diyakini menjadi dasar terciptanya inovasi kebijakan kesejahteraan dan perwujudan hak-hak anak dan perlindungan anak. Strateginya, memperkuat pengetahuan lokal, partisipasi anak dan praktisi anak berkontribusi mengemukakan persoalan, kebutuhan, dan prioritas anak kedalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Kajian buku ini dilatarbelakangi isu-isu dan persoalan belum terpenuhinya hak anak, Kebijakan pembangunan dan kebijakan desa yang belum pro anak. Anak menjadi kelompok yang semakin rentan, sebagai dampak covid 19. Lokus kajian dilakukan di pada wilayah desa di Kabupaten Lampung Selatan dan menggunakan metode survei, metode kebijakan dan analisis kualitatif. Pertanyaan yang akan dijawab dalam buku ini adalah: 1) mempertanyakan peran administrasi publik sebagai sarana meningkatkan tercapainya tujuan publik utamanya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi, manipulasi; 2) pendekatan ekologis dalam administrasi publik juga mulai memasuki ekologi sosial baru yang sarat dengan sistem nilai misalnya budaya, politik, informasi, komunikasi. Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional memang turut

membangun watak reposisi ini. Tetapi aspek yang lebih penting dan strategis menentukan karakter administrasi publik adalah justru terletak pada idiom-idiom dan kuadran nilai spontan dan arasional yang menjadi modal sosial sebuah masyarakat. Karena itu peran kapital sosial dalam proses reposisi administrasi publik menjadi sangat penting dan lebih substantif. Karenanya beberapa pertanyaan berkaitan dengan bagaimana interaksi antara kapital sosial dan tata kelola pemerintahan (*governance*) itu terjadi, bagaimana kapital sosial dibangun, apa peran *governance* dalam proses ini menjadi fokus pertanyaan strategis.

Persoalan-persoalan anak dan isu yang muncul merupakan gambaran kegagalan institusional. Pemerintah gagap bertindak. Tata kelola dan kapasitas yang lemah. Pengetahuan teknis yang kurang dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penentuan arah program yang pro anak. Kegagalan institusional yang selama ini terjadi perlu diretas dengan menempatkan konsep *democratic governance* sebagai point penting dalam kajian administrasi publik. Diyakini bahwa persoalan publik harus dituntaskan dengan sebuah pendekatan rasional sosial. Kebijakan dan program akan memberikan kemanfaatan bagi semua stakeholders dengan mempertimbangkan: a) nilai-nilai lokal yang ada; b) negara dikelola atas dasar nilai-nilai peradaban yang ditopang oleh kelembagaan yang kuat untuk menumbuh-kembangkan partisipasi aktif dan dialogis semua elemen stakeholders dalam proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan (Bevir, 2010). Atas dasar ini pula, maka era pandemi adalah saatnya mengaktualisasikan *democratic governance* dimana tata kelola negara (sektor publik) harus dijalankan secara demokratis dalam rangka mengkatrol terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pola kemitraan yang sinergis diantara semua unsur stakeholders, yaitu lembaga birokrasi pemerintahan, sektor privat (bisnis), dan *civil society* (NGO), tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok akar rumput) menjadi strategis (Duadji & Tresiana, 2020). Kemitraan dan jaringan harus dibangun dalam sebuah lingkungan yang transparan sehingga bangunan komunikasi akan berjalan baik terutama dalam setiap pengambilan keputusan sesuai azas *repositas* (timbang-balik). Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dirumuskan memenuhi harapan masyarakat. Pada konteks ini, opsi negara menerapkan otonomi daerah juga menjadi pendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang lebih demokratis, lebih dekat dengan rakyat (*desentralized*) dan lebih profesional. Langkah konkrit

perlindungan dan pemenuhan hak anak mengakar pada penciptaan program berbasis kebutuhan anak yang mengadopsi kapasitas kemajemukan dan kearifan lokal yang ada pada suatu wilayah negara bangsa (Duadji, 2013; Tresiana & Duadji, 2016b, 2016a).

Identifikasi lensa kapital sosial menjadi penting sebagai sandaran terciptanya *bridging* (keterhubungan) semua stakeholders dalam penentuan arah program pro anak di desa dengan mempertimbangkan: 1) Wadah dan penterjemah Desa/Pekon Tanggap Covid-19 melalui bangunan Program Desa/Pekon Ramah Anak dengan melibatkan multistakeholders. Kondisi sebagian besar desa telah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpendapat, saling mengkritisi usulan program desa serta keberagaman potensi modal sosial masyarakat desa menjadi pendorong partisipasi; 2) perlu dipupuk dan ditumbuhkembangkan partisipasi melalui ruang pembelajaran dini anak dalam pembuatan program desa yang dijamin negara. Anak-anak mempunyai hak menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasan. Legal framework partisipasi anak telah diatur UU No 6/2014, Keppres N0 36/1990, UU No 23/2002 kemudian direvisi dengan UU No 35/2014; 3) Pelibatan anak adalah aplikasi model demokrasi dan kebijakan deliberatif merupakan gerakan baru tradisi berdesa untuk mengakomoni kepentingan semua terutama masyarakat rentan termasuk anak (Duadji dan Tresiana, 2020).

Gagasan baru ditawarkan berbasis titik singgung potensi lensa kapital sosial masyarakat desa dan arah ideal kebijakan dan program perlindungan, pemenuhan hak anak di era pandemi Covid-19. Gagasan merupakan elaborasi konsepsi padu padan lensa kapital sosial dan gagasan deliberative policy (Hajer dan Wagenaar, 2003) sebagai bentuk merupakan bentuk derivasi deliberative democracy (Habermas, 2008). Pandangan civil society emansipatif melalui proses komunikasi, pencapaian konsensus ruang publik secara terbuka, musyawarah, kesetaraan prakondisi sebelum terciptanya konsensus.

Studi yang dilakukan Duadji dan Tresiana (2020) menemukan respon ruang publik di pemerintah lokal, terutama di desa idealisasinya berbentuk forum warga/anak yang masih memerlukan inisiasi pemerintah, bukan ruang hampa, ada manuver politik dan pasar, bahkan eksistensinya merupakan policy affirmative kelompok rentan. Konsepsi Sound Governance Body dikemukakan Denhardt & Denhardt (2007) juga menjadi titik temu orientasi baru mensinergikan deliberatif dengan konteks inovasi kebijakan untuk memperkuat ruang publik melalui desain proses pendewasaan, pengenalan sejak dini pada anak, warga sehingga warga negara menemukan kecerdasan

kolektif bersikap. Memadainya knowledge memungkinkan anak dan warga berpartisipasi dalam Sound Governance Body sebagai refleksi state, market dan civil society. Strategi kesinambungan peningkatan kapasitas tata kelola partisipasi publik dalam musrenbangdes melalui kegiatan kemasyarakatan multistakeholders.

Pada bab pendahuluan ini diuraikan berbagai isu-isu anak yang merupakan kelompok yang semakin rentan sebagai dampak COVID 19 dan kajian awal kebijakan pembangunan anak yang telah ada di beberapa wilayah.

Pada bagian akhir pendahuluan, akan diuraikan gambaran umum keseluruhan isi buku dengan maksud untuk menghantarkan pembaca pada pembahasan yang lebih rinci.

1.1. Isu dan Kebijakan Pembangunan Anak

1.1.1. Isu-Isu Strategis Anak

Isu, persoalan dan masalah yang terjadi pada anan-anak variatif dan kompleks, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi mengglobal (hamper terjadi pada semua negara). Persoalan ini tentu saja menjadi tema serius dan merupakan tanggungjawab semua pihak.

Disadari bahwa anak-anak adalah salah satu dari sekian banyak kelompok rentan. Sebagai kelompok rentan, maka anak-anak cenderung tidak berdaya dalam menghadapi semua persoalan yang terjadi, bukan saja oleh pihak luar tetapi juga terjadi pada lingkungan keluarga; mulai dari hal kecil tentang pembulian sampai pada persoalan yang beresiko tinggi—sebut saja soal pekerja anak, perdagangan anak, kejahatan seksual anak, prostitusi anak, penelantaran anak dan kasus-kasus lain yang sangat sering menyertai kehidupan anak-anak di Indonesia. Pada intinya isu, persoalan dan masalah anak dapat diklasifikasi menjadi beberapa klaster: (a) perlindungan anak; dan (b) pemenuhan hak sipil Anak; (c) pemenuhan hak tumbuh-kembang anak yang meliputi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan serta layanan khusus anak.

Persoalan dan masalah anak masih sering terjadi. Anak merupakan pihak rentan dan seringkali menjadi korban pengabaian pemenuhan hak dasar anak atau penelantaran akibat perceraian dan konflik orang tua. Intimidasi dan

dipermalukan dianggap hal biasa dan masih sering terjadi di sekolah-sekolah, sekitar 18% terjadi pada anak perempuan dan 24% terjadi pada anak laki-laki, dan disamping itu anak laki-laki juga sering menghadapi risiko serangan fisik di sekolah. Guru-guru juga masih sering menggunakan hukuman fisik dan emosi untuk mendisiplinkan anak-anak. Anak-anak cenderung untuk membiarkan hal ini dan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan melaporkan kekerasan dan merujuk siswa ke layanan untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

Masa pandemi Covid-19 yang hingga kini belum berakhir, anak-anak semakin rentan tertular penyakit yang sama, anak-anak dibatasi interaksi dan waktu bermainnya dengan teman sebayanya. Akibatnya anak-anak banyak yang mengalami gangguan psikis dan stres. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan melambatnya interaksi sosial dan ekonomi keluarga (orang tua). Keadaan demikian memberi efek menurunnya penghasilan dan daya beli keluarga yang ujungnya juga berdampak pada banyaknya kasus anak-anak yang kekurangan gizi, menurunnya kualitas kesehatan mereka, penelantaran anak, kejahatan terhadap anak dan kasus-kasus lain. Kegiatan belajar anak di sekolah-sekolah menjadi terganggu. Sekolah ditutup dan anak-anak diwajibkan menerima materi pelajaran dan tugas melalui media daring. Kondisi demikian juga berdampak buruk terhadap anak. Beban tugas yang terlalu berat dan tidak termonitor efektifitas kelaikan penerimaan anak akan materi dan tugas yang diberikan para guru. Anak-anak cenderung sulit menyampaikan hal-hal yang mereka belum pahami dan termasuk memikirkan pemecahan masalah sendiri. Disamping itu, kegiatan tutorial (pembelajaran) anak melalui media daring yang membutuhkan waktu berjam-jam juga memberikan dampak ikutan, yaitu banyak anak yang menerima gangguan penglihatan, pendengaran, pusing-pusing dll sebagai efek radiasi yang diterima. Dan sudah tentu apabila keadaan ini berlangsung lama, maka gangguan kesehatan anak yang lainnya bisa terjadi. Penggunaan cyber (media daring) dalam pembelajaran anak memberi peluang bagi anak untuk terperangkap dan menjadi korban kejahatan cyber, trauma psikis, pornografi dll. Sekarang pemerintah menyatakan masa 'new normal'. New normal lebih menekankan adanya perubahan perilaku. Di masa normal sebelum datangnya wabah, orang bebas untuk tidak menggunakan masker, boleh berinteraksi kapan saja, berkerumun dan lain sebagainya. New normal memaksa orang untuk mematuhi protokoler kesehatan, tetapi pada kenyataannya lebih banyak diinterpretasikan oleh anak-anak sebagai kondisi normal (wabah sudah

hilang), sehingga protokol kesehatan cenderung dilanggar. Anak lagi-lagi semakin rentan menjadi korban.

Anak perempuan remaja cenderung lebih rentan terhadap praktik tradisional yang berbahaya seperti perkawinan anak dan mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) dibandingkan anak laki-laki. Satu dari setiap sembilan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan anak-anak perempuan dari keluarga termiskin lima kali lebih mungkin menikah pada usia sangat dini dibandingkan teman-teman mereka yang lebih kaya. Tingkat mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) masih tinggi, yaitu 52 persen.

Perkawinan anak, selain melanggar hak-hak anak dengan memaksa mereka berhenti sekolah, juga mengakibatkan kemiskinan antargenerasi, merusak pendidikan jangka panjang mereka, kemampuan untuk mencari nafkah, dan ironisnya juga dapat bertambah jumlahnya.

Di sisi hukum, kekerasan terhadap anak belum dilarang dalam semua pengaturan (perkosaan dalam pernikahan masih diizinkan), dan sistem keadilan untuk anak-anak belum memprioritaskan perlindungan bagi semua anak yang berurusan dengan hukum.

Anggaran pemerintah didedikasikan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan hanya kurang dari 0,1 persen dari total anggaran. Prosedur administrasi publik yang kompleks dan kurangnya kewenangan yang diamanatkan untuk perlindungan anak mengakibatkan kesulitan dalam menyediakan layanan yang efektif untuk anak-anak yang rentan. Selain itu, sekitar 17% anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak memiliki akta kelahiran, yang menyebabkan mereka sulit untuk mengakses layanan utama.

Sadar atau tidak, kejadian-kejadian memperhatikan yang terjadi pada anak-anak dan terus-menerus berulang menjadi pembenar bahwa lingkungan masih saja terus melanggengkan sikap dan perilaku demikian. Kondisi ini memerlukan inisiasi perubahan sosial dan perilaku serta dorongan untuk terjadinya perubahan produk-produk kebijakan yang berkaitan dengan anak.

1.1.2. Kebijakan Pembangunan Anak Berbasis Komunitas dan Warga

Setiap anak, sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut berkenaan dengan klaster hak-hak: (a) sipil dan

kebebasan, (b) pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, (c) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (d) pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta (e) serta perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan. Hak-hak tersebut berprinsip pada terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, nondiskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Artinya hak-hak tersebut harus dipenuhi bukan semata-mata untuk hidup dan kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang berlaku untuk semua anak, tanpa membedakan, yang dilaksanakan dengan menghargai pandangan anak.

Tantangan dalam pencegahan kekerasan di masyarakat, adalah kerangka hukum masih gagal melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, hukum diam di tempat, penegakannya sering tidak memadai. Begitu juga dengan sikap sosial dan praktik budaya memaafkan kekerasan, kurangnya pengetahuan, data, dan pemahaman serta akar penyebab kekerasan terhadap anak, selain itu sumber daya yang dialokasikan tidak memadai. Pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha, dan media massa, termasuk kelompok anak melakukan berbagai upaya dalam membangun pemahaman yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, dengan memastikan bahwa: (1) anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (2) setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (3) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; (4) setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; (5) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Beberapa landasan kebijakan anak tergambar pada tabel di bawah ini

Tabel 1.1. Kerangka Regulasi Penanganan anak

Dokumen	Ketentuan/Subastansi
---------	----------------------

<p>UUD 1945</p>	<p>Pasal 27: Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. ▪ Pasal 28G : ▪ “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. ▪ “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. ▪ Pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. <p>Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (4): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.</p>
<p>Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) Ditandatangani oleh Indonesia: 29 Juli 1980 Diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/1984: Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan</p>	<p>Pasal 14:</p> <p>(1) Negara-negara Pihak wajib membuat langkah-tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak: (a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di semua tingkat; (b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana; (c) Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan</p>

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), 13 Sep 1984	sosial; (d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun nonformal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan teknik mereka; (e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui kerja dan kewiraswastaan; (f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat; (g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna, serta perlakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman; (h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, transportasi dan komunikasi
Instruksi Presiden No. 9/2000: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Instruksi ini mengharuskan pengarusutamaan isu-isu gender dalam lembaga negara dan program-programnya pada semua tahap pembangunan: yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga	tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga Definisi kekerasan dalam rumah tangga termasuk: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga, dan mengkriminalisasi perkosaan dalam pernikahan. Pelecehan seksual dikriminalisasi dan hak-hak korban diakui secara eksplisit
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67/2011	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
Surat Edaran Bersama 2012: Strategi nasional untuk percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender	Strategi nasional ini dirumuskan dan diedarkan oleh empat kementerian dalam nomor surat yang berbeda sebagai berikut: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional: 270/M.PPN/11/2012 2. Kementerian Keuangan: SE-33/MK.02/2012 3. Kementerian Dalam Negeri: 050/4379A/SJ 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: SE 46/MPPPA/11/2012

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Pasal 48 ayat (1) menjelaskan bahwa: “korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi”.
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 16 ayat (1) mengamanatkan bahwa : “pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Lampiran Huruf H mengamanatkan: “pemerintah daerah untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak”.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Pasal 59A menjelaskan bahwa: “anak dalam situasi dan kondisi tertentu berhak untuk mendapatkan pendampingan psikososial, pemberian perlindungan, serta pendampingan pada setiap proses peradilan”.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Pasal 6 ayat (1) menjelaskan: “pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan orang”.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Pasal 4 menjelaskan bahwa: “korban berhak mendapatkan layanan pemulihan dalam bentuk pendampingan, konseling, dan bimbingan rohani”.
Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	Pasal 6 ayat (3) huruf c mengamanatkan bahwa: “perempuan dan anak di daerah konflik berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik”.

dan Anak dalam Konflik Sosial. Pasal 9 bahwa: “penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam konflik sosial meliputi layanan di antaranya bantuan hukum dan pendampingan”.

Sumber: Duadji dan Tresiana (2020)

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak seperti pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak (KLA), Desa layak Anak (DLA), Sekolah Ramah Anak (SRA), pembentukan Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan/desa, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA). Selain program tersebut, di berbagai daerah juga telah banyak upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati anak maupun lembaga masyarakat di wilayah masing-masing. Akan tetapi, berbagai program tersebut belum mampu membendung kejadiankejadian baru kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekankan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama (Duadji dan Tresiana,2020).

Salah satu program pembangunan anak berbasis komunitas dan warga, telah dikeluarkan pemerintah tahun 2015. Program merupakan hasil penelitian yang dilakukan di 4 Propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bengkulu, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik perlindungan anak yang dilakukan masyarakat, kendala yang dihadapi, dan potensi pengembangannya. Hasil penelitian menggambarkan berbagai upaya perlindungan anak telah banyak dilakukan masyarakat, dengan kreasi dan nilai-nilai lokal mulai dari mensosialisasikan hak-hak anak baik dalam bentuk kesenian, dialog, penerbitan media infomasi sampai mendampingi ketika anak yang menjadi korban. Meskipun demikian, sebagian terbesar praktik tersebut belum terpadu melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat; kurang koordinasikan dengan pemerintah setempat. Di beberapa daerah ditemukan praktik yang melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara lebih terpadu tetapi dibatasi pada kelompok anak tertentu secara berbeda-beda sesuai dengan isu utama perhatian lembaga yang menggagas dan mendampingi pengembangannya. Informasi lain yang diperoleh dari penelitian tersebut

adalah upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah lebih berfokus pada penanganan keluarga dan anak-anak yang rentan dan beresiko atau sudah menjadi korban kekerasan. Pemerintah masih minim memberi pemerintah terhadap upaya penguatan keterampilan orang tua dan keterampilan hidup anak secara lebih menyeluruh, serta penguatan tatanan sosial dengan kesadaran, penguatan dan penegakan norma yang berlaku. Perhatian pemerintah terhadap penguatan masyarakat untuk memberi dukungan dalam reintegrasi juga masih minim. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan ada dukungan pemerintah yang cukup kuat dalam pengembangan praktik perlindungan anak berbasis masyarakat. Sinergi pemerintah setempat dan daerah dengan masyarakat dalam pengembangan praktik tersebut dipayungi dengan peraturan daerah, bahkan peraturan desa. Meskipun masing-masing praktik memiliki kelemahan, tetapi kekuatan dari setiap praktik di berbagai wilayah menjadi potensi yang berharga bagi pengembangan perlindungan anak yang terpadu.

Menindaklanjuti hasil penelitian tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas sebuah strategi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan). Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan dan pemenuhan hak anak di lingkungannya sendiri.

Penelitian yang dilakukan Duadji dan Tresiana (2020) yang berjudul "Pekon Tanggap Covid-19: Membangun Bridging Sosial Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", telah mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Lampung Selatan. Parameter kerangka kerja sistem yang terdiri dari masukan - proses - keluaran - hasil - dampak digunakan untuk memonitoring dan evaluasi program. Evaluasi dilakukan di 2 desa, yaitu Desa Way Galih dan Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan daerah pilot project untuk program PATBM. Tujuan evaluasi adalah : 1) Memastikan apakah kegiatan PATBM pada Kelurahan/Desa lokasi Kegiatan PATBM yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan konsep yang ditetapkan; 2) Sebagai data atau informasi untuk menjadi bahan periksa dan pertimbangan untuk kegiatan PATBM selanjutnya. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan evaluasi ada dua, yaitu: 1) Metode Kualitatif,

metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dalam pelaksanaan kegiatan PATBM. Pengumpulan data ini dilakukan dengan kegiatan diskusi dalam bentuk FGD, sehingga bisa didapatkan data yang nyata dari cerita perubahan yang dituturkan oleh aktivis dan aparat pemerintah setempat serta untuk mengumpulkan data hasil penilaian input, proses dan output kegiatan PATBM dalam bentuk format yang telah disediakan (data pendukung); 2) Metode Kuantitatif, metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang jumlah, proporsi dan prevalensi yang bersifat numerik. Data ini telah didapatkan ketika dilakukan kegiatan pelatihan PATBM tentang evaluasi kegiatan tahap 1 dan 2, yaitu evaluasi persepsi yang secara khusus digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan setiap materi yang disampaikan baik dari aspek substansi, metodologi (cara penyampaian) dan kapasitas dari pemberi materi (pelatih) dan Pengukuran tentang seberapa jauh peserta mempelajari materi yang telah disampaikan. Dengan menerapkan dua metode di atas, sebagai sumber data primer dan sekunder dalam monev ini adalah para fasilitator atau aktivis PATBM (masing-masing berjumlah 10 orang) di setiap desa.

Tabel 1.2. Indikator Pengelolaan PATBM

Indikator	Lokasi	Hasil Evaluasi	Penilaian
Aturan PATBM, partisipasi masyarakat dalam rencana kerja, jaringan dengan pihak lain, cara mengetahui PATBM	Desa Way Galih Desa Natar	Belum memiliki aturan tertulis tetapi kegiatan telah banyak dilaksanakan. Masyarakat banyak terlibat, dengan lembaga lain, masyarakat mudah mengetahui/menem ui aktivis	banyak dokumen resmi yang belum lengkap.

Sumber: Duadji dan Tresiana (2020)

Tabel 1.3. Indikator Pendanaan PATBM

Indikator	Lokasi	Hasil Evaluasi	Penilaian
Memiliki anggaran, sumber-sumber	Desa Way Galih	Belum memiliki aturan tertulis tetapi kegiatan telah banyak	Sudah baik, namun banyak dokumen

dana, partisipasi dilaksanakan. resmi yang
 desa member1 Masyarakat banyak belum lengkap.
 dana, apakah terlibat, dengan lembaga
 ada **Desa Natar** lain, masyarakat mudah
 persetujuan mengetahui/menem ui
 anggaran desa aktivis

Sumber: Duadji dan Tresiana (2020)

Tabel 1.4. Indikator SDM PATBM

Indikator	Lokasi	Hasil Evaluasi	Penilaian
Relawan yang bertanggungjawab, kegiatan memperkuat keterampilan relawan, pembagian tugas dan tanggungjawab, relawan dari berbagai unsure dalam masyarakat	Desa Way Galih Desa Natar	Semua relawan aktif dan bertanggungjawab melaksanakan PATBM, bekerjasama dg fasilitator prov. & kab. untuk mengembangkan materi, belum dibuat pembagian tugas, relawan terdiri dari tokohtokoh masy. Yang ada di desa.	Sudah baik, Segera akan dibuat pembagian tugas sesuai struktur pengurus aktivis.

Sumber: Duadji dan Tresiana (2020)

Tabel 1.5. Indikator Perlengkapan PATBM

Indikator	Lokasi	Hasil Evaluasi	Penilaian
Ada tempat kegiatan, memiliki perlengkapan untuk kegiatan, tersedia dana untuk pengadaan perlengkapan dari desa.	Desa Way Galih Desa Natar	Semua memiliki kantor dan tempat kegiatan, ada materi berupa buku materi dan alat-alat peraga yang dibuat sendiri, untuk sosialisasi. Belum mempunyai dana	Sudah baik, Tapi dana khusus untuk pengadaan belum ada.

- keterampilan anak dalam menghadapi kekerasan, dan cara merespon jika terjadi kekerasan anak.
- 3 Seberapa jauh rencana/rekomendasi dari pelatihan ditindaklanjuti oleh para aktivis dalam mengembangkan PATBM? Aktivis menjelaskan, mereka langsung menindaklanjuti/mewujudkan seluruh RTL yang telah disusun selama pelatihan. Bahkan banyak kegiatan PATBM lainnya yang dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat. Dan mendampingi beberapa kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat hingga mendapatkan solusi dan ditangani oleh pihak yang berwenang
- 4 Seberapa jauh tanggapan desa/kelurahan dengan inisiasi PATBM ini? Apa bentuk tanggapan itu? Aktivis menjelaskan, perangkat kelurahan/desa menyambut baik adanya PATBM, bahkan pihak kelurahan/desa banyak memberikan dukungan dengan menerbitkan SK (surat keputusan), mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, memberi fasilitas tempat dan sarana untuk kegiatan serta merencanakan untuk melakokasikan dukungan pembiayaan.
- 5 Seberapa jauh fasilitator desa memberikan bantuan teknis terkait dengan tindak lanjut pelatihan? (memberikan informasi tambahan, memberikan memotivasi dalam mengembangkan PATBM dan menghubungkan dengan lembaga yang relevan dengan kegiatan PATBM) Aktivis menjelaskan, mereka langsung melakukan pengenalan diri silaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat dan aparat kelurahan/desa di lingkungan desa tentang keberadaan dan tugas-tugas yang akan dijalankan aktivis, meminta kerjasama dan dukungan dari lembaga-lembaga yang ada di desa seperti sekolah-sekolah di sekitarnya, PKK, karang taruna, kelompok-kelompok agama dan pengajian.
- 6 Apa hambatan-hambatan yang dihadapi aktivis untuk menjalankan PATBM? Apa strategi mereka untuk menyikapi berbagai hambatan tersebut? Seberapa jauh Aktivis menjelaskan, hambatan yang dihadapi adalah dana. Tahap awal diatasi dengan iuran dari aktivis dan mencari sumbangan bantuan dari aparat desa dan anggota masyarakat yang peduli.

tingkat keberhasilan strategi tersebut untuk menghadapi hambatan tersebut?

- 7 Bagaimana situasi terkait dengan kekerasan anak di desa/kelurahan? Apakah ada pola dalam menyikapi kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap anak? Apakah ada mekanisme atau rencana khusus yang akan atau sedang dikembangkan? Bagaimana hasilnya? (jika ada)
- Aktivis menjelaskan, di semua desa/kelurahan masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak. Aktivis akan menjelaskan pentingnya melindungi anak dari kekerasan dan menyadarkan masyarakat pentingnya member informasi kepada pada aktivis jika ada kekerasan. Aktivis akan bergerak proaktif ke masyarakat, membuka call center yang mudah di jangkau dan dihubungi. Hasilnya beberapa kasus dilaporkan ke aktivis kemudian mendapatkan pendampingan untuk diteruskan ditangani oleh yang berwenang P2TP2A maupun kepolisian

Sumber: Duadji dan Tresiana (2020)

1.2. Gambaran isu Buku

Uraian buku ini berfokus pada reposisi administrasi publik dengan menggunakan perspektif lensa kapital sosial. Identifikasi lensa kapital sosial menjadi penting sebagai sandaran terciptanya *bridging* (keterhubungan) semua stakeholders dalam penentuan arah program pro anak di desa. Sebuah gagasan baru berbasis titik singgung potensi lensa kapital sosial masyarakat desa dan arah ideal kebijakan dan program perlindungan, pemenuhan hak anak di era pandemi Covid-19 merupakan elaborasi konsepsi padu padan lensa kapital sosial dan gagasan deliberative policy. Pemerintah memerlukan sebuah pandangan dengan perspektif pandangan civil society emansipatif mengedepankan proses komunikasi, pencapaian konsensus ruang publik secara terbuka, musyawarah, kesetaraan prakondisi sebelum terciptanya konsensus.

Untuk membahas perspektif tersebut, isi buku ini terdiri dari empat bab. Bab pertama (pendahuluan), penulis mengaitkan anak, isu anak dengan kebijakan pemerintah berbasis komunitas/warga. Administrasi publik sangat strategis peranannya dalam ketercapaian Strategi pembangunan dan kebijakan

pembangunan yang pro anak, karena fungsi pokoknya adalah merumuskan kebijakan pembangunan dan kebijakan publik, yang mengikat seluruh warga tanpa kecuali. Karenanya, reposisi administrasi public baru akan menjadikan warna strategi dan kebijakan pembangunan pro publik

Bab kedua, berisi perspektif *lensa kapital* dan *reposisi administrasi public*. Administrasi publik menjadi sarana utama untuk meningkatkan tercapainya tujuan publik utamanya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi, manipulasi. Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional memang turut membangun watak reposisi ini. Tetapi aspek yang lebih penting dan strategis menentukan karakter administrasi publik adalah justru terletak pada idiom-idiom dan kuadran nilai spontan dan arasional yang menjadi modal sosial sebuah masyarakat. Kecenderungan untuk menggeser lokus pada tataran publik yang lebih luas adalah sebagai realitas, bahwa untuk mencapai tujuan publik diperlukan sebuah konser sosial yang didalamnya terdiri dari resorsis, networking. Peran kapital sosial menempati posisi yang signifikan dalam horison perubahan paradigma administrasi publik. Karena itu peran kapital sosial dalam proses reposisi administrasi publik menjadi sangat penting dan lebih substantif. Inilah letak kebaruaran dari buku ini.

Bab ketiga menguraikan bagaimana mendudukan konsep-konsep *kapital sosial*, dan *administrasi publik* dalam konfigurasi model perubahan masyarakat yang didalamnya tergambar hubungan "mutual exclusive", tidak boleh saling meniadakan dalam model kampung/desa ramah anak. Bab ini merupakan kajian empiris dan telaah teoritik.

Bab keempat secara khusus membahas peran *collaborative* dalam perencanaan lokal tahunan yang dikenal dengan musyaawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) menjadi daya dorong pencipta hubungan mutual exclusive antara kapital sosial dan kebijakan pembangunan dan public.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari buku ini yang berisi kata-kata penutup (*closing statement*), sebagai rangkuman dari keseluruhan uraian dari buku. Pada bab ini juga dikemukakan beberapa rekomendasi untuk reposisi administrasi public

Daftar Pustaka

- Duadji dan Tresiana. (2020). *Laporan Kemajuan Penelitian Kompetitif Nasional, Skema Penelitian Dasar Tahun Kedua, "Pekon Tanggap Covid-19: Membangun Bridging Social Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak"*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung. Tidak Dipublikasikan.
- Bevir, M. (2010). Democratic governance. In *Democratic Governance*. <https://doi.org/10.4324/9780429344671-3>
- Duadji, N. (2013). Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja*. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.197-204>
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). A participation model based on community forum as a reproductive health knowledge transaction space to increase male participation in vasectomy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*. <https://doi.org/10.20473/mkp.v31i12018.1-13>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2016a). Kegagalan pemaknaan "Lembaga Musawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa" dalam mewujudkan deepening democracy. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*. <https://doi.org/10.20473/mkp.v29i42016.191-203>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2016b). Multi Stakeholders Governance Body Model In Achieving the Excellence Public Policy. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i2.1879>

DATA PENULIS

Nama Lengkap * : **Noverman Duadji M.S.i**

(Lengkap dengan gelar)

: **Agar Alam, Sumed** / 3. **November** 1989

Nomor KTP * : **1871020311630006**

Alamat KTP * : **Roon. Zndah. Sngntan. Iv. Blok. Rt/4. Sukarame. Bandar. Lampung**

Alamat Surat Menyurat * : **Roon. Imdan. Sngntan. Iv. Blok. Rt/4. Sukarame. Bandar. Lampung**

Nomor Telepon Rumah : **HP** : 08131980665**

Nama Kantor : **Fisik. Universitas. Lampung**

Alamat Kantor : **Jln. Profesi. Saranati. Korp. Negeri**

Nomor Telepon Kantor : **15.295.555.5.322.000**

NPWP * : **0079924178**

Nama di Rekening * : **Noverman Duadji**

(Apabila nama rekening bukan nama penulis, dengan menandatangani form ini penulis menyatakan menyetujui royalti ditransfer ke rekening tersebut)

Nama Bank * : **BNi 46**

Nama KCP/KCU * : **Tanjung Karang**

Kota Lokasi Bank * : **Bandar Lampung**

Email * : **noverman.duadji@fisik.unla.ac.id**

Akun Media Sosial Twitter, Facebook, Instagram



Tanda Tangan

Noverman Duadji M.S.i

(*) Harus diisi
(**) Saya bersedia menerima SMS/WA Promosi
Mohon melampirkan foto copy KTP dan dilempel/dicetak pada kertas terpisah.

GRAHA ILMU

LENSA KAPITAL SOSIAL DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK

Membangun Bridging Social Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Melalui Desa Ramah Anak

**NOVERMAN DUADJI
NOVITA TRESIANA**

**Koreksi hanya
1 (Satu) Kali**

PERHATIAN

1. Silakan koreksi dengan mencoret di buku ini
2. **Koreksi hanya sekali!** Kami tak beri kesempatan penulis koreksi lebih dari 1 kali.
3. **Waktu untuk koreksi hanya 14 hari.** Jika 14 hari kami belum menerima kembali buku koreksi ini, kami menganggap penulis tak melakukan koreksi dan proses penerbitan kami lanjutkan. Untuk itu kami mohon mengirimkan via WA foto bukti kirimnya ke 0811293642
4. Semua pertanyaan mohon via WA ke 0811293642